



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH
KOTA PALOPO
SUL-SEL, INDONESIA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024





WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2025 -2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALI KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang di daerah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Visi dan Misi Kota Palopo:

- (1) Visi : Palopo Kota Pendidikan dan Niaga yang maju, Tangguh dan berkelanjutan.
- (2) Misi :
 - a. mewujudkan transformasi sosial;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
 - c. mewujudkan transformasi tata kelola;
 - d. memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan RPJPD Provinsi, kondisi

lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

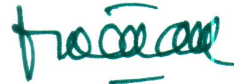
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 Nopember 2024

Pj. WALI KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP.

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 Nopember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



ILHAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

B.HK.04.126.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan Daerah Otonomi yang mengalami status dari Kota Administrasi yang sebelumnya dibawah Wilayah Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi Kota.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka waktu tahunan, jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah. Yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2025-2045 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Palopo tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Palopo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Palopo ini akan Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo untuk Jangka waktu lima tahunan, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2025-2045 merupakan dokumem perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota

Palopo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2025-2045 cukup terdiri dari 5 (lima) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 4



DAFTAR ISI :

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	7

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	9
2.1.1 GEOGRAFI	9
2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI	32
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	34
2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI	34
2.2.2. KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA	44
2.3 ASPEK DAYA SAING	54
2.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH	54
2.3.2 DAYA SAING SDM	66
2.3.3 DAYA SAING FASILITAS / INFRASTRUKTUR WILAYAH	71
2.3.4. DAYA SAING IKLIM INVESTASI	76
2.3.5 PENERIMAAN DAERAH	79
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	84
2.4.1 INDEKS REFORMASI HUKUM	84
2.4.2 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	85
2.4.3 INDEKS PELAYANAN PUBLIK	86
2.4.4 INDEKS SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS	87
2.4.5 NILAI MCP KPK	87
2.4.6 INDEKS MATURITAS SPIP	87
2.4.7 INDEKS REFORMASI BIROKRASI	88
2.4.8 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH	88
2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	88
2.5.1 KESIMPULAN HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2025	88
2.5.2 REKOMENDASI TERHADAP RPJPD TAHUN 2025-2045	89
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	89
2.6.1 PROYEKSI KEPENDUDUKAN DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	89
2.6.2 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN	90
2.6.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	90
2.6.4 PROYEKSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR	91
2.6.5 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN	91
2.6.6 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN	92
2.6.7 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	93
2.6.8 PROYEKSI KEBUTUHAN JARINGAN TRANSPORTASI	95
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	98
2.7.1 RENCANA STRUKTUR RUANG	100

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	104
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	104



3.1.1 PENDAPATAN PER KAPITA MASIH RENDAH	104
3.1.2 MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI.....	104
3.1.3 BERTAMBAHNYA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR LAPISAN MASYARAKAT	104
3.1.4 BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DAERAH	105
3.1.5 RENDAHNYA KUALITAS MODAL MANUSIA	105
3.1.6 BERKURANGNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	105
3.1.7 BELUM OPTIMALNYA MITIGASI PENURUNAN EMISI RENDAH KARBON	105
3.1.8 BELUM MERATANYA DERAJAT KESEHATAN YANG BERKUALITAS.....	106
3.1.9 RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN.....	106
3.1.10 BELUM OPTIMALNYA LAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF	106
3.1.11 BELUM OPTIMALNYA IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG PRODUKTIFITAS EKONOMI	107
3.1.12 BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU	107
3.1.13 BELUM OPTIMALNYA TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL	107
3.1.14 BELUM OPTIMALNYA INTEGRASI EKONOMI LOKAL DENGAN EKONOMI REGIONAL DAN NASIONAL	108
3.1.15 BELUM OPTIMALNYA KONTRIBUSI KOTA PALOPO SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	108
3.1.16 BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INTEGRATIF, ADAPTIF DAN RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN	108
3.1.17 SISTEM HUKUM DAN KEAMANAN KETERTIBAN BELUM SEPENUHNYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA AMAN MASYARAKAT	109
3.1.18 BELUM OPTIMALNYA STABILITAS EKONOMI MAKRO	109
3.1.19 BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DAERAH DIBANDING KOTA MAJU LAINNYA.....	110
3.1.20 BELUM OPTIMALNYA BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	110
3.1.21 BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KETAHANAN KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBANGUNAN PEMUDA SERTA TINGGINYA KETIMPANGAN GENDER	111
3.1.22 BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.....	111
3.1.23 BELUM OPTIMALNYA KETAHANAN ENERGI, KETAHANAN AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN	111
3.1.24 BELUM OPTIMALNYA RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM.....	112
3.2 ISU-ISU STRATEGIS	112
3.2.1 ISU STRATEGIS NASIONAL.....	112
3.2.2 ISU STRATEGIS PROVINSI SULAWESI SELATAN	114
3.2.3 ISU STRATEGIS KOTA PALOPO	118
BAB IV	
VISI DAN MISI KOTA PALOPO	125
4.1. VISI.....	125
4.2 SASARAN VISI.....	126
4.3 MISI	131
BAB V	
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	134
5.1. ARAH KEBIJAKAN	134
5.1.1 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2025-2029	134
5.1.2 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2030-2034	135
5.1.3 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2035-2039	137
5.1.4 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2040-2045	139
5.2 SASARAN POKOK	149
5.2.1 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN HIDUP LAYAK (Sasaran 1)	150



5.2.2 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA NIAGA DENGAN PRODUKTIVITAS PERKONOMIAN YANG TINGGI BERBASIS IPTEKIN (Sasaran 2)	155
5.2.3 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA AKSELERATIF DALAM PENCAPAIAN TATA KELOLA BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF DENGAN MASYARAKAT SIPIL YANG BERDAYA (Sasaran 3)	159
5.2.4 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA YANG AMAN, TERTIB, DEMOKRATIS, DAN KONDUSIF (Sasaran 4)	162
5.2.5 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF, BERADAB DAN BERBUDAYA (Sasaran 5)	165
5.2.6 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN PERKEMBANGAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN (Sasaran 6)	168
5.2.7 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG TINGGI SERTA TANGGUH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM (Sasaran 7)	171
5.2.8 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA SIMPUL DALAM KERJASAMA DAERAH	174
5.3 ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH	206
BAB VI	
PENUTUP	209



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterangan kewilayahan Kota Palopo Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117.....	9
Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan.....	12
Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan di Kota Palopo Tahun 2021-2023.....	13
Tabel 2. 4 Hasil Capaian IKLH.....	17
Tabel 2. 5 Persentase Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman.....	18
Tabel 2. 6 Akses Sanitasi Layak.....	18
Tabel 2. 7 Statistik Pengelolaan Sampah di Kota Palopo Tahun 2018-2023.....	18
Tabel 2. 8 Matriks Prioritas Penanganan Bencana.....	20
Tabel 2. 9 Pencapaian Penurunan Emisi GRK.....	29
Tabel 2. 10 Indikator Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018-2023.....	31
Tabel 2. 11 Kapasitas Air Baku.....	31
Tabel 2. 12 Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum per-Pipa.....	32
Tabel 2. 13 Kondisi Rata-Rata Demografi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2023.....	33
Tabel 2. 14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha dan ADHB 2018-2023.....	35
Tabel 2. 15 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2010-2023.....	37
Tabel 2. 16 Perbandingan Miskin dan Miskin Ekstrim antarkota Sulawesi Selatan.....	39
Tabel 2. 17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kota dan Provinsi (%).....	41
Tabel 2. 18 IPM Menurut Dimensi dan Indikator Penyusunan Tahun 2020 – 2023.....	42
Tabel 2. 19 Perbandingan UHH antar Wilayah Tahun 2018-2023.....	43
Tabel 2. 20 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah antar Wilayah Tahun 2018-2023.....	43
Tabel 2. 21 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah antar Wilayah Tahun 2018-2023.....	44
Tabel 2. 22 Pekerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2018-2023.....	44
Tabel 2. 23 Proporsi Kepesertaan Jaminan Kesehatan.....	45
Tabel 2. 24 Persentase Persalinan di Faskes Pelayanan Dasar sesuai Standar.....	46
Tabel 2. 25 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013-2023.....	46
Tabel 2. 26 Rasio Angka Kematian Bayi Kota Palopo Tahun 2013-2023.....	47
Tabel 2. 27 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo.....	48
Tabel 2. 28 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2023.....	48
Tabel 2. 29 Tingkat Kematian TBC per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2023.....	49
Tabel 2. 30 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS.....	50
Tabel 2. 31 Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS.....	50
Tabel 2. 32 Capaian Indeks Kualitas Keluarga Kota Palopo Tahun 2018-2023.....	51
Tabel 2. 33 Dimensi Penyusun IPA Kota Palopo Tahun 2021.....	52
Tabel 2. 34 Perbandingan Hasil Capaian IPA Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 2. 35 Hasil Capaian IKG Kota Palopo.....	52
Tabel 2. 36 Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	53
Tabel 2. 37 Proksi Capaian Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	54
Tabel 2. 38 PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2010-2023.....	54
Tabel 2. 39 Perbandingan IHK.....	55



Tabel 2. 40 Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2015-2023	56
Tabel 2. 41 Rasio Kewirausahaan Kota Palopo 2017-2003	57
Tabel 2. 42 Rasio Ketersediaan Penginapan Kota Palopo Tahun 2018-2023	58
Tabel 2. 43 Statistik Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	59
Tabel 2. 44 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif.....	59
Tabel 2. 45 Jumlah Industri, UMKM, dan Rasio terhadap PDRB.....	60
Tabel 2. 46 Rasio Sarana Perdagangan dan Total Pedagang Tahun 2018-2023	60
Tabel 2. 47 Proporsi Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB.....	61
Tabel 2. 48 Produktivitas Padi (gabah kering giling) dalam Ton.	63
Tabel 2. 49 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022-2023	65
Tabel 2. 50 Kontribusi PDRB Palopo terhadap Provinsi	66
Tabel 2. 51 Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Palopo Tahun 2022-2023	66
Tabel 2. 52 Statistik Angkatan Kerja Kota Palopo 2018-2023	67
Tabel 2. 53 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo	68
Tabel 2. 54 Angka Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2017-2023	69
Tabel 2. 55 Jumlah Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	69
Tabel 2. 56 Lulusan PT yang Bekerja di Bidang Keahlian Formal.....	69
Tabel 2. 57 Capaian Indeks Inovasi Daerah	71
Tabel 2. 58 Capaian Indeks Layanan Infrastruktur	71
Tabel 2. 59 Rasio Ketersediaan Listrik Kota Palopo Tahun 2018-2023.....	72
Tabel 2. 60 Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo tahun 2018 - 2023 (Km)	72
Tabel 2. 61 Kondisi Jalan Mantap Kota Palopo	72
Tabel 2. 62 Distribusi Konsumsi Air Perpipaan Kota Palopo.....	73
Tabel 2. 63 Akses Rumah Tangga Air Minum per-Pipa	73
Tabel 2. 64 Proporsi Rumah Tangga Bersanitasi.....	74
Tabel 2. 65 Rasio Rumah Layak Huni.....	74
Tabel 2. 66 Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%).....	74
Tabel 2. 67 Persentase Rumah Tangga Terhadap Penerangan Listrik.....	75
Tabel 2. 68 Titik Blank Spot Kota Palopo.....	75
Tabel 2. 69 Indeks Williamson 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	75
Tabel 2. 70 Layanan Publik Terselenggara Online dan Terintegrasi.....	76
Tabel 2. 71 Proxy Capaian Indeks Demokrasi	77
Tabel 2. 72 Indeks Kerukunan Umat Beragama	77
Tabel 2. 73 Persentase Angka Kriminalitas Kota Palopo Tahun 20219-2023	78
Tabel 2. 74 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	78
Tabel 2. 75 Persentase Penegakan Perda	79
Tabel 2. 76 Jumlah PKS.....	79
Tabel 2. 77 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	79
Tabel 2. 78 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	79
Tabel 2. 79 Harga dan Neraca Bahan Pokok Rata-Rata per Bulan Kota Palopo	81
Tabel 2. 80 Nilai PMTB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2022 (Milyar Rupiah) ...	82
Tabel 2. 81 Rasio Dana Pensiunan terhadap Total PDRB (%).....	83
Tabel 2. 82 Pertumbuhan Investasi Daerah.....	84
Tabel 2. 83 Hasil Capaian IPKD	84
Tabel 2. 84 Capaian IRH Tahun 2023	85
Tabel 2. 85 Nilai SPBE Kota Palopo 2018-2023.....	86



Tabel 2. 86 Capaian Indeks SPI.....	87
Tabel 2. 87 Hasil Capaian Nilai MCP.....	87
Tabel 2. 88 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2018-2022.....	88
Tabel 2. 89 Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2023.....	88
Tabel 2. 90 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo Kota Palopo (Jiwa).....	90
Tabel 2. 91 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palopo (Jiwa).....	91
Tabel 2. 92 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Palopo.....	91
Tabel 2. 93 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Palopo.....	92
Tabel 2. 94 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Palopo.....	93
Tabel 2. 95 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal Tahun 2025-2045.....	94
Tabel 2. 96 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2025-2045.....	94
Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045.....	94
Tabel 2. 98 Kebutuhan Pengolahan Persampahan Tahun 2025-2045.....	95
Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Provisi dan Kota Palopo Tahun 2025-2045.....	126
Tabel 4. 2 Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Visi Kota Palopo 2025-2045.....	126
Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi RPJPD Kota Palopo.....	127
Tabel 4. 4 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Kota Palopo.....	129
Tabel 4. 5 Keselarasan Visi dan Misi Kota Palopo 2025-2045.....	132
Tabel 4. 6 Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.....	133
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Kota Palopo.....	142
Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan.....	149
Tabel 5. 3 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Pertama Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	153
Tabel 5. 4 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kedua Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	157
Tabel 5. 5 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok ketiga Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	161
Tabel 5. 6 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Keempat Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	164
Tabel 5. 7 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kelima Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	167
Tabel 5. 8 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Keenam Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	170
Tabel 5. 9 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Ketujuh Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	173
Tabel 5. 10 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kedelapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045.....	175
Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama dan Target Kinerja.....	177
Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi.....	185



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan antara RPJPD Kota Palopo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2 Wilayah Administrasi	11
Gambar 3 Peta Topografi	14
Gambar 4 Kemiringan Lereng	15
Gambar 5 Tutupan Lahan	16
Gambar 6 Indeks Resiko Bencana Kota Palopo dan Kabupaten Tetangga 2015-2023	20
Gambar 7 Kajian Resiko Bencana Banjir Bandang	22
Gambar 8 Kajian Resiko Bencana Banjir	23
Gambar 9 Kajian Resiko Bencana Cuaca Ekstrim	24
Gambar 10 Kajian Resiko Bencana Kekeringan	25
Gambar 11 Kajian Resiko Bencana Tanah Longsor	26
Gambar 12 Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	27
Gambar 13 Resiko Bencana Multi Bencana	28
Gambar 14 Produksi (Kwh) dan Konsumsi Listrik (Kwh/Kapita)	30
Gambar 15. Proporsi Penduduk Laki Perempuan dan Jumlah Penduduk	33
Gambar 16 Rata Rata Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2010-2023	34
Gambar 17 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo, provinsi dan nasional Tahun 2011-2023 (%)	35
Gambar 18 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (Milyar Rp)	36
Gambar 19 Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2023	37
Gambar 20 Persentase Penduduk Miskin, Miskin Ekstrim, dan Garis Kemiskinan Kota Palopo	38
Gambar 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	40
Gambar 22 TPT Kota Palopo Tahun 2005-2023	41
Gambar 23 IPM Kota Palopo 2020-2023	42
Gambar 24 Distribusi Aktivitas Kegiatan Penyandang Disabilitas Kota Palopo	45
Gambar 25 Prevalensi Stunting	48
Gambar 26 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo	56
Gambar 27 Rasio PDRB Industri Pengolahan	57
Gambar 28 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Total PDRB	58
Gambar 29 ROA BUMD Kota Palopo Tahun 2013-2023	62
Gambar 30 Produktivitas Hasil Perikanan Kota Palopo (ton)	63
Gambar 31 Net Ekspor Barang/Jasa Kota Palopo Tahun 2010-2023	64
Gambar 32 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67
Gambar 33 Rasio Anggaran Litbang terhadap APBD	70
Gambar 34 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	81
Gambar 35 Nilai Transaksi Saham Rata-Rata Tahunan Kota Palopo (Milyar Rp)	83
Gambar 36 Indeks Pelayanan Publik	86
Gambar 37 Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi	97
Gambar 38 Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan	101
Gambar 39 Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan	102
Gambar 40 Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air	103
Gambar 41 Tingkat Emisi CO2 dan Luasan Hutan Tahun 1990-2021	113



RPJPD 2025-2045



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2024
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya disusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, mewajibkan penyusunan Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Gambaran capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo pada tahun 2023 mencapai 80.77 poin atau naik sebesar 6.99 poin dari tahun 2005 dan berada diatas pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan dan nasional pada periode yang sama. Dari aspek kesejahteraan penduduk, pendapatan perkapita masyarakat Kota Palopo meningkat tahun 2013 hanya berada pada angka 23 juta perkapita/tahun, di tahun 2023 telah berada pada angka 54.47 juta perkapita/tahun. Tingkat kemiskinan Kota Palopo tahun 2018 dengan persentase 7.94 persen menurun sebesar 0.25 persen pada tahun 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mencapai 8.02 persen ini mengalami perlambatan sebesar -3.68 poin pada tahun 2023 yaitu 4.34 persen. Gini ratio Kota Palopo dari tahun ketahun semakin baik, di tahun 2023 angka gini ratio sebesar 0.367 poin dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0.434 poin. begitupula dengan inflasi pada tahun 2023 sebesar 2.21 persen, dimana inflasi kota palopo mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo periode 2005- 2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1, setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Berdasarkan amanat perundangan di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 dengan fokus isu strategis dalam pengembangan wilayah yang perlu mendapat

perhatian dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahun 2025 - 2045, adalah :

1. Perubahan iklim dan lingkungan,
2. Ekonomi kesejahteraan masyarakat,
3. Kualitas tata kelola pemerintahan,
4. Kualitas sumber daya manusia (SDM),
5. Penyediaan Infrastruktur Kota
6. Pelestarian seni dan budaya,
7. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan,
8. Potensi urbanisasi,
9. Kemandirian daerah.

Perencanaan pembangunan Kota Palopo telah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan peraturan perundangan. Sejak ditetapkan sebagai kota otonom, pembangunan Kota Palopo didasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif, serta diplomasi daerah yang tangguh untuk memperkuat peran di kancah nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi yang tercakup sebagai landasan transformasi. Transformasi Kota Palopo memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 (tiga) misi kerangka implementasi transformasi.

Kota Palopo adalah salah satu Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. mempunyai karakteristik lain, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, dan juga sebagai gerbang utama menuju wilayah utara pulau Sulawesi, dengan peran tersebut, maka Kota Palopo cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya di Luwu Raya. Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat ini berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya maupun aspek keamanan. Sehingga pembangunan di wilayah Kota Palopo mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui



beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, Fasilitasi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, penyampaian ranperda ke DPRD, pembahasan Ranperda RPJPD oleh DPRD, evaluasi pemerintah Provinsi, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2025-2045 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi



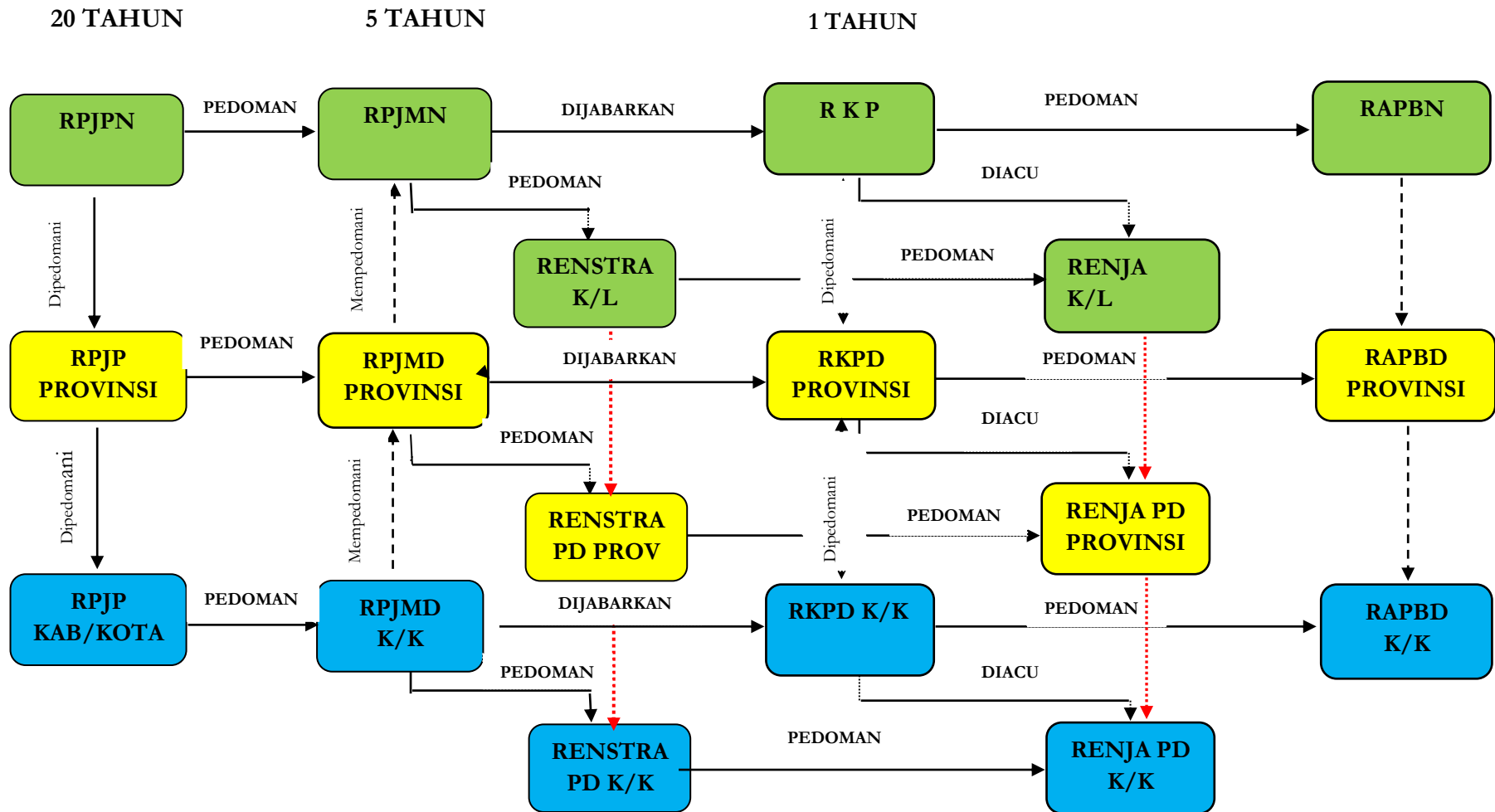
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ...);

34. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Keterkaitan dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kota Palopo merupakan perencanaan yang bersifat makro RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 bab 1-5 Rancangan Awal yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan dengan rujukan berbagai dokumen perencanaan yang relevan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1 Hubungan antara RPJPD Kota Palopo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi, maupun RTRW Kota Palopo sendiri. Disamping itu, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD.

Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya. Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 adalah untuk menjadi acuan dasar dan memberikan arah pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Palopo;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kota Palopo dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
5. Memberikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan masalah dan isu strategis daerah yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka sistematika penyusunan RPJPD Kota Palopo Tahun 2025 - 2045 disusun sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dengan RPJPD, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, trend demografi, kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

**BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Menjelaskan permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil /capaian, serta isu strategis daerah yang harus diperhatikan dan dikedepankan termasuk hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB. IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat Visi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045, sasaran visi, dan misi yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah.

BAB. V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya :

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB. VI PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045

LAMPIRAN



RPJPD 2025-2045

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 GEOGRAFI

Kota Palopo terletak antara 2°53'.15'' - 3°04'.08'' Lintang Selatan dan 120°03'.10''-120°14'.34'' Bujur Timur. Batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, batas sebelah selatan adalah Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, batas sebelah barat merupakan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan batas sebelah timur merupakan Teluk Bone. Secara geografis wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Palopo memiliki kode wilayah 7373, dengan jumlah kecamatan 9 dan kelurahan 48, kemudian Luas wilayah indikatif Kota Palopo yang tercatat berdasarkan SK PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 adalah 273.23 Km² km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 Km² atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan wara utara dengan luas 10.58 Km² atau hanya sebesar 4.27 persen dari luas Kota Palopo. Jarak antara Kota Palopo ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 365 km. jarak seluruh ibukota Palopo kecamatan ke ibu kota semua relative dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah kecamatan telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12.00 km. Berdasarkan pencatatan tersebut keterangan kewilayahan di Kota Palopo disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Keterangan kewilayahan Kota Palopo Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117

Kode	Kecamatan	Kelurahan	Luasan
73			
7373			Palopo (273.23 Km ²)
737301	Wara		11.49 Km ² (4.64%)
737301.1001		Tompotikka	0.7178
737301.1002		Boting	0.692
737301.1003		Amasangan	0.3858
737301.1004		Lagaligo	0.4724
737301.1005		Dangerako	0.4281
737301.1006		Pajalesang	1.7224
737302	Wara Utara		10.58 Km ² (4.27%)
737302.1001		Batupasi	0.2129
737302.1002		Sabbangparu	0.8322
737302.1003		Salobulo	3.3771
737302.1004		Penggoli	0.2679
737302.1005		Luminda	0.2072
737302.1006		Pattene	0.64
737303	Wara Selatan		10.66 Km ² (4.32%)
737303.1001		Takkalala	3.4364
737303.1002		Songka	4.2714
737303.1003		Sampoddo	2.3515
737303.1004		Binturu	0.9835
737304	Telluwanua		34.34 Km ² (13.87%)
737304.1001		Batuwalenrang	5.0197



Kode	Kecamatan	Kelurahan	Luasan
737304.1002		Jaya	7.9055
737304.1003		Mancani	3.8871
737304.1004		Maroangin	4.9956
737304.1005		Pentojangan	5.6121
737304.1006		Salubatang	9.9888
737304.1007		Sumarambu	2.9121
737305	Wara Timur		12.08 Km2 (4.88%)
737305.1001		Benteng	1.5578
737305.1002		Malatunrung	0.5749
737305.1003		Ponjalee	0.4749
737305.1004		Pontap	0.6342
737305.1005		Salekoe	1.4139
737305.1006		Salotulue	0.3132
737305.1007		Surutanga	1.1354
737306	Wara Barat		54.13 Km2 (21.87%)
737306.1001		Batang	38.459
737306.1001		Batang barat	34.0068
737306.1001		Lebang	5.967
737306.1001		Padang lambe	21.896
737306.1001		Tomarunding	1.3016
737307	Sendana		53.80 Km2 (21.74%)
737307.1001		Mawa	4.5878
737307.1002		Peta	27.6676
737307.1003		Purangi	5.2659
737307.1004		Sendana	5.7244
737308	Mungkajang		
737308.1001		Kambo	15.7623
737308.1002		Latuppa	15.1841
737308.1003		Mungkajang	3.4057
737308.1004		Murante	3.5404
737309	Bara		
737309.1001		Balandai	4.1694
737309.1002		Buntutatu	2.8041
737309.1003		Rampoang	5.8126
737309.1004		Temmaleba	4.7702
737309.1005		Tobulung	5.3808

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 , 2022

Dilihat dari sejarah masa lalu, Kota Palopo adalah kota administrative yang terbentuk pada tahun 2002 pemecahan dari wilayah kabupaten Luwu. Dengan status kotamadya, harus dapat menjadikan contoh bagi kabupaten lain di wilayah sekitar karesidenan Luwu raya (Luwu, Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, dan Luwu Timur). Wilayah Kota Palopo memiliki posisi yang strategis berada di tengah-tengah wilayah Luwu raya sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu Kota Palopo merupakan tempat tujuan bagi pendatang disekitar Luwu raya baik untuk mencari pekerjaan, berdagang maupun melanjutkan pendidikan tinggi. Adanya arus migrasi keluar dan masuk memberikan dampak bagi pertumbuhan populasi serta aktivitas perekonomian. Batas wilayah administrasi Kota Palopo disajikan pada gambar di halaman selanjutnya.

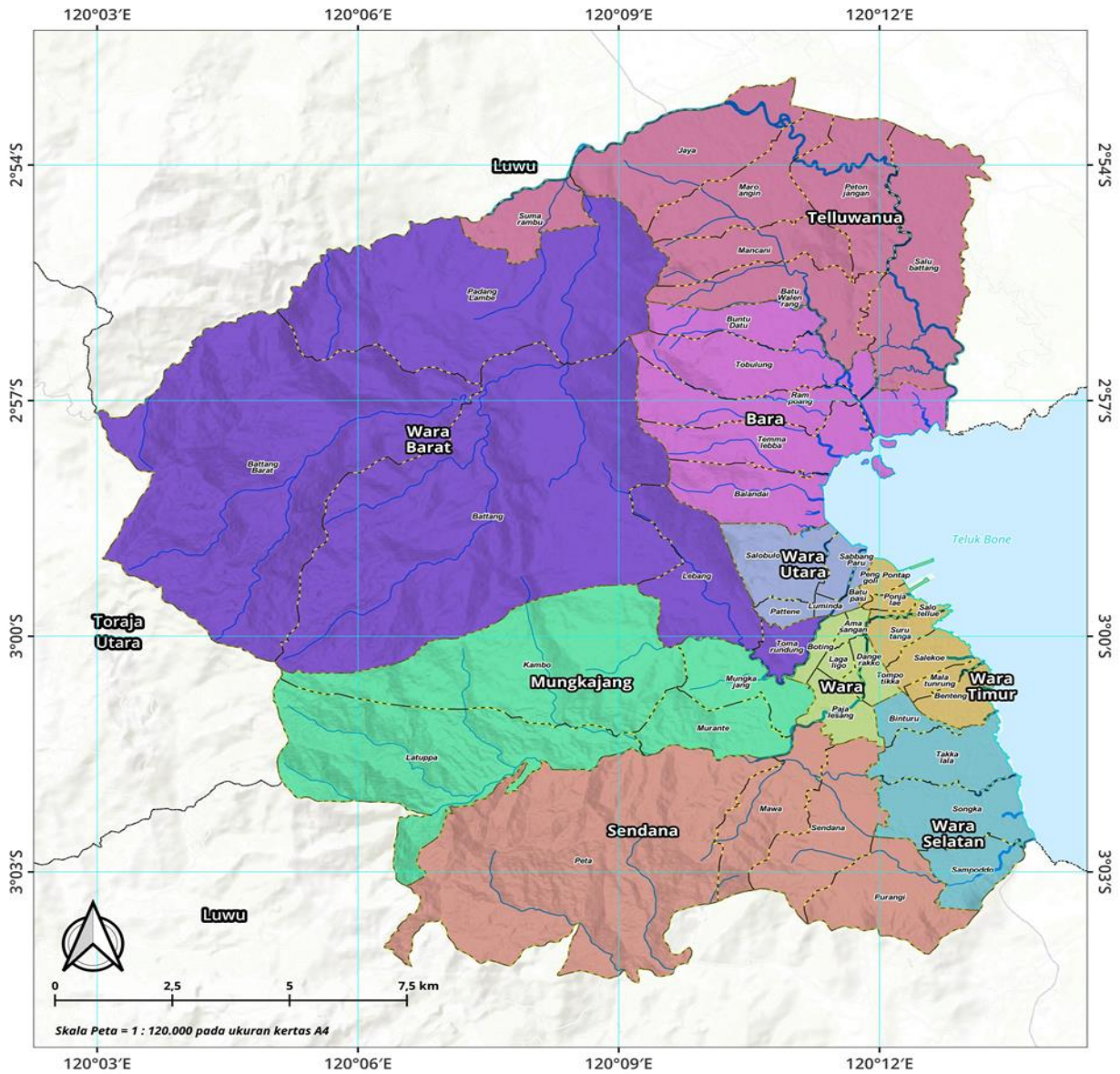


Gambar 2 Wilayah Administrasi



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILAYAH ADMINISTRASI



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai
- Garis Pantai
- Bara
- Mungkajang
- Sendana
- Telluwanua
- Wara
- Wara Barat
- Wara
- Wara Selatan
- Wara Timur
- Wara Utara

SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Jenis batuan terdiri dari 3 jenis. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balistik hingga andesitik.

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26–100	101-500	501-1000	> 1000
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		247.52	76.677	8,951	66,801	60.038	35.053

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Kota Palopo memiliki peran strategis untuk skala regional, sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kota Palopo sangat strategis, menghubungkan antara wilayah di Kawasan Tana Luwu dan Toraja dengan kota-kota di sekitarnya dan merupakan daerah perlintasan trans Sulawesi menuju Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Palopo. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Palopo juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang didiami oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas masing – masing jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel dibawah. Luasan lahan pertanian dan non pertanian tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya kecuali pada tahun 2021, dapat diasumsikan bahwa perubahan lahan di Kota Palopo dapat terlihat 2 atau lebih tahun berjalan.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan di Kota Palopo Tahun 2021-2023

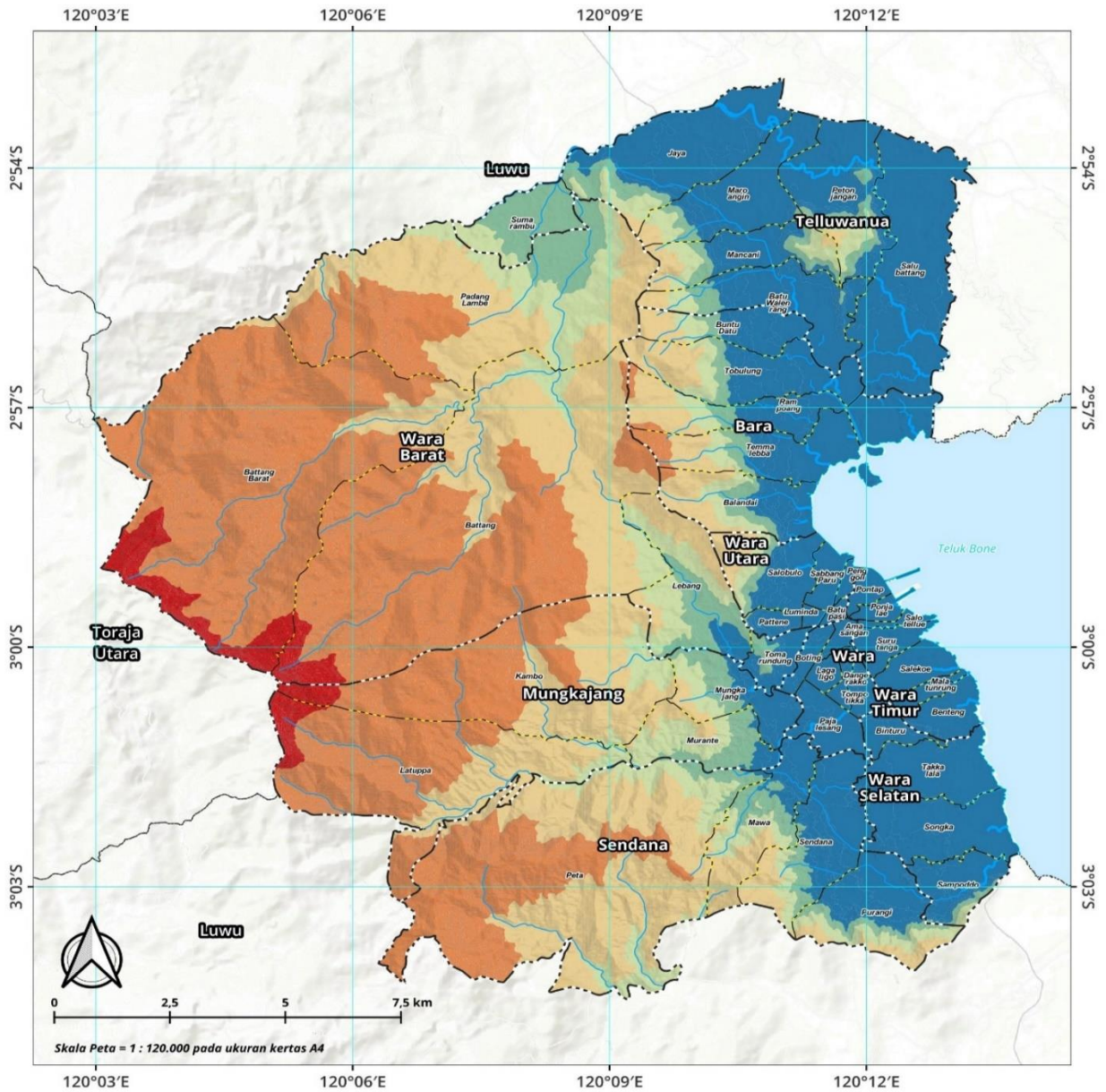
Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)						Lahan Non Pertanian (Ha)			Jumlah		
	Sawah			Bukan Sawah			2021	2022	2023	2021	2022	2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023						
Wara Selatan	136	136	136	455	455	455	475	475	475	1066	1066	1066
Sendana	295	295	295	2387	2387	2387	1027	1027	1027	3709	3709	3709
Wara	83	83	83	7	7	7	1059	106	106	1149	115	115
Wara Timur	-	-	-	195	195	195	1013	1013	1013	1208	1208	1208
Mungkajang	47	47	47	1158	1158	1158	4175	4175	4175	538	538	538
Wara Utara	5	5	5	246	246	246	807	807	807	1058	1058	1058
Bara	-	-	-	1624	1624	1624	711	711	711	2335	2335	2335
Telluwana	1144.25	930.25	930.25	1894.3	1894.8	1894.8	3955	609	609	2434	3434	3434
Wara Barat	180	180	180	1654	1654	1654	3588	3588	3588	5413	5422	5422
PALOPO	1890.25	1676.25	1676.25	9611.3	9620.8	9620.8	13250.5	13465	13465	24752	24762	24762

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2024

Adanya aktivitas manusia di suatu wilayah berpengaruh terhadap kualitas tutupan lahan, adalah hal yang lumrah dalam proses pembangunan. Penutupan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Identifikasi yang dilakukan untuk melihat kondisi penutupan lahan di Kota Palopo, menggunakan data penutupan lahan berdasarkan data KLHK Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil VII Makassar tahun 2014, 2018 dan 2022. Berdasarkan data penutupan lahan Kota Palopo kelas penutupan hutan lahan kering sekunder mengalami deforestasi, kemudian kelas penutupan pertanian lahan kering campur semak juga mengalami pengurangan luasan. Adapun penambahan luas pada kelas penutupan lahan pemukiman seluas 1.086,37 ha pada tahun 2014-2018 dan 922,29 ha pada tahun 2018-2022, selain itu kelas penutupan lahan sawah juga mengalami penambahan luasan seluas 178,19 ha pada tahun 2014-2018 dan 178,09 ha pada tahun 2018-2022, dalam hal ini kebutuhan lahan pangan dan kebutuhan lahan permukiman yang semakin bertambah yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya gambar peta topografi, kemiringan lereng, dan penutupan lahan tersaji pada lampiran halaman selanjutnya.



TOPOGRAFI



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Morfografi :

- Datar = <50 m
- Dataran Rendah = 50-100 m
- Perbukitan Rendah = 100-200 m
- Perbukitan = 200-500 m
- Perbukitan Tinggi = 500-1.500 m
- Pegunungan = >1.500 m

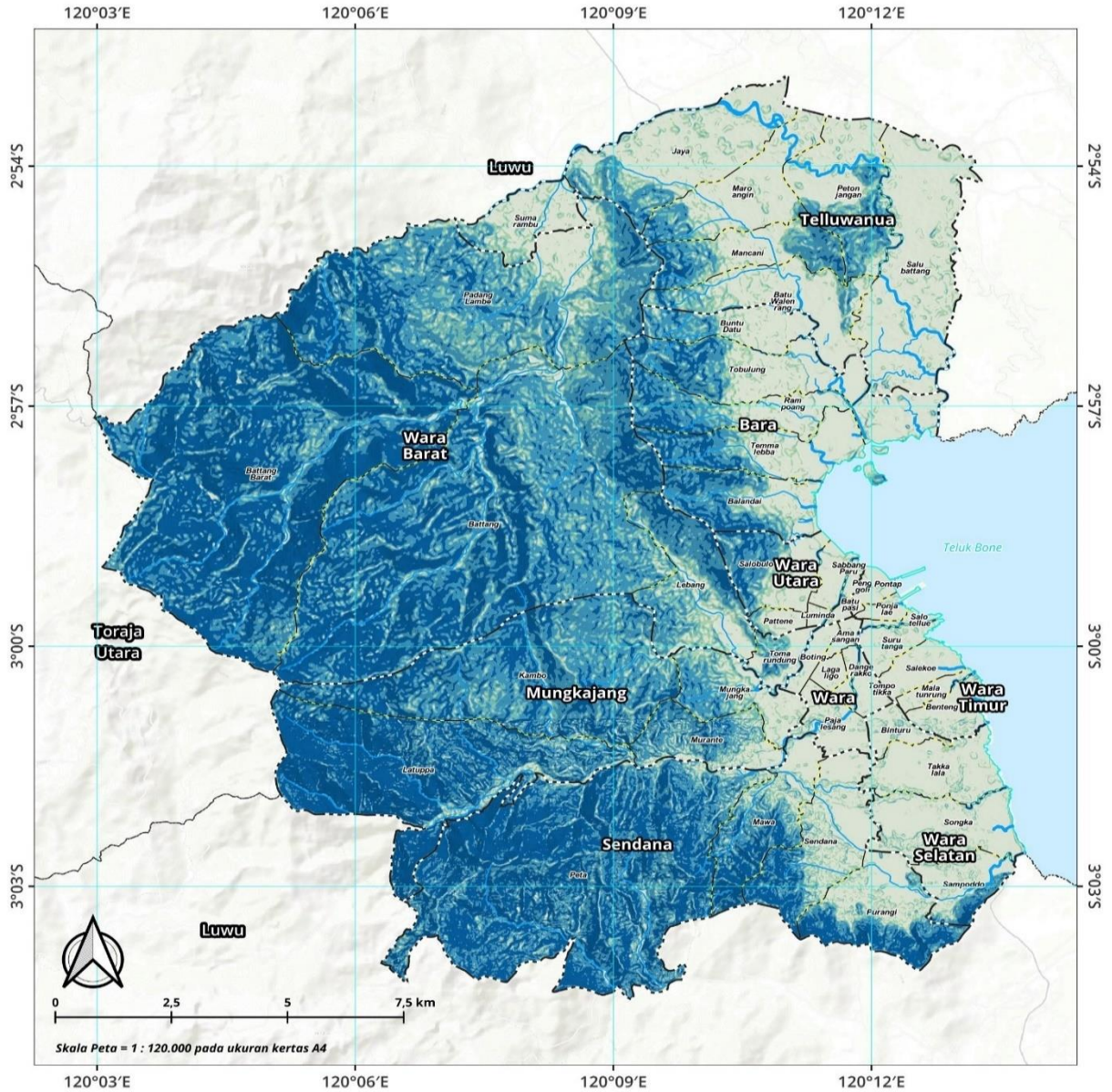
SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Gambar 3 Peta Topografi



KEMIRINGAN LERENG



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Kemiringan Lereng :

- Datar = 0-8 %
- Landai = >8-15 %
- Agak Curam = >15-25%
- Curam = >25-45%
- Sangat Curam = 45%

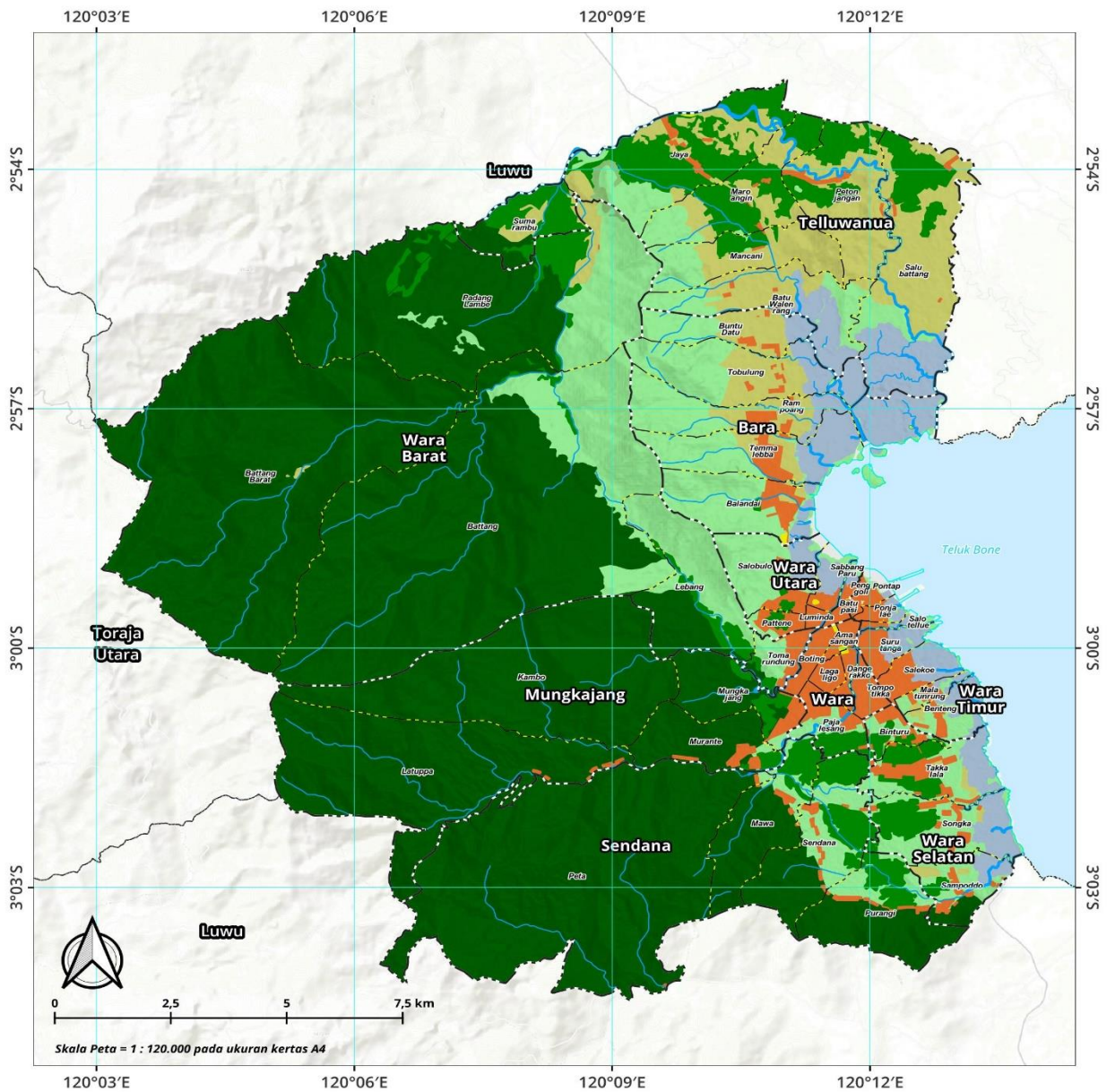
SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Gambar 4 Kemiringan Lereng



PENUTUPAN LAHAN



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai
- Tambak
- Sungai
- Hutan Rimba
- Perkebunan
- Permukiman dan Tempat Kegiatan
- Sawah
- Sawah Tadah Hujan
- Semak Belukar / Alang Alang
- Tanah Kosong / Gundul
- Tegalan / Ladang

SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Gambar 5 Tutupan Lahan

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks komposit dari gabungan seluruh indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan tutupan lahan. Tahun 2023 capaian hasil komposit perhitungan IKLH yaitu IKA 53,33; IKU 89,53; dan IKTL 60,30. Tujuan dari perhitungan IKLH adalah untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan mendesain program lingkungan sebagai efek dari eksternalitas. Hasil capaian IKLH Indonesia dan Provinsi disajikan pada gambar dibawah, semakin tinggi angka IKLH mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia bertambah baik dibandingkan tahun sebelumnya. IKLH nasional pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 72,54 meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya, tetapi untuk level provinsi pada tahun 2023 dengan capaian 74.30 atau lebih diatas daripada capaian nasional yang 5 tahun kebelakang hanya berkisar pada rentang 65-72.

Data IKLH di level kota/kab, Kota Palopo masuk dalam kategori sedang tahun 2023 sebesar 69,52. Hasil capaian ini lebih rendah dibandingkan hasil capaian nasional dan provinsi. Walaupun demikian hasil pengukuran Kota Palopo lainnya yang berkaitan dengan komposit penyusun IKLH selama tahun 2018-2023 indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan sebagai tolak ukur kualitas lingkungan tersaji dibawah. Hasil capaian ketiga indikator tersebut selama tahun 2019-2023 di Kota Palopo mengalami perbaikan setiap tahunnya. Kondisi ini tidak lepas dari komitmen pemerintah Kota Palopo untuk melaksanakan proses pembangunan kota tanpa mengesampingkan daya dukung lingkungan disekitarnya, yang sejalan dengan indikator dalam pencapaian SDG's.

Tabel 2. 4 Hasil Capaian IKLH

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup palopo	53,63	54,38	51,45	55,62	56,04	69,52
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi	66,01	67,03	70,7	73,23	74,17	74,3
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional	71,76	66,55	70,7	71,45	72,42	72,54

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup, 2024

Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman adalah Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu Fasilitas air bersih, Pembuangan air besar/tinja, Pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011 rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Oleh karena kelayakan sanitasi perumahan yang didiami oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Sasaran yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan akses sanitasi aman adalah masyarakat miskin. Kemiskinan berkaitan erat dengan sarana prasarana kumuh, oleh karena itu penduduk miskin membutuhkan intervensi dalam penyediaan sarana air minum. Penyediaan air bersih maupun air minum adalah hal yang saling berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Setiap ada konsumsi air bersih, pasti akan ada residu yang dihasilkan yaitu air limbah/kotor. Apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk MCK, maka air yang terbuang menjadi limbah sekitar 85 liter. Pengelolaan air bersih berkaitan dengan pengelolaan fasilitas sanitasi. Berkaitan dengan kondisi tersebut pemerintah Kota Palopo telah menyiapkan fasilitas sanitasi dasar tersebut. Hasil capaian Kota Palopo untuk akses sanitasi aman tahun 2023 adalah 4.32% atau kurang dari 5% hal ini berarti untuk akses rumah tangga dengan sanitasi aman dalam kondisi masih kurang baik jika dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 10.21% dan provinsi dengan capaian sebesar 12.83%. begitupula jika dibandingkan dengan kota makassar dan kota pare-pare sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5 Persentase Akses Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman

Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	7.49	7.64	7.25	10.16	10.21
Prov. Sulawesi Selatan	4.70	4.74	3.97	12.92	12.83
Kota Makassar	14.89	13.22	13.81	19.95	25.70
Kota Pare-Pare	8.59	9.12	5.54	9.48	12.55
Kota Palopo	0.22	1.31	4.11	4.11	4.32

Sumber : Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

Selanjutnya untuk pencapaian sanitasi layak dan perlimbahan di Kota Palopo masih rendah di Sebagian kecamatan. Hanya Kecamatan Wara Utara yang persentase akses sanitasi layak 97,88%. Hasil capaian Kota Palopo pada tahun 2023 akses sanitasi layak masih 63,61%. Kondisi ini terjadi karena status legalitas kepemilikan lahan dan tanah yang akan dilakukan pembangunan oleh pemerintah masih belum tersertifikasi secara sah oleh kantor agraria setempat, sehingga keadaan tersebut membuat pemerintah melalui perangkat daerah pengampu tidak dapat menjangkau sebelum legalitas tanah diselesaikan.

Tabel 2. 6 Akses Sanitasi Layak

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Pengguna (KK)			Akses Sanitasi Layak	
		IPAL KOMUNAL	Jamban Sehat Semipermanen	Jamban Sehat Permanen	Jumlah	%
Wara	10071			6468	6468	64.22
Wara Utara	6682	142	230	6462	6834	97.88
Wara Selatan	5203	229		2326	2555	49.11
Telluwanea	4789	377	174	1645	2196	45.86
Wara Timur	11388	686	357	8065	9108	79.98
Wara Barat	3589	205	40	1893	2138	59.57
Sendana	2317	151	28	1412	1591	68.67
Mungkajang	2930	170	13	2122	2305	78.67
Bara	9093	20	32	2125	2177	23.94
Kota Palopo	56062	1980	874	32518	35372	63.61

Sumber : Bidang Sarpraswil Bappeda, 2023

Pengelolaan dan timbulan sampah dimana Sampah merupakan bagian dari limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin banyak aktivitas manusia dan kegiatan usaha disuatu wilayah berdampak kepada peningkatan jumlah limbah domestik yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan penanganan akan menimbulkan timbulan sampah. Kota Palopo hanya memiliki satu tempat pengelolaan sampah yaitu TPA terpadu Mancani, capaian pengelolaan sampah disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 7 Statistik Pengelolaan Sampah di Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	30.409	30.419	29.437,25	23.735,37	25.110,62	24.038,90
Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	34.171	33.699	33.215	33.704,28	34.187,91	34.833,23
Persentase Timbulan Sampah Tertangani	%	88.90	90,26	88,63	70.42	73.45	69,01
Jumlah Timbulan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	34.171	33.699	29.437,25	23.735,37	25.110,62	24.038,90



Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	1.376	1.387	1.401	1.762,37	2.024	2.880,35
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	4,02	4,11	9,12	7,43	8,06	11,98
Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	166,27	167,89	201,56	201,56	201,56	201,56
Luas area Kota Palopo	km ² /ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
Persentase layanan persampahan	%	67	67,83	80,52	81,43	81,43	81,43
Volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	(ton)	1.387	1.387	1.947	1.762	2.024	2.880,35
Total Volume sampah	(ton)	33.699	33.699	33.215	33.738	34.187,91	34.833,23
Persentase sampah daur ulang sebelum masuk TPA	%	4.12	4.12	5.86	5.22	5.92	8.27
Jumlah rumah tangga terlayani pengumpulan sampah	KK	48.127	47.380	46.634	45.887	46.623	47.030
Jumlah seluruh rumah tangga	KK	60.226	61.538	61.560	56.351	57.255	57.755
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	79,91	76,99	75,64	81,43	81,43	81,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

Berdasarkan hasil tabel diatas terdapat beberapa indicator yang mengalami penurunan kualitas pelayanan, yang disebabkan salah satunya ada masalah teknis sarana penunjang. Persentase volume penanganan timbunan sampah mengalami penurunan layanan menjadi 69,01% terjadi karena adanya keterbatasan sarana truk pengangkut, dimana 60% dari total armada sudah tidak layak pakai dikarenakan usia kendaraan. Kemudian persentase sampah yang dikurangi melalui konsep 3R mengalami peningkatan menjadi 11,98%, kondisi ini terjadi karena difungsikan kembali bank sampah pada pertengahan 2023 yang ada di beberapa kecamatan dan kelurahan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah beberapa tahun mati suri alias tidak berjalan. Luas area layanan pengelolaan sampah masih stagnan 3 tahun terakhir terjadi karena kendala sarana pengangkut yang tidak dapat bekerja secara optimal. Terakhir persentase volume sampah yang diolah sebelum masuk TPA meningkat di tahun 2023 menjadi 8,27% karena efek dari aktifnya bank sampah di lingkungan kecamatan dan kelurahan.

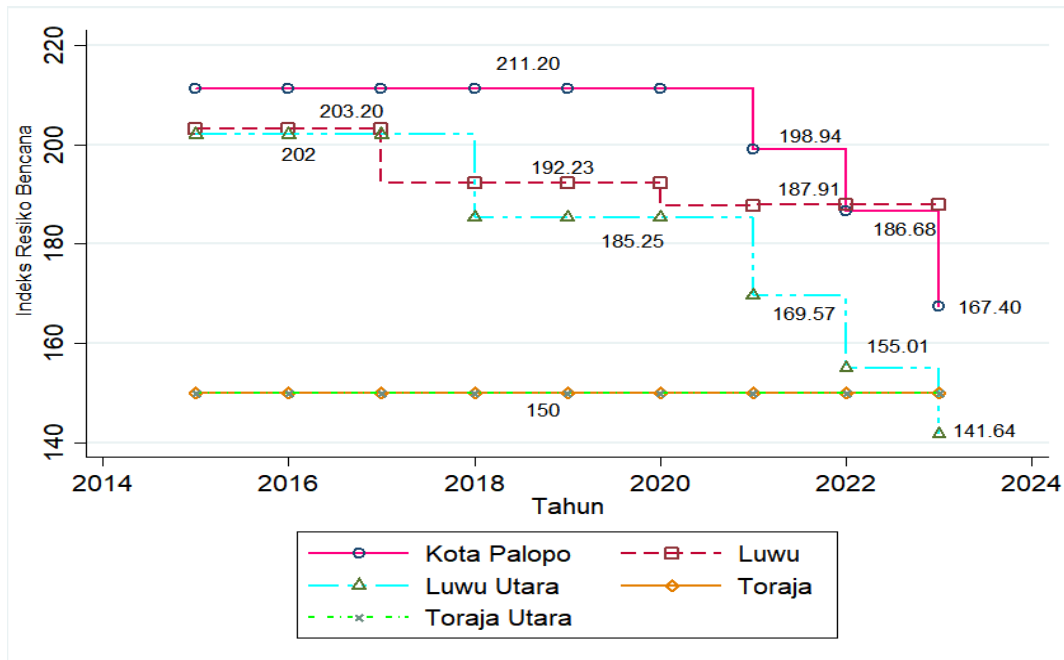
Indeks Resiko Bencana Kota Palopo memiliki kontur topografi daerah dataran rendah yang berbatasan dengan pantai/laut, kemudian daerah perbukitan, dan lereng pegunungan yang berbatasan dengan kabupaten Toraja Utara sehingga resiko untuk terjadi bencana lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di sekitar Luwu raya. Menurut data BPBD Kota Palopo bencana alam yang umum terjadi di daerah Palopo adalah tanah longsor dan banjir. Selain bencana alam tersebut menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) ada penambahan bencana yang merupakan imbas dari cuaca ekstrem yang melanda Indonesia yaitu angin puting beliung dan angin kencang. Berdasarkan dari hasil rilis BNPB INARISK lewat data Indeks Resiko Bencana tahun 2023 Kota Palopo berada pada peringkat 27 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan skor 167.40 kategori tinggi.

Tabel 2. 8 Matriks Prioritas Penanganan Bencana

PRIORITAS I	PRIORITAS II	PRIORITAS III
Penetapan PERDA tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori	Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana
Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD	Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air	Perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
Optimalisasi penerapan aturan dan mekanisme forum kebencanaan	Pengurangan frekuensi dan dampak bencana melalui restorasi sungai	Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana
Penguatan PERDA tentang RTRW berbasis kajian resiko bencana	Pengurangan frekuensi dan dampak bencana longsor melalui penguatan lereng	Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
Peningkatan kapabilitas dan tata Kelola BPBD	Pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui konservasi vegetatif DAS	
Penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran legislative dalam pengurangan resiko bencana di daerah		

Sumber : Dokumen KRB Kota Palopo, 2023-2027

Dalam menghitung indeks resiko bencana diperoleh dari fungsi resiko bencana yaitu ancaman (*Hazard*), kerentanan (*Vulnerability*), dan kapasitas (*Capacity*) terkait bencana. Selama tahun 2015-2023 Kota Palopo masih berada di peringkat pertama indeks resiko bencana dari 24 kab/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Resiko Bencana Kota Palopo dan daerah sekitarnya disajikan pada gambar dibawah.



Gambar 6 Indeks Resiko Bencana Kota Palopo dan Kabupaten Tetangga 2015-2023

Sumber : <https://inarisk.bnppb.go.id/>

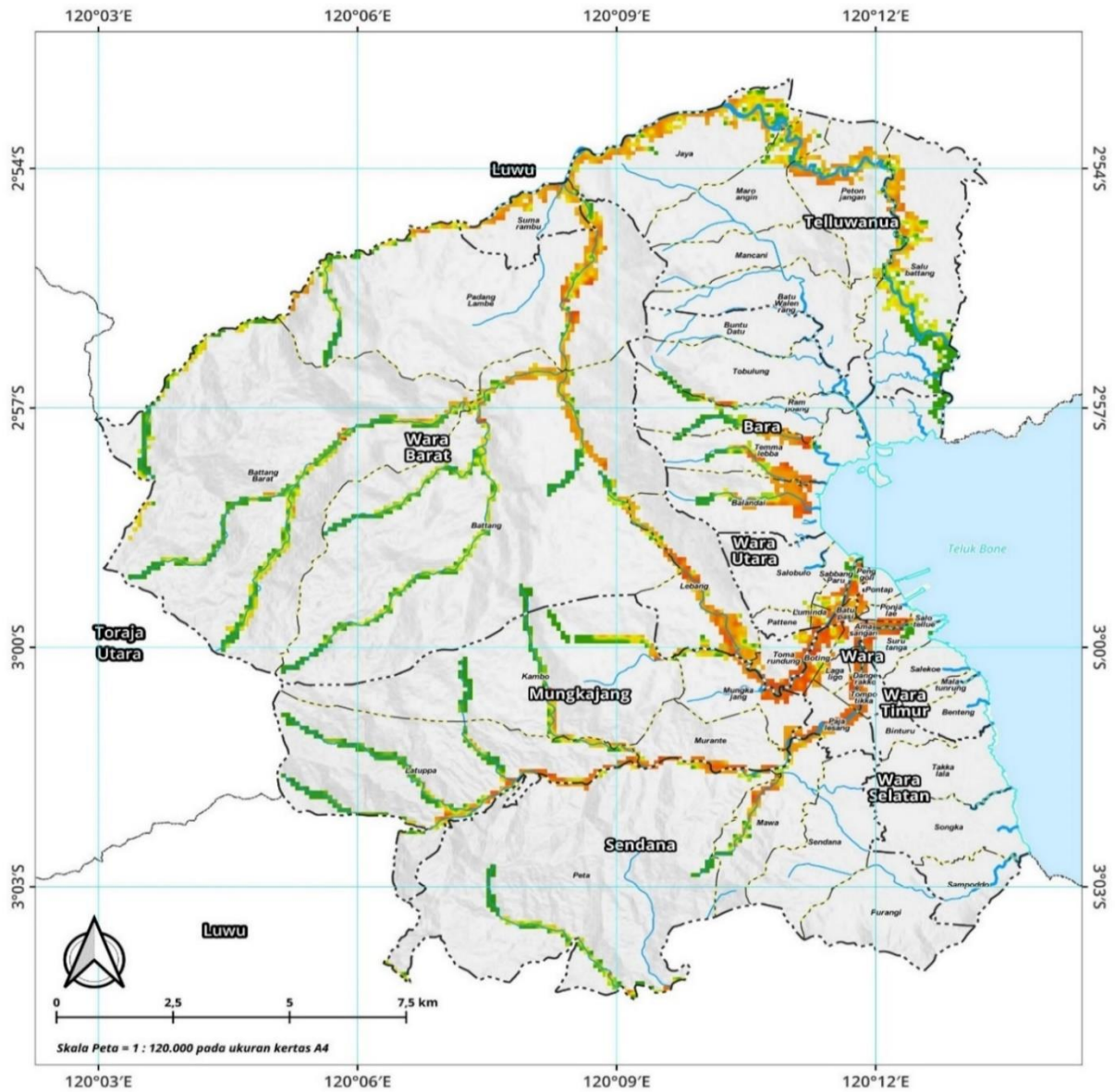


Berdasarkan hasil IRB Kota Palopo masih berada di peringkat pertama walaupun di tahun 2022-2023 turun peringkat kedua dan bergeser Kab.Luwu menjadi peringkat pertama. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah adalah Prioritas 1 Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; Prioritas 2 Peningkatan Efektifitas dan Mitigasi Bencana; dan Prioritas 3 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Upaya pengurangan resiko bencana dapat berjalan secara baik dan lancar apabila terdapat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (pelaku usaha). Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan 2 elemen tersebut. Terakhir adalah hidup berselaras dengan alam untuk saling melindungi dan menjaga, tanpa adanya alam manusia tidak dapat hidup. Matriks Kebijakan Penanganan Bencana di Kota Palopo disajikan pada tabel dibawah.



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAJIAN RESIKO BENCANA BANJIR BANDANG



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Indeks Risiko



SUMBER :

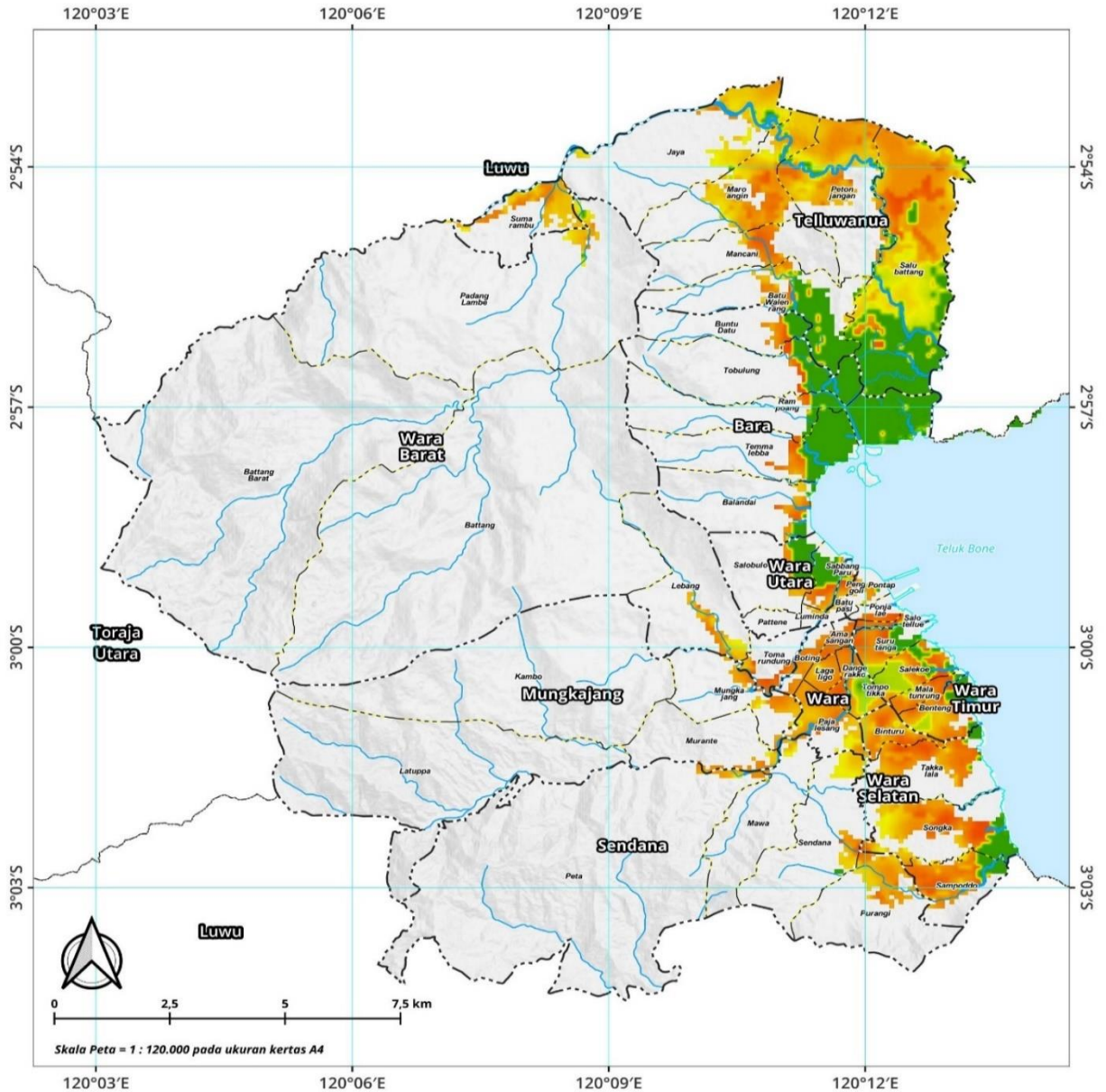
1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnpb.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 7 Kajian Resiko Bencana Banjir Bandang



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAJIAN RESIKO BENCANA BANJIR



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan Sungai
- Batas Administrasi Kecamatan

Indeks Risiko



SUMBER :

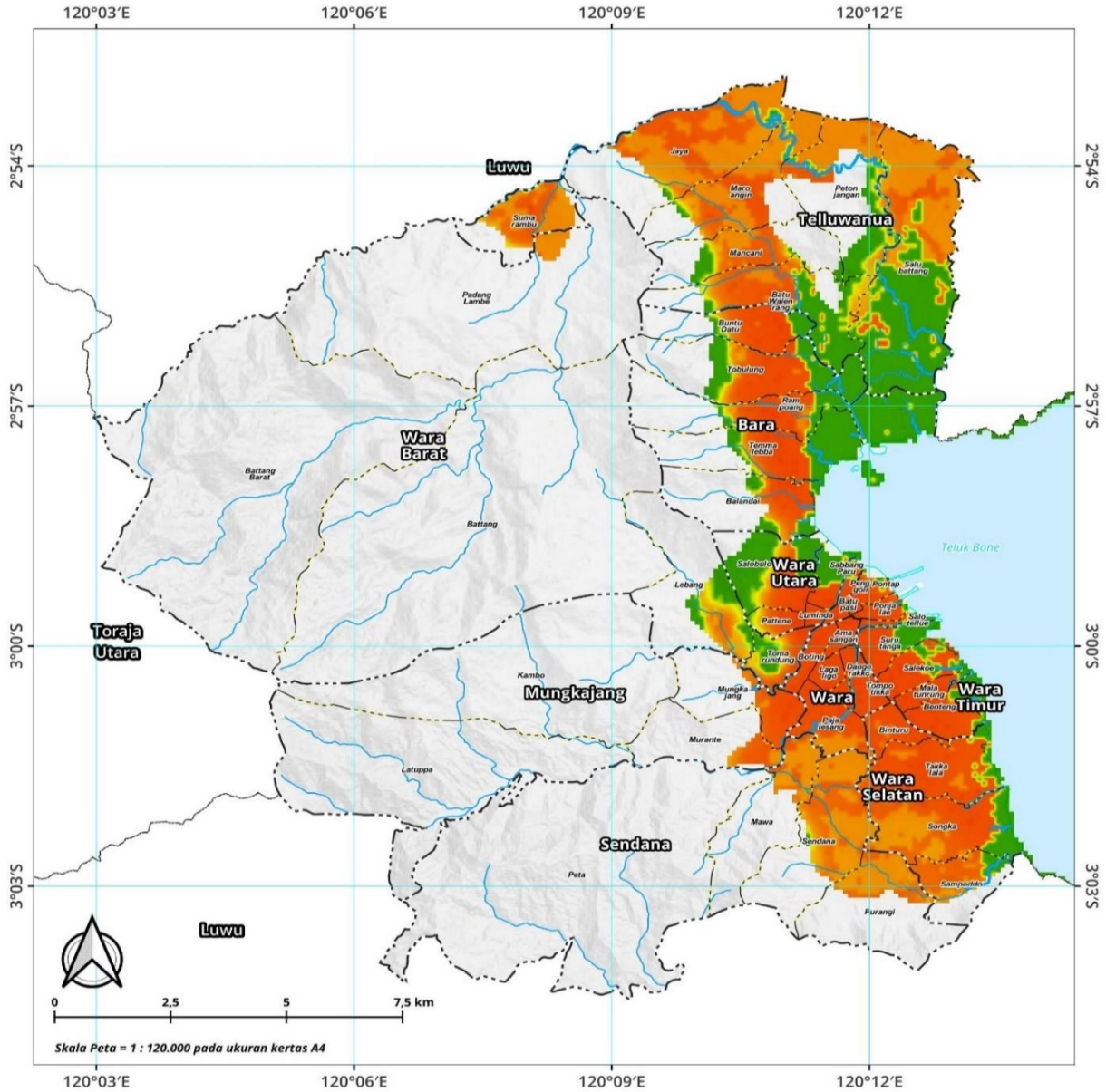
1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnbp.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 8 Kajian Resiko Bencana Banjir



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAJIAN RESIKO BENCANA CUACA EKSTRIM



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan Sungai
- - - Batas Administrasi Kecamatan

Indeks Risiko



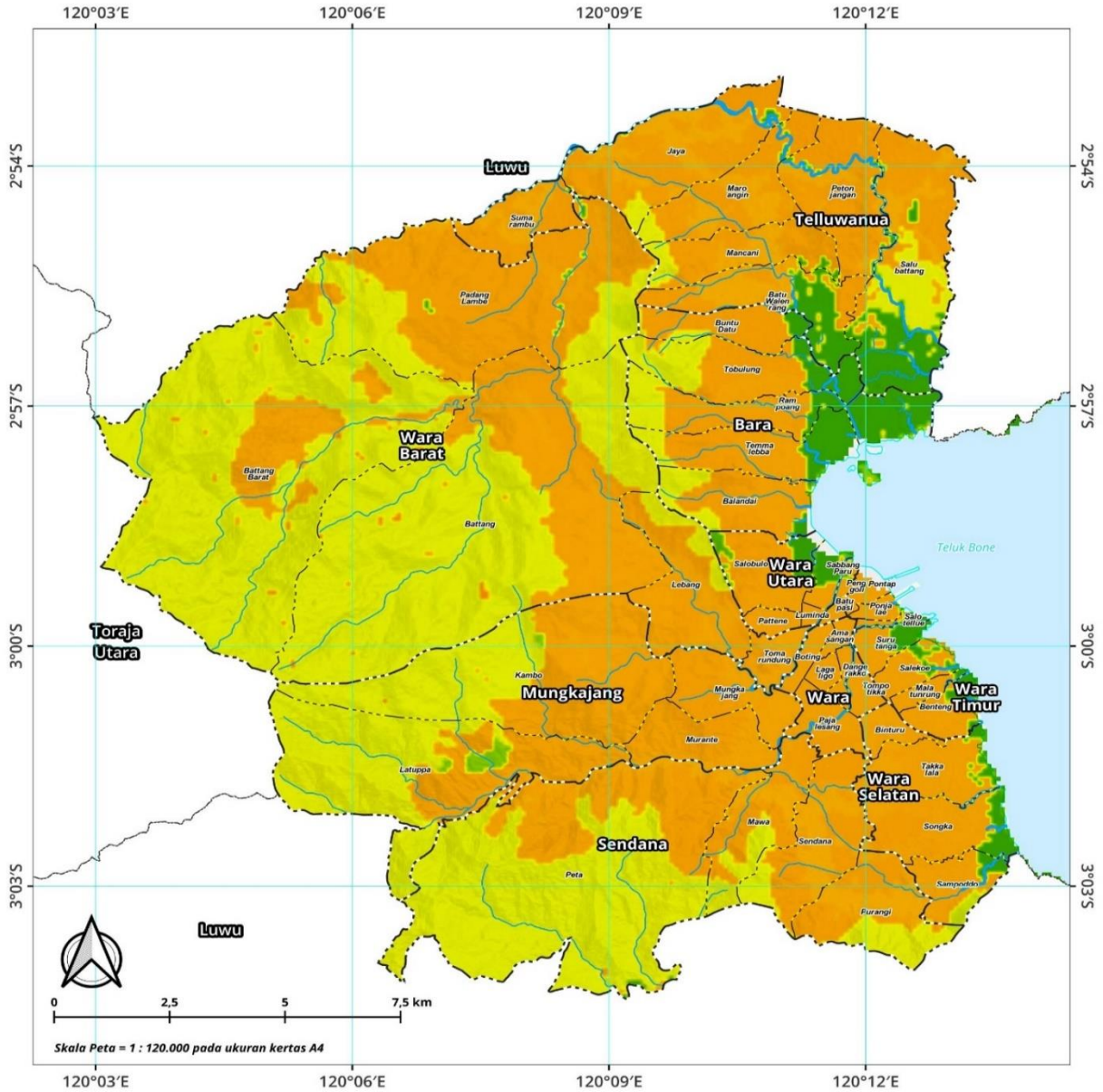
SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnpb.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 9 Kajian Resiko Bencana Cuaca Ekstrim



KAJIAN RESIKO BENCANA KEKERINGAN



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan

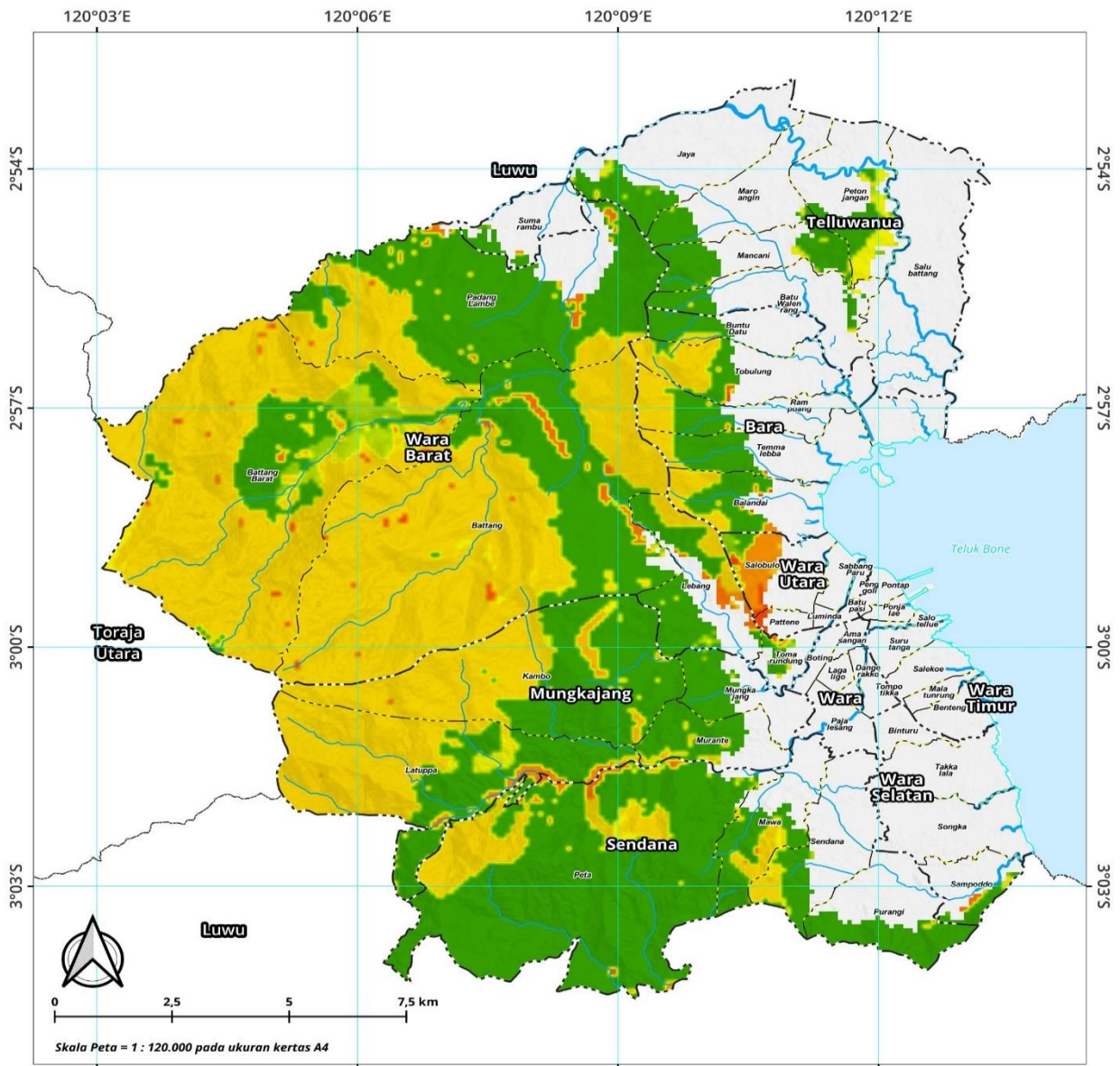
Sungai

INDEKS RESIKO BENCANA :

SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnpb.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 10 Kajian Resiko Bencana Kekeringan



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Indeks Risiko



SUMBER :

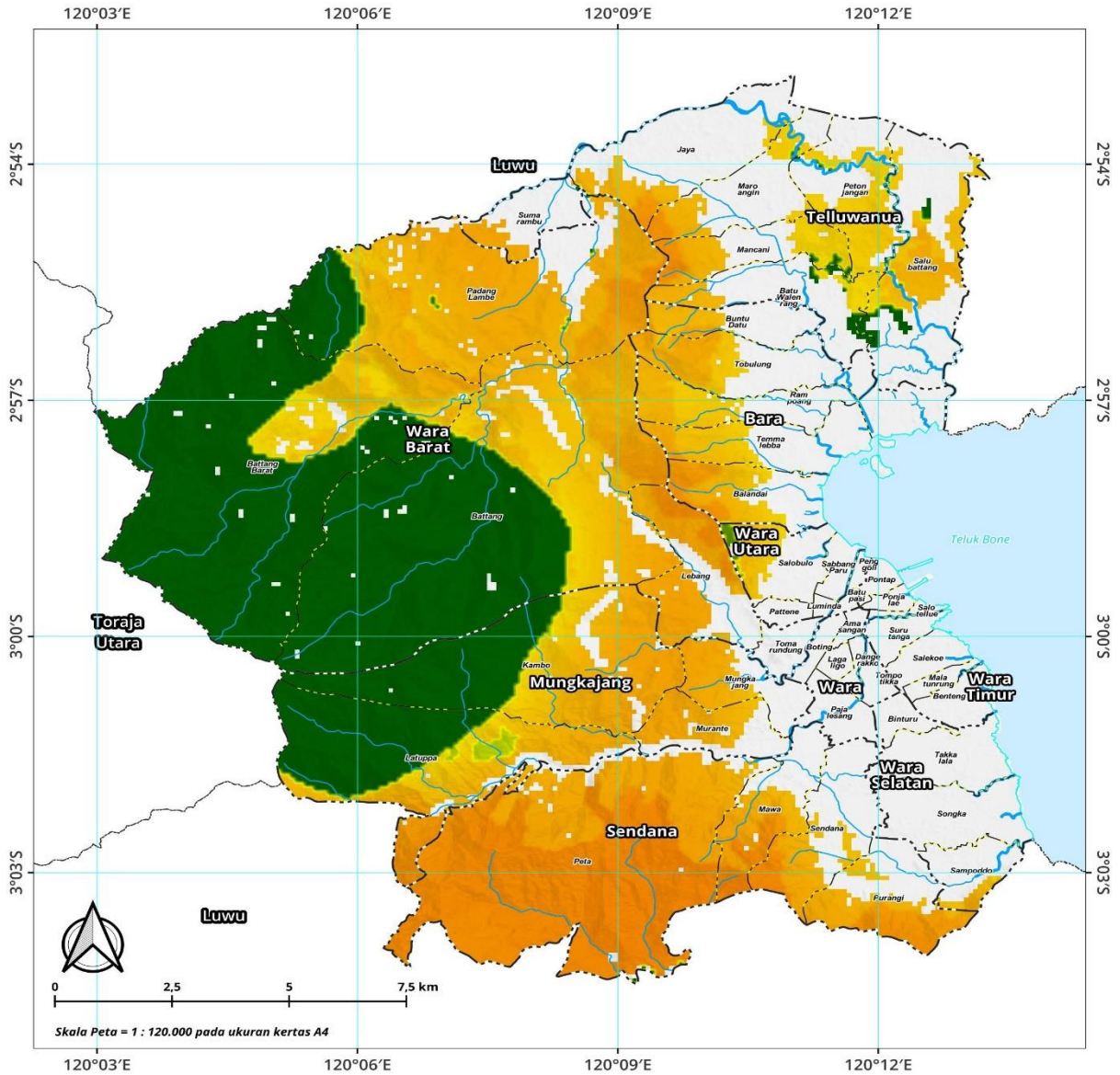
1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnbp.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 11 Kajian Resiko Bencana Tanah Longsor

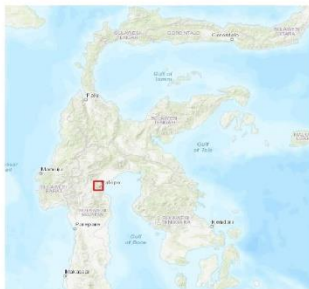


Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAJIAN RESIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN & LAHAN



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Indeks Risiko



SUMBER :

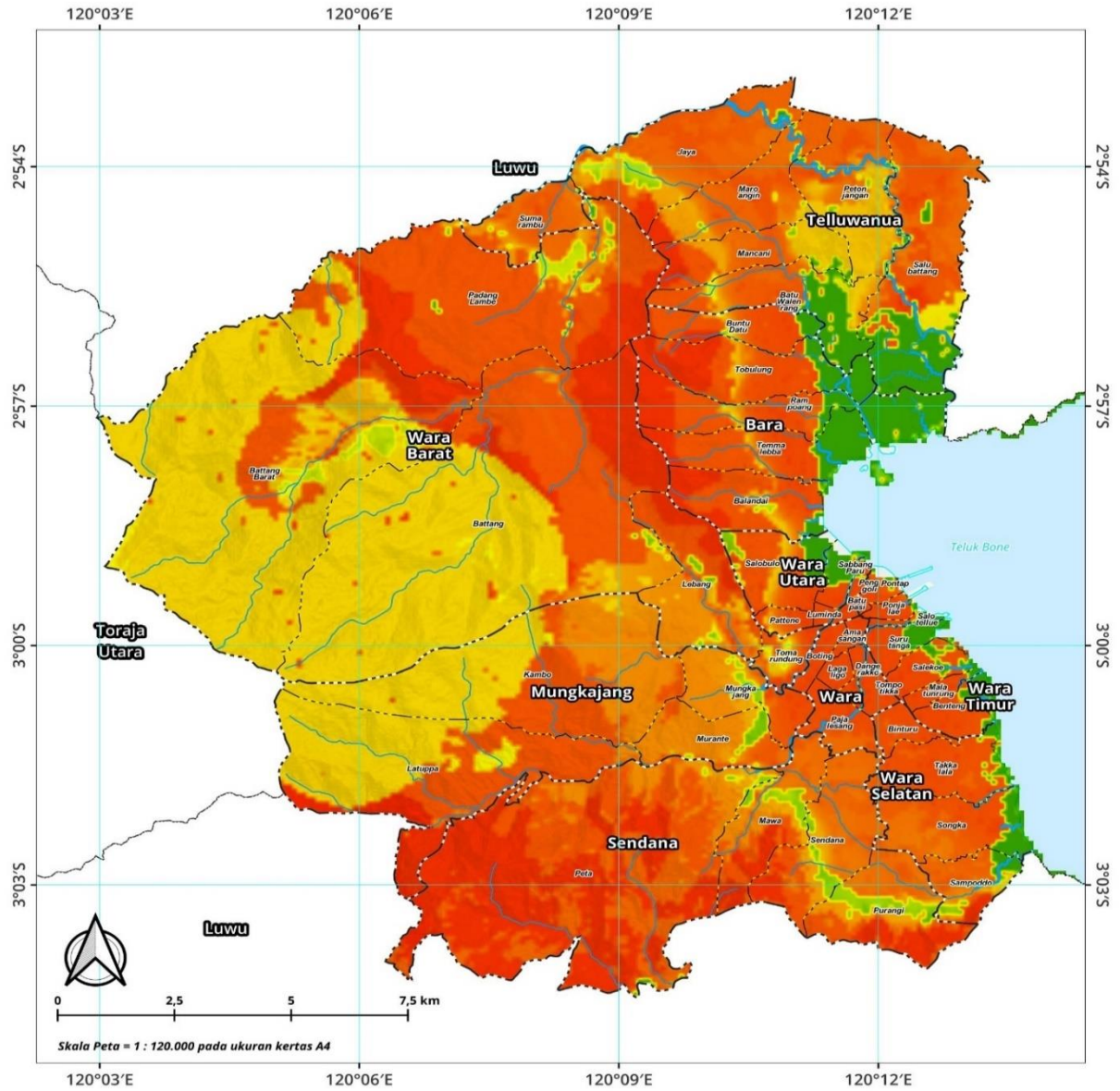
1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnppb.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 12 Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KAJIAN RESIKO BENCANA MULTI BAHAYA



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Indeks Risiko



SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018
4. Kajian Resiko Bencana - <https://gis.bnpp.go.id/server/rest/services/inarisk> - BNPB, Tahun 2021

Gambar 13 Resiko Bencana Multi Bencana

Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca. Isu lingkungan merupakan isu yang sering dilemparkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Isu lingkungan sengaja diciptakan sebagai alasan untuk menekan negara-negara dunia ketiga agar kepentingan ekonomi negara maju tidak tergeser oleh negara-negara berkembang yang mulai masuk ke dalam negara berpendapatan tinggi, khususnya negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Oleh karena itu negara Indonesia dituntut untuk memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Isu lingkungan juga telah masuk dalam perencanaan pembangunan nasional dengan memasukkan dalam indicator SDG's.

Dalam penyusunan RPJP pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsis dan kab/kota untuk membantu memberikan kontribusi dalam upaya melaksanakan penurunan emisi CO₂. Kota Palopo di tahun 2019-2023 mengalami kenaikan signifikan pencapaian penurunan emisi dari 10 menjadi 310 ton CO₂, tetapi setelah itu stagnan pada kondisi 310 tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian dibandingkan dengan wilayah lain kabupaten tetangga dan provinsi Kota Palopo berada nomor dua terbawah, masih sedikit lebih baik capaiannya daripada Kabupaten Toraja yang hanya 299 ton CO₂.

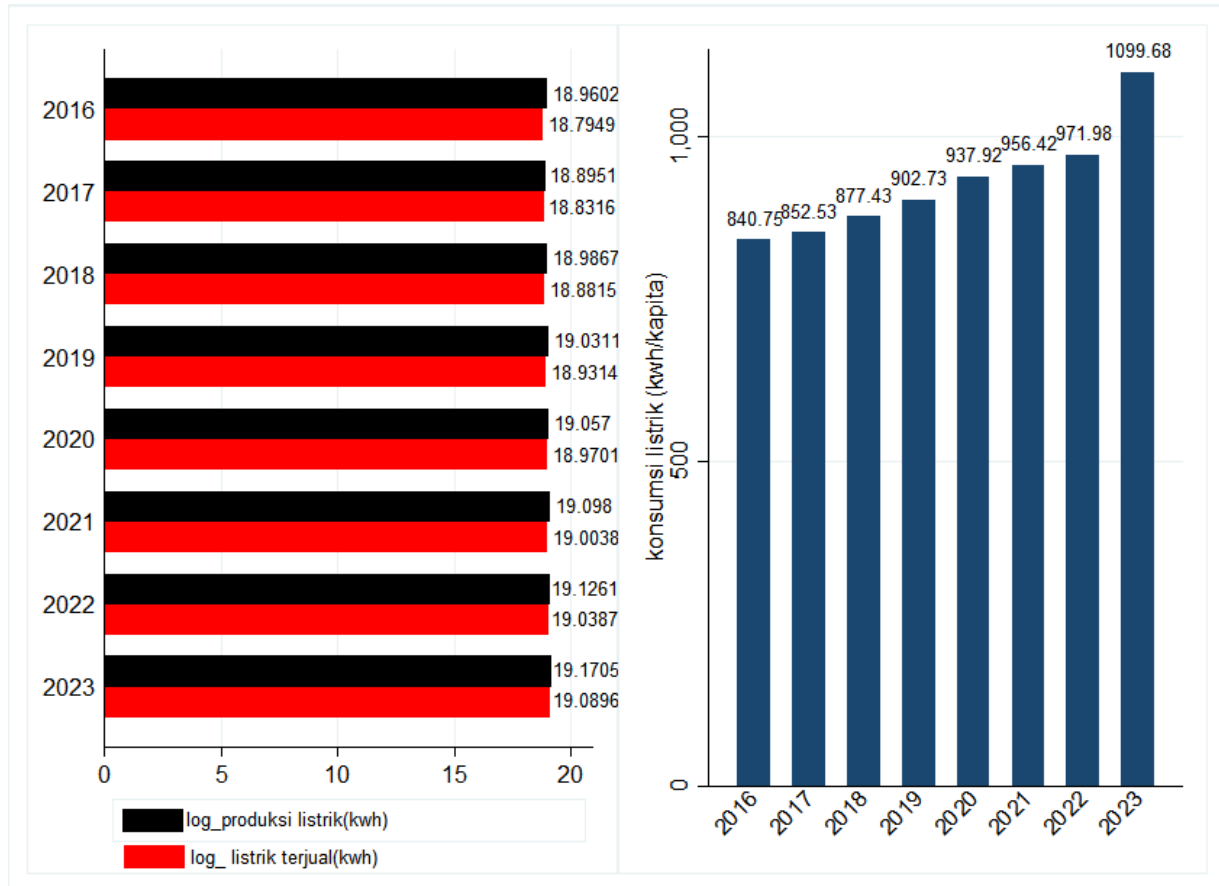
Tabel 2. 9 Pencapaian Penurunan Emisi GRK

Tahun	Palopo	Provinsi	Luwu	Toraja Utara	Toraja
2019	10	1,539,494	212,316	9,794	
2020	310	1,679,830	218,340	10,347	
2021	310	1,708,035	223,634	10,347	299
2022	310	2,018,106	223,634	10,347	299
2023	310	2,340,652	223,634	10,347	299

Source: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara> • Created with Datawrapper

Ketahanan Energi, Air, dan Pangan. Dalam proses pembangunan dibutuhkan sumber daya pendukung, selain sumber daya manusia juga dibutuhkan sumber daya alam sebagai bahan baku. Energi merupakan hasil proses pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang telah diubah untuk kebutuhan hidup manusia. Salah satu contoh energi yang telah diubah menjadi kebutuhan primer manusia saat ini adalah energi listrik. Energi ini menempati posisi sentral dalam pelaksanaan proses pembangunan. Perusahaan penyedia energi listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PT.PLN. Pelaksanaan distribusi listrik dilakukan oleh PLN melalui kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia. Kota Palopo masuk dalam area pelayanan PLN wilayah VII. Produksi dan kebutuhan listrik di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami peningkatan (lihat gambar dibawah).

Berdasarkan gambar bawah produksi listrik di Kota Palopo masih mengalami surplus dibandingkan dengan listrik yang terjual ke masyarakat atau daya yang terpakai. Kondisi ini terjadi karena sumber utama listrik Palopo dan daerah sekitarnya yang ada di Luwu raya berasal dari pembangkit listrik tenaga air yang terletak di beberapa danau yang ada di Luwu timur dan Poso Sulawesi tengah, dimana ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun tanpa ada kekeringan. Kemudian pada tahun 2023 Kota Palopo mengalami lonjakan konsumsi listrik menjadi 1099.68 Kwh/kapita, dibandingkan tahun sebelumnya karena kebutuhan listrik oleh masyarakat meningkat. Menurut sumber dari Kementerian ESDM kenaikan ini salah satunya dipicu oleh penggunaan pendingin ruangan yang meningkat disetiap rumah tangga, efek dari anomaly cuaca.



Gambar 14 Produksi (Kwh) dan Konsumsi Listrik (Kwh/Kapita)

Sumber : PLN Kota Palopo

Ketahanan Pangan. Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan pangan minimal yang harus dicukupi, oleh karena itu urusan ini masuk dalam urusan wajib. Kondisi ketahanan pangan Kota Palopo, indikator pertama adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU (prevalence of undernourishment). PoU adalah persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu dimana asupan energi harian dari makanan tidak mencukupi memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal. Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi 6,25%, kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan pangan yang memenuhi standar pola pangan harapan yang telah ditentukan.

Selanjutnya adalah Indeks ketahanan pangan yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, terdiri dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Semakin besar skor indeksnya menggambarkan wilayah yang paling tahan pangan, dan sebaliknya paling kecil menunjukkan wilayah rentan pangan. Kota Palopo masuk dalam wilayah tahan pangan, karena dari 2018-2023 skor mengalami peningkatan dari 70 menjadi 82.93. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) juga mengalami penurunan dari tahun 2018-2023 skor terakhir adalah 85,5. Terakhir adalah pengutan cadangan pangan, di tahun 2023 sebesar 4,60 ton atau mengalami tren penurunan sejak tahun 2018 dari 5,76 ton. Penurunan ketersediaan cadangan pangan karena penggunaan cadangan pangan Kota Palopo untuk kepentingan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu dan keluarga yang terkena bencana secara incidental sesuai pengajuan dari kelurahan atau kecamatan.

Tabel 2. 10 Indikator Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	2.11	2.52	2.93	3.34	4.16	6.25
Indeks Ketahanan Pangan	70	70.85	71.7	72.55	73.41	82.93
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.11	95,60	90,01	90	82,5	85,5
Penguatan Cadangan Pangan (ton)	5,76	5,76	5,76	4,92	4,60	4.60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan & Badan Pangan Nasional

Kapasitas Air Baku. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dibutuhkan bagi kebutuhan hidup manusia, tanpa adanya air makhluk hidup tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ketahanan air masuk dalam tujuan nomor 6 yaitu akses air bersih dan sanitasi, oleh karena itu pemerintah menetapkan indikator tersebut dalam dokumen perencanaan jangka Panjang. Merujuk data dari Dirjen Cipta Karya PUPR pemenuhan kebutuhan air minimum untuk kategori Kota sedang 110 liter/org per hari atau 0.11 M³/org per hari.

Kapasitas air baku di Kota Palopo bersumber dari beberapa DAS yang ada di Kota Palopo, kemudian Kota Palopo memiliki Karakteristik topografi yang berada dibawah lereng bukit membuat ketersediaan sumber air melimpah memberikan keuntungan untuk distribusi air kepada masyarakat /pelanggan, karena hanya menggunakan sistem gravitasi dan kemiringan tanah untuk penyalurannya dari hulu ke hilir. DAS Latuppa, Mangkaluku, Magandang, Bambalu dan Batupapan adalah sumber *intake* air baku bagi PDAM Kota Palopo, dengan luas area 6.843, 02 ha dan panjang aliran sungai 59.472 meter. Kapasitas output yang dapat dihasilkan oleh DAS tersebut dan dioperasikan oleh Perusahaan daerah melalui PAM Tirta Mangkuluku dan kebutuhan air terpakai masyarakat disajikan pada tabel berikut,

Tabel 2. 11 Kapasitas Air Baku

Tahun	Output Volume air PAM (M3/tahun)	Kebutuhan masyarakat air /tahun	Persentase Kebutuhan air masyarakat dari total supply
2016	7,726,763	6,847,474	89
2017	8,402,888	7,005,517	83
2018	9,161,016	7,154,849	78
2019	9,644,345	7,310,714	76
2020	9,629,512	7,313,368	76
2021	9,607,691	7,418,308	77
2022	10,026,671	7,558,333	75
*2023	10,327,421	7,030,030	68

Source: BPS; PAM Tirta Mangkuluku, diolah *Angka Proyeksi - Created with Datawrapper

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total *supply* ketersediaan air masih surplus untuk dikonsumsi oleh penduduk. Surplus air penyediaan air tersebut berdasarkan sumber dari PAM Tirta Mangkuluku, digunakan untuk konsumsi berdasarkan kategori sosial, non niaga, niaga dan industri, dan khusus. Kapasitas air baku tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 10.327.421 meter kubik / tahun dari



sebelumnya masih ada di 7.726.763 meter kubik / tahun, dengan rata-rata kebutuhan domestic rumah tangga sebesar 0,615 meter kubik/detik.

Akses rumah tangga terhadap air siap minum di Kota Palopo selama tahun 2018-2023 mendekati 100%. Kebutuhan air minum di Kota Palopo akan tercapai 100% dikarenakan sumber intake dan DAS pengelolaan PAM di Kota Palopo masih beroperasi secara maksimal selama kondisi vegetasi di lereng pegunungan Palopo yang berbatasan dengan Kab. Toraja Utara masih terjaga. Disisi lain yang menjadi kendala dalam akses penyediaan air minum di Kota Palopo adalah curah hujan yang tinggi berpengaruh terhadap kualitas air bersih yang terdistribusi tidak layak.Selanjutnya keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh PAM dalam mengadakan IPAM (Instalasi Pengolahan Air Minum)

Tabel 2. 12 Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum per-Pipa

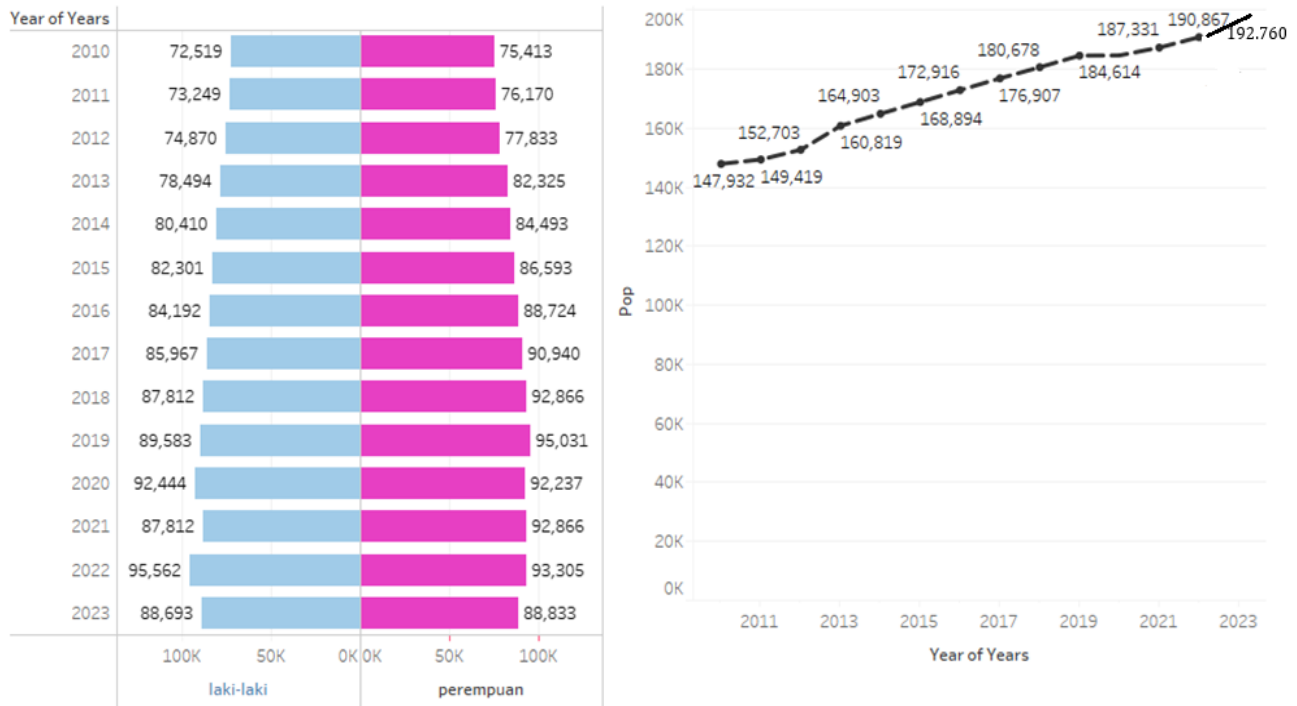
Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	171,359	176,521	175,646	177,105	180,145	191280
Jumlah Penduduk (jiwa)	180,678	184,614	184,681	187,331	190,867	192760
Persentase	95	96	95	95	94	99,23

Source: BPS & PDAM Tirta Mangkuluku, 2024 • Created with Datawrapper

2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi potensi besar apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah penduduk Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 2018 – 2023 mengalami kenaikan secara perlahan. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Palopo menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, dimana jumlah pada Tahun 2018 sebesar 180.678 jiwa meningkat menjadi 190.867 jiwa pada Tahun 2022, dan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 192.760 jiwa.

Bila dilihat dari sebarannya, penduduk Kota Palopo tersebar di sembilan kecamatan. Sebaran penduduk tersebut cenderung belum merata. Sebaran penduduk terbanyak berada di kecamatan Wara Timur sebesar 39.356 jiwa atau sekitar 20,62 persen penduduk Kota Palopo berada di wilayah ini. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Sendana sebanyak 7.635 jiwa atau hanya sekitar 4 persen penduduk Kota Palopo. Penyebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Wilayah yang menyediakan peluang dan lapangan pekerjaan tentu saja lebih padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah yang kondisinya berkebalikan. Selain itu, kemudahan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi kepadatan penduduk.



Gambar 15. Proporsi Penduduk Laki Perempuan dan Jumlah Penduduk

Sumber : BPS Kota Palopo

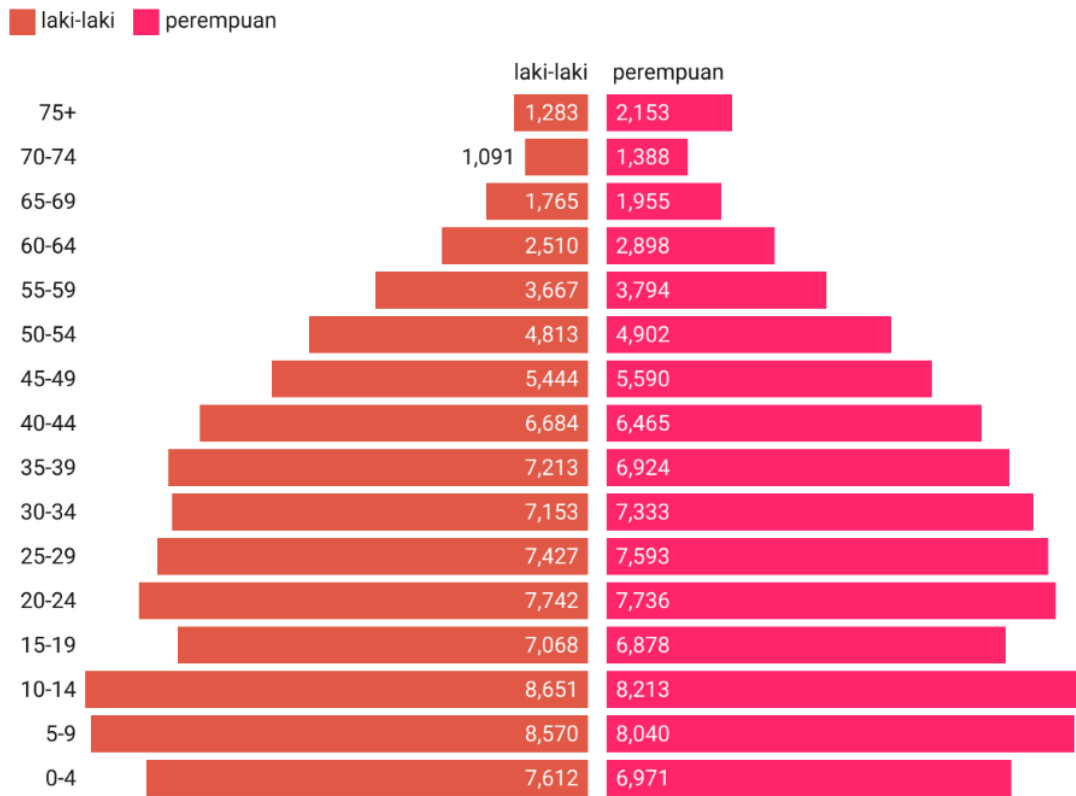
Kota Palopo dihuni sebanyak 192.760 jiwa penduduk pada tahun 2023 dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 717.22 jiwa per km². Kecamatan Wara Timur merupakan wilayah yang penduduknya paling padat. Secara rata-rata setiap 1 km² di Kecamatan Wara Timur dihuni oleh sebanyak 3049.67 jiwa penduduk. Kecamatan wara timur masuk dalam peruntukan tata ruang permukiman, yang berdekatan dengan kecamatan wara yang merupakan wilayah peruntukan jasa, perdagangan, dan pusat perkantoran. Kota Palopo sebagai daerah perkotaan dihadapkan pada masalah kepadatan penduduk. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut,

Tabel 2. 13 Kondisi Rata-Rata Demografi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2023	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Wara Selatan	10,66	18880	1.29	10.64	1771.11
2	Sendana	37,09	7600	2.3	4.28	204.88
3	Wara	11,49	29390	5.13	16.55	2557.79
4	Wara Timur	12,08	36840	4.76	20.75	3049.67
5	Mungkajang	53,8	9570	0.37	5.39	177.9
6	Wara Utara	10,58	19600	5.43	11.04	1852.46
7	Bara	23,35	28730	4.39	16.19	1230.54
8	Telluwanua	34,34	16080	1.59	9.06	468.29
9	Wara Barat	54,13	10830	5.75	6.1	200.15
PALOPO		247,52	177530	3.67	100	717.22

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Jumlah penduduk Kota Palopo Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 88.693 jiwa atau 49,96% dan 88.833 jiwa penduduk perempuan atau 50,04%. Rincian komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar bawah :



Source: BPS Kota Palopo, 2024 • Created with Datawrapper

Gambar 16 Rerata Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2010-2023

Dari piramida penduduk di atas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk tercatat sekitar 27,07% berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 5,43% pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 67,50% berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (*dependency ratio*) Kota Palopo Tahun 2023 sebesar 0,48 yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif Kota Palopo akan menanggung secara ekonomi sebesar 48 penduduk usia tidak produktif.

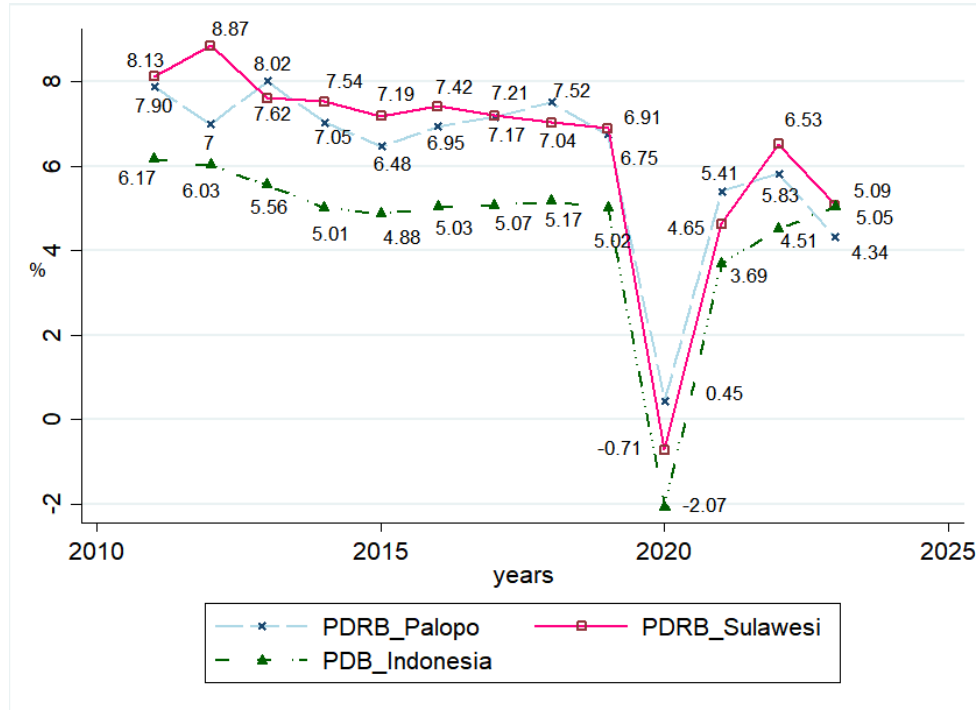
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan ekonomi suatu daerah dalam satu periode adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan *output* agregat yang dihasilkan dari nilai transaksi dan kegiatan ekonomi lapangan usaha maupun rumah tangga. Variabel yang dipakai dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB (produk domestik regional bruto) atas harga konstan tahun 2010 atas lapangan usaha dan PDRB atas harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2011 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif di angka 7-5%, sehingga dapat dikatakan dalam 20 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo masih berada pada angka \pm 7-6% terjadi peningkatan 2% dari tahun awal penyusunan dokumen ini. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat turun secara signifikan yaitu sebesar 0.45 persen karena Pandemi Covid-19, tetapi geliat

ekonomi kembali membaik pada Tahun 2021 yang mampu mengangkat kembali angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,41% dan 5,83%. Pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,34% karena disisi kontributor PDRB menurut pengeluaran mengalami penurunan di sisi pengeluaran pemerintah. Kondisi ini dipicu karena pada tahun 2023 APBD mengalami defisit yang berimbas terhadap belanja jasa dan barang pemerintah.



Gambar 17 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo, provinsi dan nasional Tahun 2011-2023 (%)
Sumber : BPS, 2024

Kontributor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palopo adalah lapangan usaha sektor perdagangan jasa 25.89%, pertanian perkebunan 14.93%, dan konstruksi 14.76%. Selama 5 tahun kebelakang nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 5.102,99 milyar di tahun 2018 menjadi Rp 6.369,71 milyar di tahun 2023.

Tabel 2. 14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha dan ADHB 2018-2023

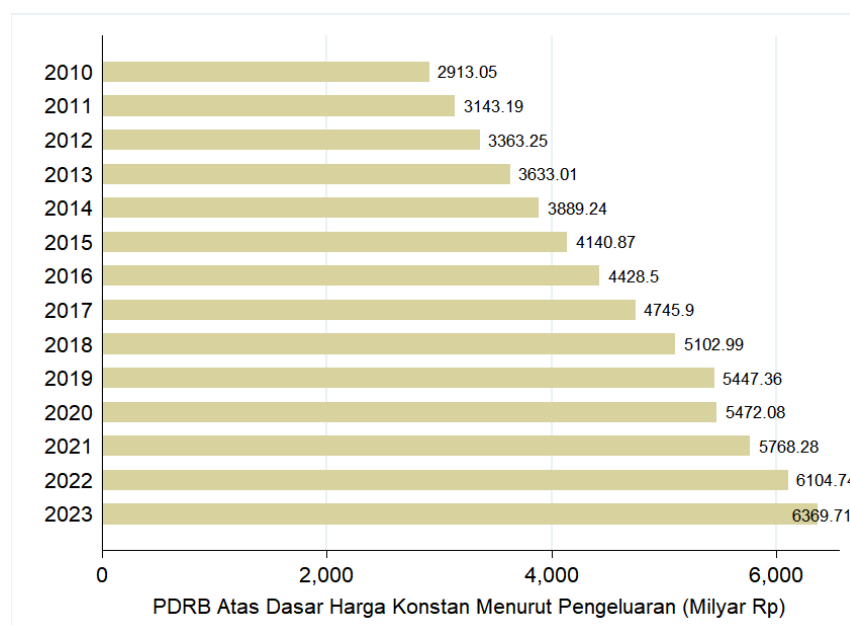
Bidang /Urusan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	830,61	871,74	884,51	923,60	956	951.24
Pertambangan dan Penggalian	6,71	6,82	6,76	7,16	8,06	8.55
Industri Pengolahan	129,18	139,20	130,85	134,79	147,42	155.98
Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	5,89	6,10	6,73	6,59	7.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,75	15,42	15,42	15,40	16,45	17.32
Konstruksi	734,33	779,14	774,84	816,75	894,51	940.22
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.291,73	1.421,61	1.426,60	1.491,21	1.568.52	1648.94
Transportasi dan Pergudangan	286,15	312,34	268,07	304,64	345,35	367.16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59,80	64,55	60,02	64,27	68,42	74.18
Informasi dan Komunikasi	303,02	335,22	376,60	387,66	409,51	435.33
Jasa Keuangan dan Asuransi	383,21	382,09	391,48	423,52	446,9	488.69
Real Estate	233,02	246,38	258,25	265,22	283,1	298.69



Bidang /Urusan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Perusahaan	4,61	5,07	4,97	5,14	5,68	6,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,09	380,14	377,91	399,87	400,15	392,60
Jasa Pendidikan	247,46	262,10	26,576	272,25	270,4	277,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,06	145,79	150,56	172,78	283,83	196,16
Jasa Lainnya	67,61	73,88	73,37	77,63	93,85	103,87
Total PDRB (ADHK)	5.102,99	5.447,36	5.472,08	5.768,28	6.104,74	6.369,71
Total PDRB (ADHB)	7.285,14	7.942,48	8.025,29	8.714,31	9.767,89	10.499,83

Sumber : BPS Kota Palopo

Selain dari kontribusi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan pemerintah yang diukur melalui pendekatan pengeluaran PDRB. PDRB atas Pengeluaran merupakan total pengeluaran dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPR, konsumsi akhir pemerintah, investasi fisik serta ekspor neto.



Gambar 18 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023 (Milyar Rp)

Sumber : BPS Kota Palopo

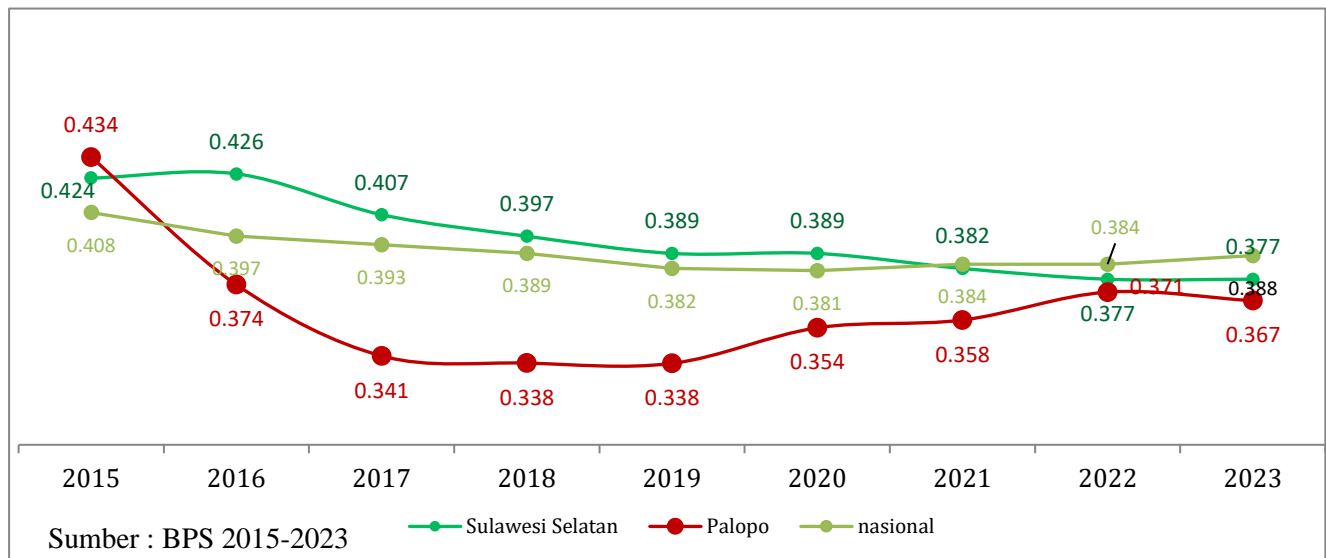
Selama tahun 2010-2023 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran, mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2010 PDRB yang masih berada pada angka 2.913,05 milyar rupiah selama 13 tahun meningkat menjadi 6.369,71 milyar rupiah. Kontributor utama yang mendorong peningkatan PDRB menurut pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan PMTB (pembentukan modal tetap bruto) lihat pada tabel dibawah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama di Kota Palopo yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi, urutan kedua adalah PMTB, yang merupakan belanja barang modal memiliki masa pakai lebih dari satu tahun atau aktivitas dari kegiatan investasi dan bukan barang konsumsi.

Tabel 2. 15 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2010-2023

Tahun	Konsumsi RT	Konsumsi LNPRT	Konsumsi Pemerintah	PMTB	Perubahan Inventori	Net Ekspor Barang/Jasa
2010	1698.25	38.36	444.25	1068.94	25.33	-362.08
2011	1811.12	40.81	473.14	1212.89	14.75	-409.53
2012	1928.69	43.68	486.64	1310.62	81.98	-488.35
2013	2064.75	48.16	505.01	1423.71	-36.12	-372.50
2014	2204.66	53.54	522.58	1509.58	21.24	-422.37
2015	2347.74	54.75	560.31	1603.55	24.58	-450.06
2016	2470.38	56.31	551.16	1729.89	20.90	-400.14
2017	2617.15	58.95	572.51	1834.83	2.13	-339.67
2018	2781.53	66.17	658.51	1923.48	6.44	-333.14
2019	2958.86	80.94	685.45	2046.07	2.59	-326.55
2020	2982.13	75.24	666.49	2038.64	2.25	-292.67
2021	3075.00	74.15	704.23	2142.20	2.32	-229.62
2022	3266.35	81.45	711.66	2317.35	3.32	-275.40
2023	3478.46	89.95	722.08	2443.65	2.94	-367.38

Sumber : BPS Kota Palopo

Gini rasio indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Nilai gini rasio $0 < x < 1$, atau dalam rentang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Semakin besar nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya, sedangkan semakin kecil atau mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Indikator gini rasio menunjukkan semakin rendah / mendekati 0 adalah semakin baik.



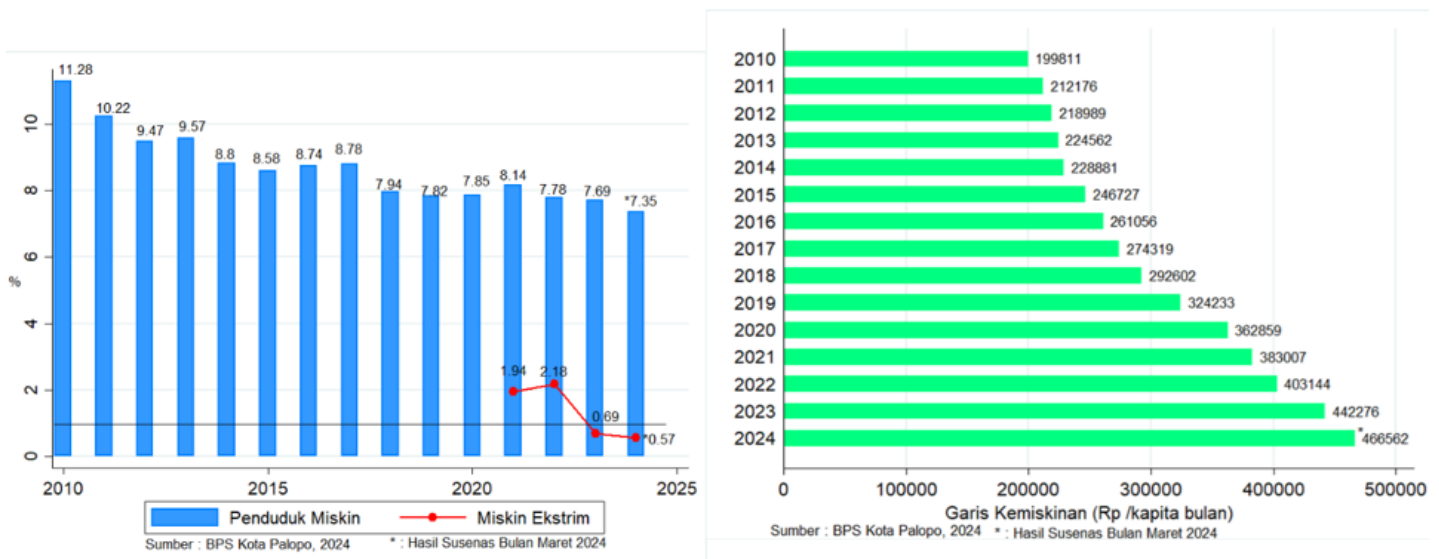
Gambar 19 Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2023

Selama periode 2015-2018, gini rasio Kota Palopo cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 gini ratio sebesar 0,434 dan menjadi sebesar 0,338 pada tahun 2019. Namun, pada saat terjadinya Covid-19 di tahun 2020, gini ratio naik menjadi 0,354 poin dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 0,371

point yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo semakin besar pasca terjadinya COVID-19. Ketimpangan pendapatan ini dibuktikan dengan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat pasca COVID-19. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan nasional, gini rasio Kota Palopo cenderung lebih rendah. Pada tahun 2023, Kota Palopo mengalami penurunan gini rasio menjadi 0,367 point. Hal yang perlu diwaspadai adalah besaran gini rasio Kota Palopo pada tahun 2023 masih belum bisa kembali seperti sebelum covid-19 yang pada tahun 2019 di angka 0.338 poin. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal yang tidak mungkin laju peningkatan kemiskinan ekstrem Kota Palopo sulit untuk ditekan.

Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur melalui pengeluaran konsumsinya. Seseorang individu dikatakan masuk dalam status miskin apabila pengeluaran konsumsi per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kebutuhan minimal yang dikeluarkan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) dan non pangan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan oleh BPS dan telah memperhitungkan inflasi dan perubahan indeks harga konsumen. Persentase kemiskinan Kota Palopo mengalami trend penurunan selama 12 tahun terakhir, tetapi disisi lain garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar.5).

Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi Rp.442.276, dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 403.144,-. Tetapi disisi lain persentase penduduk miskin, dan miskin ekstrim tahun 2023 turun. Proses penurunan persentase penduduk miskin membutuhkan proses yang panjang dimulai dari tahun 2010 sebesar 11,28% menjadi 7,69% di tahun 2023 selama 12 tahun, oleh karena itu proses penurunan kemiskinan adalah proses berkelanjutan yang akan diteruskan oleh kepala daerah melalui RPJMD tahun selama 5 tahun dan RPJP selama 20 tahun kedepan. Kemudian untuk miskin ekstrim tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,69% atau mendekati seperti yang ditargetkan untuk tahun 2024 sebesar 0% capaian miskin ekstrim.



Gambar 20 Persentase Penduduk Miskin, Miskin Ekstrim, dan Garis Kemiskinan Kota Palopo

Kemiskinan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga untuk menghapuskan adalah hal yang mustahil, untuk mengurangi ya, tetapi untuk menghapuskan 0% tidak. Walaupun demikian pada tahun 2023 Kota Palopo masuk dalam urutan 9 terendah, persentase penduduk miskin dari 24 kab/kota provinsi

Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan proses penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah ditargetkan Presiden menjadi 0%. Pada kasus ini memang bisa dihapuskan menjadi 0% atau dengan kata lain dihilangkan, karena miskin ekstrim adalah kondisi miskin kronis yang berada di level terbawah. Miskin ekstrim merupakan bagian dari kondisi miskin, apabila secara keseluruhan penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim di Kota Palopo naik status menjadi kategori miskin maka Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim 0%.

Konsep perhitungan penduduk miskin ekstrim hampir sama dengan penduduk miskin hanya batas pengeluaran konsumsi per kapitanya yang membedakan. Penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan tidak lebih dari USD \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau sesuai dengan perhitungan BPS tahun 2023 sebesar Rp.304.626,- per kapita per bulan. Hasil perbandingan antarkota di Sulawesi Selatan Kota Palopo masuk kategori paling rendah daripada Pare-Pare, dan Makassar. Pengentasan kemiskinan adalah pekejaan rumah yang harus diselesaikan setiap periode Wali Kota yang menjabat. Salah satu caranya adalah melalui intervensi fiskal melalui program kegiatan perangkat daerah. Kemudian perlu dicatat bahwa dalam proses penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait diluar pemerintah.

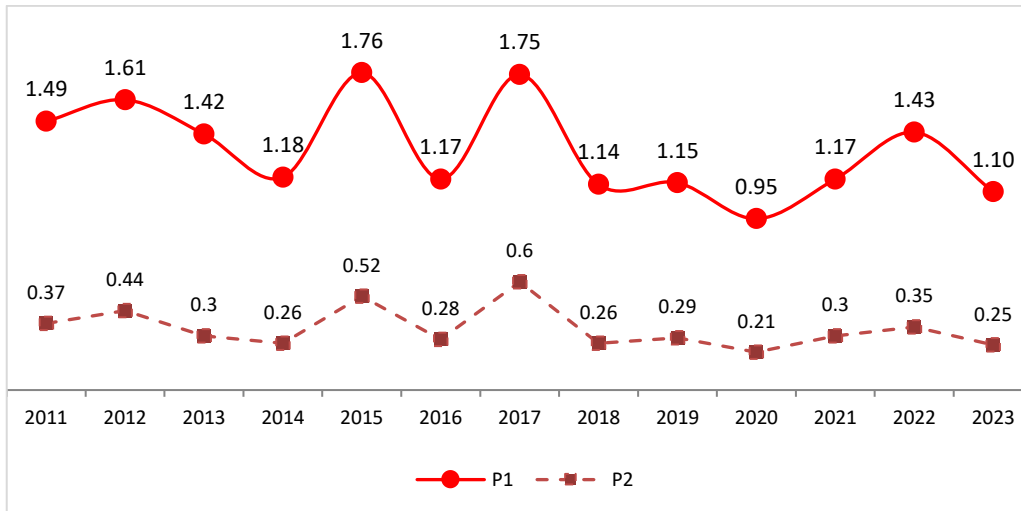
Tabel 2. 16 Perbandingan Miskin dan Miskin Ekstrim antarkota Sulawesi Selatan

Tingkat Kemiskinan (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	4.41	4.28	4.54	4.82	4.58	5.07
Pare-Pare	5.59	5.26	5.44	5.4	5.41	5.34
Palopo	7.94	7.82	7.85	8.14	7.78	7.69
Miskin Ekstrim (%)						
Makassar				0.72	0.92	0.59
Pare-Pare				0.47	0.33	0.38
Palopo				1.94	2.18	0.64

Sumber : BPS & P3KE Kemenko PMK

Perspektif kemiskinan tidak hanya pada sudut pandang jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Tetapi diperlukan dimensi lain seperti tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan agar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dapat diketahui. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, tetapi juga bagaimana memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020 Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo sebesar 0,95 dan terus meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, P1 Kota Palopo sebesar 1,10 atau turun 0,33 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Palopo semakin dekat dari garis kemiskinan atau semakin membaik dalam kemiskinan daripada tahun 2022.



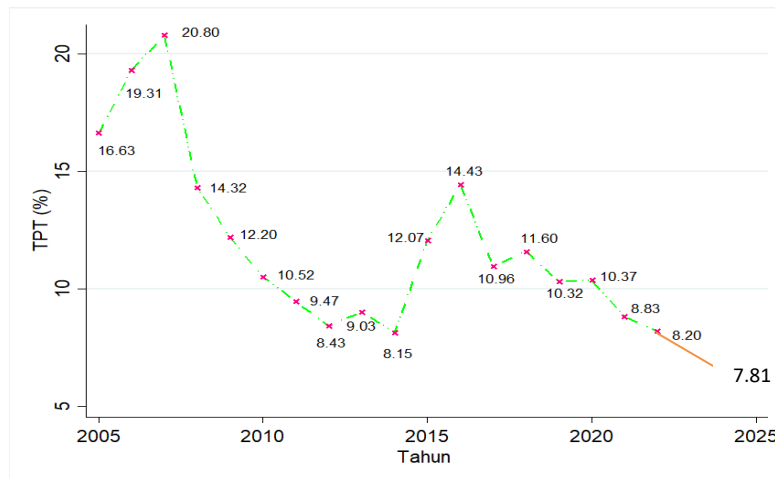
Gambar 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber : BPS Kota Palopo

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama halnya dengan kondisi P1, indeks keparahan kemiskinan Kota Palopo selama 2020 hingga 2022 cenderung mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2020, Indeks P2 sebesar 0,21 dan meningkat hingga menjadi 0,35 pada tahun 2022 kemudian turun menjadi 0,25. Artinya, pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Palopo semakin mengecil ketimpangannya dibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi kemiskinan di Kota Palopo perlu penanganan yang lebih lanjut. Meskipun persentase penduduk miskin relatif turun pada tahun 2022, namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, perlu upaya penanggulangan dari pemerintah agar penduduk miskin tersebut dapat dibebaskan dari kondisi miskin yang tidak terlalu dalam dan memberikan penanganan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahannya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Kota Palopo dalam kurun waktu 17 tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2005 sampai dengan 2022 mengalami penurunan sebanyak 8,43%, dari 16,83% di tahun 2005 menjadi 8,2% tahun 2022. Perbandingan TPT antara provinsi dan nasional Kota Palopo masih lebih tinggi, TPT provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 sebesar 4,51% sedangkan nasional 5,86%. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pandemi covid-19 yang memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kota Palopo. Tahun 2021 sektor perekonomian berangsur pulih. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo berkurang ke angka 8,83% dan kembali berkurang menjadi 7,81% di tahun 2023. Pengangguran di Kota Palopo lebih tinggi daripada provinsi dan nasional, dapat dijelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Kota Palopo disebabkan adanya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi karena jam kerja secara kumulatif dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pengangguran ini biasanya terjadi di Kota yang struktur lapangan usahanya adalah jasa/ perdagangan dan sektor pertanian. Sejalan dengan data BPS Kota Palopo (2022), bahwa lapangan pekerjaan utama yang menyerap angkatan kerja adalah sektor jasa dengan 63.629 tenaga kerja.



Gambar 22 TPT Kota Palopo Tahun 2005-2023
Sumber : BPS Kota Palopo

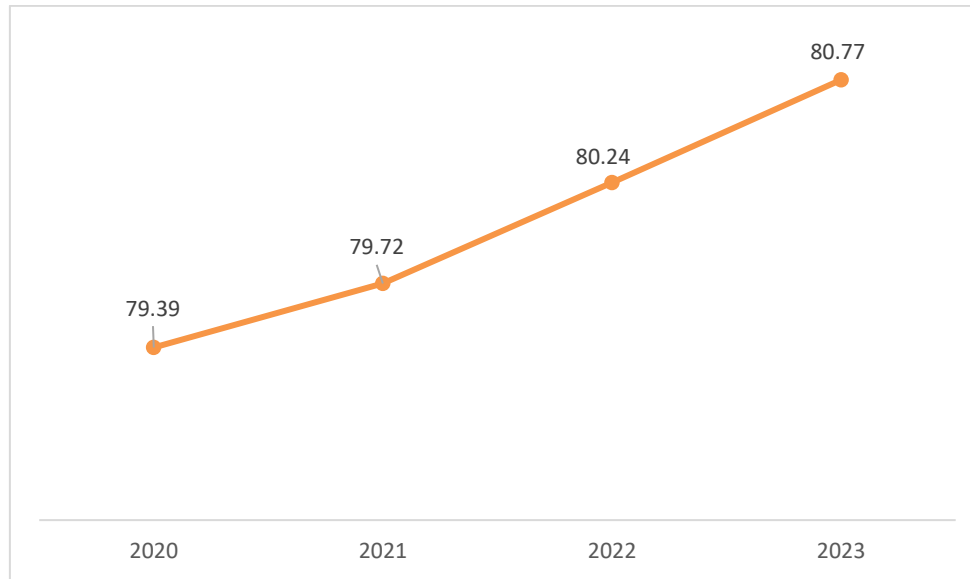
Perbandingan kondisi pengangguran dengan wilayah kota lainnya, Kota Palopo masih lebih baik capaian daripada Kota Makassar. Kota Pare-pare telah berhasil menurunkan angka pengangguran dari 6 menjadi 5%, sedangkan untuk provinsi Sulawesi selatan secara kumulatif telah berhasil mengurangi angka pengangguran dari 5 menjadi 4% di tahun 2023. Walaupun demikian pengangguran merupakan masalah nasional tidak hanya daerah saja, oleh karena itu membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan mendatangkan investasi usaha sebanyak mungkin adalah solusi terbaik baik jangka panjang dan pendek.

Tabel 2. 17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kota dan Provinsi (%)

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pare-Pare	6.81	6.17	7.14	6.72	5.60	5.86
Makasar	12.19	9.83	15.92	13.18	11.82	10.60
Provinsi	5.34	4.62	6.31	5.72	4.51	4.33

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dalam membangun kualitas manusianya yang diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan dilihat dari komponen yang membentuk indikator tersebut yaitu angka harapan hidup (AHH), indikator pendidikan dari komponen harapan lama sekolah (HLS) dan RLS (rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi dari paritas daya beli. Nilai IPM Kota Palopo selama tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan dari angka 79,39 menjadi 80,77 pada tahun 2023.

**Gambar 23 IPM Kota Palopo 2020-2023**

Sumber : BPS Kota Palopo

Tabel 2. 18 IPM Menurut Dimensi dan Indikator Penyusunan Tahun 2020 – 2023

Dimensi	Indikator Penyusunan IPM	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kesehatan	Indeks Kesehatan	82.35	82.42	82.78	83.08
Pendidikan	Indeks pendidikan	77.76	78.38	78.91	79.10
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	12,995	13,117	13,404	13,892
	Indeks pengeluaran	78.14	78.43	79.09	80.18

Sumber : BPS Kota Palopo

Capaian dimensi dan indikator penyusunan IPM Kota Palopo dalam waktu 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel di atas. Hasil capaian selama tahun 2022 indeks Kesehatan 83,08 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks Pendidikan 79,10 di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kemudian standar hidup layak mengalami peningkatan juga menjadi 80,18. Ketiga indikator dimensi penyusunan IPM mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap nilai kumulatif yang dikonversikan menjadi IPM.

Dalam melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada pelakunya (manusia atau masyarakatnya), yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan IPM di suatu wilayah.

Usia Harapan Hidup. Pembangunan sektor kesehatan membawa dampak terhadap meningkatnya kualitas kesehatan warga Kota Palopo. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihatnya adalah usia harapan hidup. Berdasarkan data dari BPS, UHH Kota Palopo tahun 2023 sebesar 71,39 tahun. Capaian tersebut lebih baik dibanding Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Pare-pare dan Makassar. Rendahnya capaian dibandingkan dengan Kota Pare-pare dan Makassar terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan bagi usia-usia lansia secara langsung di wilayah. Hal ini kondisi geografis wilayah Kota Palopo dengan 2 Kota tersebut berbeda.



Perbedaan yang paling mendasar adalah Kota Palopo memiliki wilayah lereng gunung yang memiliki akses sulit berbatasan dengan wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2. 19 Perbandingan UHH antar Wilayah Tahun 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	70.49	70.79	70.88	70.92	71.18	71.39
Pare-Pare	70.88	71.18	71.27	71.31	71.57	71.78
Makassar	71.7	72	72.09	72.13	72.4	72.6
Sulsel	70.08	70.43	70.57	70.66	70.97	71.22

Created with Datawrapper

Sumber : BPS, 2024

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut adalah Harapan Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2018-2023 tersaji pada tabel dibawah.

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palopo Tahun 2023 menunjukkan capaian 15,12 yang masih dibawah jika dibandingkan dengan capaian HLS Kota Makassar. Angka HLS Kota Palopo yang masih berkisar di 15 tahun menunjukkan bahwa bila dihitung mulai dari Pendidikan usia dini maka rata-rata masyarakat Kota Palopo menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Tetapi bila terhitung mulai dari usia 0 tahun maka rata-rata masyarakat Kota Palopo tingkat pendidikannya hanya sampai SMA.

Tabel 2. 20 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah antar Wilayah Tahun 2018-2023

Wilayah	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	15.06	15.07	15.08	15,09	15,10	15,12
Pare-Pare	14.47	14.49	14.50	14,52	14,52	14.58
Makassar	15.55	15.56	15.57	15,76	15,59	15.64
Sulawesi Selatan	13.34	13.36	13.45	13,49	13,53	13.69
Nasional	12.91	12.95	12,98	13,03	13,10	13.11

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2024

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2023 berada pada posisi 11,13 tahun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Palopo ini jauh diatas angka RLS Nasional pada tahun 2022 yang berada pada angka 8.69 tahun dan RLS Sulawesi Selatan 2022 yang berada pada angka 8.63 tahun. Perbandingan capaian RLS Kota Palopo dengan beberapa daerah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah. Berdasarkan hasil publikasi data BPS Sulawesi Selatan, RLS Kota Palopo lebih baik dibandingkan capaian nasional, provinsi, dan Pare-Pare. Kota Makassar lebih unggul untuk RLS karena fasilitas Pendidikan lebih banyak dan variative dibandingkan 2 kota lainnya.

Tabel 2. 21 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah antar Wilayah Tahun 2018-2023

Wilayah	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo	10.51	10.75	10.76	10,94	11,09	11,13
Pare-Pare	10.29	10.30	10.45	10,56	10,66	10.87
Makassar	11.09	11.20	11.21	11,27	11,55	11.71
Sulawesi Selatan	8.02	8.26	8.38	8,54	8,63	8.78
Nasional	8.17	8.34	8.48	8,60	8,69	8.87

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2024

2.2.2. KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait perlindungan tenaga kerja khususnya penerapan K3. K3 merupakan akronim dari keselamatan dan Kesehatan kerja. Pengertian K3 adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan resiko penyakit yang ditimbulkan karena melaksanakan aktivitas pekerjaan tersebut. Penerapan K3 yang dilakukan oleh pelaku usaha berpengaruh terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial. Jaminan sosial ini memberikan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kecelakaan kerja, resiko penyakit maupun PHK sepihak dengan pemberian uang pesangon sesuai dengan waktu kepesertaan yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha.

Tabel 2. 22 Pekerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	11.438	13.765	25.921	34.050	30.182	36.553
Jumlah Buruh/Pekerja	29.337	25.105	31.210	46.390	77.465	87.471
Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek (%)	39	54.82	83,05	73,40	38.96	41.79

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo dan BPJS Ketenagakerjaan Palopo

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren yang fluktuatif, sempat terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 54,82% kemudian naik turun sampai pada angka 35,32% tahun 2022. Tahun 2023 kepesertaan jamsostek mengalami peningkatan menjadi 41,79%. Disisi lain jumlah pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi *alarm* pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjajanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja. Kedepannya perkembangan usaha baik perdagangan jasa, konstruksi, dan industry rumah tangga di Kota Palopo akan meningkat, sehingga pekerja yang bekerja di sektor formal dan informal pada bidang tersebut perlu difasilitasi jaring pengaman sosial melalui asuransi ketenagakerjaan.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (BPJS). Proporsi BPJS kesehatan Kota Palopo sudah mendekati paripurna atau mendekati 100%, walaupun demikian kondisi sebenarnya masih belum sempurna. Keadaan BPJS Kesehatan di Kota Palopo memiliki proporsi angka yang tinggi dikarenakan sumber pembayaran premi terbanyak berasal dari PBI pemerintah pusat dan daerah. Disisi lain premi yang berasal dari iuran mandiri masih sangat rendah sekali, sehingga perlu di sosialisasikan kembali agar adanya *cost sharing* antara masyarakat kaya dan miskin.

Tabel 2. 23 Proporsi Kepesertaan Jaminan Kesehatan

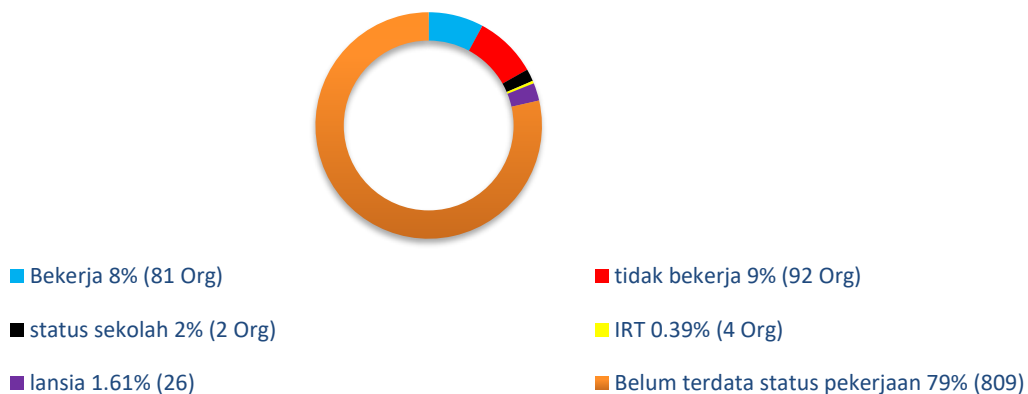
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan	100	82.16	80.14	90.39	93.14	96.98

Sumber: BPJS Kota Palopo

Penyandang Disabilitas Bekerja. Penyandang disabilitas masih menjadi kaum marjinal di masyarakat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dalam melakukan interaksi dengan lingkungan mengalami hambatan, serta kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas di Kota Palopo termasuk di seluruh Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks untuk bertahan hidup dilingkungan masyarakat saat ini, sehingga dapat disebut kaum minoritas / marjinal yang perlu dibantu untuk berdaya.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas ini karena keterbatasan fungsi panca indera yang dimiliki penyandang disabilitas sehingga tidak dapat diakomodir oleh lingkungan sekitar. Dampak dari hal tersebut adalah minimnya peluang dalam partisipasi kegiatan ekonomi/memiliki mata pencaharian yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan mencoba keluar dari ketergantungan dari pihak lain. Dalam undang-undang disabilitas bab IV pasal 27 “pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”. Maka dari itu pemerintah Kota Palopo perlu melakukan pendataan terhadap kondisi disabilitas yang ada di Kota Palopo, apakah sudah ada yang berdaya dengan terserap di lapangan kerja atau masih banyak yang belum mandiri secara ekonomi. Total jumlah disabilitas yang terdata di Kota Palopo sampai dengan tahun 2023 adalah 1030 orang dengan kriteria disabilitas fisik/sensorik 97,90% (792 orang) dan mental 2,10% (238 orang).

Dari total disabilitas yang terdata 79% disabilitas Kota Palopo, belum terdata atau dapat dikatakan tidak diketahui kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan sisanya terbagi aktivitasnya mulai dari bekerja sampai dengan yang menjadi ibu rumah tangga (IRT). Ketimpangan disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja masih banyak yang tidak bekerja sebesar 9% sedang yang telah mandiri bekerja 8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa disabilitas sudah mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi dalam dunia kerja, walaupun demikian masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan perangkat daerah pengampu, yaitu melakukan pendataan terhadap 809 disabilitas yang belum terdata status pekerjaannya.



Gambar 24 Distribusi Aktivitas Kegiatan Penyandang Disabilitas Kota Palopo

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Kesehatan Ibu dan Anak. Upaya proaktif dalam mendukung kesehatan ibu dan anak tidak hanya bergantung dari urusan individu setiap keluarga, melainkan juga dukungan preventif melalui penyediaan fasilitas Kesehatan yang bermanfaat bagi setiap masyarakat. Pemerintah Kota Palopo memiliki fasilitas eksisting Kesehatan baik tingkat layanan dasar level kelurahan kecamatan, sampai dengan layanan rujukan di tingkat rumah sakit umum daerah. Fasilitas layanan dasar yang mendukung upaya preventif kematian ibu hamil saat melahirkan adalah pertolongan pertama oleh tenaga Kesehatan di tingkat layanan dasar kelurahan dan kecamatan. Berikut ini adalah data tersaji persentase ibu persalinan di fasilitas kesehatan yang mendapatkan pelayanan fasilitas bersalin sesuai dengan standar tahun 2013-2023.

Tabel 2. 24 Persentase Persalinan di Faskes Pelayanan Dasar sesuai Standar

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
total ibu bersalin yang mendapat pelayanan tahun-n	2,755	2,674	2,764	2,767	2,956	3,035	3,279	2,947	3,002	2880	2768
total ibu bersalin tahun-n	2,755	2,871	2,870	2,944	3,086	3,035	3,225	3,295	3,297	3344	2933
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	93.14%	96.31%	93.99%	95.79%	100.00%	101.67%	89.44%	91.06%	86%	94%

Sumber : Dinas Kesehatan

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelekaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang masih terjadi 1 angka kematian ibu setiap tahunnya (tabel.2.24). Tahun 2023 angka kematian ibu meningkat turun menjadi 120 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 25 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	4	4	2	3	1	1	6	8	3
Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	3285
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	7	11	14	15	68	99	30	34	171	279	120

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo ,2023

Meningkatnya angka kematian ibu selama 2 tahun terakhir ini berdasarkan analisis permasalahan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo disebabkan karena kualitas tenaga SDM Kesehatan dan sarana prasarana belum memadai. Kemudian dari faktor eksternal adalah kesadaran masyarakat akan kesehatan diri sendiri dan keluarganya masih kurang.

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Data AKB Kota Palopo selama periode 2013 – 2023 disajikan pada tabel dibawah.

Meningkatnya angka kematian bayi selama 2 tahun terakhir ini berdasarkan analisis permasalahan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo disebabkan karena sarana prasarana di tingkat pustu dan puskesmas belum memadai. Kemudian dari faktor eksternal adalah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan Kesehatan secara berkala masih rendah.

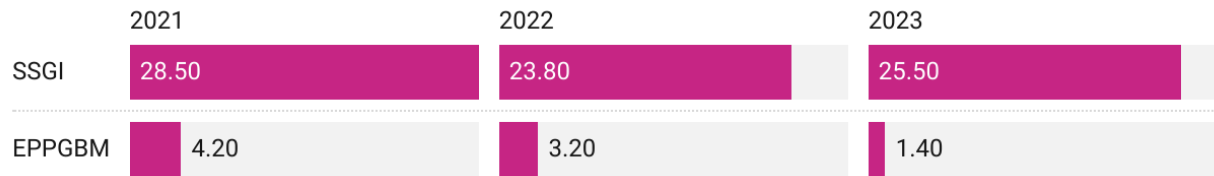
Tabel 2. 26 Rasio Angka Kematian Bayi Kota Palopo Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	16	4	1	6	6	3	2	3	13	15	9
Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871	2950
Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	5,87	1,53	0,36	2,18	2,03	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22	2,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi yang berlangsung lama (kronis) terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting kota Palopo yang bersumber dari survey status gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan 4,7% dari 28,50% tahun 2021 menjadi 23,80% di tahun 2022 tetapi meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 25,50%. Jumlah kasus stunting dan prevalensi stunting ditampilkan pada gambar bawah.

Kemudian hasil capaian tahun 2023 kasus stunting di Kota Palopo meningkat kembali menjadi 25,5% (SKI, 2023). Menurut hasil kajian dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, peningkatan ini terjadi karena pihak surveyor SKI (status Kesehatan Indonesia) melakukan survey dan sampling secara acak dari total anak yang masuk dalam variabel penilaian sehingga memungkinkan anak yang belum tersentuh sama sekali oleh intervensi masuk dalam hitungan. Disisi lain data yang bersumber dari EPPGBM Kementerian Kesehatan, Kota Palopo mengalami penurunan yang signifikan. Selama tahun 2021-2023 prevalensi stunting mengalami penurunan dari 4.2% menjadi 1.4%. Hasil yang signifikan tersebut memang terjadi karena pengaruh intervensi stunting secara massif dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, dan data sasaran keluarga stunting telah ada dalam target pensasaran oleh perangkat daerah pengampu sehingga anak stunting yang dilakukan intervensi tidak lepas dari total keseluruhan target ditetapkan.



Source: Dinas Kesehatan • Created with Datawrapper

Gambar 25 Prevalensi Stunting

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebarannya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkulosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini. Hasil di Kota Palopo menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2023 penemuan kasus TBC mengalami penurunan.

Tabel 2. 27 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Palopo

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	130	206	202	241	243	415	396	300	350	204	362
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	139	202	242	222	176	301	349	499	369	441	472
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07	137,87	133,33	60,12	75,32	46,26	76,57

Sumber : Dinas Kesehatan

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk Adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2. 28 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banyaknya kasus penderita	348	299	374	354	433	415	454	300	369	441	420



Uraian	Tahun											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TBC (baru dan lama)												
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907	180,678	184,614	184,681	187,331	190,867	195435	
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	216.39	181.32	221.44	204.72	244.76	229.69	245.92	162.44	196.98	231.05	214.90	

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 216 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini fluktuatif dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 231 orang per 100.000 penduduk. Hasil analisis permasalahan terkait prevalensi TBC yang mengalami tren kenaikan oleh Dinas Kesehatan adalah pola hidup masyarakat yang tidak sehat sehingga rentan terjangkit virus TBC. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2. 29 Tingkat Kematian TBC per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasien TB yang meninggal	0	0	0	0	0	17	0	0	17	29	19
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907	180,678	184,614	184,681	187,331	190,867	195435
Presentase tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	9.07	15.19	10

Sumber : Dinas Kesehatan

Meski secara jumlah, pengidap TB di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, dan menyebabkan juga meningkatnya kematian yang disebabkan penyakit TB. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan masih kurang efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya perlu dioptimalkan, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS. DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTs adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk

Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS. Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2. 30 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	130	94	91	354	430	415	454	299	215	204	363
Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	139	202	242	222	176	301	297	499	358	441	469
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	93.53	46.53	37.60	159.46	244.32	137.87	152.86	59.92	60.06	46.26	77.41

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TBC dalam program DOTs sejak 2013 sampai dengan 2022 cenderung terus membaik. Tahun 2013, sebanyak 93,53% pasien TBC BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan 2023 angka menurun menjadi 77,41% pasien.

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TBC tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan kejadian TBC di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TBC. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik. Tabel dibawah menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2022 mengalami penurunan dari 84,62% menjadi 56,49%. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TBC yang menjalankan prosedur pengobatan TBC dalam program DOTS secara baik.

Tabel 2. 31 Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu	110	96	121	159	154	114	167	165	129	161	167



Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
wilayah selama 1 tahun											
Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	130	206	202	241	243	415	396	300	375	285	402
Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	84.62	46.60	59.90	65.98	63.37	27.47	42.17	55	34.40	56.49	41.56

Sumber : Dinas Kesehatan

Indeks Kualitas Keluarga. Salah satu cara untuk mengetahui pencapaian pembangunan keluarga, dimana terdapat anak-anak yang diberikan pendidikan, perawatan, dan pengasuhan yaitu melalui indeks kualitas keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang ditindaklanjuti oleh kementerian terkait yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Dalam regulasi tersebut pembangunan keluarga diukur melalui 5 dimensi indeks kualitas keluarga yaitu (1) Kualitas legalitas struktur; (2) Kalitas ketahanan fisik; (3) kualitas ketahanan ekonomi; (4) Kualitas sosial psikologi; (5) Kualitas ketahanan sosial budaya (PPPA, 2021) Berdasarkan indikator kategori penilaian terkait capaian per dimensi indeks kualitas keluarga yang bersumber dari metode perhitungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kategori hasil capaian/skor adalah sebagai berikut :

Skor Penilaian IKK

Keterangan Kualitas Keluarga	Kategori	Skor
Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	1	<50
Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	2	50 < x ≤ 75
Responsif Gender dan Hak Anak	3	>75

Sumber : Kementerian PPPA

Berdasarkan hasil perhitungan dari 5 dimensi penyusun indeks kualitas keluarga sesuai sub bagian bawah, Kota Palopo di tahun 2023 masuk kategori 2 yaitu “cukup responsive gender dan hak anak” yang sebelumnya pada tahun 2020-2022 masih masuk kategori 3, dengan capaian nilai sebagai berikut

Tabel 2. 32 Capaian Indeks Kualitas Keluarga Kota Palopo Tahun 2018-2023

Tahun					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
72.558	73.524	81.102	77.802	79.266	72.85

Sumber : Hasil olah indikator penyusun

Indeks perlindungan anak (IPA) adalah alat ukur bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan komitmen dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal. Perlindungan anak menjadi isu penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu setiap daerah baik provinsi maupun kab/kota wajib melakukan perencanaan pembangunan yang mengakomodir kegiatan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menurut data Kementerian PPPA (2020), kemiskinan dipercaya sebagai penyebab dari hampir semua tantangan yang dihadapi anak Indonesia, baik dari segi aspek Kesehatan, Pendidikan, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan. Indikator dalam Menyusun IPA terdiri dari 5 dimensi yaitu : Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus. Semakin tinggi nilai setiap dimensi penyusun berpengaruh terhadap meningkatnya nilai IPA, semakin tinggi IPA mengindikasikan bahwa pemerintah telah memberikan penjaminan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

¹Hasil perhitungan IPA yang dilakukan oleh Kementerian PPPA hanya level provinsi dan nasional selama tahun 2019-2021, sedangkan untuk Kab/Kota hanya terdiri dari indikator penyusun IPA tahun 2021. Hasil capaian IPA disajikan pada gambar dan tabel dibawah. Nilai indeks penyusun IPA Kota Palopo rata-rata >50, tetapi masih ada indeks yang masih rendah nilainya yaitu indeks pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Tabel 2. 33 Dimensi Penyusun IPA Kota Palopo Tahun 2021

Indek Penyusun IPA	Indonesia	Provinsi	Palopo
Indeks Hak Sipil dan Kebebasan	61.38	46.48	59.15
Indeks lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	58.34	69.77	54
Indeks Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	73.59	79.92	80.74
Indeks Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	32.2	27.17	30.09
Indeks Perlindungan Khusus	66.01	65.15	66.48

Sumber : Kementerian PPPA, 2022

Berdasarkan komposit penyusun IPA, hasil IPA Kota Palopo pada tahun 2019-2023 masih lebih rendah dibandingkan capaian dari provinsi dan nasional. Walaupun demikian Kota Palopo mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019-2023 dari nilai IPA 58.27 menjadi 65 di tahun 2023. Salah satu usaha yang mendukung peningkatan ini adalah dari indeks Kesehatan dasar dan kesejahteraan serta upaya langsung perlindungan khusus kepada anak yang berada langsung dibawah tanggung jawab UPTD perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Tabel 2. 34 Perbandingan Hasil Capaian IPA Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	77.03	73.11	73.59	72.18	74.63
Provinsi	67.95	66	66.86	67.22	67.38
Palopo	58.27	59.95	61.63	63.32	65

Sumber : Kementerian PPPA,2022

Indeks ketimpangan gender (IKG) adalah nilai ukuran ketimpangan gender seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia yaitu reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Indikator IKG semakin rendah menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Selama tahun 2018-2023 IKG Kota Palopo mengalami fluktuatif walaupun menurun dari tahun dasar 2018 sebesar 0,407 menjadi 0,291 di tahun 2023. Hasil yang didapat ini merupakan usaha dari pemerintah setempat untuk mengupayakan keberpihakan perempuan dalam segala aktivitas pembangunan di Kota Palopo.

Tabel 2. 35 Hasil Capaian IKG Kota Palopo

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Palopo	0.407	0.190	0.329	0.286	0.289	0.291

Sumber : BPS Kota Palopo

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator yang menampilkan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai formulasi kebijakan pembangunan bidang kebudayaan dan manusia. Indeks pembangunan kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi :



Dimensi Ekonomi Kebudayaan; Dimensi Pendidikan; Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; Dimensi Warisan Budaya; Dimensi Ekspresi Budaya; Dimensi Budaya Literasi; dan Dimensi Gender.

Tabel 2. 36 Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Dimensi Penyusun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi Budaya	11,62	13,53	9,13	10,03	7,08	11.18
Pendidikan	70,34	73,12	71,83	72,94	72,75	72.87
Ketahanan Sosial Budaya	73,18	74,26	74,92	69,79	72,09	71.54
Warisan Budaya	36,37	38,17	36,79	44,20	45,95	46.65
Ekspresi Budaya	25,35	25,49	24,89	20,46	25,37	25.98
Budaya Literasi	54,75	58,33	61,12	54,85	58,05	55.32
Gender	57,03	57,38	60,82	61,69	63,46	62.21
Hasil Capaian						
Sulawesi Selatan	49,82	51,62	51,10	51,21	52,68	52.74
Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	56.11
Palopo	52,18	52,51	51,11	53,18	52,51	53.84

Sumber : IPK Kemendikbud.go.id

Sehubungan tidak adanya data IPK di level kabupaten/ kota maka dilakukan proksi indicator penyusun Indeks Kebudayaan Kota Palopo yaitu Pendidikan proksi RLS; Ketahanan sosial budaya proksi jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu; warisan budaya adalah jumlah benda/situs Kawasan budaya yang dilestarikan; Ekspresi budaya proksi jumlah penyelenggaraan festival seni budaya; budaya literasi adalah jumlah pengunjung rata per tahun; gender proksi tingkat partisipasi 53ngkatan kerja perempuan.

Dimensi Penyusun	Proxy Kota Palopo	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi Budaya	Proporsi PDRB Ekraf	0.11	0,15	0,11	0,12	0,14	0,15
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah/RLS (tahun)	10,51	10,75	10,76	10,94	11,09	11.13
Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	52	53	53	53	53
Warisan Budaya	Jumlah benda/situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	148	148	148	148	148	148
Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggara festival seni budaya (kegiatan)	18	14	5	8	10	13
Budaya Literasi	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (org)	1.204	1.246	2.964	1,162	791	1074
Gender	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	47.55	51.00	54,45	59,95	52,27	51.11

Sumber : Hasil olah bappeda kota palopo

Berdasarkan hasil diatas untuk IPK di Kota Palopo masih lebih baik capaiannya daripada provinsi. Hal ini terjadi karena sarana ekspresi budaya mengalami peningkatan baik infrastruktur sejak 2 tahun terakhir dan penguatan materi lokal yang mengakat Bahasa dan budaya asli Palopo dalam Pendidikan dasar anak sekolah.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Skala yang digunakan untuk menghitung jumlah spesies tumbuhan dan hewan di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk memperkirakan kesehatan, stabilitas, dan kompleksitas suatu ekosistem. Fungsi dari indeks ini adalah untuk membedakan antara lokasi, ekosistem, atau populasi organisme yang berbeda. Kemudian sebagai alat ukur keanekaragaman hayati yang kompleks dan beragam. Keterbatasan dalam perhitungan indeks ini, maka dilakukan proksi menggunakan data sebagai berikut :

Tabel 2. 37 Proksi Capaian Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	28.51	29.47	38.18	30.11	29.19	28.94
Indeks Pertanaman Padi	IP100	IP100	IP100	IP100	IP100	IP100
Proporsi Sawah Irigasi (%)	90.78	91.42	91.42	90.05	88.96	88.96
Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	112,220.85	108,715.45	32,747.84	158,260.28	174,751.00	174,750.87
Rata-rata konsumsi ikan segar per kapita sebulan (Kg)	2.66	2.72	2.44	2.42	0.60	2.60

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan hasil capaian proksi indeks pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Palopo proporsi realisasi penyaluran pupuk organik masih rendah sekali. Kondisi ini terjadi karena petani masih mengandalkan penggunaan pupuk subsidi dan non subsidi yang mengandung bahan kimia buatan. Penggunaan pupuk organik masih rendah juga karena, proses panen yang dihasilkan lebih lama dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Kemudian juga proses pembuatan secara mandiri membutuhkan waktu yang lama untuk penguraian dan pembusukan, untuk indikator lainnya hasil capaian masih masuk kategori baik di Kota Palopo.

2.3 ASPEK DAYA SAING

2.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH

PDRB per Kapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk digunakan untuk membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya. PDRB per kapita Kota Palopo mengalami tren kenaikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, kemudian tahun 2020 tidak mengalami kontraksi walaupun terjadi pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar Rp.33.044.770 per tahunnya, sedangkan per bulan sebesar Rp.2.990.369.

Tabel 2. 38 PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2010-2023

Tahun	Rupiah	Jiwa	Rupiah	
	PDRB ADHK (Milyar)	Pop	PDRB per Kapita	PDRB per Kapita/Bln
2010	2913.050.2	147932	19691819	1640985
2011	3143.190.57	149419	21036084	1753007
2012	3363.253.34	152703	22024802	1835400
2013	3633.005.18	160819	22590647	1882554
2014	3889.249.03	164903	23585011	1965418



Tahun	Rupiah	Jiwa	Rupiah	
	PDRB ADHK (Milyar)	Pop	PDRB per Kapita	PDRB per Kapita/Bln
2015	4140.871.84	168894	24517578	2043132
2016	4428.507.04	172916	25610684	2134224
2017	4745.909.89	176907	26827089	2235591
2018	5102.997.2	180678	28243545	2353629
2019	5447.367	184614	29506738	2458895
2020	5472.087.18	184681	29629887	2469157
2021	5768.285.24	187331	30791888	2565991
2022	6104.747.61	190867	31984249	2665354
2023	6369.71	192760	33044770	2990369

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Inflasi. Perhitungan inflasi di daerah dihitung berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) yang didasarkan atas survey biaya hidup, meliputi 11 kelompok yaitu makanan, minuman, dan tembakau; pakaian alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; pendidikan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makan dan minum restoran; perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi dipengaruhi oleh perubahan IHK dan ITF (*inflation targeting framework*). Penargetan inflasi / ITF merupakan cara pemerintah untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional agar stabil, tidak terlalu tinggi dan rendah. Di Sulawesi Selatan, terdapat 5 kabupaten/kota yang masuk dalam perhitungan IHK yaitu Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Inflasi Sulawesi Selatan merupakan inflasi gabungan 5 kabupaten/kota IHK tersebut.

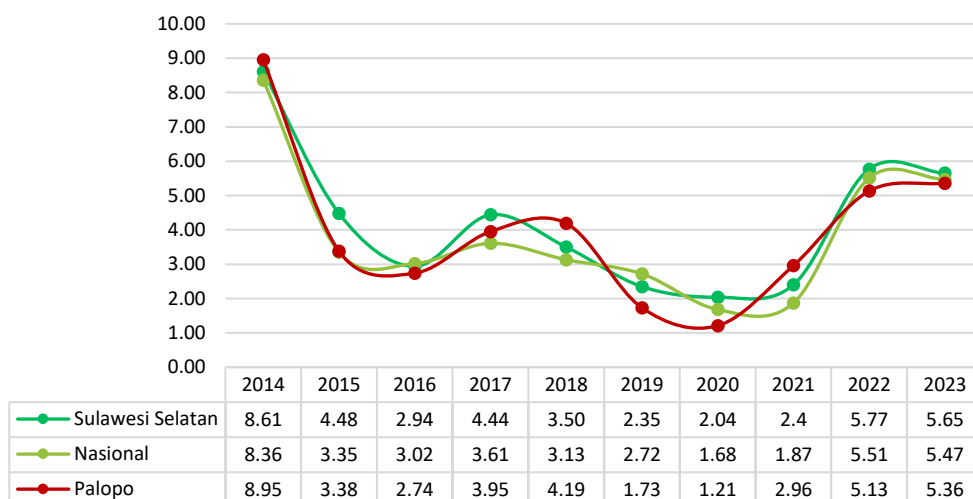
Tabel 2. 39 Perbandingan IHK

Kota Di Sulawesi Selatan	Indeks Harga Konsumen (IHK)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Makassar	140,02	105,54	107,92	114,19	117,49
Kota Pare-Pare	131,91	104,47	108,74	115,98	118,55
Kota Palopo	136,62	104,49	107,58	113,10	115,60

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2023, inflasi Kota Palopo tercatat sebesar 5,36%. Besaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,13%. Pada bulan September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Hal ini berimbas terhadap kenaikan harga secara umum terutama kelompok transportasi. Pada bulan September 2023 inflasi *year on year* Kota Palopo meningkat sebesar 2,07%. Artinya, bila dibandingkan dengan bulan September tahun 2022, terjadi kenaikan harga barang secara umum sebesar 2,07% *month to month* pada bulan yang sama tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, tiga kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 2,42 persen. Selanjutnya kelompok transportasi juga memberikan andil yang cukup besar yaitu sebesar 1,77 persen dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberi andil sebesar 0,32 persen terhadap inflasi tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan inflasi nasional dan Sulawesi Selatan, besaran inflasi Kota Palopo pada tahun 2023 lebih rendah daripada Provinsi dan Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo mampu sedikit menekan gejolak inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2023 dan peran maksimal oleh TPID (tim pengendali inflasi daerah).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 26 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo

Indeks Ekonomi Hijau. Isu lingkungan merupakan isu yang sering dilemparkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang atau sering disebut negara dunia ketiga. Isu lingkungan sengaja diciptakan sebagai alasan untuk menekan negara-negara dunia ketiga agar kepentingan ekonomi negara maju tidak tergeser oleh negara-negara berkembang yang mulai masuk ke dalam negara berpendapatan tinggi, khususnya negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Hakikat konsep strategi pembangunan ekonomi hijau adalah melaksanakan proses pembangunan secara berkelanjutan atau dapat dikatakan membangun secara fisik sosial ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi secara bersamaan menyebabkan eskalasi krisis sosial dan krisis lingkungan hidup semakin meningkat, fenomena ini dikenal dengan paradoks pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan ekonomi masa lalu cenderung bersifat ekstraktif dan bersifat jangka pendek tanpa memperhitungkan efek samping berupa depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan.

Sebagai negara yang telah bergabung dengan kesepakatan global dalam menurunkan emisi karbon dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, maka upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau dapat tercipta dari dukungan pemerintah daerah setempat dan pemangku kepentingan. Menindaklanjuti rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan visi Indonesia emas 2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**”. Berkelanjutan dalam hal ini yaitu keseimbangan dan kelestarian antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan sasaran utama : kemiskinan dan ketimpangan berkurang; Daya saing SDM meningkat; Emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam mengukur pelaksanaan ekonomi hijau, digunakan GEI (*green economy index*) yang memiliki tiga pilar penyusun yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hasil capaian indeks ekonomi hijau Kota Palopo masih rendah dibandingkan dengan Makassar dan Pare-Pare

Tabel 2. 40 Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2015-2023

Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	27.23	31.96	31.41	38.95	41.68	40.06	41.42	42.06	74.86
Parepare	46.30	47.10	26.23	26.12	45.75	21.78	44.33	44.76	67.21
Palopo	29.19	30.55	30.00	29.44	33.90	32.09	36.88	36.34	37.82

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

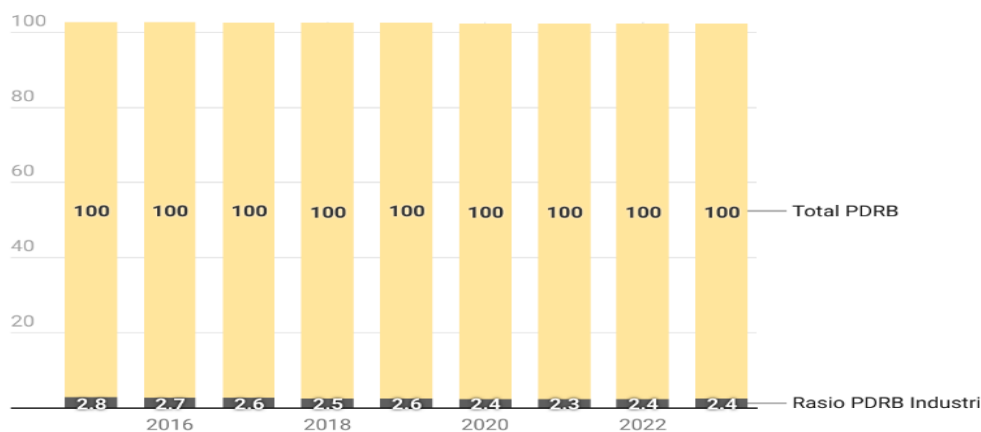
Rasio kewirausahaan. Berdasarkan data dibawah menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berwirausaha pada tahun 2017 yang nilainya sebesar 33,66% yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Pada tahun 2018 Rasio Kewirausahaan menurun menjadi 31,70% yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Ditahun 2019 terus menurun menjadi 27,74% yang berarti total angkatan kerja yang berwirausaha. Pada tahun 2020 Rasio kewirausahaan kembali meningkat menjadi 27.88%, yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Tahun 2021 Rasio kewirausahaan meningkat lagi menjadi 28.60%, yang berarti dari total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Tahun 2022 Rasio kewirausahaan mencapai 30.35%, yang berarti total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Dan pada tahun 2023 Rasio kewirausahaan menurun lagi menjadi 29.31%, yang berarti total angkatan kerja adalah penduduk yang berwirausaha. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan dan beberapa tahun menunjukkan penurunan.

Tabel 2. 41 Rasio Kewirausahaan Kota Palopo 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Berwirausaha	25,432	24,038	22,346	23,706	24,299	27,907	27,812
Total Angkatan Kerja	75,563	75,829	80,564	85,026	84,969	91,960	94,881
Rasio Kewirausahaan	33.66	31.70	27.74	27.88	28.60	30.35	29.31

Sumber: bps Kota Palopo 2024

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kemudian dari total nilai PDRB Kota Palopo selama tahun 2014-2023 rasio PDRB Industri pengolahan hanya berkisar 2.4%. Industri pengolahan yang ada di Palopo hanya sebatas kegiatan subsisten mengolah hasil usaha produksi pertanian perikanan menjadi bahan baku dasar semisal tanaman sagu, rumput laut, hasil perikanan tangkap. Output produksi yang masih rendah menjadi dasar rasio PDRB industry pengolahan berkisar di angka 2%.



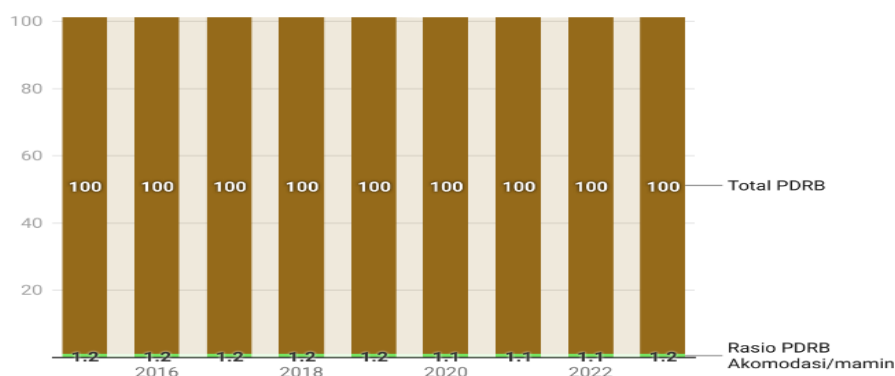
Source: BPS,2024 • Created with Datawrapper

Gambar 27 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pengembangan Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu potensi untuk mendapatkan penghasilan dan pemberdayaan ekonomi lokal daerah. Palopo memang tidak memiliki pariwisata yang seindah dan sebaik kabupaten tetangga yaitu Toraja dan Toraja Utara, walaupun demikian Palopo memiliki fasilitas untuk menampung limpahan wisatawan yang akan transit menuju dua kabupaten tersebut. Selain itu fasilitas Pelabuhan sebagai tempat sandar kapal sewaan yang mengangkut wisatawan dan jarak relative dekat dengan bandara yang ada diwilayah Bua Kabupaten Luwu. Adanya pengembangan pariwisata daerah

dapat berdampak terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan usaha kecil rumah tangga penyedia jasa penginapan, makanan minuman, maupun aksesoris / buah tangan bagi wisatawan. Indikator dari pengembangan pariwisata di Kota Palopo yaitu rasio PDRB penyediaan akomodasi mamin, fasilitas ketersediaan penginapan, dan statistic jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan mamin menjadi salah satu aspek daya saing ekonomi daerah terutama sektor pariwisata. Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa sektor lapangan usaha akomodasi makan minum seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB. Berdasarkan hasil tabel dibawah menunjukkan rasionya masih berada pada angka 1,2% dari total PDRB. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan potensi pariwisata di Palopo belum terlaksana secara maksimal. Hal yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun sebelumnya adalah pembangunan infrastruktur pendukung konektifitas antar tempat wisata. Walaupun belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kota Palopo, peta jalan (*road map*) sektor pariwisata telah dibuat oleh Dinas Pariwisata setempat melalui Rencana Induk Pariwisata Daerah.



Source: BPS,2024 • Created with Datawrapper

Gambar 28 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Total PDRB

Jumlah wisatawan manca /hotel bintang/tamu berkaitan dengan Kota Palopo sebagai Kota Jasa, dan dalam dokumen perencanaan jangka Panjang masuk dalam rencana pengembangan pariwisata daerah. Guna mendukung kegiatan penyelenggaraan MICE di Kota Palopo, maka diperlukan dukungan dari penyedia jasa penginapan dan perhotelan. Klasifikasi hotel yang ada di Palopo masih masuk bintang 1 dan 2, mayoritas adalah hotel non bintang / *homestay*. Walaupun masih belum ada hotel berbintang, daya dukung penginapan yang menunjang kegiatan MICE masih besar, yang dilihat dari rasio ketersediaan penginapan yang masih 70%. Menurut klasifikasi hotel tahun 2023 memiliki 5 unit hotel berbintang terdiri dari 3 hotel bintang 1 dan 2 hotel bintang 2, selain hotel bintang terdapat pula hotel non bintang dan jenis akomodasi lainnya, wisma, homestay dan penginapan sejumlah 47 unit. Lokasi akomodasi terbanyak berada di kec.wara timur 19 unit.

Tabel 2. 42 Rasio Ketersediaan Penginapan Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel Bintang 1	1	3	3	3	3	3
Hotel Bintang 2	1	1	1	1	1	2
Hotel Non-Bintang dan Akomodasi Lainnya	43	48	50	47	44	47
Jumlah Kamar		912	936	908	872	889
Jumlah Tempat Tidur		1148	1221	1147	1129	1153
Persentase Penghunian Kamar Hotel (%)	29.9	32.03	22.7	30.38	30.42	29.48



Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Menginap (hari)	1	1	1	1	1	1
Rasio Ketersediaan Penginapan (%)	70.1	67.97	77.3	69.62	69.58	69.87
PAD Sektor Pariwisata (Rp)	543.236.605	656.513.665	407.676.317	428.653.986	501.136.114	718.960.884
PAD ADHK (Milyar Rp)	5102.99	5447.36	5472.08	5768.28	6104.74	6369.71
Proporsi PDRB Pariwisata	0.01	0.01	0.01	0	0	0

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Jumlah wisatawan berkunjung di Kota Palopo masih didominasi oleh wisatawan domestic. Hasil capaian selama tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang pesat, walaupun ada penurunan sepanjang tahun 2020-2021 akibat pandemic. Tahun 2023 jumlah wisatawan berkunjung sebanyak 178561 orang atau meningkat 3,27% daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk wisatawan mancanegara sangat kecil sekali yaitu hanya 68 orang pada tahun 2023. Perlu diketahui bahwa kunjungan wisatawan asing ini hanya berstatus transit, sebelum menuju ke Toraja dan Toraja Utara. Berdasarkan hasil analisis tersebut Kota Palopo (khususnya bagi wisatawan asing) perlu mempromosikan secara luas kepada pihak travel atau bekerja sama dengan dinas pariwisata kabupaten tetangga untuk menawarkan fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran cepat saji, dan pusat ritel modern agar menyempatkan diri berkunjung sebentar sebelum menuju destinasi pariwisata utama.

Tabel 2. 43 Statistik Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	830	953	22	0	5	68
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	105381	126457	61267	68184	172910	178561

Sumber : Dinas Pariwisata

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB. Ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan; penciptaan lapangan kerja; dan pendapatan ekspor; serta mempromosikan inklusi sosial, keragaman budaya, dan pembangunan manusia. Sektor ekonomi kreatif bisa menjadi harapan untuk menyokong perekonomian Kota Palopo terutama dalam menghadapi ancaman bonus demografi dan permasalahan ekonomi saat ini. Ekonomi kreatif seharusnya bisa terus meningkat dari segi persentase terhadap PDRB Kota Palopo. Dalam mengukur PDRB ekonomi kreatif dilihat dari nilai barang dan jasa di 16 subsektor industri, yaitu Arsitektur, Desain interior, Desain komunikasi visual, Desain produk, Film, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan radio, Seni pertunjukan, serta Seni rupa. Hasil capaian Kota Palopo menunjukkan masih rendahnya ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap PDRB.

Tabel 2. 44 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
PAD Sektor Ekonomi Kreatif (Rupiah)	7.904.665.740	6.020.590.491	6.895.876.329	8.441.595.705	9.834.161.637
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	5.447,36	5.472,08	5.768,28	6.104,74	6.369,71
Kontribusi PAD sektor Ekonomi Kreatif	0,15	0,11	0,12	0,14	0,15



Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
terhadap PDRB ADHK (%)					

Sumber : Dinas Pariwisata diolah

Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD Produktivitas ekonomi suatu daerah salah satunya dapat diukur lewat aktivitas pemberdayaan ekonomi lokalnya, yaitu terlihat dari seberapa besar UMKM, koperasi lokal, dan BUMD memberikan kontribusi terhadap PDRB diluar aktivitas lapangan usaha formal dengan status kepemilikan induk usaha level provinsi maupun nasional.

Kota Palopo adalah kota administrative yang terbentuk pada tahun 2002 pemecahan dari wilayah kabupaten Luwu. Dengan status kotamadya, di wilayah sekitar karesidenan Luwu raya (Luwu, Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, dan Luwu Timur), memberikan keunggulan dibandingkan dengan kabupaten lainnya sekitar Palopo. Kota Palopo merupakan Kota Perdagangan dan jasa yang berada di wilayah Luwu Raya dan sebagai tempat tujuan bagi pendatang disekitar Luwu raya baik untuk mencari pekerjaan, berdagang maupun melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagai kota dagang dan jasa keunggulan lain yang dimiliki Kota Palopo adalah usaha perdagangan kecil menengah. Statistik klasifikasi industri dan nilai rupiah output produksi disajikan sebagai berikut,

Tabel 2. 45 Jumlah Industri, UMKM, dan Rasio terhadap PDRB

Klasifikasi Industri	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	Output (Rp) X 1000	Jumlah	Output (Rp) X 1000	Jumlah	Output (Rp) X 1000	Jumlah	Output (Rp) X 1000	Jumlah	Output (Rp) X 1000	Jumlah	Output (Rp) X 1000
Industri Besar	3	1232000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Sedang	923	80,982,531	1185	98,006,080	1292	106,291,284	1322	96,388,424	1341	93,604,756	1348	92,811,754
Total PDRB (X 1.000.000)		5102987.2		5447357		5472077.18		5768275.24		6104737.61		6369710
Rasio PDRB (%)												
Industri Besar		0.024		-		-		-		-		-
Industri Sedang		1,59		1,80		1,94		1,67		1,53		1.48
Total UMKM												
Jumlah UMKM		8824		8975		11022		11211		14048		14804

Sumber : Dinas Koperasi; Dinas Perindustrian; BPS Kota Palopo, diolah

Selama tahun 2018-2023 nilai total output produksi berdasarkan klasifikasi industry di Kota Palopo < 1 triliun rupiah dari total output PDRB Kota Palopo yang telah mencapai angka 6 triliun rupiah dan rasio <2%, sehingga perlu dipromosikan kembali ataupun kemudahan investasi agar menarik sektor industry PMA/PMDN masuk untuk meningkatkan rasio nilai output industri.

Sebagai kota perdagangan tidak lepas dari sarana penunjang kegiatan perdagangan, Pemerintah Kota Palopo telah membangun berbagai macam infrastruktur guna mendukung kegiatan tersebut salah satu contohnya adalah pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya. Hasil menunjukkan bahwa rasio sarana perdagangan dengan jumlah pedagang masih dalam kondisi normal yaitu 2:1 atau dari 1 sarana penunjang perdagangan baik kios /pasar/dll digunakan oleh 2 pedagang secara bersamaan. Walaupun demikian pemerintah perlu membangun kembali pusat perdaganga agar tercapai kondisi ideal 1 pedagang menggunakan 1 fasilitas perdagangan / 1:1.

Tabel 2. 46 Rasio Sarana Perdagangan dan Total Pedagang Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pedagang						
Pedagang Besar	360	371	374	377	-	380



Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Menengah	639	674	712	754	-	761
Kecil	7709	8271	8778	9050	9361	9512
Total Pedagang	8708	9316	9864	10181	9361	10653
Sarana Perdagangan						
Pasar/Market	7	7	7	7	7	7
Toko/Store	78	87	46	57	57	59
Kios/Stall	1207	1307	1307	1311	1331	1345
Warung/Shop	455	455	455	483	862	870
Total Sarana Perdagangan	3765	3875	3835	3879	4279	4562
Rasio Sarana Perdagangan dan Pedagang	2:1	2:1	3:1	3:1	2:1	2:1

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Proporsi Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB. Koperasi yang ada di Kota Palopo belum memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selama ini, koperasi yang ada hanya berfokus kepada sektor usaha simpan pinjam. Kondisi ini sudah menyimpang dari agenda dan tujuan pembentukan koperasi untuk memberdayakan masyarakat lewat kepesertaan anggota koperasi. Proporsi angka seperti yang ada dalam tabel merupakan perputaran uang simpan pinjam yang telah disalurkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman, dan indikator tersebut belum mencerminkan keberhasilan koperasi yang terbentuk di Kota Palopo. Secara factual di lapangan banyak juga koperasi yang didirikan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, setelah itu akan gulung tikar dengan sendirinya.

Tabel 2. 47 Proporsi Omzet Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi Sehat (Unit)	74	69	77	76	74
Omzet Usaha Koperasi (Rp)	-	-	52.208.803.000	50.517.513.000	51.812.715.000
PDRB ADHK (Milyar)	5447.36	5472.08	5768.28	6104.74	6369.71
%	-	-	0.91	0.83	0.81

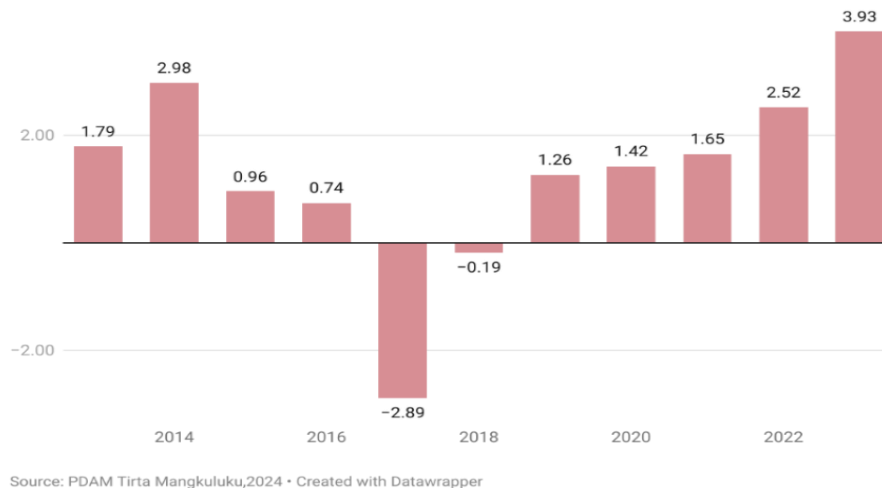
Sumber : Dinas Koperasi

ROA BUMD. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bab XII yang mengatur BUMD, tujuan dibentuknya usaha daerah melalui BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, menyelenggarakan manfaat umum berupa peyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik dan kondisi daerah berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik, dan terakhir adalah memperoleh laba/keuntungan. Sumber pendanaan BUMD berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, dan sumber-sumber lainnya yang sah. Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, secara teknis yang mengatur pembentukan BUMD adalah Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Bersumber dari data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palopo, BUMD yang masih aktif dan telah memberikan deviden kepada daerah hanya PDAM Tirta Mangkuluku. Salah satu indikator dalam mengukur kinerja BUMD adalah ROA (*return of asset*). ROA merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan pada sebuah asset. Seperti contoh sederhana penjual bakso keliling yang membutuhkan gerobak dan kompor untuk membuat bakso dan berjualan keliling, gerobak dan kompor merupakan asset bagi tukang bakso, dan

hasil dari penjualan keliling atau laba bersih yang didapat setiap bulan dibandingkan dengan total pembelian asset itu yang dikatakan ROA. Semakin tinggi akan hasil pengembalian atas asset, berarti semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan pada setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

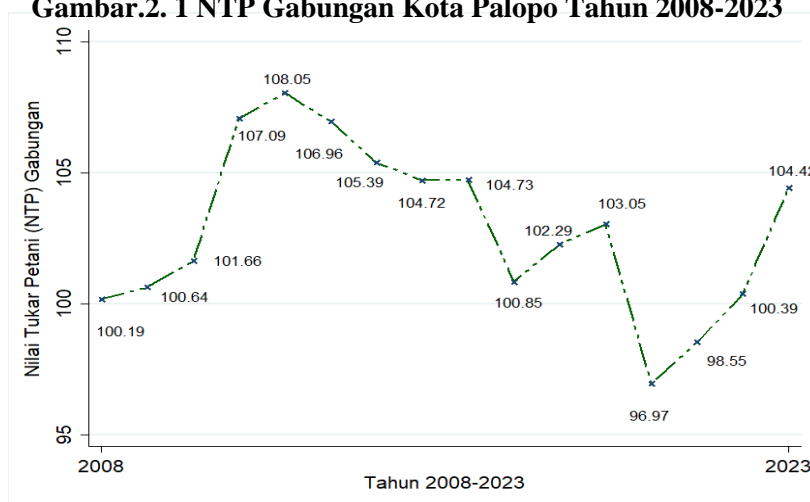
Hasil ROA yang bersumber dari BUMD PAM Kota Palopo, menunjukkan bahwa BUMD Kota Palopo dalam kondisi sehat dan dapat memberikan keuntungan dan deviden bagi daerah atas nilai penyertaan modalnya. Tahun 2017 dan 2018 mengalami kerugian karena harga pokok produksi lebih tinggi daripada harga jual, sehingga mengalami kerugian maka pada tahun 2019 sesuai Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 245/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 ada penyesuaian tarif. Dampak dari penyesuaian tarif PDAM Kota Palopo mengalami peningkatan keuntungan.



Gambar 29 ROA BUMD Kota Palopo Tahun 2013-2023

Nilai tukar petani merupakan indikator dalam mengukur kesejahteraan petani. Nilai tukar tersebut dihitung melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Pengertian angka nilai tukar petani terdiri dari 3 yaitu lebih besar, impas dan kurang dari. Angka meningkat jika $NTP > 100$ yang berarti mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dimana pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. $NTP=100$ berarti petani mengalami impas, kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi atau pendapatan sama dengan pengeluaran. $NTP < 100$ petani mengalami defisit, kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan harga barang konsumsinya pendapatan lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar.2. 1 NTP Gabungan Kota Palopo Tahun 2008-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

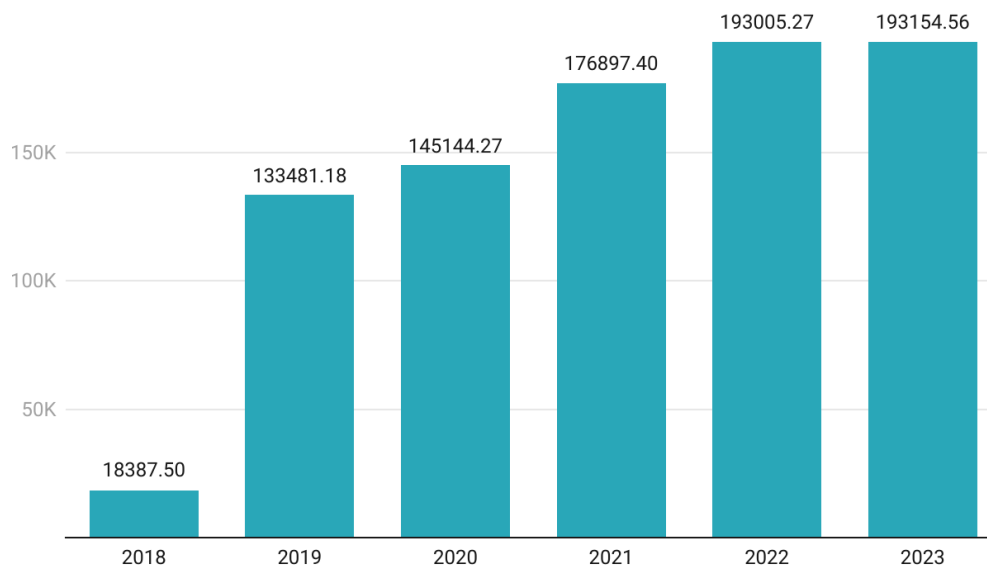
Nilai tukar petani terdiri dari 7 subsektor yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Kumpulan dari beberapa sub sektor tersebut dijadikan satu menjadi NTP gabungan. Sehubungan tidak adanya ketersediaan NTP pada level kabupaten/kota maka dilakukan pendekatan nilai NTP menggunakan NTP provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2008-2023. Sepanjang perjalanan tahun 2008-2023 petani di Kota Palopo mengalami surplus atau mendapatkan selisih keuntungan antara biaya produksi dengan harga panen, kecuali tahun 2020-2021 yang sempat turun $NTP < 100$ akibat imbas pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Meningkatnya NTP di Kota Palopo mendorong peningkatan produktivitas padi yang berupa GKG (gabah kering giling) ditahun 2023 menjadi 5493 ton dari tahun sebelumnya. Walaupun secara rata-rata setiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2018-2023 karena semakin berkurangnya lahan produktif sawah beralih fungsi menjadi lahan perumahan.

Tabel 2. 48 Produktivitas Padi (gabah kering giling) dalam Ton.

Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	4.818	4.789	4.489	4.319	4.558	5.215
Parepare	5.755	4.606	4.352	4.366	4.826	4.008
Palopo	6.276	6.417	5.375	6.393	575	5.493

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Produktivitas Perikanan. Kota Palopo terletak di daerah pesisir pantai yang masuk dalam Kawasan teluk Bone, oleh karena itu sektor perikanan diperhitungkan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Palopo. Kemudian untuk melihat perkembangan dari sektor perikanan dilihat dari jumlah produksi hasil ikan baik dari perikanan laut dan perikanan budidaya. Selama tahun 2018-2023 hasil perikanan Kota Palopo mengalami peningkatan secara signifikan dari 18387,50 ton menjadi 193154,56 ton.



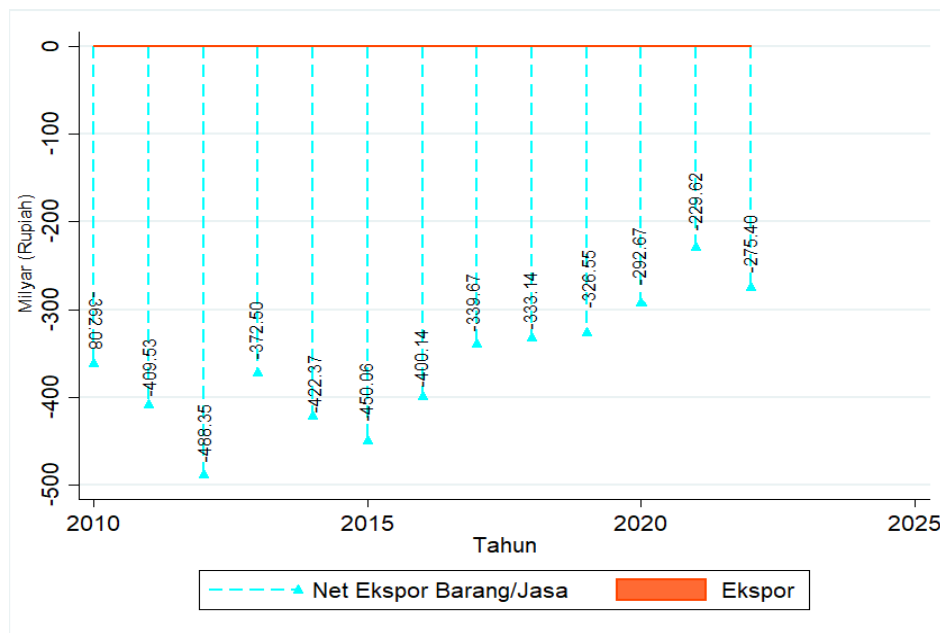
Source: Dinas Perikanan • Created with Datawrapper

Gambar 30 Produktivitas Hasil Perikanan Kota Palopo (ton)

Ekspor barang dan Jasa. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan dampak secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Wilayah yang memiliki angka ekspor yang tinggi berpengaruh terhadap aktivitas produksi barang/jasa baik dari sektor industri besar sampai kecil. Imbas adanya kegiatan skala produksi berorientasi ekspor membuka peluang investasi masuk. Investasi tersebut memberikan manfaat kepada daerah untuk menciptakan lapangan kerja. Pada umumnya data yang digunakan untuk melihat data ekspor yang ada di daerah bersumber dari dinas perdagangan, asosiasi pengusaha (eksportir/Importir) ataupun kantor bea cukai setempat.

Kota Palopo adalah kota perdagangan jasa yang memiliki lokasi jauh dari Ibu Kota Provinsi Makassar dan bukan bagian dari Kota/Kab aglomerasi industri Makassar Maros Gowa, sehingga tidak ada industri besar/kecil yang memiliki aktivitas produksi ekspor secara langsung ke luar negeri. Berbeda dengan daerah lain di wilayah Luwu Raya lain, yaitu Luwu Timur, Toraja, dan Toraja Utara yang memiliki industry pertambangan nikel internasional dan Toraja Toraja Utara dengan sektor jasa pariwisata budaya yang sudah menjadi tujuan prioritas wisatawan asing untuk berlibur di wilayah Sulawesi Selatan. Terbukti bahwa Kota Palopo bukan Kota yang memiliki aktivitas industry orientasi ekspor terlihat dari data Net Ekspor yang bersumber dari BPS Kota Palopo minus atau dapat dikatakan ekspor 0%. Sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daya saing ekonomi daerah untuk kegiatan ekspor Kota Palopo atau aktivitas perdagangan luar negeri, perlu dilakukan perintisan melalui perangkat daerah pengampu dengan menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. Sebelum hal tersebut dilakukan diperlukan standarisasi dan sertifikasi produksi usaha kecil.

Gambar.2. 2



Gambar 31 Net Ekspor Barang/Jasa Kota Palopo Tahun 2010-2023

Sumber : BPS, diolah

Indeks daya saing daerah (IDSD) adalah indikator untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam bersaing di tingkat provinsi dan nasional. Komponen penyusun IDSD diadaptasi dari standar pengukuran internasional melalui GCI (*global competitive index*), komponen penyusun meliputi : komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*); komponen sumber daya manusia (*human capital*); komponen pasar (*market*); dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*).

Komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*) memiliki empat pilar penyusun yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro. Pilar Institusi mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas ekonomi daerah. Pilar infrastruktur merupakan indikator yang dapat mendukung aktivitas perekonomian yang mendapatkan nilai tambah yang terlihat dari modal fisik infrastruktur, akses kelistrikan dan air minum layak, dan ketersediaan infrastruktur daerah. Pilar adopsi TIK yaitu keunggulan kompetitif melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif. Pilar stabilitas ekonomi makro yaitu ukuran kinerja secara umum perekonomian makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi modal, tingkat konsumsi, dan tingkat biaya hidup. Pilar stabilitas makro terdiri dari nilai tambah, akumulasi modal jangka panjang, dan tingkat kemakmuran.

Komponen sumber daya manusia (*human capital*) meliputi dua pilar penyusun utama yaitu kesehatan dan ketrampilan. Pilar kesehatan menggambarkan kualitas hidup manusia yang dapat berpengaruh terhadap daya saing dengan indikator usia harapan hidup. Pilar keterampilan adalah penegasan terhadap kualitas pendidikan yang dapat berkontribusi terhadap penciptaan tenaga kerja produktif yang memiliki kompetensi, keahlian, ketrampilan tinggi, dan pengetahuan.

Komponen pasar (*market*) meliputi empat pilar yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, pasar sistem keuangan, dan ukuran pasar. Pilar pasar produk adalah kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB. Pilar pasar tenaga kerja merupakan kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan daerah terkait dengan ketenagakerjaan. Pilar sistem keuangan mencerminkan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan daerah dalam mediasi aktivitas ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah. Pilar ukuran pasar merupakan kekuatan struktur industri yang menghasilkan nilai tambah yang meningkat akibat berkembangnya iptek.

komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) memiliki dua pilar utama yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Pilar dinamisme bisnis adalah kemudahan dalam perizinan bisnis dan SOP kejelasan waktu terkait administrasi yang dibutuhkan. Pilar kapabilitas inovasi dilihat dari kemampuan penguasaan iptek dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi. Rentang penilaian IDSD berada pada nilai 1-3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hasil IDSD daerah di provinsi Sulawesi tahun 2022-2023 disajikan tabel sebagai berikut,

Tabel 2. 49 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022-2023

Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan	3.35	3.70
Palopo	3.22	3.59
Luwu	2.82	2.79
Luwu Utara	2.84	2.92
Luwu Timur	2.82	2.83
Tana Toraja	2.92	3.16
Toraja Utara	2.83	2.96

Source: BRIN, 2024 • Created with Datawrapper

Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi. Salah satu hasil keberhasilan dari indikator makro ekonomi adalah meningkatnya nilai dan pertumbuhan PDRB. Hasil dari keberhasilan indicator ekonomi provinsi Sulawesi Selatan adalah nilai PDRBnya. Nilai PDRB provinsi ini dibentuk dari kontribusi PDRB setiap kabupaten/kota. Kota Palopo hanya memberikan kontribusi yang kecil sekali dibandingkan Kota Pare-Pare, dan Makassar hanya 1,69%.

Tabel 2. 50 Kontribusi PDRB Palopo terhadap Provinsi

	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Palopo (Miliar Rupiah)	7.942,48	8.025,29	8.714,31	9.767,89	10.499,83	5.447,36	5.472,08	5.768,28	6.104,74	6.369,71
Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah)	504 321,74	504 059,37	545 230,03	605.148,86	652.574,05	330.506,38	328.154,57	343.402,51	360.895,02	377.162,17
Kontribusi (%)	1,57	1,59	1,60	1,61	1,61	1,65	1,67	1,68	1,69	1,69

Sumber : BPS, diolah

2.3.2 DAYA SAING SDM

Skor Literasi Membaca dan Numerasi. Daya saing sumber daya manusia (SDM) Kota Palopo dipengaruhi oleh kualitas output yang dihasilkan pelayanan pendidikan yang ada di daerah kab/kota. Gambaran kualitas pendidikan yang ada di daerah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi system Pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap pendidikan PAUD, dasar, dan menengah dapat dilihat melalui hasil rapor pendidikan. Indikator capaian dari rapor pendidikan salah satunya yang dapat digunakan sebagai tolak ukur daya saing SDM adalah kemampuan literasi dan numerasi.

Definisi variabel kemampuan literasi menurut Permendikbudristek adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Tabel 2. 51 Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Palopo Tahun 2022-2023

Jenis Sekolah	**Indikator Capaian			
	Kemampuan Literasi		Kemampuan Numerasi	
	2022	2023	2022	2023
SD Umum	51,99	58,46	23,24	37,86
SD Keagamaan	27,27	48,53	16,36	35,29
SD Kesetaraan	-	-	-	-
SD SLB	100	100	50	50
SMP Umum	49,10	63,01	33,17	40,58
SMP Keagamaan	52,26	60,90	29,87	36,94
SMP Kesetaraan	0	25	0	25
SMP SLB	66,67	50	33,33	50

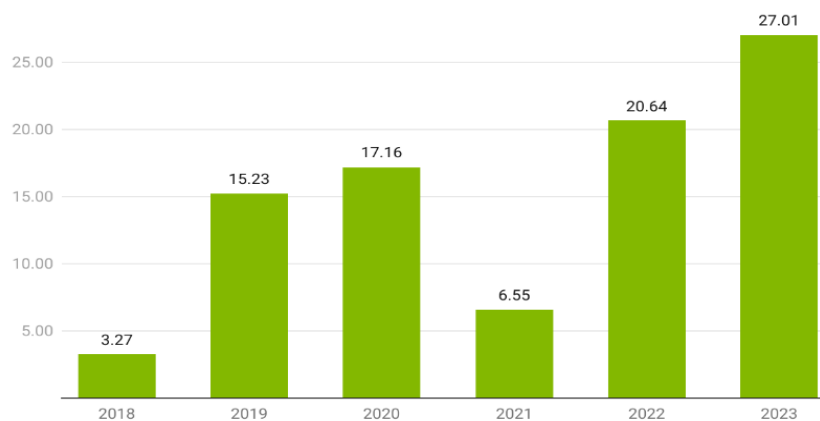
Sumber : Rapor Pendidikan Kota Palopo Dinas Pendidikan, 2024

** <40 Kurang; 40<x≤70 sedang; >70 baik

Berdasarkan hasil capaian rapor Pendidikan Kota Palopo rata-rata pendidikan SD kemampuan literasi masuk dalam kategori sedang, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali pendidikan SD SLB. Rata-rata pendidikan SMP kemampuan literasi masuk dalam kategori sedang, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kecuali SMP kesetaraan yang masih kurang. Kemudian rata-rata kemampuan numerasi SD dan SMP capaian masih kurang, kecuali SD-SMP SLB. Hasil menunjukkan perlu dilakukan evaluasi oleh perangkat daerah untuk mendorong kemampuan numerasi SD dan SMP di Palopo.

Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Hal-hal yang diukur dalam indeks ini terdiri dari 7 kriteria meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, perpus ber-SNP (standar nasional perpustakaan), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan

anggota perpustakaan. Kriteria penilaian IPLM memiliki skor 0-100 yang merujuk dari peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Hasil capaian di Kota Palopo masih sangat rendah sekali selama tahun 2017-2023, hal ini menandakan budaya literasi masyarakat yang ada di Kota Palopo masih rendah sekali. Pemicu rendahnya adalah masyarakat cenderung menghabiskan waktu bermain sosial media dibandingkan menghabiskan waktu untuk membaca buku atau menulis.



Source: Dinas Perpustakaan, 2024 • Created with Datawrapper

Gambar 32 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kota Palopo masih rendah serapannya dan lebih rendah dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal tersebut diakibatkan oleh karena pertumbuhan penduduk alami yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah Angkatan kerja. Di sisi lain jumlah lapangan pekerjaan di Kota Palopo masih sangat terbatas sekali. Sehingga Angkatan kerja yang mengalami penambahan tidak terserap. Akibatnya dapat dilihat di kota-kota besar termasuk Kota Palopo menjamur pekerjaan sektor informal yang mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Kondisi ketenagakerjaan Kota Palopo disajikan pada tabel statistik angkatan kerja dibawah.

Tabel 2. 52 Statistik Angkatan Kerja Kota Palopo 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	75.829	80.564	85.299	87.800	91.960	94.881
- Laki – Laki	Orang	45.831	47.611	49.391	49.668	54.442	38.597
- Perempuan	Orang	29.998	32.953	35.908	38.132	37.518	56.284
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	129.460	133.176	136.892	136.407	142.488	3.419
- Laki – Laki	Orang	61.900	63.611	65.322	65.328	70.712	1.863
- Perempuan	Orang	67.560	69.565	71.570	71.079	71.776	1.556



Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	121.883	124755	127.627	126.565	132.252	5.738
- Laki – Laki	Orang	58.794	60.142	61,490	61.246	66.318	3.585
- Perempuan	Orang	63.089	64.613	66.137	65.319	65.934	2.153
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	74,04	74,85	75,66	76,09	70	0.59
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,4	47,37	50,34	53,82	40,80	0.40
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,57	60,49	62,41	64,49	64,54	94.88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	77.95	79.16	80,37	81,15	76,99	78.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47.55	51.00	54,45	59,95	52,27	51.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58.31	64.58	70,85	73,36	63,65	65.75

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Palopo,2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan indikasi bahwa perempuan telah masuk dalam dunia kerja dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam mengejar karier maupun mencari nafkah. Persentase partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo mengalami tren yang fluktuatif. Walaupun demikian pada tahun 2023 partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan menjadi 95.57%.

Tabel 2. 53 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo

Tahun	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah angkatan kerja perempuan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
2023	36,871	38,579	95.57
2022	34,318	37,520	91.47
2021	33,549	37,156	89.99
2020	31,594	34,933	90.26
2019	30,135	32,953	91.45
2018	26,694	29,998	88.99

Source: BPS Kota Palopo dan Dinas PPPA • Created with Datawrapper

Rasio ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Sebaliknya, semakin rendah *dependency ratio* menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif juga semakin rendah.

Tabel 2. 54 Angka Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2017-2023

Rentang Umur	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-14	50477	51178	51943	48304	48223	48379	48057
>65	7268	7577	7916	9281	9731	10236	9635
15-64	119162	121923	124755	127096	129377	132252	119834
Angka Ketergantungan	48.46	48.19	47.98	45.31	44.79	44.32	48.14

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Berdasarkan hasil capaian diatas angka ketergantungan rata-rata 47 yang bisa dikategorikan mendekati separuh / 50 atau berada di tengah tengah. Kondisi angka ketergantungan di Kota Palopo yang tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi menunjukkan bahwa usia produktif seimbang untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Evaluasi yang harus dilakukan pada kondisi ini adalah membuka kesempatan kerja atau peluang seluas-luasnya kepada usia produktif, agar tidak masuk dalam jurang kemiskinan.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi. Semakin tinggi latar belakang Pendidikan seseorang berpengaruh positif terhadap status pekerjaan dan penghasilannya. Kota Palopo merupakan wilayah kotamadya yang memiliki perguruan tinggi negeri dan swasta. Alhasil Pendidikan yang ditamatkan masyarakat Kota Palopo di tingkat sarjana / universitas mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan Pendidikan vokasi yang menurun setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pendekatan dari indikator pendidikan tinggi yang ditamatkan, diasumsikan bahwa proporsi pekerja yang ada saat ini dengan latar Pendidikan menengah dan tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun mengalami peningkatan secara jumlah, tetapi secara rasio mengalami fluktuatif. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, disisi lain usia anak yang masuk jenjang perguruan tinggi jumlahnya menurun karena distribusi terbanyak masih berada di usia SD dan SMP.

Tabel 2. 55 Jumlah Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang ditamatkan	2019	2020	2021	2022	2023
Diploma I/II/III/ Akademi	3.163	2.680	4.096	3.425	2.933
Universitas	19.706	21.091	23.572	21.636	22.334
Jumlah Populasi	182.107	184.681	187.331	190.867	194.241
Rasio %	12.56	11.57	14.77	13.13	13.01

Sumber : BPS

Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi. Kemudian hasil *output* lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bidang keahlian tinggitaupekerjaan formal di Kota Palopo masih rendah. Porsi terbesar masih berada sektor pekerjaan operator dan sales. Sektor tersebut masih membutuhkan tingkatan Pendidikan lulusan SMA/SMK dan vokasi (tingkat diploma 1-3). Lulusan sarjana serapan masih kecil yang bekerja sebagai tenaga profesional serta tenaga TU/*Clerk*. Kondisi ini terjadi karena jumlah lapangan terbatas, sehingga banyak lulusan PT / sarjana mencari kerja dan bekerja diluar Kota Palopo.

Tabel 2. 56 Lulusan PT yang Bekerja di Bidang Keahlian Formal

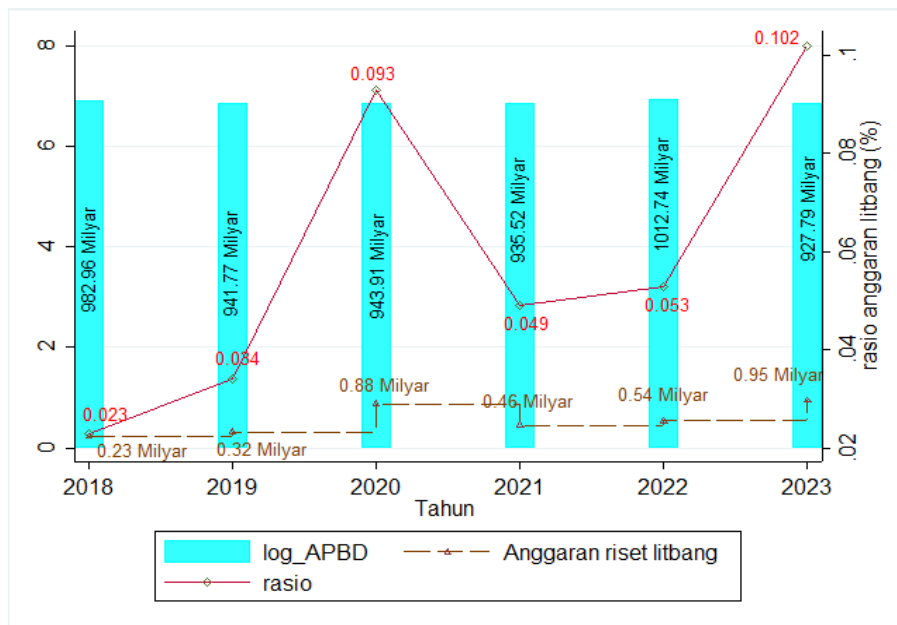
Tahun	Pendidikan	Tenaga Profesional	Tenaga TU/ <i>Clerk</i>	Sales	Operator
2024	Universitas	12610 (14.41%)	159(0.18%)		
	Vokasi (DI-DIII)	9724(11.12%)	2774(3.17%)	14827(16.95%)	20705(23.67%)
	SMA/SMK			9629(11.01%)	25903(29.61%)
2023	Universitas	13208(15.65%)	1470(1.74%)		
	Vokasi (DI-DIII)	8428(9.98%)	1955(2.32%)	2304(2.72%)	8354(9.90%)

Tahun	Pendidikan	Tenaga Profesional	Tenaga TU/Clerk	Sales	Operator
2022	SMA/SMK			6915(8.19%)	15237(18.05%)
	Universitas	11105(14.34%)	1549(2%)		
	Vokasi (DI-DIII)	11484(14.82%)	2258(2.91%)	3878(5%)	1215(1.57%)
2021	SMA/SMK			10732(13.85%)	8733(11.27%)
	Universitas	10434(13.69%)	36(0.05%)		
	Vokasi (DI-DIII)	10283(13.49%)	2654(3.48%)	1470(1.93%)	3256(4.27%)
2020	SMA/SMK			8975(11.78%)	17098(22.43%)
	Universitas	9933(13.75%)	89(0.12%)		
	Vokasi (DI-DIII)	7951(11%)	2988(4.14%)	8789(12.16%)	3697(5.12%)
	SMA/SMK			15149(20.97%)	21301(29.48%)

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Proporsi Anggaran riset Pemda terhadap APBD. Dalam upaya meningkatkan daya saing SDM suatu daerah salah satu jalan yang ditempuh selain aksesibilitas Pendidikan bagi masyarakat tanpa terkecuali adalah dukungan anggaran riset dari APBD. Seperti diketahui bahwa anggaran riset umumnya melekat di badan perencanaan daerah, tetapi di Kota Palopo dengan struktur organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri anggaran riset dibawah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo dalam mendukung pengembangan riset sudah baik dengan terbukti selama tahun 2018-2023 anggaran riset mengalami peningkatan dari 0.23 Milyar menjadi 0.95 Milyar, walaupun secara kuantitas realisasi APBD yang dimiliki Kota Palopo belum ada perubahan yang signifikan masih < 1 triliun setiap tahunnya.

Selanjutnya perbaikan terlihat dari rasio anggaran riset terhadap total realisasi APBD Badan Litbang di Kota Palopo mengalami peningkatan dari 0.023% menjadi 0.102%. Kondisi tersebut terlihat perbedaan yang mencolok dengan anggaran litbang yang dikeluarkan oleh sektor swasta, karena dalam prakteknya orientasi sudah berbeda pemerintah hanya memberikan fasilitas dan pelayanan publik sedangkan sektor swasta orientasi keuntungan. Walaupun demikian hasil positif pembangunan SDM di Kota Palopo beberapa tahun terakhir dapat tercapai dengan mendapat peringkat ke-2 IPM setelah Kota Makassar.



Gambar 33 Rasio Anggaran Litbang terhadap APBD

Sumber : DPPKAD & Badan Litbang, diolah

Tingkat Penguasaan Iptek. Tingkat penguasaan iptek dilihat dari indeks inovasi daerah, yaitu himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah, dilihat pada Tabel diatas capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Palopo mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2018 dan 2019 indeks Inovasi Daerah Kota Palopo berada pada Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 2710 dan 3790 dengan himpunan Inovasi dari hasil Lomba cipta Inovasi tingkat OPD, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi , Namun pada tahun 2020 dan 2021 dimana merupakan masa pandemi Covid 19, membatasi segala pergerakan maupun koordinasi secatra langsung dalam pendataan Inovasi yang juga minimnya jumlah inovasi yang diciptakan, keadaan ini berdampak pada indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Palopo yang mengalami penurunan yaitu hanya meraih predikat Kurang Inovatif atau nilai indeks masing- masing 278 dan 26,67 setelah masa Pandemi yakni Tahun 2022 dan 2023 Penyelenggaraan Inovasi di pemerintah Kota Palopo dilaksanakan dengan menata dan melaksanakan pembinaan Inovasi Daerah secara intensif memberikan peningkatan indeks inovasi Daerah pada kategori Inovatif dengan nilai indeks tahun 2022 = 56,61 dan Tahun 2023 = 55,92

Tabel 2. 57 Capaian Indeks Inovasi Daerah

TAHUN	NILAI	KATEGORI
2018	2710	sangat Inovatif
2019	3790	sangat Inovatif
2020	278	Kurang Inovatif
2021	26,67	Kurang Inovatif
2022	56,61	Inovatif
2023	55,92	Inovatif

Sumber data : Badan Penelitian dan Pengembangan

2.3.3 DAYA SAING FASILITAS / INFRASTRUKTUR WILAYAH

Indeks layanan infrastruktur adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengukur indeks ini, terdapat variabel yang dijadikan sebagai tolak ukur yaitu : Ketersediaan fisik; Kualitas fisik; Kesesuaian; Efektifitas pemanfaatan; Penyerapan tenaga kerja; dan Kontribusi bagi ekonomi. Data terkait hasil pengukuran indeks tersebut bersumber dari publikasi BRIN, menggunakan hasil penilaian pilar 2 yaitu layanan infrastruktur. Hasil rilis publikasi BRIN hanya tersedia selama tahun 2022-2023. Capaian Kota Palopo selama tahun 2022 s/d 2023 mengalami peningkatan, kemudian dibandingkan dengan Makassar dan Pare-Pare capaian Palopo masih rendah. Rendahnya capaian tersebut salah satunya adalah tidak adanya layanan infrastruktur perkeretaapian di Kota Palopo, sehingga skor untuk layanan tersebut masih nol dibandingkan dua kota lainnya yang dalam hal ini sudah ada infrastruktur eksisting jalur kereta api Makassar-Pare Pare.

Tabel 2. 58 Capaian Indeks Layanan Infrastruktur

Kota	2022	2023
Makassar	2.06	2.64
Pare-Pare	1.93	2.49
Palopo	2.01	2.20

Sumber : BRIN

Rasio Elektrifikasi. Listrik merupakan sumber energi primer yang digunakan oleh masyarakat, tanpa adanya energi listrik gan. Pemerintah hanya memberikan keterbukaan pasar / pasar persaingan sempurna di sektor hulu kepada vendor yang berminat menjual listriknya kepada PLN. Kota Palopo adalah salah satu wilayah yang berkembang pesat di Luwu raya untuk kebutuhan listriknya, dibandingkan dengan Luwu Timur yang kebutuhan listriknya bisa dicukupi oleh PT.Vale dan juga menjualnya kepada PLN. Kondisi eksisting di Kota Palopo pasokan ketersediaan masih besar , sehingga dapat dikatakan pasokan ketersediaan masih aman. Hal ini dapat menjadi nilai jual kepada calon investor yang membutuhkan pasokan tenaga listrik. Kondisi eksisting di Kota Palopo pasokan ketersediaan masih besar , sehingga dapat dikatakan pasokan ketersediaan masih aman. Hal ini dapat menjadi nilai jual kepada calon investor yang membutuhkan pasokan tenaga listrik.

Tabel 2. 59 Rasio Ketersediaan Listrik Kota Palopo Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (KW)	98727366	110043914	118902214	126439814	133026164	134013082
Produksi (Kwh)	176116220	184121010	188944859	196859205	202462719	203731360
Rasio (%)	56.06	59.77	62.93	64.23	65.70	65.78

Sumber : PLN Kota Palopo, diolah

Kemantapan Jalan Infrastruktur fisik dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi jalan yang ada pada suatu wilayah. Panjang jalan permukaan yang merupakan kewenangan Kota Palopo yaitu sebesar 443,39 Km. Meskipun tidak terdapat perubahan panjang jalan, namun terjadi perubahan pada kondisi jalan. Kondisi jalan yang berupa tanah, kerikil dan bebatuan mulai berkurang dan tergantikan dengan jalan aspal dan beton. Perbaikan kondisi jalan ini semakin mempermudah akses yang ada di Kota Palopo. Data panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo ditampilkan dalam Tabel Berikut :

Tabel 2. 60 Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kota Palopo tahun 2018 - 2023 (Km)

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	220,720	267,596	269,784	272,164	285,008	296.681
Beton	77,566	75,858	68,206	72,102	69,102	68.389
Kerikil	138,042	93,659	98,859	93,171	84,692	72.497
Tanah dan Lainnya	7,062	6,277	6,541	5,139	4,588	5.823
Jumlah	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39

Sumber data : Dinas PUPR

Indikator perbaikan aksesibilitas fisik yang berupa jalan selain dilihat dari jenis permukaannya juga dapat dilihat dari kategori kondisi jalan. Jalanan secara umum terbagi menjadi 4 yaitu jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Data kondisi jalan di Kota Palopo ditampilkan pada Tabel bawah. Walaupun terjadi perbaikan kondisi jalan, namun kondisi rusak yang bertambah menunjukkan bahwa prioritas perbaikan jalan diutamakan untuk jalan dalam kondisi rusak berat, sehingga kondisi jalan yang awalnya sedang dapat berubah menjadi rusak karena hujan, muatan kendaraan yang ditanggung jalan, serta umur jalan yang sudah tua. Walaupun demikian kondisi mantap jalan di kota palopo berkisar antara 72-73%. Ketercapaian belum mencapai 100% karena masih banyak jalan terutama jalan penghubung antar kecamatan dan kelurahan yang masih rusak karena aktivitas kendaraan berat terutama untuk pengangkutan hasil pertanian dan galian sirtu. Secara umum, apabila disimpulkan kondisi jalan di Kota Palopo dengan permukaan berupa aspal tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 61 Kondisi Jalan Mantap Kota Palopo

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	264,15	309,54	308,923	310,833	315,75	266,34
Sedang	49,64	7,80	19,517	38,477	22,46	12.45
Rusak Ringan	95,27	49,09	49,580	55,689	47,81	115.21
Rusak Berat	34,33	76,96	65,370	38,391	57,38	49.39
Total	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39	443,39



Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Mantap (%)	72.39	73.48	72.11	73.29	73.40	73.78

Sumber data : Dinas PUPR

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaian. Air minum merupakan kebutuhan primer bagi mahluk hidup, tanpa air manusia tidak dapat berkembang biak dan bertahan hidup. Oleh Karena itu kebutuhan air menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di daerah Kota Palopo. Dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan air bersih, maka dari itu diperlukan proyeksi untuk memenuhi kebutuhan air selama periode waktu tertentu. Perkembangan kebutuhan air di Kota Palopo terbagi menjadi beberapa konsumen yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, serta industri. Selama tahun 2018 sampai tahun 2023, komsumsi kebutuhan air masih didominasi kebutuhan rumah tangga dengan persentase rata-rata 81,11% kemudian diikuti oleh sektor niaga dengan persentase rata-rata 14,11% dan sisanya adalah kebutuhan sosial, instansi pemerintah, serta industri.

Tabel 2. 62 Distribusi Konsumsi Air Perpipaian Kota Palopo

Konsumen Air Kota Palopo	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	485.856	501.139	326.017	410.626	481.431	481.445
Persentase	5,30	5,20	3,38	4,27	4,80	4,98
Rumah Tangga	6.652.226	7.257.460	7.808.389	7.742.291	7.949.494	8.045.455
Persentase	72,61	75,25	81,08	80,58	79,28	81,11
Instansi Pemerintah	309.431	341.092	184.470	167.466	193.820	192.117
Persentase	3,37	3,53	1,91	1,74	1,93	1,81
Niaga	1.703.015	1.533.406	1.302.472	1.280.601	1.392.810	1.444.754
Persentase	18,59	15,90	13,52	13,33	13,89	14,11
Industri	10.488	11.248	8.164	6.707	9.116	9.208
Persentase	0,11	0,12	0,08	0,07	0,09	0,18

Sumber : BPS Kota Palopo

Selanjutnya akses rumah tangga air minum perpipaian yang bersumber dari data Dirjen Cipta Karya-Direktorat Air Minum PUPR hanya tersaji tahun 2021-2023. Hasil capian Kota Palopo masih lebih baik dibandingkan Kota Makassar dan Pare-Pare. Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa ketersediaan air baku Kota masih melimpah yang bersumber dari DAS latuppa, dengan memanfaatkan gravitasi kelerengan dalam menyalurkan ke sambungan rumah.

Tabel 2. 63 Akses Rumah Tangga Air Minum per-Pipaian

Kota	2021	2022	2023
Kota Makassar	52.85	53.83	48.00
Kota Pare-Pare	63.45	65.09	59.29
Kota Palopo	70.94	4.30	107.29

Sumber : Bappelitbanda Prov.Sulawesi Selatan

Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan. Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 2. 64 Proporsi Rumah Tangga Bersanitasi

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	42.622	42.772	33.066	34.872	38.992	46.069
Jumlah Rumah Tinggal	44.209	44.081	39.514	41.220	43.467	55.713
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	96,41	97,03	83,68	84,60	89,70	82,69

Sumber data : Dinas PUPR

Data di atas menunjukkan rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2023 sebanyak 82,69%. Kondisi ini apabila dibandingkan tahun 2018, mengalami penurunan dari angka 96,41%. Hal ini dipengaruhi meningkatnya pembangunan rumah tinggal tetapi tidak didukung oleh sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan.

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 65 Rasio Rumah Layak Huni

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Layak Huni	32.097	34.268	35.313	37.876	38.967	39.365
Jumlah Penduduk	180.678	182.107	184.681	187.331	190.867	194.241
Rasio Rumah Layak Huni	0,178	0,188	0,191	0,201	0,204	0,203

Sumber data : Dinas Perumahan dan pemukiman

Selanjutnya kemampuan akses rumah tangga untuk membeli rumah layak huni dan terjangkau selama tahun 2015-2023 mengalami peningkatan dari 71,23% meningkat di tahun 2023 menjadi 81,91%. Kondisi Kota Palopo masih lebih baik dibandingkan Kota Makassar dan Pare-Pare. Hal ini terjadi karena harga tanah di Kota Palopo masih lebih rendah, sehingga membuat developer fokus untuk konsumen kelas menengah dengan status rumah subsidi.

Tabel 2. 66 Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%)

Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Makassar	70.58	69.16	75.07	70.29	74.08	69.13	82.15	77.27	79.88
Kota Pare-Pare	57.87	57.89	60.26	63.20	54.76	66.12	68.38	81.52	80.74
Kota Palopo	71.23	67.54	74.56	70.11	71.95	82.62	78.90	80.39	81.91

Sumber : Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas bersama BPS

Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik. Listrik merupakan sumber daya primer energi bagi rumah tangga, tanpa adanya energi listrik aktivitas ekonomi dan kehidupan manusia tidak akan berjalan secara sempurna. Sumber penyedia energi listrik yang ada di Indonesia dan Kota Palopo adalah bersumber dari perusahaan listrik negara PT.PLN. Proporsi rumah tangga yang ada di Kota Palopo mayoritas menggunakan sumber penerangan dari PLN, walaupun demikian selama tahun 2019-2023 masih ada rumah tangga yang tidak menggunakan sumber listrik dari PLN dan persentasenya sangat kecil sekali hanya 0,01%.

Tabel 2. 67 Persentase Rumah Tangga Terhadap Penerangan Listrik

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga menggunakan Sumber Penerangan Listrik non PLN	0	0	0	51	10	9
Jumlah Total KK	48628	51489	56582	57255	64386	56062
%	0	0	0	0.09	0.02	0.01
Rumah Tangga dengan Sumber Listrik (%)	100	100	100	99.91	99.98	99.99

Sumber : BPS & P3KE, diolah

Jangkauan Jaringan 4G Kawasan Permukiman Komunikasi merupakan bentuk media perantara dalam menyampaikan gambar atau tulisan dan suara pada individu atau kelompok lainnya. Komunikasi tidak dapat terjadi apabila tidak ada pengirim dan penerima, oleh karena itu diperlukan suatu sarana prasarana yang menjembatani aktivitas pengiriman dan penerimaan pesan. Perkembangan globalisasi memberikan dampak besar terhadap perkembangan komunikasi yang telah memasuki revolusi industri 4.0, Kota Palopo telah memiliki sarana prasarana pendukung tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, terdapat tiga (3) daerah yang belum terakses oleh jaringan komunikasi/Internet. Saat ini Kota Palopo telah terakses jaringan komunikasi/internet sebesar 93,75%, sedangkan yang belum terakses jaringan komunikasi/internet hanya 6,25%. Kedepannya Kota Palopo akan memperluas aksesibilitas jaringan yang belum ada pada tiga daerah tersebut untuk memenuhi cakupan 100%.

Tabel 2. 68 Titik Blank Spot Kota Palopo

Nama Daerah	Kelurahan	Kecamatan
Siguntu	Latuppa	Mungkajang
Minjana	Peta	Sendana
Padang Lambe	Padang Lambe	Wara Barat

Sumber Data : dinas Komunikasi dan informatika

Kota Maju Inklusif dan Berkelanjutan (Proxy Indeks Williamson). Ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dalam penyusunan RPJP nasional terdapat salah satu indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu indeks ekonomi inklusif. Sehubungan dengan indikator tersebut, tidak semua daerah baik provinsi, kab/kota mengukur indeks tersebut. Sehingga pemerintah Kota Palopo dalam menyusun dokumen perencanaan ini menggunakan pendekatan / *proxy* indeks Williamson.

²Indeks Williamson digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Besarnya indeks Williamson bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai indeks ini berarti semakin besar tingkat ketimpangan antar daerah dalam wilayah tersebut. Hasil capaian Indeks Williamson ditampilkan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 69 Indeks Williamson 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Selayar	0.134	0.112	0.111	0.038	0.106	0.108
Bulukumba	0.237	0.197	0.199	0.067	0.189	0.197
Bantaeng	0.159	0.132	0.134	0.045	0.127	0.132
Jeneponto	0.221	0.184	0.191	0.064	0.182	0.186
Takalar	0.199	0.165	0.165	0.056	0.157	0.164



Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gowa	0.319	0.266	0.264	0.089	0.252	0.256
Sinjai	0.181	0.150	0.153	0.052	0.146	0.150
Maros	0.217	0.181	0.188	0.064	0.181	0.179
Pangkep	0.212	0.176	0.177	0.060	0.169	0.171
Barru	0.153	0.127	0.129	0.044	0.123	0.126
Bone	0.318	0.264	0.270	0.091	0.257	0.260
Soppeng	0.176	0.146	0.146	0.049	0.138	0.141
Wajo	0.232	0.193	0.185	0.062	0.175	0.182
Sidrap	0.200	0.166	0.170	0.057	0.163	0.164
Pinrang	0.225	0.187	0.191	0.065	0.183	0.185
Enrekang	0.166	0.138	0.143	0.048	0.137	0.138
Luwu	0.221	0.184	0.182	0.061	0.173	0.177
Tana Toraja	0.178	0.148	0.160	0.054	0.154	0.146
Luwu Utara	0.205	0.170	0.171	0.058	0.163	0.165
Luwu Timur	0.198	0.165	0.164	0.055	0.157	0.160
Toraja Utara	0.177	0.147	0.154	0.052	0.147	0.147
Makassar	0.451	0.375	0.359	0.121	0.341	0.348
Pare Pare	0.139	0.116	0.117	0.040	0.112	0.115
Palopo	0.155	0.130	0.129	0.044	0.124	0.121

Sumber : Bappeda, Hasil olah

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Kota Palopo tergolong rendah yaitu 0,121 dibandingkan dengan Kota Makassar tetapi masih lebih tinggi daripada Kota Pare-Pare. Nilai indeks Williamson yang rendah menunjukkan pembangunan di Kota Palopo dapat dikatakan inklusif atau merata dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Layanan publik terselenggara dan online terintegrasi. Layanan publik terintegrasi berkaitan dengan pembangunan layanan infrastruktur secara berkelanjutan. Harapannya adanya integrasi yang telah diatur oleh perangkat daerah pengampu, maka koneksi jaringan dan pertukaran data menjadi terintegrasi satu data dapat berlangsung secara mudah. Kemudian bagi penerima manfaat langsung masyarakat, dapat dengan mudah mengakses darimanapun tanpa harus bertatap muka dengan di kantor. Hasil capaian di Kota Palopo menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2023, dari 20 layanan *online* menjadi 80 layanan *online*.

Tabel 2. 70 Layanan Publik Terselenggara Online dan Terintegrasi

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan publik yang terselenggara secara online & terintegrasi	20	30	40	50	60	80

Sumber : Dinas Kominfo

2.3.4. DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Indeks Demokrasi. Indeks ini merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Tujuan dari penilaian Indeks Demokrasi ini adalah memberikan data terkait perkembangan demokrasi, data perencanaan pembangunan politik, dan sarana hasil evaluasi pelaksanaan demokrasi suatu daerah. Dalam perhitungannya Indeks demokrasi memiliki 3 aspek penyusun utama yaitu : Kebebasan; Lembaga Demokrasi; dan Kesetaraan. Hasil capaian Kota Palopo tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 71 Proxy Capaian Indeks Demokrasi

Uraian Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota DPRD perempuan	5	5	7	7	7	7
Jumlah seluruh anggota DPRD	25	25	25	25	25	25
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD (%)	20.00	20.00	28.00	28.00	28.00	28.00
Perda Inisiatif DPRD	2	7	3	9	4	5
Persentase Perempuan Pengurus Parpol	31.44	31.44	31.44	38.71	38.71	38.71

Sumber : Sekretariat DPRD

Hasil menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislative Kota Palopo selama 2 periode pemilihan terjadi peningkatan dari 5 menjadi 6 orang perempuan. Kemudian penyusunan peraturan daerah yang diinisiasi oleh DPRD setiap tahunnya jumlahnya masih sangat minim sekali, hal ini berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah sebagai dasar payung hukum dalam bekerja. Disisi lain zaman telah berubah dengan cepat sehingga aturan hukum yang sudah usang dan tidak layak pakai perlu dilakukan revisi kembali.

Indeks Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan beragama merupakan isu yang selalu muncul dalam perjalanan pembangunan negara Indonesia. Ancaman terhadap kerukunan beragama terkadang muncul setiap saat, dan memiliki potensi yang lebih besar pasca pelaksanaan reformasi. Dalam rencana pembangunan nasional kebijakan pembangunan agama dilaksanakan, salah satunya melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Keberhasilan pembangunan di bidang keagamaan salah satunya dilihat dari kondisi kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrument yang digunakan dalam pencapaian pembangunan bidang keagamaan. Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Toleransi beragama. Kategori penilaian indeks kerukunan umat beragama yaitu sebagai semakin mendekati 100, maka semakin tinggi tingkat kerukunan dan kondusifitas sesama umat agama. Hasil capaian Kota Palopo adalah sebagai berikut,

Tabel 2. 72 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	72.27	70.9	73.83	67.46	72.39	-	-
Provinsi	74	71.3	75.67	75.7	74.6	-	-
Kota Palopo	-	-	-	-	72.39	73.09	76.02

Sumber : Kemenag Kota Palopo,2024

Persentase Tindakan Kriminal yang Tertangani. Angka kriminalitas / tingkat kejahatan merupakan salah satu indikator yang dipakai oleh pelaku usaha untuk berinvestasi di suatu daerah. Semakin tingginya angka kriminalitas dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dibangun di suatu daerah, oleh karena itu indikator tersebut dapat berguna dalam perencanaan pembangunan terutama menciptakan iklim investasi. Kota Palopo merupakan wilayah dengan status kotamadya di wilayah Luwu raya dan ketiga setelah Pare-pare dan Makassar, peluang angka kejahatan lebih besar daripada wilayah sekitarnya.

Berdasarkan hasil tabel diatas persentase angka kriminalitas di Kota Palopo tergolong rendah yaitu kurang dari 1% jumlah keluarga yang ada. Walaupun demikian selama tahun 2019-2022 persentasenya mengalami fluktuatif, dan meningkat lagi di tahun 2022 dengan jumlah terlapor terbanyak. Jumlah kejahatan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 menjadi 1371 kasus. Peningkatan terbesar ini salah satunya bersumber dari efek penggunaan sosial media yang masih sekali penggunaannya oleh masyarakat kerap digunakan sebagai alat pamer, sehingga dapat memunculkan kecemburuan sosial.

Semakin canggihnya teknologi dan ketatnya persaingan hidup yang memungkinkan tindakan criminal terjadi setiap saat dan dimanapun tempatnya. Hal ini harus menjadi evaluasi oleh kepala daerah untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah agar arus investasi mengalir masuk.

Tabel 2. 73 Persentase Angka Kriminalitas Kota Palopo Tahun 2021-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kejahatan Terlapor	317	200	212	435	1371
Jumlah Keluarga	40303	41125	41956	57755	44382
Persentase Kriminalitas	0.79	0.49	0.51	0.75	3.09
Proporsi Penduduk yang aman berjalan sendiri	99.21	99.51	99.49	99.25	96.91

Sumber : POLRES; BPS Kota Palopo diolah

Persentase Perda yang Ditegakkan. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan dan penindakan terhadap subyek ataupun obyek yang melanggar peraturan daerah. Setiap laporan yang berkaitan dengan penyimpangan perda wajib ditindaklanjuti melalui kegiatan rutin. Laporan yang masuk berasal masyarakat perlu dilakukan penelaahan apakah memang bagian dari kewenangannya atau pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian apabila sudah masuk Tindakan pidana dan perdata. Peraturan daerah memiliki keterkaitan dengan kemudahan investasi, semakin sederhana peraturan daerah yang dibuat dan tidak berbelit, memberikan peluang arus invsetasi masuk dengan cepat. Salah satu fungsi dari SATPOL PP salah satunya adalah mengamankan berjalannya perda. Kejelasan pengamanan dan pengawalan terhadap pelaksanaan perda yang berhubungan dengan investasi membawa dampak positif bagi iklim investasi di Kota Palopo.

Tabel 2. 74 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelanggaran K3 yang terlapor	186	169	153	150	134	114	737
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	208	184	160	158	134	120	741
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	92,20	91,80	95,62	94,93	100	95	99.46

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 – 2022, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan walaupun tidak 100%, kecuali pada tahun 2021. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Pol PP juga diselesaikan.

Peraturan daerah dibuat untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat, selain itu juga peraturan daerah sebagai alat untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah setempat guna mendukung kondusifitas dan juga peningkatan sumber pendapatan daerah. Instansi yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah adalah satuan polisi pamong praja. Selama tahun 2017-2023 jumlah pelanggaran peraturan daerah mengalami penurunan, walaupun demikian jumlah kasus yang dapat diselesaikan mengalami penurunan seharusnya kondisi ini berlaku terbalik dimana pelanggaran turun dan penyelesaian meningkat. Hal ini terjadi karena ada sebageian kasus yang masuk di satpol PP yang tidak diteruskan untuk tindak lanjut karena bukan bagian dari kewenangan, yang salah satunya adalah kewenangan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan.



Tabel 2. 75 Persentase Penegakan Perda

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA (kasus)	186	169	153	150	134	131	105
Jumlah pelanggaran PERDA (kasus)	190	184	160	158	145	137	130
%	97.89	91.85	95.63	94.94	92.41	95.62	80.77

Sumber : SATPOL PP

Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (*Sister Province/ Sister City*). Indikator ini merupakan proksi dari Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah Tinggi. Adanya kerjasama antar daerah maupun lembaga non pemerintah diharapkan mampu memberikan kontribusi antar kedua belah pihak secara ekonomi maupun penguatan koordinasi kelembagaan. Kota Palopo sepanjang tahun 2018-2023 telah melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Hasil pencapaian kerjasama disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 76 Jumlah PKS

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perjanjian Kerjasama	18	28	16	11	16	7

Sumber : Bagian Kerjasama Daerah

2.3.5 PENERIMAAN DAERAH

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Palopo kurang dari 30%. Kondisi ini terjadi karena peragkat daerah penghasil yang memiliki kewenangan menaruh pajak daerah dan retribusi, belum secara maksimal mencari potensi baru yang ada dilapangan karena tidak didukung oleh peraturan daerah yang sudah diperbarui sesuai perkembangan zaman.

Tabel 2. 77 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164,812,192,980	177,203,606,907	140,122,685,326	150,674,004,142	194,013,652,600
Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah	941,767,702,906	943,899,350,653	935,517,935,254	875,208,300,009	927,786,559,564
Persentase	17.50	18.77	14.98	17.22	20.91

Sumber : LRA DPPKAD diolah

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Kondisi ini juga berlaku terhadap rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang nilainya kurang dari 30%. Kondisi ini terjadi karena peragkat daerah penghasil yang memiliki kewenangan menaruh pajak daerah dan retribusi, belum secara maksimal mencari potensi baru yang ada dilapangan karena tidak didukung oleh peraturan daerah yang sudah diperbarui sesuai perkembangan zaman.

Tabel 2. 78 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164,812,192,980	177,203,606,907	140,122,685,326	150,674,004,142	194,013,652,600
Total Pendapatan Daerah	974,124,785,348	969,407,489,043	936,579,424,986	935,256,256,500	943,087,588,525



Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase	16.92	18.28	14.96	16.11	20.57

Sumber : LRA DPPKAD diolah

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap PAD Begitupun juga rasio pajak daerah dan retribusi terhadap PAD yang nilainya kurang dari 30%. Kondisi ini terjadi karena perangkat daerah penghasil yang memiliki kewenangan menaruh pajak daerah dan retribusi, belum secara maksimal mencari potensi baru yang ada dilapangan karena tidak didukung oleh peraturan daerah yang sudah diperbarui sesuai perkembangan zaman.

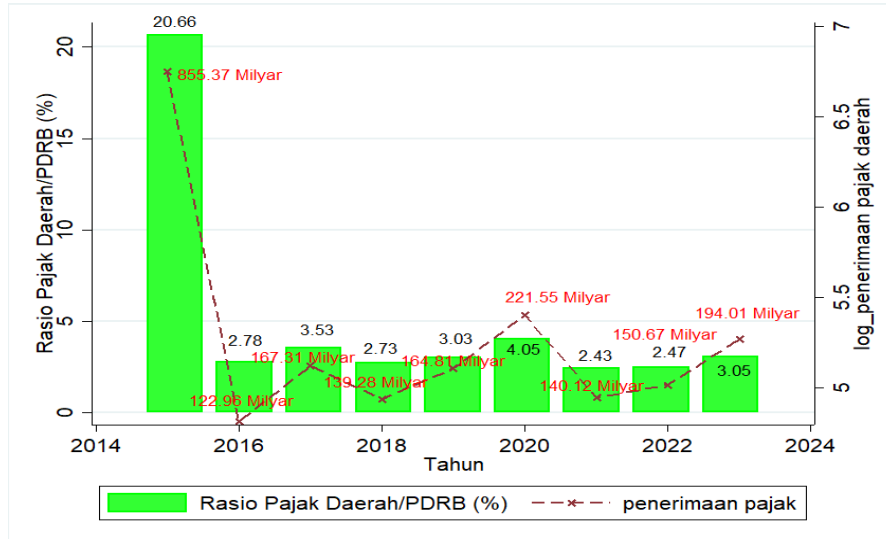
Tabel.2. 1 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	34,860,944,165	34,031,809,461	35,622,582,580	41,418,904,125	46,687,824,782
Retribusi Daerah	9,074,168,786	8,880,154,097	11,577,437,249	18,039,142,233	10,560,295,890
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164,812,192,980	177,203,606,907	140,122,685,326	150,674,004,142	194,013,652,600
Persentase	26.66	24.22	33.68	39.46	29.51

Sumber : LRA DPPKAD diolah

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB. Pajak merupakan paksaan pungutan kepada warga negara untuk pembiayaan pembangunan dan diatur oleh UUD 1945 pasal 23, kemudian menurut Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Penarikan pajak oleh pemerintah memiliki kewenangan yang berbeda-beda, ada yang kewenangan pusat provinsi dan daerah. Peraturan yang mengatur kewenangan penarikan pajak adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Adanya kewenangan daerah dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar dana transfer dari pusat melalui pajak daerah, maka rasio pajak daerah terhadap PDRB daerah menjadikan realisasi penerimaan pajak sebagai aspek daya saing ekonomi daerah. Kota Palopo pernah mengalami puncak tertinggi penerimaan pajak pada tahun 2015 yang mencapai 855,37 milyar rupiah. Kondisi ini terjadi karena ada penyesuaian nilai NJOP tanah sesuai harga berlaku, dan ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh daerah. Kemudian ditahun 2016 terdapat penyesuaian lagi kewenangan pajak yang ditarik oleh provinsi, salah satunya adalah pajak Air Bawah Tanah, sehingga menurun drastic menjadi 122,96 Milyar rupiah. Selama tahun 2016-2023 rata-rata penerimaan pajak daerah di Kota Palopo < 250 milyar setiap tahunnya dengan rata-rata rasio 3% dari total PDRB Kota Palopo. Hasil capaian yang masih rendah ini menjadi rekomendasi kepada instansi pemungut lebih fokus melakukan penagihan kepada WP yang memiliki tunggakan dan disertai perubahan kembali nilai NJOP tanah sesuai harga berlaku saat ini untuk mendongkrak pajak daerah terutama Pajak PBB.


Gambar 34 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Sumber : DPPKAD, diolah

Koefisien variasi harga antar wilayah secara sederhana dibentuk dari nilai inflasi yang terjadi disetiap daerah. Inflasi yang ada didaerah dipengaruhi oleh indeks harga konsumen. Kota Palopo memiliki koefisien variasi harga yang paling rendah dibandingkan Kota Pare-Pare dan Makassar. Kondisi ini terjadi karena arus pergerakan barang jasa lancar dan normalnya kondisi permintaan penawaran yang terjadi di pasar. Informasi harga dan neraca pangan bersumber dari perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Perdagangan Kota Palopo terkait harga dan neraca pangan rata-rata per bulan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2. 79 Harga dan Neraca Bahan Pokok Rata-Rata per Bulan Kota Palopo

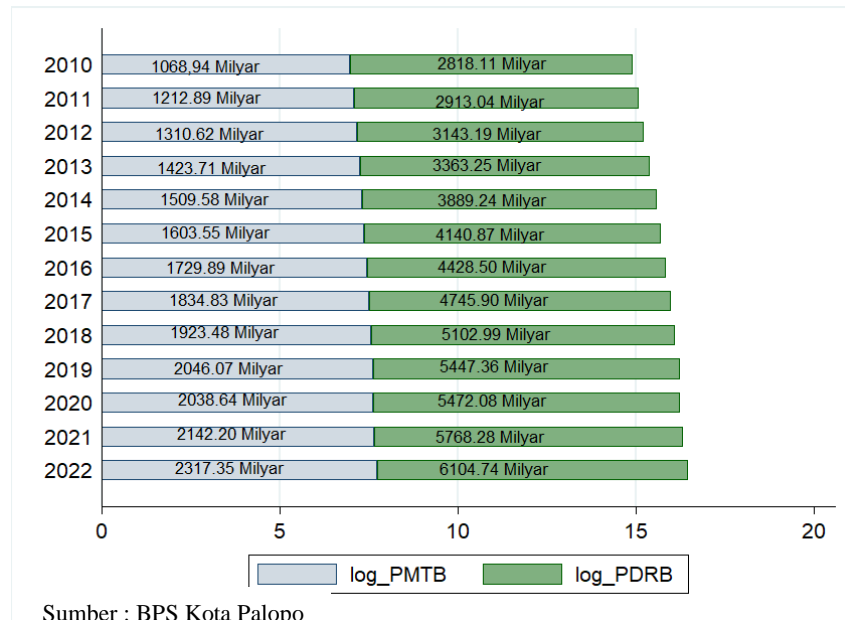
Komoditas	Supply (ton)			Kebutuhan (ton)			Harga/kg (Rp)	Kebutuhan Per kapita Bulan	
	Harian	Mingguan	Bulanan	Harian	Mingguan	Bulanan		ton	Kg
Beras	64.79	453.50	1814.00	53.7	375.90	1503.60	9800	0.008141606	8.141606
Jagung	2.37	16.58	66.32	1.7	11.90	47.60	6000	0.000257742	0.257742
Bawang Merah	1.03	7.20	28.80	0.8	5.60	22.40	24300	0.00012129	0.12129
Bawang Putih	0.88	6.15	24.60	0.7	4.90	19.60	30000	0.000106129	0.106129
Cabai Besar	0.12	0.85	3.40	0.1	0.70	2.80	45000	1.51613E-05	0.015161
Cabai Rawit	1.21	8.50	34.00	1.2	8.40	33.60	85000	0.000181935	0.181935
Daging Sapi	2.76	19.30	77.20	2.6	18.20	72.80	125000	0.000394193	0.394193
Daging Ayam Ras	3.65	25.55	102.20	3	21	84.00	27700	0.000454838	0.454838
Telur Ayam Ras	6.18	43.25	173.00	5.8	40.60	162.40	27500	0.000879354	0.879354
Gula Pasir	1.81	12.70	50.80	1.4	9.80	39.20	13000	0.000212258	0.212258
Minyak Goreng	3.61	25.25	101.00	3.5	24.50	98.00	20000	0.000530645	0.530645

Sumber : Dinas Perdagangan

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB). adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Salah satu contohnya adalah asset tempat tinggal, tanah, bangunan lainnya yang bukan berasal dari pembelian atau pengadaan pemerintah. Menurut BPS hasil pengadaan barang modal oleh pemerintah baik berupa asset bergerak dan tidak bergerak masuk dalam pengeluaran konsumsi pemerintah.

Selama tahun 2010-2022 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran Kota Palopo, mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2010 PDRB yang masih berada pada angka

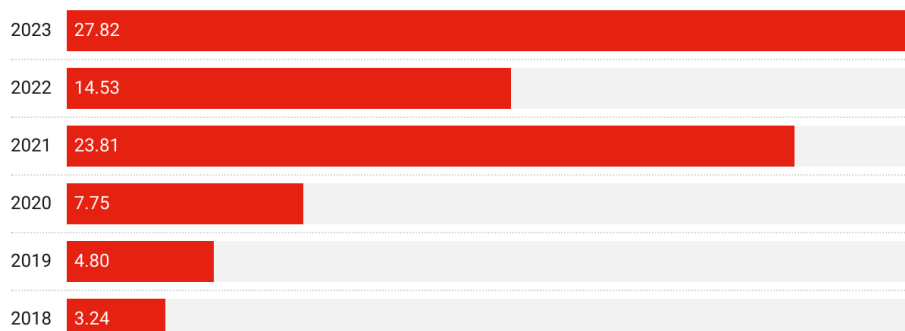
2.913,05 milyar rupiah selama 13 tahun meningkat menjadi 6.104,74 milyar rupiah. Kontributor utama yang mendorong peningkatan PDRB menurut pengeluaran adalah PMTB (pembentukan modal tetap bruto). Konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama di Kota Palopo yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi pada angka 5,83% pada tahun 2022.



Tabel 2. 80 Nilai PMTB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2022 (Milyar Rupiah)

Pertumbuhan investasi daerah tidak hanya dilihat dari indikator makro lewat jumlah investor baik PMA dan PMDN yang masuk dan terdata oleh dinas perizinan setempat. Tetapi juga dapat dilihat dari perputaran sektor keuangan moneter di wilayah tersebut. Seperti diketahui bahwa urusan moneter adalah urusan pemerintah pusat melalui undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dengan mendelegasikan kewenangan tersebut secara independent kepada Gubernur Jendral Bank Indonesia (BI). Gubernur BI memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan moneter tanpa dapat diintervensi oleh eksekutif. Oleh karena itu BI memiliki kewenangan menjalankan fungsi makroprudensial secara eksplisit diatur dalam UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan aturan tersebut kewenangan kebijakan mikroprudensial dialihkan kepada OJK. Salah satu kewenangan dari OJK adalah mengatur dan mendata transaksi saham dalam pasar modal, selain pengawasan terhadap bank perkreditan rakyat dan Lembaga pembiayaan / kredit, termasuk pinjaman *online*.

Hasil publikasi statistik transaksi saham bulanan oleh OJK Kota Palopo memiliki perkembangan menggembirakan. Masyarakat Kota Palopo telah paham investasi dan literasi keuangan lainnya selain simpanan konseratif perbankan. Sepanjang tahun 2018-2023 mengalami peningkatan signifikan dari 3,24 milyar menjadi 27,82 milyar. Kondisi ini menunjukkan banyak warga Palopo melakukan transaksi saham baik sebagai bentuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek lewat spekulasi naik turunnya harga pasar saham. Rata-rata nilai transaksi saham di Kota Palopo tersaji pada gambar dibawah.



Source: Statistik Bulanan Pasar Modal OJK • Created with Datawrapper

Gambar 35 Nilai Transaksi Saham Rata-Rata Tahunan Kota Palopo (Milyar Rp)

Salah satu fungsi dari lembaga sektor keuangan non bank adalah fungsi intermediasi keuangan. Pengelola dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bertugas mengelola dana pensiunan bagi pegawai negeri ataupun pihak lain berdasarkan kesepakatan. Pengelola dana pensiunan yang ada di Kota Palopo adalah PT TASPEN. Selama tahun 2016-2023 rasio dana pensiunan terhadap total PDRB berkisar pada rentang 11-12%. Semakin besarnya rasio dana pensiunan yang dikelola di suatu daerah mengindikasikan bahwa perekonomian di sektor riil khususnya pada bidang pekerjaan formal mengalami peningkatan, sehingga wilayah tersebut bisa dikatakan tidak masuk dalam daerah dengan kontribusi lapangan usahanya diluar lapangan usaha sektor ekstraktif. Kemudian di sisi moneter, pengelolaan dana pensiun memberikan dukungan terhadap besar kecilnya sirkulasi uang yang beredar di daerah, dan menjaga tingkat inflasi.

Tabel 2. 81 Rasio Dana Pensiunan terhadap Total PDRB (%)

Tahun	Kepesertaan Pensiunan	PDRB (Milyar)	Aset Dana Pensiun (Milyar)	rasio (%)
2016	20,291	4,429	535	12
2017	20,426	4,746	547	12
2018	20,334	5,103	561	11
2019	20,481	5,447	602	11
2020	20,671	5,472	628	11
2021	20,942	5,768	647	11
2022	20,936	6,105	654	11
2023	21,655	6,370	687	11

Source: TASPEN Cabang Palopo • Created with Datawrapper

Selanjutnya secara data makro jumlah agregat investasi yang masuk di Kota Palopo bersumber dari data Dinas Perizinan tahun 2017-2023. Hasil menunjukkan bahwa jumlah investasi baik PMDN dan PMA di Kota Palopo mengalami penurunan signifikan dari 147 pengajuan investasi menjadi 50 ditahun 2023. Hal tersebut juga berlaku kepada investasi PMDN berskala nasional yang mengalami penurunan juga dari menjadi 55 pengajuan izin investasi.

Tabel 2. 82 Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	147	129	78	74	77	33	50
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	147	129	85	74	77	51	55

Sumber : Dinas Perizinan

Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD). IPKD merupakan suatu ukuran dalam menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Dalam mengukur IPKD terdapat enam dimensi utama yaitu : Keseuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Kualitas anggaran belanja dalam APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Serapan anggaran; Kondisi keuangan daerah; dan Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil capaian Kota Palopo lebih baik dari 2 kota lainnya, hal ini dapat dijelaskan bahwa selama ini pemerintah komitmen untuk menyelesaikan hasil dari temuan pemeriksaan sehingga mendapatkan opini WTP dari BPK. Selain itu ketaatan bendahara umum daerah dalam melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan.

Tabel 2. 83 Hasil Capaian IPKD

Kota	IPKD					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	22.86	26.80	25.30	42.15	56.60	57.11
Pare-Pare	62.58	63.60	65.93	65.41	57.93	57.4
Palopo	52.20	52.08	58.27	74.31	69.83	71.28

Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 INDEKS REFORMASI HUKUM

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator dari 26 (dua puluh enam) indikator keberhasilan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level Meso yaitu “birokrasi yang bersih dan akuntabel”. IRH sebagai instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Sebagai wujud menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut, dalam penilaian IRH, Kementerian Hukum dan HAM diamanatkan sebagai leading institution dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Penilaian IRH dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai pedoman yang tertuang dalam Permenkumham No.17 Tahun 2022 tentang Penilaian IRH pada K/L/Pemda dengan ruang lingkup penilaian terdiri dari 4 Variabel dan 10 Indikator Penilaian. Hasil capaian Kota Palopo masih lebih rendah dari capaian Kota Makassar dan Pare-Pare. IRH Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar 67,78

Tabel 2. 84 Capaian IRH Tahun 2023

NO	INSTANSI	NILAI AKHIR HASIL TIM PUSAT		
		NILAI AWAL	NILAI APRESIASI	NILAI AKHIR
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	87,55	9,96	97,51
2	Pemerintah Daerah Kota Makassar	86,15	11,08	97,23
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep	84,30	12,56	96,86
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	82,45	14,04	94,49
5	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	78,85	8,92	87,77
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	77,90	9,68	87,58
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara	67,30	10,16	77,46
8	Pemerintah Daerah Kota Parepare	63,55	13,16	76,71
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	61,95	14,44	76,39
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	59,35	8,52	67,87
11	Pemerintah Daerah Kota Palopo	58,90	8,88	67,78
12	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng	56,00	11,20	67,20
13	Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara	54,00	12,80	66,80
14	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	49,80	8,16	57,96
15	Pemerintah Daerah Kabupaten Barru	48,95	8,84	57,79
16	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	42,25	14,20	56,45
17	Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	40,65	15,48	56,13
18	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	37,15	18,28	55,43
19	Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	37,10	18,32	55,42
20	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	36,90	18,48	55,38
21	Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	27,60	17,92	45,52
22	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	27,40	18,08	45,48
23	Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto	26,30	18,96	45,26
24	Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	-	-	-
25	Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	-	-	-

Sumber : Bagian Hukum

2.4.2 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Indikator ini merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, yang diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan sejak 5 tahun oleh pemerintah kota palopo menunjukkan tren kenaikan yang diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi.

Nilai SPBE kota Kota Palopo mendapatkan nilai 2,6 kategori CUKUP pada tahun 2019, angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya nilai 1,88 dengan kategori CUKUP. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 indeks SPBE mengalami peningkatan yaitu 2.17 kategori CUKUP tahun 2020, nilai 2.34 kategori CUKUP tahun 2021 dan nilai 2.90 kategori BAIK. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan berbasis IT semakin meningkat, sebagaimana di jabarkan dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 85 Nilai SPBE Kota Palopo 2018-2023

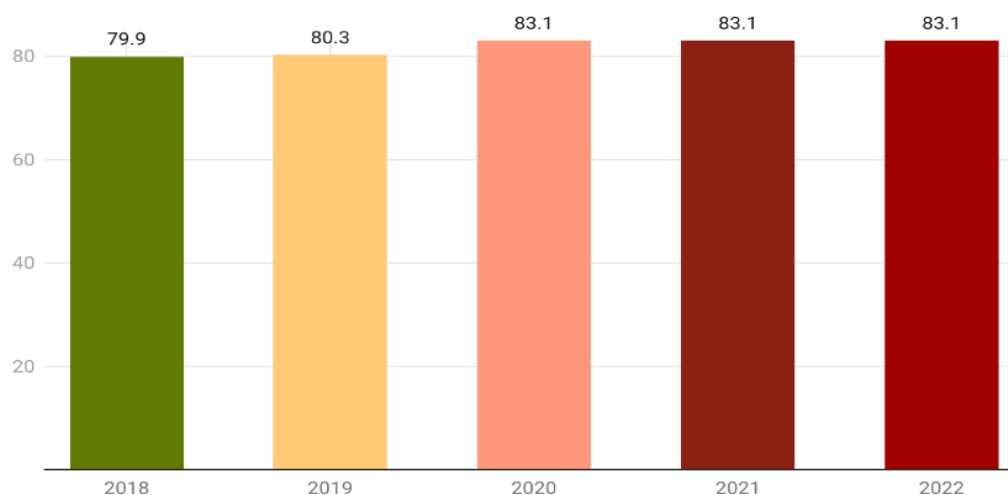
Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	1.88 (cukup)	2.6 (cukup)	2.17 (cukup)	2,34 (cukup)	2.90 (baik)	3.31 (Baik)

Sumber : Dinas Komunikasi dan informatika kota palopo

2.4.3 INDEKS PELAYANAN PUBLIK.

Pelayanan publik merupakan produk jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah setempat dalam memberikan kesejahteraan ekonomi, aksesibilitas Pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan termasuk kegiatan ekonomi oleh pelaku usaha. Indikator penilaian suatu daerah salahsatunya adalah kriteria aspek pelayanan publik yang diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat. Semakin banyaknya masyarakat yang menilai puas terhadap kinerja pelayanan pemerintahan, maka dapat dikatakan kinerja perangkat daerah pengampu dalam suatu pemerintah daerah cepat efisien dan tidak berbelit. Intinya masyarakat akan merasa puas dan senang apabila pengurusan pelayanan cepat, dan tidak ada tambahan biaya lain-lain / pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat diluar peraturan daerah yang berlaku. Hal yang sangat mempengaruhi kinerja pelayanan public adalah reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh kepala daerah setempat untuk memotong alur birokrasi yang Panjang dan berbelit.

Kota Palopo telah melakukan reformasi birokrasi dengan penggunaan system teknologi informasi guna mempermudah prosedur pelayanan yang diajukan oleh masyarakat, walaupun demikian Kota Palopo masih memiliki kelemahan yaitu gemuknya struktur birokrasi yang membuat inefisiensi penggunaan APBD. Kondisi ini berdampak kepada Indeks Pelayanan Publik Kota Palopo yang mengalami perbaikan dari tahun 2018-2020 yaitu dari angka 79.9 menjadi 83.1, selanjutnya tahun 2020-2022 kondisi masih stagnan tidak ada perubahan. Penyebab terjadinya stagnasi ini adalah belum adanya inovasi baru yang bersifat sistemik dengan disertai dukungan peraturan daerah yang memperkuat landasan regulasi pelaksanaan dan eksekusi di lapangan, hanya bersifat mempersingkat dan menyederhanan proses bisnis dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.



Created with Datawrapper

Gambar 36 Indeks Pelayanan Publik

Sumber : Bagian Organisasi

2.4.4 INDEKS SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS

Indeks SPI merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Dalam perhitungan indeks SPI melibatkan tiga sumber data yaitu: Sumber Internal (Pegawai di Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah); Sumber Eksternal (Pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi); Narasumber Ahli (Auditor dari BPK, BPKP, Ombudsman). Hasil capaian nilai SPI Kota Palopo tahun 2023 mengalami penurunan kualitas dari sebelumnya di angka 7 menjadi 6. Hal ini perlu menjadi masukan terhadap perangkat daerah pengampu untuk mengurangi potensi penyimpangan yang menjadi temuan oleh auditor dari inspektorat maupun BPK dan BPKP.

Tabel 2. 86 Capaian Indeks SPI

Wilayah	2021	2022	2023
Kota Palopo	72.58	73.05	63.58

Sumber : Inspektorat

2.4.5 NILAI MCP KPK

Indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) bertujuan untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Lewat MCP pemangku kepentingan dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap daerah dan membantu identifikasi titik-titik rawan yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat dihindarkan. Perubahan area indikator pencegahan korupsi salah satunya adalah pemisahan area perencanaan dan penganggaran, serta perluasan area perizinan dengan memasukan sektor layanan publik. Area tata kelola dana desa tidak diikutsertakan, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemda. Hasil capaian MCP KPK Kota Palopo selama tahun 2021-2023 mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindakan pidana korupsi. Hasil capaian tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 87 Hasil Capaian Nilai MCP

Uraian	2021	2022	2023
Capaian MCP	76	70	58.73

Sumber : Inspektorat

2.4.6 INDEKS MATURITAS SPIP

Penilaian penyelenggaraan maturitas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2008 dimana menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern dilingkungan masing-masing. Bentuk pengawasan SPIP Terintegrasi adalah *monitoring* dan evaluasi Pengawasan lebih menitikberatkan pada aspek analisis terhadap hasil penilaian SPIP/SPIP-T yang selama ini sudah dilaksanakan, dengan beberapa data/informasi tambahan serta *monitoring* terhadap upaya tindak lanjut pemerintah daerah untuk memperkaya hasil analisis dengan tujuan memastikan diperolehnya informasi strategis keberhasilan implementasi SPIP pemerintah daerah yang diindikasikan melalui daya ungkit dalam perspektif efektivitas dan efisiensi organisasi serta program pembangunan nasional, kendalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-uandangan.

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palopo tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,057 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3**
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,594 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 2**.
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah atau **Level 1**.

2.4.7 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks ini menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Fokus utamanya yaitu adanya perubahan *mindset* dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan public, perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital, deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM dan efektivitas pengawasan internal. Capaian indeks reformasi birokrasi dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam waktu 5 tahun tren mengalami fluktuatif walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2018-2023. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka indikator ini mengalami peningkatan sebesar 2.61%, begitupula dengan capaian tahun 2020 yaitu 50.33 mengalami penurunan, capaian pada tahun 2021 yaitu 52.13 dan tahun 2022 yaitu 55.09 kembali mengalami kenaikan dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72.

Tabel 2. 88 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2018-2022

Indikator	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi (point)	50.09	52.70	50.33	52.13	55.09

Sumber : Lakip Kota Palopo

2.4.8 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH

Sistem ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Adapun predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah kota palopo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari 52,43 menjadi 62,87.

Tabel 2. 89 Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah	52.43	60.03	61.01	62.40	62.87

Sumber : Setda Kota Palopo 2023

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

2.5.1 KESIMPULAN HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2025

RPJPD Kota Palopo tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025 merupakan dokumen strategis yang bertujuan untuk menggambarkan arah pembangunan daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahun 2005-2025 memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kota Palopo jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025, RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Evaluasi RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap target indikator kinerja Sasaran Pokok dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025 yang di nilai dari setiap Tahapan Pembangunan Lima Tahun pelaksanaan RPJMD, untuk



melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja RPJPD Kota Palopo 2005-2025.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025 merupakan rencana tahun terakhir dari Perubahan RPJPD Kota Palopo 2005-2025, Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tahun awal penyusunan RPJPD Kota Palopo berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJPD maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Indikator capaian kinerja dengan interval Sangat Rendah (SR) terdapat pada :
 - Misi 4 yaitu meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah dengan nilai 41.73%.
 - Misi 6 yaitu meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah dengan nilai 27.99%.
 - Misi 7 yaitu meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan nilai 22.80%.
- b. Indikator capaian kinerja dengan interval Rendah (R) terdapat pada :
 - Misi 2 yaitu Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dengan nilai 52.19%.
- c. Indikator capaian kinerja dengan interval Sedang (S) terdapat pada :
 - Misi 1 yaitu Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan dengan nilai 66.71%.
 - Misi 5 yaitu Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan nilai 67.58%.
- d. Indikator capaian kinerja dengan interval Sangat Tinggi (ST) terdapat pada :
 - Misi 3 yaitu mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan nilai 108.61%.

2.5.2 REKOMENDASI TERHADAP RPJPD TAHUN 2025-2045

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan serta kendala dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang, tinjauan dan analisis realisasi dan capaian evaluasi hasil RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yakni:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 2005-2025 untuk selanjutnya dapat disusun strategi penyelesaian pada perencanaan berikutnya;
2. Mencermati kembali indikator yang masih relevan untuk dilaksanakan serta menjadikan realisasi 2022 sebagai baseline perencanaan periode berikutnya.
3. Menentukan target kuantitatif sebagai *milestone* pencapaian di tiap periode RPJPD, dengan indikator yang terukur dan jelas untuk diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan menghasilkan data yang akuntabel;
4. Melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif dalam proses penyusunan RPJPD, termasuk masyarakat, akademisi, dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan representasi yang lebih luas dan adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
5. Memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam setiap kebijakan dan program yang diusulkan dalam RPJPD, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 PROYEKSI KEPENDUDUKAN DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Proyeksi kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung fasilitas publik, dan pelayanan umum. Semakin tinggi atau banyak penerima manfaat fasilitas tersebut, maka diperlukan penambahan kapasitas baik fasilitas

umum maupun pelayanan. Dari dasar proyeksi penduduk yang merupakan proksi penerima manfaat pelayanan pemerintahan, maka arah kebijakan pembangunan dapat diambil sesuai dengan prioritas yang ingin dituju.

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar, khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi prioritas daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM, prasarana dan sarana dasar merupakan poin penting dalam mendukung penerapan SPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan trantibum. Kota Palopo merupakan salah satu kotamadya yang menjadi lokasi migrasi penduduk sekitar Luwu raya baik bersifat risen/ulang-alik karena pekerjaan atau melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo. Dampak dari migrasi tersebut adalah kapasitas daya dukung wilayah, sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 perlu dilakukan proyeksi jumlah penduduk baik setiap kecamatan, kelompok umur dan dukungan fasilitas pelayanan umum lainnya.

2.6.2 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN

Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbesar adalah kecamatan Wara timur, Wara dan diikuti kecamatan Bara. Kedua kecamatan tersebut berada di wilayah kota yang merupakan tempat pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Hasil proyeksi selama tahun 2025-2045 pada tabel dibawah menunjukkan 3 kecamatan tersebut, masih menjadi lokasi dengan jumlah penduduk terbesar. Kedepannya selama kurun waktu 2025-2045 agar tidak terjadi kepadatan, penataan tata ruang dan pemberian izin lokasi hunian diupayakan untuk berada di luar 3 kecamatan tersebut. Pembukaan ruang hijau, fasilitas umum dan hunian baru di pinggiran pusat kota dapat memberikan efek dalam jangka Panjang kepadatan penduduk yang merata di setiap kecamatan tidak terpusat pada 3 kecamatan wilayah kota.

Tabel 2. 90 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo Kota Palopo (Jiwa)

Kecamatan	Penduduk Tahun	Proyeksi Penduduk				
	2023**	2025	2030	2035	2040	2045
Wara	33229	34888	39406	44510	50275	56787
Wara Utara	21751	22837	25795	29136	32910	37173
Wara Selatan	20235	21245	23997	27105	30616	34581
Telluwana	16958	17805	20111	22716	25658	28981
Wara Timur	40326	42340	47824	54018	61014	68917
Wara Barat	12048	12649	14288	16138	18229	20590
Sendana	7823	8214	9278	10479	11837	13370
Mungkajang	10900	11444	12927	14601	16492	18628
Bara	32302	33915	38308	43269	48874	55204
*Total Populasi	193280	198105	210167	222230	234293	246356

Sumber : Kajian KLHS Tahun 2025-2045, *Hasil olah, ** Proyeksi

Hasil proyeksi total populasi Kota Palopo selama tahun 2025-2045 berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama 20 tahun kedepan meningkat dari 193280 jiwa menjadi 246356 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Palopo dapat ditekan apabila pemerintah melalui Dinas KB dan Pengendalian Penduduk tetap mengkampanyekan 2 anak cukup dan mengikuti MKJP bagi pasangan usia subur.

2.6.3 PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk di kota Palopo masih selama tahun 2010-2019 masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan, namun pada tahun 2020-2023 jumlah penduduk laki-laki mengambil alih dominasi oleh perempuan. Penduduk laki-laki meningkat secara pelan dan konsisten, dan sebaliknya jumlah penduduk perempuan turun secara teratur setiap tahunnya. Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2040 masih didominasi oleh penduduk laki-laki, tetapi pada tahun 2045, seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Hasil proyeksi disajikan pada tabel dibawah. Hasil proyeksi selama kurun waktu 2025-2040 jumlah penduduk rasio jumlah penduduk laki-laki adalah 102 atau

dengan perbandingan 2:1, kemudian di tahun 2045 rasio turun menjadi 101 dengan perbandingan 1:1 yaitu keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 91 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palopo (Jiwa)

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun	Proyeksi Penduduk				
	2023**	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	96040	96995	99384	101774	104163	106552
Perempuan	93818	94845	97410	99976	102542	105108
Total Populasi	193280	198105	210167	222230	234293	246356
Rasio	102 2:1	102 2:1	102 2:1	102 2:1	102 2:1	101 1:1

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah; ** Proyeksi

2.6.4 PROYEKSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan bagian dari perhitungan angka ketergantungan, untuk menghitung angka tersebut diperlukan pembagian kelompok berdasarkan umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan lebih besar dari 65 tahun. Angka ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Hasil proyeksi selama tahun 2025-2045 kelompok umur yang memiliki jumlah terbesar adalah 15-64 tahun, kemudian diikuti oleh umur 0-14 tahun. Berdasarkan hasil proyeksi jangka panjang angka ketergantungan mengalami kenaikan. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Pekerjaan rumah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang yang perlu dicarikan solusi agar meningkatnya angka ketergantungan tidak berdampak negatif adalah membuka kesempatan kerja atau peluang seluas-luasnya kepada usia produktif, agar tidak masuk dalam jurang kemiskinan.

Tabel 2. 92 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Palopo

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk					
	2023**	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	49067	50444	53886	57328	60770	64212
>65	10924	12301	15743	19185	22627	26069
15-64	132940	134317	137759	141201	144643	148085
Angka Ketergantungan	45.12	46.71	50.54	54.19	57.66	60.97

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah, **Proyeksi

2.6.5 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN

Pemenuhan kebutuhan fasilitas Kesehatan bagi masyarakat adalah bagian dari penerapan SPM bidang Kesehatan. Kesehatan termasuk dalam *mandatory spending* pemerintah daerah nomor 2 setelah bidang Pendidikan. Pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar apabila ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukungnya dicukupi oleh pemerintah, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan juga bagi sektor swasta untuk masuk membantu keterjangkauan pelayanan pemerintah. Pihak swasta dapat mengoperasikan rumah sakit ataupun klinik sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Rumah sakit salah satu contoh, dimana pihak swasta dapat mengambil bagian dalam melayani masyarakat yang ada di Kota Palopo. Kota Palopo memiliki jumlah rumah sakit umum daerah 1 dan yang lainnya 7 rumah sakit adalah operator swasta. Hasil proyeksi pada tabel dibawah selama tahun 2025-2030 kapasitas rumah sakit baik swasta dan pemerintah masih dapat menampung jumlah kenaikan penduduk dari 198105 menjadi 210167, tetapi pada tahun 2035-2045 jumlah rumah sakit perlu dilakukan penambahan dari 8 menjadi 9 untuk memenuhi kapasitas daya tampung.

Tabel 2. 93 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Palopo

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Faskes					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	193280	198105	210167	222230	234293	246356
Rata-rata populasi/kecamatan	21730	22815	25770	29108	32878	37137
Rata-rata populasi/kelurahan	4346	4563	5154	5822	6576	7427
Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	9	9	9
Jumlah Puskesmas	12	12	13	13	13	14
Jumlah Pustu	30	32	36	40	45	48
Jumlah Posyandu	149	150	165	180	198	220
Jumlah Klinik	16	18	22	26	31	34

Sumber : BPS Kota Palopo; Dinas Kesehatan, diolah

Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang berlokasi di setiap kecamatan. Puskesmas dibuat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan yang dapat memberikan kewenangan pemberian rujukan kepada pasien dengan keluhan penyakit yang tidak bisa ditangani olehnya dan harus diteruskan kepada rumah sakit dengan tipe tertentu untuk menolong nyawa pasien. Penyediaan puskesmas merupakan salah satu upaya meningkatkan SPM kesehatan dalam hal aksesibilitas didaerah yang sulit terjangkau/atau pinggiran kota. Hasil proyeksi selama tahun 2030-2040 diperlukan penambahan jumlah puskesmas dari 12 menjadi 13, kemudian di akhir periode perencanaan pembangunan jangka Panjang 2045 diperlukan penambahan kembali menjadi 14 puskesmas.

Pustu merupakan akronim dari puskesmas pembantu. Pustu didirikan untuk mendukung pelayanan puskesmas yang berlokasi di ibukota dengan masyarakat yang bermukim di desa/kelurahan yang memiliki jarak lokasi menuju ibukota kecamatan yang jauh. Tidak semua pustu didirikan di wilayah yang berlokasi jauh dari ibukota kecamatan, melainkan juga memperhatikan jumlah cakupan pelayanan penduduk di beberapa desa/kelurahan tersebut. Hasil proyeksi jumlah pustu yang harus disediakan selama tahun 2025-2045 dari 30 pustu perlu ditambah menjadi 48 pustu.

Posyandu salah satu juga bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di lingkup pemerintahan paling kecil yaitu Rukun Warga (RW). Posyandu tidak melakukan pelayanan secara rutin 5 hari kerja dalam sebulan, tetapi di waktu tertentu sesuai jadwal pelayanan. Posyandu ini dikhususkan untuk melayani Kesehatan ibu hamil, balita, baduta, dan penduduk lansia. Hasil proyeksi selama tahun 2025-2045 kebutuhan yang harus tercukupi adalah 220 posyandu.

Klinik adalah salah satu operator kesehatan yang memiliki kategori tingkatan lebih rendah dari rumah sakit. Klinik bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan, dengan pelayanan berbayar dengan harga lebih diatas dibandingkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Klinik memberikan fasilitas khusus yang tidak dimiliki tempat pelayanan Kesehatan lainnya dengan penyediaan dokter spesialis tertentu. Tidak hanya pada lingkup kesehatan, melainkan juga lingkup kecantikan, dan pengobatan tradisional herbal lainnya. Hasil proyeksi jumlah klinik selama tahun 2025-2045 mengalami peningkatan dari 16 menjadi 34 atau hampir 2 kali lipatnya.

2.6.6 PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN

Upaya pemerintah dalam mencerdaskan bangsanya adalah meningkatkan kualitas Pendidikan setiap warganya tanpa terkecuali baik miskin dan kaya. Pendidikan merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan strata sosial dan keluar dari jurang kemiskinan. Guna mendukung pemerintah pusat dalam mencerdaskan manusia Indonesia, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM bidang pendidikan, yang masuk dalam *mandatory spending* urutan pertama dalam alokasi APBD. Dukungan yang wajib disediakan adalah sekolah dalam setiap jenjang mulai dari PAUD sampai SMP sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Penyediaan fasilitas pendidikan tidak hanya dimonopoli oleh pusat, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, operator swasta dapat berperan untuk mengembangkan dan membangun fasilitas pendidikan tertentu baik yang bersifat sekolah umum maupun

sekolah agama. Pengajaran bagi anak dimulai dari usia dini, oleh karena itu diperlukan penyediaan Pendidikan pada tingkatan ini yaitu PAUD. Usia jenjang PAUD adalah 5-6 tahun, yang kemudian dilanjutkan dalam tahapan selanjutnya untuk persiapan pra sekolah adalah taman kanak-kanak (TK) dengan rentang usia 6-7 tahun. Hasil proyeksi kebutuhan fasilitas Pendidikan tahun 2025-2045 pada jenjang ini mengalami kenaikan signifikan yaitu PAUD dari 24 di tahun 2023 menjadi 281 di tahun 2045, sedangkan TK dari 93 menjadi 278.

Jenjang pendidikan selanjutnya adalah SD dan SMP. Penyedia layanan pendidikan di Kota Palopo baik SD dan SMP tidak hanya negeri, melainkan swasta juga mengambil peran dengan kelebihan berbagai fasilitas penunjang dan metode pendidikan yang berbeda dengan sekolah negeri. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045 tabel dibawah jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan SD meningkat dari 81 menjadi 211, dan SMP dari 25 menjadi 130 sekolah, peningkatan tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah anak usia sekolah setiap tahunnya.

Tabel 2. 94 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Palopo

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	193280	198105	210167	222230	234293	246356
Jumlah PAUD*	24	56	112	168	225	281
Jumlah TK*	93	130	167	204	241	278
Jumlah SD*	81	107	133	159	185	211
Jumlah SMP*	25	46	67	88	109	130
Jumlah MI**	7	27	48	68	88	108
Jumlah MTS**	8	30	52	74	96	118

Sumber : *Data Dapodik Dinas Pendidikan,2023; **EMIS Kemenag diolah

Madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (Mts) merupakan bagian dari pendidikan sekolah keagamaan yang berada dibawah naungan Departemen Agama. Berbeda dengan sekolah umum sekolah agama memiliki kurikulum yang berbeda yaitu 70% materi agama yang meliputi hadits, fiqih, dan sejarah islam sisanya 30% merupakan pelajaran umum. Sekolah MI dan MTS baik negeri dan swasta berada dalam kewenangan Depag Kota Palopo. Hasil proyeksi tahun 2025-2045 ketersediaan fasilitas Pendidikan MI meningkat dari 7 menjadi 108, dan MTS dari 8 menjadi 118. Jumlah proyeksi ini berbeda dengan jenjang yang sama SD dan SMP dikarenakan kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan anaknya sekolah di sekolah umum dengan porsi pelajaran umum 70% dan pelajaran agama hanya 30%, daripada menyekolahkan anaknya di madrasah yang terbatas hanya pada urusan agama sehingga kesulitan untuk meneruskan jenjang pendidikan perguruan tinggi .

2.6.7 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

2.6.7.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Kebutuhan rumah tinggal di Kota Palopo mengalami trend kenaikan, hal ini terjadi karena setiap tahun jumlah penduduk Kota Palopo mengalami peningkatan. Disisi lain suplay perumahan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat Kota Palopo tidak hanya terbatas pada tipe rumah subsidi melainkan juga tipe perumahan non subsidi. Keterbatasan developer perumahan melakukan pengembangan dikarenakan permasalahan lahan terbatas dan perizinan tata ruang, dimana lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) tidak dapat dirubah peruntukannya menjadi kawasan perumahan. Maka dari itu diperlukan perubahan Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) untuk merubah sebagian lahan LP2B yang tidak produktif menjadi kawasan permukiman. Berikut adalah proyeksi kebutuhan lahan perumahan dan kebutuhan rumah di Kota Palopo tahun 2025-2045, tersaji dalam tabel bawah.

Tabel 2. 95 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	193.280	198.105	210.167	222.230	234.293	246.356
Proyeksi Kebutuhan lahan (ha)	645,545	951,17	1.167,71	1.343,16	1.561,080	1.779
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	25.822	38.047	46.708	53.726	62.443	71.160

Sumber: Dokumen RP2KPKPK 2022

2.6.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air bersih tidak hanya digunakan sebagai kebutuhan domestik rumah tangga, tetapi juga digunakan sebagai untuk konsumsi air minum dan memasak. Sumber utama penyedia kebutuhan air minum bersih tidak hanya dari air hujan yang ditampung, sumber mata air pegunungan, sumur bor yang terlindungi tetapi juga dari PDAM. Mayoritas di Kota Palopo 89,43% sumber air bersih bersumber dari PAM Tirta Mangkaluku. Kondisi penyediaan air minum di Kota Palopo hampir seluruh wilayah yang meliputi 48 (empat puluh delapan) kelurahan telah terlayani oleh jaringan air minum dari PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Dalam perjalanan proses pembangunan di Kota Palopo kapasitas produksi air minum, dari 5 (lima) IPAM yang ada mampu memproduksi air minum sebesar 550 liter/detik. Jika di asumsikan bahwa pelanggan tersebut adalah rumah tangga yang didalamnya masing-masing berpenghuni 5 orang (1 KK = 5 orang), maka proyeksi kebutuhan air minum tahun 2025-2045 masih dalam kondisi surplus dikarenakan kebutuhannya kurang dari 550 liter/detik. Berikut adalah data proyeksi yang tersaji pada tabel bawah.

Tabel 2. 96 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	193.280	198.105	210.167	222.230	234.293	246.356
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (ltr/dtk)	439	449	474	499	524	549

Sumber: Dokumen RP3KP 2019

2.6.7.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan energi listrik saat ini di Kota Palopo dilayani oleh sistem jaringan interkoneksi sulawesi pada jaringan tegangan menengah dan tegangan tinggi. Untuk jaringan tegangan tinggi 275 KV dioperasikan oleh PT. Poso Energy yang sumber energi listriknya berasal dari PLTA Poso, terkoneksi kedalam jaringan tegangan menengah melalui Gardu Induk Latuppa yang dioperasikan oleh PT. PLN yang selanjutnya mendistribusikan listrik ke masing-masing pelanggan. Pendekatan perkiraan kebutuhan energi listrik di Kota Palopo berdasarkan SNI 03-1733-2004 adalah setiap rumah tangga 450 VA/jiwa. Sementara untuk sarana lingkungan perumahan adalah sebesar 40% dari kebutuhan rumah tangga. Selengkapnya mengenai jumlah kebutuhan energi listrik di Kota Palopo sampai tahun 2045 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	193.280	198.105	210.167	222.230	234.293	246.356
Proyeksi Rumah (Unit)	25.822	38.047	46.708	53.726	62.443	71.160
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Va)	98.224.250	115.351.110	128.469.600	172.771.200	197.672.580	222.573.960

Sumber: Dokumen RP2KPKPK 2022

2.6.7.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah hampir melanda semua kota-kota di Indonesia, terutama peningkatan volume timbulan sampah dari tahun ke tahun yang sering tidak paralel dengan kemampuan dalam penanganannya oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan kota, dan

estetika visual kota. Secara parsial-parsial, tetapi memerlukan penanganan yang kompleks, tersistematis, mulai dari sumber sampah sampai pada pengolahan di lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA). Secara rinci dijelaskan bahwa pola penanganan sampah perkotaan dimulai dari sumber sampah dengan pembuangan/pengolahan akhir sebagai berikut:

1. Pevadahan: berupa bin/tong sampah;
2. Pengumpulan sementara: transfer depo, kontainer, pasangan bata, bak kayu, dan tanah terbuka;
3. Pengangkutan; motor sampah, gerobak sampah, becak sampah, pick up, dump truck, dan arm roll truck.
4. Pengolahan akhir di TPA; sistem controlled landfill.

Dengan demikian, maka diperkirakan hingga tahun 2045 nanti jumlah volume timbulan sampah di Kota Palopo mencapai 706,58 m³ perhari. Selengkapnya mengenai volume timbulan sampah di Kota Palopo seperti terlihat pada tabel 4.28 berikut ini:

Tabel 2. 98 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	193.280	198.105	210.167	222.230	234.293	246.356
Proyeksi Timbulan Sampah (M ³ /Hr)	200,12	366,19	407,84	548,48	627,53	706,58
Proyeksi Jumlah Kebutuhan TPST	1	2	2	3	3	3

Sumber: Dokumen RP2KPKPK 2022

2.6.8 PROYEKSI KEBUTUHAN JARINGAN TRANSPORTASI

Aktivitas manusia tidak lepas dari pergerakan dari tempat satu ke tempat lainnya, tidak hanya sebatas dalam ruangan atau rumah. Kelancaran aktivitas manusia didukung oleh sarana transportasi. Begitupun juga aktivitas anak maupun pemuda-pemudi bergantung dengan pelayanan transportasi aman nyaman yang tersedia di daerah tersebut. Pelayanan transportasi di Kota Palopo mayoritas masih menggunakan kendaraan pribadi, persentase penggunaan kendaraan umum masih sedikit sekali sebatas transportasi *online*. Hal ini perlu dievaluasi karena dalam mendorong terwujudnya KLA, sejak usia dini harus dididik dan dibiasakan sehingga kedepannya penggunaan transportasi umum dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Situasi terpentingnya adalah menjaga keselamatan anak pemuda-pemudi selama melaksanakan aktivitas pergerakan diluar rumah. Disisi lain yang menjadi penekanan kepada pemerintah maupun pemangku kepentingan yang berkaitan dengan transportasi dan kelaikan jalan adalah pengembangan system transportasi alternatif dari eksisting yang telah tersedia. Pengembangan system transportasi tidak hanya dilihat dari kendaraannya, melainkan juga jaringan jalan, jembatan, rambu lalu lintas, dan fasilitas perpindahan antarmoda. Perwujudan sistem jaringan jalan sesuai kewenangan, meliputi:

- 1) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder yang berlokasi di jalan Opu Tohalide, Jalan Andi Paso, Jalan Andi Bintang, ruas jalan lingkaran barat luar (Jalan Poros Kambo, Jalan Battang – Jaya, dan Jalan Padang Lambe), Jalan Andi Kambo, Jalan Andi Tenriadjeng, Jalan Lingkaran Timur, Jalan Beruang, Jalan Diponegoro – Somel, Jalan Sawerigading, Jalan K.H, Ahmad Rasyad, Jalan Tandi Pau, Jalan K.H, Muh, Kasim, Jalan Lingkaran (Pelabuhan – Tappong), Jalan Lingkaran (Ponjalae – Pelabuhan), Jalan PPI/TPI - jalan poros terminal tipe A Songka, ruas jalan lingkaran barat dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri - Pamenta - Lassik), Jalan Yos Sudarso, Jalan Sungai Cerekang, Jalan Lamaranginang, Jalan Guttu Pareppa, Jalan Mungkasa, Jalan Pantai Labombo, Jalan We Cudai, dan Jalan Andi Sangka.
- 2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder,
- 3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan, Jalan lingkungan dimaksud berupa jalan lingkungan sekunder yang meliputi seluruh ruas jalan di Kota Palopo selain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan tol.
- 4) Rencana pembangunan jalan tol meliputi ruas jalan Tindantana – Palopo dan Palopo – Parepare.



- 5) Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kelurahan Songka, Pengembangan terminal penumpang tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko dan pembangunan terminal penumpang tipe C Telluwanua di Kelurahan Maroangin.
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.
Selain itu alternatif lainnya yang rencana akan dibangun adalah jaringan rel kereta api, melanjutkan rel kereta api eksisting Makassar-Pare Pare. Rencana perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) Pembangunan jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota Pare-pare – Wajo – Palopo – Masamba – Malili untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 - 2) Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi terdapat di Kelurahan Songka.Selanjutnya transportasi laut, dengan memanfaatkan teluk Bone sebagai alur pelayaran. Pengembangan jaringan transportasi laut, meliputi:
 - 1) Pengembangan pelabuhan pengumpul yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap.
 - 2) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Pontap.Rencana struktur ruang dan system jaringan transportasi disajikan pada gambar dibawah.

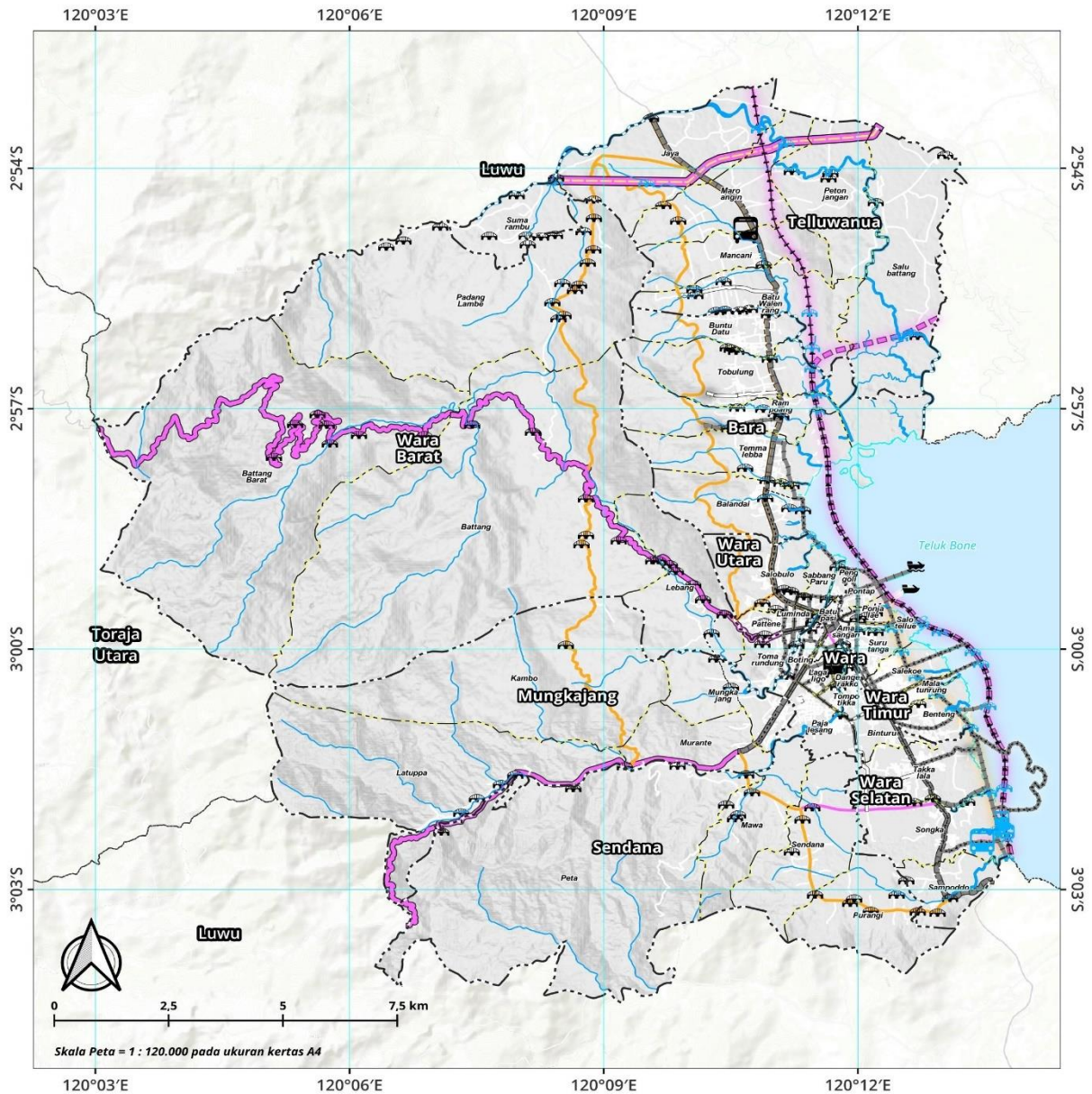


Gambar 37 Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



INDEKS :



KETERANGAN :

Sarana Transportasi :

- Jembatan
- Terminal Penumpang Tipe C
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Pengumpul
- Jembatan
- Terminal Penumpang Tipe A
- Stasiun Barang
- Stasiun Operasi
- Stasiun Penumpang

Jaringan Jalan :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jaringan Jalan :

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 609 hektar berupa kawasan hutan produksi terbatas (HPT) terletak di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan To'bulung.

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 9.310 hektar terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1.245 hektar tersebar di 10 kelurahan yaitu Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Battang, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sendana dan Kelurahan Purangi. Kawasan tanaman pangan terdiri dari 919 hektar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 326 hektar.
- b. kawasan hortikultura seluas kurang lebih 438 hektar tersebar di 11 Kelurahan;
 - 1) Kelurahan Buntu Datu kurang lebih 20 hektar
 - 2) Kelurahan To'bulung kurang lebih 48 hektar
 - 3) Kelurahan Purangi kurang lebih 9 hektar
 - 4) Kelurahan Batu Walenrang kurang lebih 31 hektar
 - 5) Kelurahan Jaya kurang lebih 25 hektar
 - 6) Kelurahan Mancani kurang lebih 14 hektar
 - 7) Kelurahan Maroangin kurang lebih 36 hektar
 - 8) Kelurahan Pentojangan kurang lebih 63 hektar
 - 9) Kelurahan Salubattang kurang lebih 98 hektar
 - 10) Kelurahan Sumarambu kurang lebih 8 hektar dan
 - 11) Kelurahan Padang Lambe kurang lebih 86 hektar
- c. kawasan perkebunan seluas kurang lebih kurang lebih 7.380 hektar berada di dengan sebaran sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Sendana seluas kurang lebih 3.030 hektar; di Kelurahan Mawa, Peta, Kelurahan Purangi dan Kelurahan Sendana,
 - 2) Kecamatan Wara Selatan seluas kurang lebih 39 hektar; di Kelurahan Sampoddo,
 - 3) Kecamatan Mungkajang seluas kurang lebih 1.221 hektar; di Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Mungkajang dan Kelurahan Murante,
 - 4) Kecamatan Wara Utara seluas kurang lebih 24 hektar; di Kelurahan Salobulo,
 - 5) Kecamatan Wara Barat seluas kurang lebih 2.42 hektar, di Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, dan Kelurahan Padang Lambe,
 - 6) Kecamatan Bara seluas kurang lebih 537 hektar; di Kelurahan Balandai, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, dan Kelurahan To'bulung,
 - 7) Kecamatan Telluwana seluas kurang lebih 487 hektar; di Kelurahan Jaya, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang dan Kelurahan Sumarambu.
- d. Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 249 hektar dengan sebaran Kelurahan Mancani, Kelurahan Peta, Kelurahan Mawa dan Kelurahan Sendana.

Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 50 hektar, terdiri dari kawasan perikanan tangkap di pesisir Teluk Bone kurang lebih 3 hektar di Kelurahan Pontap dan kawasan perikanan budidaya kurang lebih 47 hektar di Kelurahan Temmalebba.

Kawasan Pertambangan dan Energi terbagi atas Kawasan Pertambangan Mineral dan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik;

- a. Kawasan pertambangan mineral berupa batuan seluas kurang lebih 295 hektar tersebar di Kelurahan Lebang, Kelurahan Lebang Padang Lambe, Kelurahan Lebang Purangi, Kelurahan Lebang Mancani, Kelurahan Lebang Jaya, Kelurahan Lebang Maroangin, dan Kelurahan Lebang Murante,
- b. Kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 6 hektar di Kelurahan Mungkajang.

Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 350 hektar meliputi Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Batu Walenrang dan Kelurahan Mancani.



Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 136 hektar tersebar di 11 kelurahan yaitu: Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Kambo, Kelurahan Mawa, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Sumarambu dan Kelurahan Salekkoe.

Kawasan Permukiman dengan luas total kurang lebih 5.636 hektar terbagi atas Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Ruang Terbuka non Hijau dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan;

- a. Kawasan perumahan seluas kurang lebih 5.347 hektar tersebar di 9 Kecamatan meliputi:
 - 1) Kecamatan Wara seluas kurang lebih 308 hektar di Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, dan Kelurahan Pajalesang,
 - 2) Kecamatan Wara Selatan seluas kurang lebih 839 hektar di Kelurahan Binturu, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Takkalala,
 - 3) Kecamatan Wara Timur seluas kurang lebih 320 hektar di Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Surutanga, Kelurahan Benteng Pontap, Kelurahan Benteng Malatuntung, Kelurahan Benteng Salekkoe, Kelurahan Benteng Salotellue, dan Kelurahan Benteng Ponjalae,
 - 4) Kecamatan Wara Utara seluas kurang lebih 312 hektar di Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan pattene,
 - 5) Kecamatan Wara Barat seluas kurang lebih 457 hektar di Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Lebang, Kelurahan Padang Lambe, dan Kelurahan Tomarunding,
 - 6) Kecamatan Bara seluas kurang lebih 863 hektar di Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu,
 - 7) Kecamatan Telluwanua seluas kurang lebih 1.071 hektar di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, dan Kelurahan Pentojangan,
 - 8) Kecamatan Sendana seluas kurang lebih 755 hektar di Kelurahan Purangi, Kelurahan Mawa, Kelurahan Peta, dan Kelurahan Sendana,
 - 9) Kecamatan Mungkajang seluas kurang lebih 422 hektar di Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Murante, Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Kambo.
- b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas kurang lebih 255 hektar di Kelurahan Batupasi, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Pattene, Kelurahan Luminda, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Boting, Kelurahan Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Salekkoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Purangi dan Kelurahan Sendana.
- c. Kawasan Ruang Terbuka non Hijau seluas kurang lebih 27 hektar di Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Benteng, Kelurahan Salekkoe, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Balandai dan Kelurahan Temmalebba.
- d. Kawasan Infrastruktur Perkotaan seluas kurang lebih 7 hektar meliputi Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, dan Kelurahan Maroangin.

Kawasan Transportasi disediakan seluas kurang lebih 34 hektar untuk keperluan terminal penumpang tipe A dan stasiun kereta api di Kelurahan Songka, Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Maroangin, dan Kelurahan Mancani, Pelabuhan di kelurahan Pontap dan Rest Area di Kelurahan Sampoddo.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 20 hektar di Kelurahan Boting, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Balandai dan Kelurahan Maroangin dengan peruntukan:

- a. Kantor Polisi Resort Palopo,
- b. Kantor Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading,
- c. Kantor Polisi Militer (CPM) TNI AD,
- d. Rumah Dinas Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading,
- e. Kompi Senapan C Yonif 721 Makkasau,
- f. Zibang TNI AD,
- g. Tepbek TNI AD,



- h. Lapangan Tembak KODIM,
- i. Asrama TNI AD 721 Makkasau,
- j. Kantor Koramil dan
- k. Kantor Polisi Sektor.

2.7.1 RENCANA STRUKTUR RUANG

Salah satu tujuan dari penataan Ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan dikawasan timur Indonesia yang berkearifan local dan relegius serta nyaman dan produktif untuk semua. Dengan kebijakan yang meliputi :

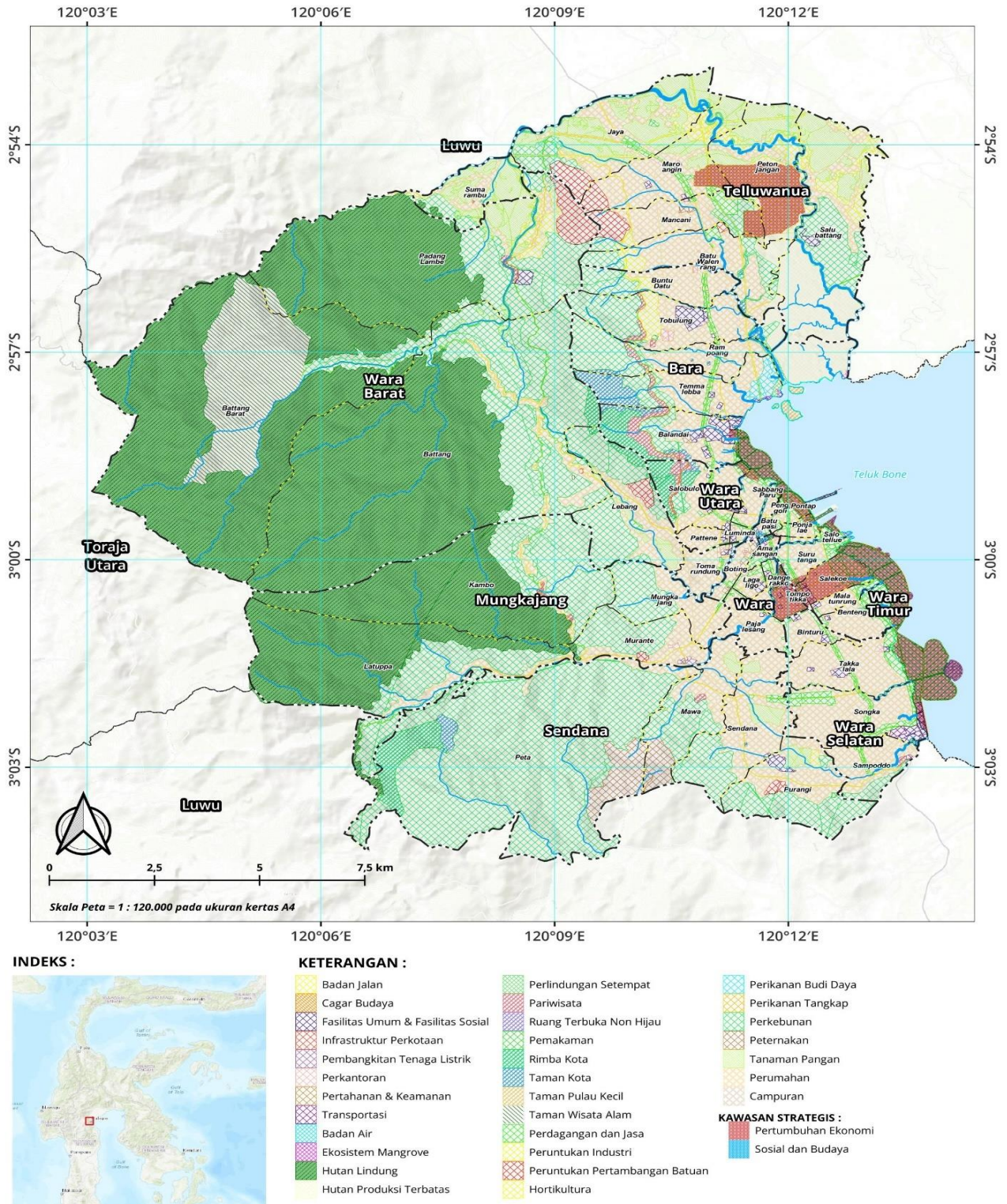
- a. Penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota
- b. Pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota
- c. Pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas umum yang integrative, komprehensif, dan penerapan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- d. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marjinal dengan kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan
- e. Pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefesienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota
- f. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan
- g. Peningkatan daya saing melalui program-program inovasi daerah yang berkearifan local
- h. Pemantauan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Berikut di sajikan rencana pola ruang peruntukan kawasan, rencana struktur ruang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi dan jaringan sumber daya air kota palopo pada gambar dibawah;



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA POLA RUANG PERUNTUKAN KAWASAN

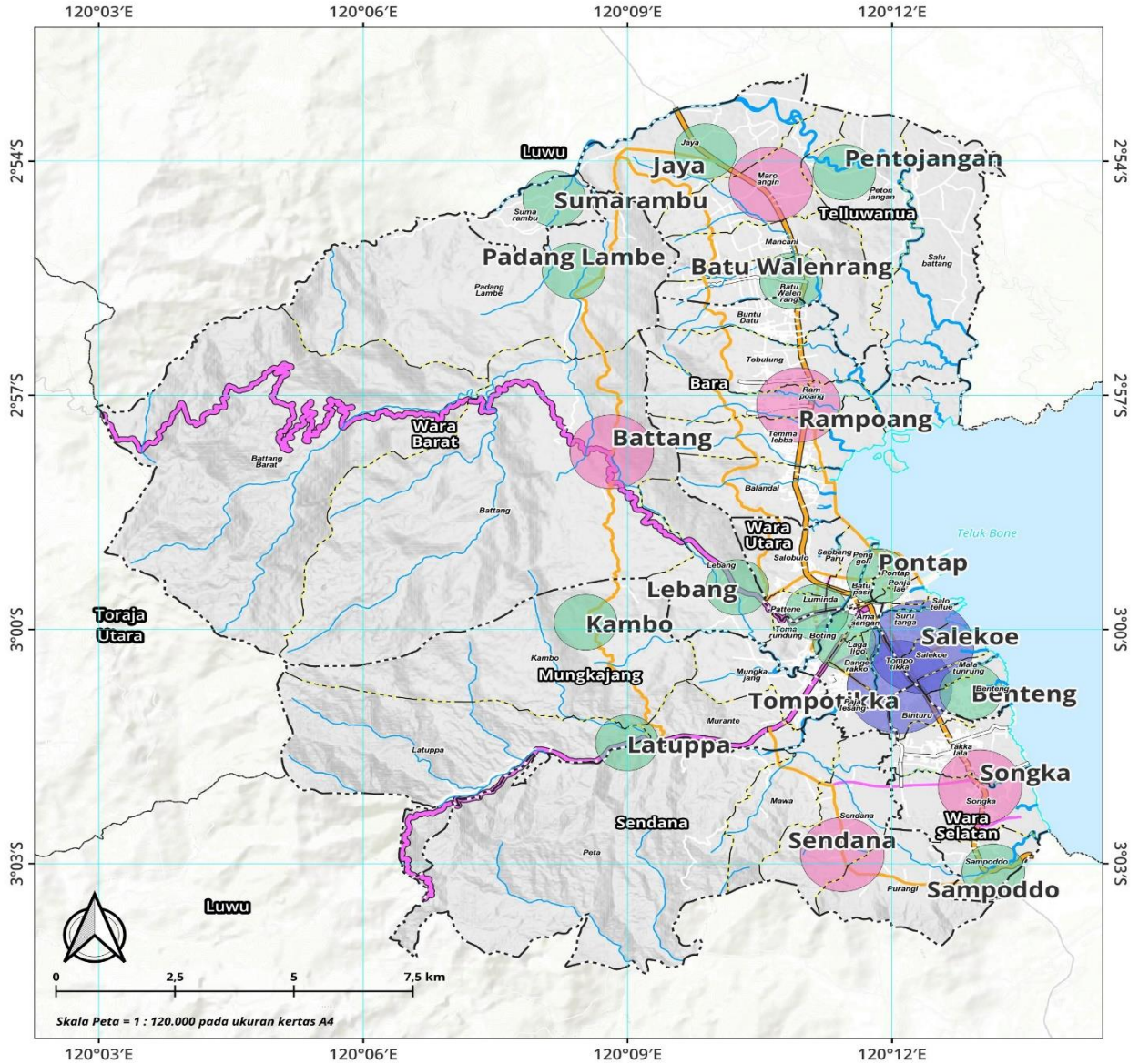


Gambar 38 Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan



Pemerintah Kota Palopo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN



INDEKS :



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kelurahan
- - - Batas Administrasi Kecamatan
- Sungai

Sistem Pusat Pelayanan :

- Pusat pelayanan Kota (PPK)
- Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

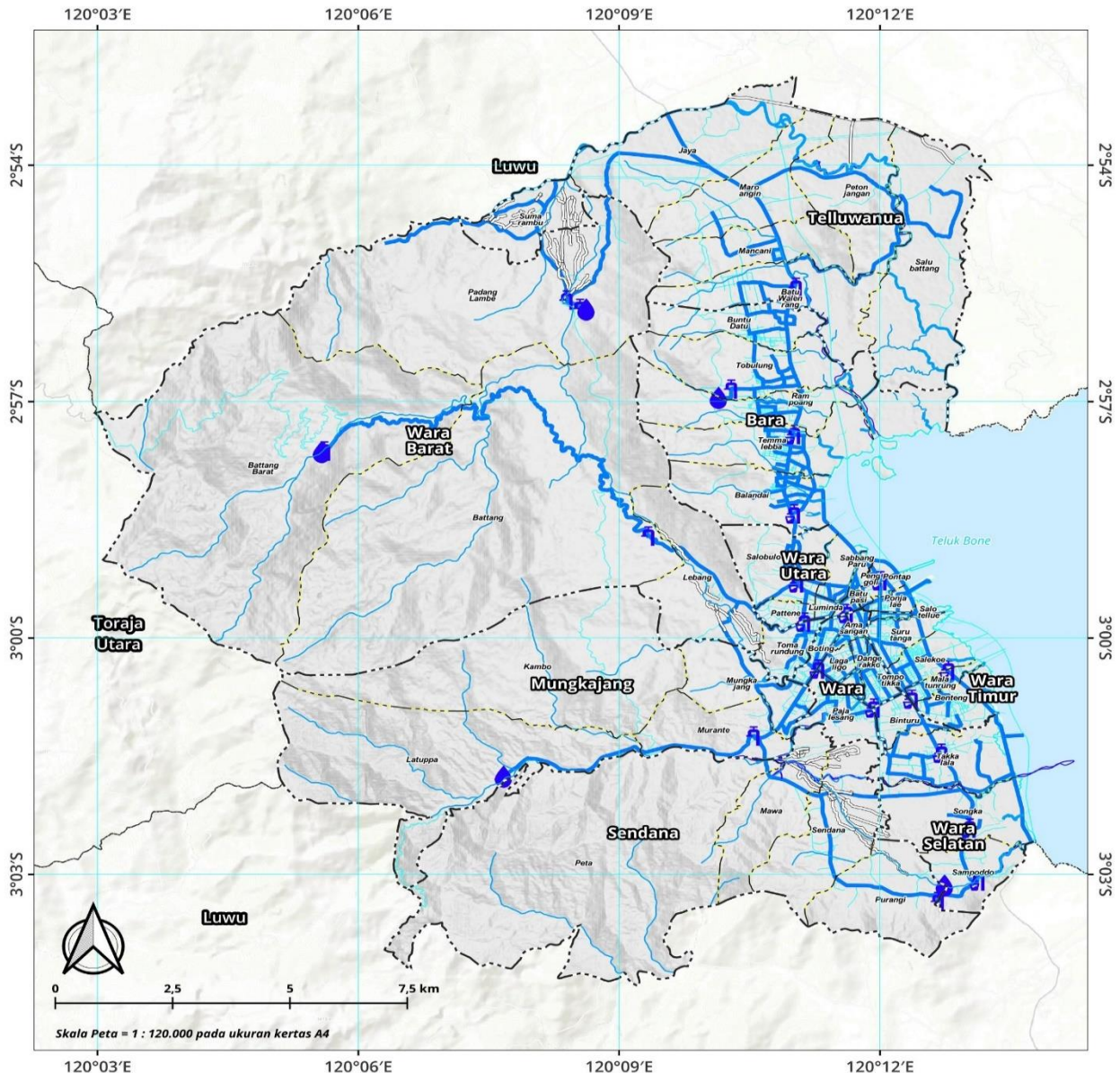
SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Gambar 39 Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan



RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR



INDEKS :



KETERANGAN :

Sarana SPAM :

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan

- Jaringan Irigasi
- Jaringan SPAM
- Jaringan Pengendali Banjir
- Jaringan Drainase

SUMBER :

1. Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2023
2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2022-2041 - Dinas PUPR Kota Palopo, Tahun 2022
3. Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS) - Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018

Gambar 40 Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air



RPJPD 2025-2045

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan proses pembaharuan, berkelanjutan, peningkatan, dan pengembangan dari hasil pembangunan yang telah dicapai periode sebelumnya. Pembangunan kedepan mengalami pergeseran paradigma dimana masyarakat selain sebagai objek juga sekaligus menjadi subyek atau pelaku pembangunan, sebagai motor penggerak pembangunan sedangkan peran pemerintah akan bergeser lebih menjadi fasilitator dan moderator pembangunan. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, *private sector* dan lembaga lainnya guna mewujudkan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut dan dengan mengacu pada kondisi obyektif Kota Palopo maka dapat diuraikan beberapa permasalahan pembangunan di Kota Palopo yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.

3.1.1 PENDAPATAN PER KAPITA MASIH RENDAH

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Palopo relatif masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang sudah mencapai triliun rupiah per kapita per tahun. Rendahnya PDRB per kapita ini menggambarkan masih rendahnya produktifitas ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya akses akan sumberdaya ekonomi, rendahnya penerapan iptekin dalam kegiatan produksi, dan rendahnya nilai tambah ekonomi dari lapangan usaha yang dikelola dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kota Palopo. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 23,70 persen.

3.1.2 MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2011 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif di angka 7-5%, namun pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,34%. Hal ini dikarenakan kontributor PDRB dari sector perdagangan mengalami penurunan. Sector perdagangan dan jasa ini yang menjadi peranan terbesar dalam perekonomian Kota Palopo tahun 2023 dengan angka sebesar 25,89%. Kondisi ini dipicu karena pada tahun 2023 APBD mengalami defisit yang berimbas terhadap belanja jasa dan barang pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah masih mendominasi factor peredaran uang dan tingkat konsumsi masyarakat Kota Palopo. Masih lemahnya produktifitas ekonomi serta rendahnya nilai tambah ekonomi dari lapangan usaha lain yang dikelola dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kota Palopo.

3.1.3 BERTAMBAHNYA KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR LAPISAN MASYARAKAT

Kemiskinan menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Palopo. Kompleksitas masalah kemiskinan dipengaruhi oleh: 1) Tingginya beban pengeluaran masyarakat, yang disebabkan oleh inflasi, rasio ketergantungan, dan tuntutan kebutuhan hidup; 2) Masih rendahnya pendapatan masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, tingginya pengangguran, dan derajat kesehatan belum optimal; 3) Belum berkembangnya usaha ekonomi mikro dan kecil, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap permodalan dan belum optimalnya pendampingan serta penguatan kewirausahaan. Kemiskinan yang terjadi berdampak terhadap sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses perumahan yang layak, terbatasnya akses air bersih, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, ketimpangan pendapatan Kota Palopo tak kunjung menunjukkan perbaikan yang berarti. Hal ini dilihat dari indeks gini yang cenderung fluktuatif. Selama periode tersebut pendapatan masyarakat belum merata atau masih adanya ketimpangan pendapatan. Meskipun indeks gini ratio Kota Palopo lebih baik dari Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, namun jika dibandingkan dengan

beberapa daerah di Indonesia, angka gini ratio Kota Palopo tergolong masih cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga kerja belum mendapatkan upah kerja yang cukup, sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah masih terasa. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal yang tidak mungkin laju peningkatan kemiskinan ekstrem Kota Palopo sulit untuk ditekan.

3.1.4 BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DAERAH

Di tengah tantangan global yang makin kompleks, Pemerintah Kota Palopo perlu bertransformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor yang bernilai tambah tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangatlah penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didesain menjadi alat untuk memahami kondisi daya saing sebuah daerah, seperti kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi. Pencapaian IDSD Kota Palopo pada tahun 2023 telah melampaui capaian nasional, namun bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa daerah Indonesia, IDSD Kota Palopo masih lebih rendah. Belum optimalnya daya saing daerah ini dikontribusi oleh rendahnya pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi, atau dengan kata lain diperlukan penciptaan lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, peningkatan daya saing daerah juga perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran.

3.1.5 RENDAHNYA KUALITAS MODAL MANUSIA

Modal manusia merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya manusia, seperti memiliki keahlian dan keterampilan. Mutu modal manusia terdiri dari kemampuan, keahlian dan pengetahuan seseorang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas modal manusia antara lain; tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kurangnya lapangan kerja berkualitas, korupsi dan politik yang tidak stabil. Berdasarkan data BPS, Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang masih tinggi angka kemiskinannya di Sulawesi Selatan. Dalam waktu lima tahun terakhir (2018-2023) Pemerintah Kota Palopo tidak mencapai target pengentasan kemiskinan. Begitu pula halnya dengan angka tingkat pengangguran terbuka masih tertinggi di Sulawesi Selatan.

3.1.6 BERKURANGNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Jika dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Palopo di tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Seiring pesatnya pembangunan dan tingginya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Pencemaran air, udara, lahan masih terjadi diakibatkan laju tekanan terhadap lingkungan lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan pengendaliannya. Aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat menyebabkan alih fungsi lahan tak terelakkan. Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan bijak dengan tetap memprioritaskan upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Palopo menjadi lebih baik. Penurunan IKLH Kota Palopo dikontribusikan oleh rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun atau untuk penyediaan infrastruktur. Jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong peningkatan kebutuhan untuk perumahan, fasilitas publik, dan sarana dan prasarana lainnya. Di samping itu, lahan pertanian yang berada di perkotaan, karena lokasi-nya yang strategis, banyak dialihfungsikan menjadi area perdagangan dan jasa. Penurunan IKLH juga dikontribusikan oleh kualitas air yang tergolong masih kurang akibat pencemaran yang berasal dari kegiatan pertanian, industri, dan rumah tangga. Aspek lain yang turut berkontribusi terhadap menurunnya IKLH adalah menurunnya kualitas udara yang disebabkan oleh pencemaran udara dari peningkatan aktivitas kendaraan bermotor, limbah industri yang dibuang di udara, dan kegiatan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara, seperti penggunaan kompor gas, pembakaran sampah dan limbah.

3.1.7 BELUM OPTIMALNYA MITIGASI PENURUNAN EMISI RENDAH KARBON

Kerentanan ekologi dan rendahnya kualitas lingkungan hidup terjadi karena adanya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan data, penurunan emisi GRK Kota Palopo sejak Tahun 2020 sampai

dengan Tahun 2023 mengalami stagnasi. Berdasarkan hasil perhitungan emisi GRK Kota Palopo sebesar 310 ton CO₂ yang disumbang dari beberapa aktivitas yang menimbulkan efek rumah kaca seperti industri, pertanian, peternakan dan kehutanan. Aktifitas sektor pertanian merupakan penyumbang emisi terbesar. Emisi GRK dari sektor pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan pertanian, proporsi penggunaan pupuk non organik khususnya urea yang lebih mendominasi. Sub sektor peternakan juga memberi kontribusi GRK, yang berasal dari penanganan kotoran ternak yang belum optimal. Pembukaan lahan baru dengan penebangan pohon juga memberi kontribusi dalam peningkatan Emisi GRK. Hutan kehilangan fungsi sebagai penyerap gas CO₂ dan pasokan O₂ menipis. Selain itu, penanganan sampah yang belum optimal juga menjadi masalah bagi lingkungan, penumpukan sampah terutama sampah plastik yang tidak dapat terurai dapat mengurangi kualitas tanah. Komitmen dan aksi mitigasi serta upaya yang konkrit dari pemerintah daerah secara optimal diperlukan untuk mewujudkan Kota Palopo dengan emisi GRK yang rendah.

3.1.8 BELUM MERATANYA DERAJAT KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Indeks kesehatan yang diukur dengan angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang rendah mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal. Permasalahan pada Indeks Kesehatan Kota Palopo adalah UHH, secara angka lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan UHH nasional dan beberapa daerah setara di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; 1) upaya kuratif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif, 2) belum semua fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, 3) sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata, 4) cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, 5) penerapan pola hidup sehat belum melembaga di masyarakat, 6) penerapan standar pelayanan minimum belum semua dipenuhi di seluruh layanan kesehatan. 7) angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, 8) prevalensi stunting yang tinggi, dan 9) masih tingginya kasus tuberkulosis menjadi parameter rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

3.1.9 RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Rendahnya kualitas pendidikan tercermin dari Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). HLS pada tahun 2023 hanya menempatkan Kota Palopo pada peringkat 25 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Begitu pula dengan RLS, jika dibandingkan dengan kota setara lainnya, Kota Palopo masih tertinggal. RLS Kota Palopo berada pada urutan ke 36 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. HLS Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar 15,12 tahun, artinya bahwa secara rata-rata anak yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hanya sampai Diploma III. Sedangkan RLS tahun 2023 sebesar 11,13 tahun. Artinya bahwa lama anak bersekolah hanya sampai pada kelas XI SMA. Hal ini disebabkan oleh karena masih terdapat anak putus sekolah dan masih terdapat anak yang sudah lulus sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan alasan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

3.1.10 BELUM OPTIMALNYA LAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Kota Palopo memperlihatkan perlambatan penurunan angka kemiskinan. Beberapa hal yang menjadi penyebab melambatnya penurunan angka kemiskinan tersebut, antara lain; belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif, rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, rendahnya penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, kurang optimalnya penanggulangan masyarakat pra sejahtera. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multi pihak dan koordinasi lintas sektor. Namun penanggulangan masyarakat pra sejahtera masih kurang optimal dilakukan, karena kurang mandiri masyarakat yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, juga penanganan kemiskinan yang tidak terintegrasi

3.1.11 BELUM OPTIMALNYA IPTEK DAN INOVASI UNTUK Mendukung Produktifitas Ekonomi

Belum optimalnya produktivitas perekonomian Kota Palopo dapat diketahui dari beberapa indikator, diantaranya adalah melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; real estate; informasi dan komunikasi dan jasa pendidikan. Perekonomian Palopo rentan dengan perubahan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di dominasi oleh sektor lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada sektor Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi promosi dan distribusi hasil, dan rendahnya inovasi usaha. Pada sektor pariwisata pengelolaan Pariwisata belum berbasis pariwisata berkelanjutan, belum optimalnya nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*). Pemanfaatan IPTEKIN menjadi suatu kebutuhan namun membutuhkan investasi besar dalam penggunaannya. Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan namun percepatan pertumbuhan cenderung melambat. Jika dibandingkan terhadap kota besar setara lainnya, Kota Palopo masih tertinggal. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal yaitu sektor pendorong kepariwisataan relatif belum berkembang maksimal, ketersediaan infrastruktur destinasi wisata belum memadai, SDM pariwisata belum memadai dan ekonomi kreatif belum berkembang secara signifikan.

3.1.12 BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU

Komitmen Pemerintah Kota Palopo menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan belum menjadi sebuah kesadaran bersama. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya kebutuhan investasi awal untuk penerapan ekonomi hijau dan biru, sehingga peningkatan peluang kerja dan investasi hijau, pengembangan produk-produk hijau, pengembangan potensi lokal dan mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) serta mengimplementasikan *circular economic* masih sangat terbatas penerapannya. Di sisi lain, terdapat emisi hasil penggunaan energi khususnya dari sektor transportasi yang ditimbulkan oleh kepadatan kendaraan. Hal tersebut mempengaruhi keberadaan potensi dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan. Selain hal tersebut, faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem yang berdampak secara ekologis.

3.1.13 BELUM OPTIMALNYA TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL

Belum optimalnya upaya transformasi digital diindikasikan dengan masih rendahnya kualitas dan keberlanjutan layanan berbasis elektronik. Belum seluruh layanan public diselenggarakan secara terintegrasi. Tidak optimalnya integrasi layanan mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat khususnya bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas, selain itu rawan terhadap ketidakakuratan data antar sistem yang berbeda, serta inefisiensi biaya dan waktu. Implementasi SPBE memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kota Palopo telah mengalami peningkatan bila dilihat dari trend nilai indeks SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai indeks 2,90 dengan peringkat baik meningkat dari tahun 2022 yang memperoleh indeks 2,34 dengan peringkat cukup, namun secara nasional angka ini masih di bawah standar. Keunggulan signifikan yang dapat menjadi kekuatan Kota Palopo dalam aspek penyelenggaraan SPBE adalah domain layanan berbasis elektronik. Di sisi lain, kelemahan yang paling sering terjadi adalah belum adanya proses reviu dan evaluasi secara berkala, pada aspek pelaksanaan audit TIK.

3.1.14 BELUM OPTIMALNYA INTEGRASI EKONOMI LOKAL DENGAN EKONOMI REGIONAL DAN NASIONAL

Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global diindikasikan dengan proporsi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama 5 tahun mengalami perlambatan. PMTB merupakan konsumsi dengan proporsi terbesar kedua terhadap total PDRB pengeluaran Kota Palopo setelah konsumsi rumah tangga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, konsumsi PMTB menyumbang 39-40 persen terhadap total PDRB pengeluaran. Pada tahun 2023, konsumsi PMTB menyumbang 40,45 persen terhadap total PDRB pengeluaran Kota Palopo. Sementara itu ditinjau dari pertumbuhan riilnya, pertumbuhan PMTB di Kota Palopo tahun 2023 sebesar 5,45 persen. Nilai ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 8,18 persen. Hal ini disebabkan karena jumlah pembangunan pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2023, seperti pembangunan road race, menara kuliner, dan revitalisasi Islamic Center. Pembangunan tersebut sudah diselesaikan sebelum tahun 2023 dan pembangunan pada tahun 2023 juga tidak sebesar tahun 2022 sehingga pertumbuhan PMTB pada tahun 2023 mengalami perlambatan.

Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, *net ekspor* Kota Palopo selalu memiliki nilai yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai impor antar daerah di Kota Palopo masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor antar daerahnya yang berarti lebih banyak barang yang masuk dari luar daerah ke Kota Palopo. Selama periode lima tahun terakhir ini, proporsi impor Kota Palopo memiliki nilai antara 43,64-44,62 persen terhadap total PDRB Pengeluaran. Sementara itu, proporsi impor pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 44,56 persen terhadap total PDRB Pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palopo masih bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari luar kota Palopo.

3.1.15 BELUM OPTIMALNYA KONTRIBUSI KOTA PALOPO SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Belum optimalnya kontribusi Kota Palopo sebagai pusat pertumbuhan diindikasikan oleh beberapa hal diantaranya; pola pembangunan perkotaan yang masih belum tertata sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah; tata kelola antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan yang belum terpadu, inovatif dan kolaboratif; pemenuhan layanan perkotaan belum memadai dan inklusif; masih terdapatnya masalah sosial ekonomi di masyarakat perkotaan; serta degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana yang menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Rendahnya kontribusi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan dengan kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang belum optimal. Penyediaan infrastruktur perkotaan belum optimal ditunjukkan dengan nilai Indeks Layanan Infrastruktur Kota Palopo yang berada pada nilai 2,20. Permukiman kumuh juga menjadi salah satu penyumbang kontribusi belum optimalnya Kota Palopo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hingga Tahun 2022 masih terdapat seluas 27,18 km² kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah kelurahan. Pertumbuhan kawasan kumuh dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah yang berdampak pada kondisi rumah menjadi tidak layak huni. Masih terdapat jaringan jalan dan dalam kondisi belum bagus. Demikian pula pengelolaan persampahan belum optimal. Masih rendahnya kemampuan dan teknologi fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah, khususnya Tempat Pembuangan Akhir yang masih menggunakan sistem *open dumping*.

3.1.16 BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INTEGRATIF, ADAPTIF DAN RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, antara lain; belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik; belum optimalnya penguatan kapasitas

aparatur daerah dan Lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi; Masih terjadi kerentanan pelayanan publik terhadap risiko korupsi; Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital. Masih rendahnya etos kerja, belum optimalnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik yang adaptif, dan masih rendahnya keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kemampuan merespon aspirasi masyarakat.

Lemahnya tata Kelola pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kota Palopo dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah indeks Survey Penilaian Integritas (SPI). Indeks SPI Kota Palopo dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi angka dimana pada tahun 2023 indeks SPI berada pada nilai 63,58. Selain itu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dalam sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami stagnasi yaitu pada angka 83,1. Indeks reformasi birokrasi juga belum berjalan optimal. Tahun 2023, Kota Palopo mendapat nilai IRB 55,09 atau termasuk kategori baik tetapi sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Indeks maturitas SPIP Kota Palopo juga masih belum memadai. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir indeks SPIP mengalami kenaikan, hingga di tahun 2023 mencapai 3,057 atau termasuk kategori terdefinisi. Masih terdapat tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif serta masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset dan cukup tingginya risiko terjadinya korupsi.

3.1.17 SISTEM HUKUM DAN KEAMANAN KETERTIBAN BELUM SEPENUHNYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA AMAN MASYARAKAT

Angka kriminalitas di Kota Palopo tergolong cukup tinggi. Hal ini terindikasi dari belum optimalnya kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditandai dengan jumlah aksi tindak kriminalitas yang terjadi. Jumlah kriminalitas di Kota Palopo Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 meningkat sangat drastis. Jumlah kejahatan umum yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 555 kasus dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 1.273 kasus (*crime total*) dan angka kriminalitas (*crime rate*) sebesar 678,31 tindak kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Palopo. Dalam tiga tahun terakhir, tindak kriminal yang ditangani cenderung naik, namun tindak kejahatan belum maksimal tertangani. Pada tahun 2023, capaian penanganan tindak kriminal hanya sebesar 72,74 persen. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus kriminal yang tidak terselesaikan yaitu kompleksitas kasus yang membutuhkan waktu lama untuk penanganan dan wilayah geografis yang luas.

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kriminalitas adalah arus urbanisasi di Kota Palopo sebagai episentrum pusat perdagangan barang dan jasa di Jazirah Utara Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya terkendali khususnya pada daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo. Belum optimalnya penanganan tingkat kemiskinan, belum optimalnya penanganan tingkat pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda yang rentan melakukan aksi tindak kriminalitas, belum optimalnya penanganan kemiskinan.

3.1.18 BELUM OPTIMALNYA STABILITAS EKONOMI MAKRO

Di Kota Palopo stabilitas ekonomi makro tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur pasar dan sektor pendukung lainnya. Dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro, maka kebijakan ekonomi makro daerah harus terkordinasi dengan baik, melalui kebijakan perpajakan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan perpajakan daerah perlu didukung oleh kebijakan reformasi, yang ditujukan untuk memberikan *stimulus* kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Palopo, kemudian memperbaiki struktur pasar kearah yang lebih kompetitif bagi

pelaku-pelaku ekonomi di daerah, kemudian mendorong sektor perbankan untuk lebih berperan dalam peningkatan investasi, penciptaan pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor industri, UMKM, pertanian, perdagangan, keuangan dan perbankan. Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Palopo harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir bahaya inflasi mengancam walaupun dalam posisi terkendali pada tingkat yang stabil, tingkat suku bunga dan kurs rupiah pun cukup stabil, sehingga aktivitas ekonomi terus bergeliat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi.

3.1.19 BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DAERAH DIBANDING KOTA MAJU LAINNYA

Belum optimalnya daya saing Kota Palopo tergambar dari Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2023 hanya berada pada angka 3,59. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kota maju lainnya di Indonesia. Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai daerah dengan daya saing yang optimal memerlukan kombinasi dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, stabilitas ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan daya saing daerah juga perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan insentif bagi dunia usaha untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran.

3.1.20 BELUM OPTIMALNYA BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Beragama *maslahat* merupakan cara beragama yang menghadirkan kebaikan bersama. Beragama *maslahat* melihat agama sebagai sesuatu yang positif, *problem solver*, dan spirit untuk kemajuan bangsa. Beragama *maslahat* adalah beragama yang selaras dengan konsensus berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Agama yang menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Beragama *maslahat* penting sebagai instrumen untuk menyongsong Kota Palopo sebagai daerah yang Maju pada Tahun 2045. Belum optimalnya beragama *maslahat* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: posisi Kota Palopo sebagai daerah perlintasan di Sulawesi Selatan, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya paham keagamaan yang kurang moderat yang cenderung ekstrem serta tidak toleran kepada kelompok lainnya. Kurang optimalnya dialog antar tata nilai yang berbeda, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, serta melemahnya penanaman dan penerapan ajaran agama sejak dini juga menjadi penyebab yang penting untuk diperhatikan. Selain itu berkembangnya ekstremisme, klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta ketimpangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pengetahuan antar masyarakat juga berkontribusi terhadap penurunan toleransi dan kerjasama beragama.

Pemajuan kebudayaan di Kota Palopo belum menunjukkan hasil yang optimal disebabkan oleh beberapa hal antara lain Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, Melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga, Lemahnya sinergitas dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, Lemahnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, dan Belum tersedianya informasi teknologi digital yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo untuk mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

3.1.21 BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KETAHANAN KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBANGUNAN PEMUDA SERTA TINGGINYA KETIMPANGAN GENDER

Keluarga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kota Palopo, diperlukan pendampingan, asistensi, dan advokasi yang berkelanjutan melalui pendekatan yang humanis dan mudah dipahami masyarakat. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Palopo belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; Permasalahan anak belum dianggap sebagai urusan lintas sektor (*cross cutting issues*), sehingga efektifitas sistem perlindungan anak sebagai sebuah ekosistem menjadi lemah, Lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak, dan Belum efektifnya layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak. Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan tren fluktuatif, berada pada nilai 0,291 dan berada dibawah angka nasional dan provinsi.

3.1.22 BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup juga tercermin dari masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Pada tahun 2023 jumlah rumah yang terakses sanitasi aman sebesar 4,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah sebanyak 34.833,23 ton dan yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru sebesar 24.038,90 ton atau 11,98 persen. Pengelolaan sampah belum diselenggarakan secara optimal, dimana hampir seluruh timbulan sampah diangkut langsung ke TPA tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan. Kondisi TPA masih menggunakan praktek *open dumping* dimana sampah dibuang secara langsung tanpa perlakuan atau pengolahan yang memadai.

3.1.23 BELUM OPTIMALNYA KETAHANAN ENERGI, KETAHANAN AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Tahun 2023 Kota Palopo mengalami lonjakan konsumsi listrik menjadi 1099.68 Kwh/kapita, dibandingkan tahun sebelumnya karena kebutuhan listrik oleh masyarakat meningkat. Berdasarkan data PLN Palopo produksi listrik di Kota Palopo masih mengalami surplus dibandingkan dengan listrik yang terjual ke masyarakat. Kondisi ini terjadi karena sumber utama listrik Palopo berasal dari pembangkit listrik tenaga air yang terletak di beberapa danau yang ada di Luwu Timur dan Poso Sulawesi Tengah. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari sisi keberlanjutan khususnya dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan kekurangan debit air di beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga dilakukan manajemen beban listrik berupa pemadaman listrik secara bergilir di beberapa lokasi di Wilayah Kota Palopo selama beberapa bulan. Penurunan ketahanan air disebabkan oleh terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air. Permasalahan terkait menurunnya ketahanan pangan disebabkan masih rendahnya akses terhadap pangan yang murah, sehat dan berkualitas. Masih rendahnya diversifikasi pangan dan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangan.

Kemandirian pangan yang terganggu akan mengakibatkan krisis pangan. Sebagai sebuah cita-cita, maka kemandirian pangan di Kota Palopo dalam proses produksinya sering dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain, lambatnya regenerasi petani; ketersediaan infrastruktur pertanian yang masih terbatas; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum dibarengi dengan kemampuan petani untuk mengelola usaha pertanian; digitalisasi pemasaran hasil produksi belum dikelola dengan baik oleh petani; perubahan iklim yang menjadi ancaman produksi pertanian; penerapan *urban farming* belum dikelola secara massif dan tidak berkelanjutan; alih fungsi lahan pertanian mengancam ketersediaan pangan; pertumbuhan penduduk akan

meningkatkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, sehingga mengurangi lahan pertanian untuk pemenuhan kemandirian pangan. Selain itu pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan *double pressure* pada ketahanan pangan, yaitu tarikan permintaan dan pengurangan lahan yang semakin besar.

3.1.24 BELUM OPTIMALNYA RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal karena adanya pembangunan yang masif terjadi dan tingginya aktivitas ekonomi. Berkurangnya tutupan lahan dan menurunnya daya dukung daya tampung lingkungan mengakibatkan meningkatnya bencana *hidrometeorologi*. Dibutuhkan intervensi kebijakan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta penerapan ekonomi hijau. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak perubahan iklim, kerugian ekonomi dan meningkatkan *resilience* akibat perubahan iklim. Pencemaran air, udara, lahan dan pesisir terus terjadi. Hal tersebut diakibatkan oleh laju tekanan terhadap lingkungan yang lebih cepat dibanding upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan. Perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim. Hal tersebut berpengaruh terhadap periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya. Hal ini juga akan berdampak pada ketersediaan dan pemenuhan air. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian juga akan menerima dampak, sebagai akibat dari berubahnya pola tanam. Selain itu perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan pesisir. Hal tersebut berdampak pada ketidakseimbangan ekologis dan terjadinya pencemaran lingkungan.

3.2 ISU-ISU STRATEGIS

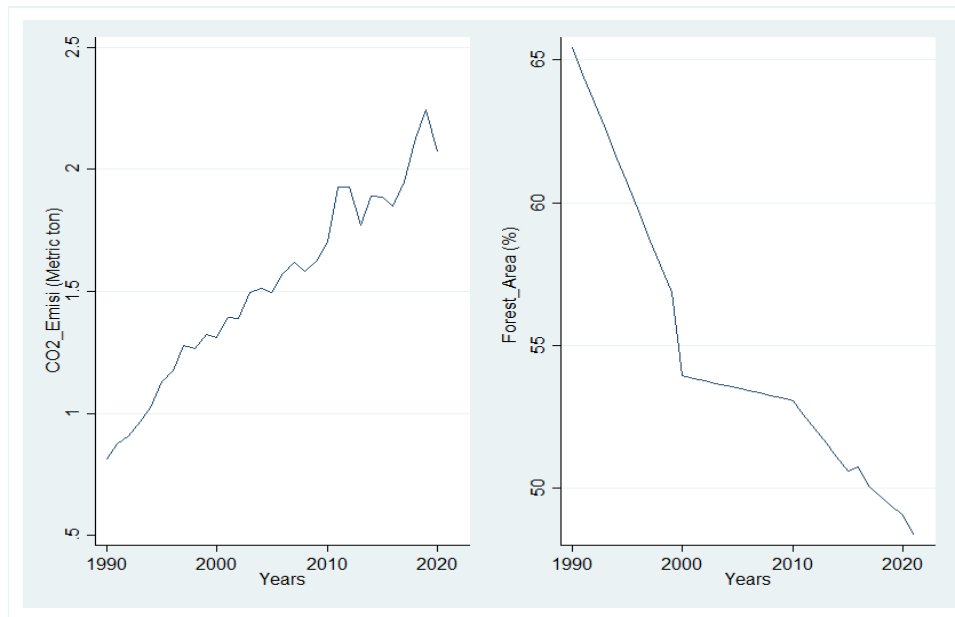
3.2.1 ISU STRATEGIS NASIONAL

Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Kota Palopo tahun 2025 diproyeksikan penduduk usia produktif sebesar 69,33% (Proyeksi BPS Palopo,2024) dari total populasi pada tahun tersebut, dan diperkirakan turun menjadi 68,10% di tahun 2035. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ketahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan.Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

Pembangunan Berkelanjutan

Hakikat konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan proses pembangunan secara fisik sosial ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi secara bersamaan menyebabkan eskalasi krisis sosial dan krisis lingkungan hidup semakin meningkat, fenomena ini dikenal dengan paradoks pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan ekonomi masa lalu cenderung bersifat ekstraktif dan bersifat jangka pendek tanpa memperhitungkan efek samping berupa depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Selama tahun 1990-2021 jumlah emisi gas buang mengalami peningkatan 2,07 metric ton dan luasan area hutan mengalami penyusutan 48,36% (gambar 3.1), akibat dari meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Sumber : World Bank,2023

Gambar 41 Tingkat Emisi CO2 dan Luasan Hutan Tahun 1990-2021

Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sebagai solusi jangka pendek, kemudian pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan penggantian sumber daya fosil merupakan solusi jangka panjang saat ini. Peran aktif pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan telah dilakukan, salah satunya dengan menjadi anggota aktif KTT Rio +20, perjanjian Paris dan melaksanakan program pembangunan berkelanjutan melalui MDG's dan pilar SDG's. Sektor usaha dalam melaksanakan *green* melalui proses bisnis ramah lingkungan dan tata kelola perusahaan (*sustainable report*) dan tanggung jawab sosial lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Kemudian dalam rangka menciptakan pertumbuhan berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Berkelanjutan bagi Sektor Keuangan, sektor Jasa dan Perusahaan melalui Konsep Tata Kelola Lingkungan Sosial ESG agar tercapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan terutama di Kota Palopo adalah : Penggunaan sumberdaya energi surya sebagai sarana alternatif; Pengelolaan lingkungan daerah DAS Latutupa dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

Proses Hilirisasi

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2025 merupakan titik awal dari perjalanan pelaksanaan RPJPN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2030. Dalam perencanaan tersebut pemerintah telah menetapkan visi Indonesia emas 2045, dan sekaligus berupaya keluar dari negara *middle income trap*. Cara mewujudkan hal tersebut melalui pelaksanaan 17 arah tujuan pembangunan nasional, 8 prioritas pembangunan nasional, dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan (Bappenas, 2023). Salah satu prioritas nasional untuk mengangkat Indonesia dari negara *middle income trap* adalah prioritas kelima "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri" (Permen RKP, 2024). Demi menyatukan kesepakatan serta konsistensi perencanaan antara pusat dan daerah, maka melalui PP Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, daerah provinsi/kabupaten kota wajib menyinkronkan arah pembangunan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Pemindahan Ibu Kota IKN

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). Peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan *visual arts*, kuliner).

3.2.2 ISU STRATEGIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan. Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan. Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang. Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia. Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional

(KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut. Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan-Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan. Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

Pemanfaatan Bonus Demografi

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan. Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

Ekosistem Transformasi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

Daya Dukung DayaTampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

Hilirisasi

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai penyangga pangan IKN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayanan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

3.2.3 ISU STRATEGIS KOTA PALOPO

Bonus Demografi, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis mengenai bonus demografi menjadi perhatian penting dalam pembangunan jangka panjang Kota Palopo 2025-2045. Bonus demografi adalah periode ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Kota Palopo dapat memanfaatkan bonus demografi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan catatan bahwa angkatan kerja harus dibekali keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi justru dapat menjadi tantangan serius, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan akibat ketidaksiapan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam memaksimalkan manfaat dari bonus demografi tersebut. Pemerintah Kota Palopo perlu mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk penguatan sektor pendidikan vokasi dan teknologi. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan berkualitas, dan kesejahteraan sosial yang adaptif harus diutamakan. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.

Dampak dari bonus demografi terhadap kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada keberhasilan program-program peningkatan kualitas SDM. Jika penduduk usia produktif dapat mengisi pasar kerja dengan keterampilan yang sesuai, maka ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup. Beberapa masalah yang relevan dengan isu strategis ini di Kota Palopo adalah kualitas layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan, masih adanya ketimpangan akses terhadap daerah yang berada di pinggiran atau luar Kota Palopo, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang kondisinya belum cukup baik dibandingkan baik secara regional maupun nasional. Selain itu, belum optimalnya pendidikan non formal berbasis vokasi apalagi teknologi, pemerataan infrastruktur yang belum begitu baik, termasuk belum optimalnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha termasuk lapangan kerja menjadi salah satu tantangan menghadapi bonus demografi. Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Olehnya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya lokal secara optimal.

Digitalisasi Ekonomi, Adaptasi Teknologi serta Inovasi

Isu strategis kedua adalah digitalisasi ekonomi dan adaptasi teknologi serta inovasi sebagai wujud bertransformasinya perekonomian di Kota Palopo. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan, sebab digitalisasi ekonomi tidak hanya akan berfokus pada penerapan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Palopo di tingkat regional, dan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adaptasi teknologi dalam sektor-sektor utama, seperti perdagangan, jasa, dan pertanian yang berbasis teknologi dan berfokus pada produktifitas dan nilai tambah, merupakan elemen kunci dari transformasi ini. Di bidang perdagangan, digitalisasi akan memungkinkan integrasi platform e-commerce lokal Kota Palopo dalam rangka memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Di sektor jasa, penerapan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) dan sistem informasi geografis (GIS) misalnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Demikian dengan lapangan usaha pertanian, yang diharapkan dapat berkontribusi bagi ketahanan pangan melalui optimasi produksi dan distribusi pangan

secara lebih efisien dan bernilai tambah. Inovasi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Pemerintah dan dunia usaha serta civitas akademik perlu berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung startup dan pelaku usaha berbasis teknologi. Program inkubasi bisnis, akselerator teknologi, dan pelatihan keterampilan digital dapat mempersiapkan generasi muda dan tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam ekonomi digital. Selain itu, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi akan mempercepat terciptanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, baik dalam sektor ekonomi maupun pelayanan publik. Dengan menghadapi tantangan ini, transformasi digital dan adaptasi teknologi di Kota Palopo diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang lebih tangguh dan dinamis. Selain menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada tercapainya kota yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan. Isu strategis digitalisasi ekonomi, adaptasi teknologi, serta inovasi menyoroti pentingnya transformasi ekonomi di Kota Palopo melalui penerapan teknologi digital di berbagai sektor, peningkatan literasi digital, dan inovasi untuk mendorong daya saing di tingkat regional dan nasional. Tantangan ini melibatkan penerapan teknologi pada sektor perdagangan, jasa, dan pertanian, di mana digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Penggunaan teknologi seperti IoT dan GIS diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan sektor pertanian yang berfokus pada ketahanan pangan. Inovasi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem inovasi, seperti startup dan bisnis berbasis teknologi. Program inkubasi, akselerator teknologi, dan pelatihan digital akan mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk bersaing di era ekonomi digital. Selain itu, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan (R&D) akan mempercepat terciptanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga menciptakan ekonomi yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan, sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru di Kota Palopo.

Transparansi, Integritas, dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola

Transparansi, integritas, dan partisipasi publik menjadi isu strategis yang sangat relevan dalam upaya mewujudkan transformasi tata kelola Kota Palopo menuju 2025-2045. Dalam menghadapi kompleksitas administrasi pemerintahan yang semakin tinggi, transparansi menjadi fondasi utama untuk menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan teknologi informasi dalam layanan publik, seperti e-government dan sistem informasi pengelolaan keuangan, akan mendukung terbukanya akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Ini memungkinkan warga untuk memantau secara langsung kebijakan, anggaran, serta hasil pembangunan, sehingga memperkuat keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Integritas dalam tata kelola adalah komponen vital dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum. Reformasi birokrasi di Kota Palopo, yang mencakup penerapan standar integritas di seluruh lini pemerintahan, akan meningkatkan efektivitas layanan publik dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, dengan mengedepankan adaptabilitas, tata kelola yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat akan semakin kuat. Fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru dan menyesuaikan regulasi terhadap perubahan lingkungan global, seperti era digital dan ekonomi hijau, akan memperkuat daya saing kota dalam jangka panjang.

Partisipasi publik yang inklusif dalam proses pemerintahan menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Masyarakat sipil yang berdaya, didukung dengan regulasi yang mendorong keterbukaan, akan mampu memainkan peran aktif dalam memberikan masukan serta kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Melalui partisipasi aktif ini, transformasi tata kelola bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Palopo sebagai kota dengan tata kelola yang unggul dan berintegritas tinggi.

Isu strategis transparansi, integritas, dan partisipasi publik dalam tata kelola menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Palopo. Transparansi melalui penerapan layanan publik akuntabel yang mudah, cepat dan fleksibel seperti teknologi e-

government memungkinkan masyarakat memantau kebijakan publik, anggaran, dan hasil pembangunan secara langsung, sementara integritas birokrasi yang kuat mendorong pemerintahan yang bersih dan efisien. Reformasi birokrasi yang berfokus pada integritas dan adaptasi terhadap perubahan era digital akan memperkuat tata kelola kota. Partisipasi publik yang inklusif, di mana masyarakat sipil aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, menjadi kunci bagi tercapainya tata kelola yang berintegritas, responsif, dan adaptif, sehingga Palopo dapat tumbuh sebagai kota dengan pemerintahan yang berdaya saing, adil, dan berkelanjutan.

Dinamika Keamanan dan Stabilitas Sosial Ekonomi serta Politik

Dinamika keamanan di era digital menjadi isu strategis penting dalam pembangunan jangka panjang, termasuk bagi Kota Palopo. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah lanskap keamanan baik regional maupun nasional pada 20 tahun dengan kemunculan ancaman-ancaman baru, disinformasi alias hoax, serangan cyber dan berbagai bentuk radikalisasi melalui *platform* digital. Kota Palopo, seperti wilayah lain di Indonesia, tidak terlepas dari dampak globalisasi ini, yang memerlukan penguatan mekanisme perlindungan sosial dan politik untuk menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Era digital juga membawa tantangan di tingkat sosial-politik lokal, misalnya penyebaran provokasi, dan polarisasi masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial-politik. Dalam konteks Kota Palopo, penguatan literasi digital dan kesadaran politik menjadi krusial untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan mampu menyikapi perubahan di era digital. Pemerintah Kota perlu memastikan adanya regulasi yang efektif dan pemantauan terhadap konten digital yang dapat merusak harmoni sosial dan demokrasi lokal. Namun sebaliknya era digital juga menciptakan peluang untuk memperkuat stabilitas sosial-politik. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efisien, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan transparansi pemerintahan.

Di Kota Palopo, *platform* digital dan beragam media sosial dapat menjadi alat penting untuk memperluas akses informasi publik, mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, teknologi dapat memperkuat tata kelola yang demokratis dan kondusif, mendukung pembangunan daerah yang aman dan stabil. Stabilitas sosial-politik yang kuat akan menciptakan iklim yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi makro daerah. Ekosistem investasi dan bisnis akan semakin berkembang jika didukung oleh lingkungan yang stabil dan kondusif, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Palopo.

Isu strategis dinamika keamanan dan stabilitas sosial ekonomi dan politik sangat relevan bagi pembangunan jangka panjang Kota Palopo. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ancaman-ancaman baru, seperti serangan cyber, disinformasi seperti hoax, dan radikalisasi, yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan bahkan harmoni sosial masyarakat. Kota Palopo tentu pula akan menghadapi tantangan dari dampak globalisasi yang memerlukan penguatan mekanisme perlindungan sosial dan politik untuk menjaga stabilitas. Literasi digital dan kesadaran politik menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas dan tangguh terhadap provokasi di era digital. Selain tantangan, teknologi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi warga dalam demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan memanfaatkan *platform* digital, Kota Palopo dapat memperkuat tata kelola yang lebih demokratis dan kondusif, serta mendukung stabilitas ekonomi makro daerah melalui iklim investasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Globalisasi Budaya, Inklusivitas serta Ketahanan Daerah

Globalisasi budaya menjadi salah satu isu strategis penting yang dihadapi Kota Palopo dalam jangka panjang, khususnya periode 2025-2045. Globalisasi budaya membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan mengadopsi gaya hidup baru. Kota Palopo, yang sedang menuju pembangunan jangka panjang hingga 2045, akan menghadapi tantangan signifikan dari arus budaya global yang semakin kuat. Pengaruh ini dapat melemahkan nilai-nilai lokal dan identitas budaya jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat budaya lokal. Tekanan untuk beradaptasi dengan budaya global dapat menciptakan ketegangan antara tradisi dan modernitas, yang perlu dikelola secara bijaksana agar identitas budaya tetap lestari tanpa menutup diri dari perkembangan global. Dalam menghadapi globalisasi, penting bagi Kota Palopo untuk memperkuat nilai-nilai Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Globalisasi dapat mempengaruhi cara

masyarakat beragama dan berbudaya, namun dengan pendekatan maslahat, agama dapat berfungsi sebagai sumber kebaikan yang mempersatukan. Begitu pula dengan budaya lokal yang harus dijaga namun tetap terbuka untuk memperkaya diri dengan budaya global. Keseimbangan ini akan membantu Kota Palopo menghadapi tantangan globalisasi budaya tanpa kehilangan jati diri, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan yang membentuk masyarakat yang lebih maju dan toleran.

Tekanan globalisasi juga berpotensi mempengaruhi upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender. Pengaruh budaya global dapat membuka peluang bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan, namun juga dapat memicu resistensi terhadap perubahan peran gender di masyarakat. Kota Palopo harus memastikan bahwa keluarga sebagai unit sosial terpenting tetap kuat, dengan mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, keluarga-keluarga di Palopo dapat menjadi lebih inklusif, tangguh, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Globalisasi budaya juga memberikan tantangan terhadap penciptaan masyarakat inklusif di Kota Palopo. Dengan terbukanya akses terhadap berbagai pandangan dan gaya hidup, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan toleransi dan inklusivitas yang tinggi. Kota Palopo harus memperkuat dialog antarbudaya dan antaragama, serta memperluas akses terhadap pendidikan inklusif yang memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berpartisipasi dalam pembangunan. Inklusivitas ini tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga mendorong stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ketahanan daerah, globalisasi menuntut Kota Palopo untuk lebih memperhatikan ketahanan energi, air, dan pangan. Ketahanan ini sangat erat kaitannya dengan kemandirian pangan yang menjadi aspek penting dari stabilitas ekonomi dan sosial. Pengaruh globalisasi dalam bentuk ketergantungan pada pasokan energi dan pangan dari luar dapat melemahkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, Kota Palopo harus fokus pada pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, termasuk diversifikasi energi terbarukan, optimalisasi sumber daya air, dan penguatan sektor pertanian. Kemandirian pangan yang kokoh akan memastikan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan ketahanan sosial yang lebih kuat. Dengan mengelola pengaruh globalisasi secara bijak dan memperkuat ketahanan daerah, Kota Palopo dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga kuat dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, inklusivitas sosial, dan kemandirian ekonomi.

Ketimpangan Wilayah dan Keterhubungan Pusat Pertumbuhan

Di Kota Palopo, ketimpangan ini dapat terjadi antara pusat perkotaan yang menjadi motor penggerak ekonomi terutama pada sektor jasa dan perdagangan, dengan wilayah pinggiran kota yang belum sepenuhnya terintegrasi baik kemudahan akses transportasi jalan maupun keterhubungan komunikasi. Dalam jangka panjang, ketimpangan wilayah ini perlu diatasi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan merata. Integrasi Ekonomi Kota Palopo baik secara lokal, regional dan nasional menjadi salah satu kunci dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Sebagai bagian Sulawesi Selatan, Kota Palopo perlu memperkuat keterhubungannya dengan pusat-pusat ekonomi lain di kawasan tersebut serta jaringan ekonomi nasional. Dengan membangun konektivitas yang lebih baik, baik dari segi infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, dan transportasi publik lainnya) maupun infrastruktur digital, daerah-daerah luar kota yang produktif dan potensial dapat lebih mudah mengakses pasar, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Keterhubungan ini juga akan memperkuat daya saing Kota Palopo di tingkat regional dan nasional. Selain itu, pusat kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan wilayah. Kota Palopo, sebagai salah satu pusat ekonomi di Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar untuk menjadi *hub* ekonomi yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor unggulan. Namun, untuk mencegah semakin melebar ketimpangan termasuk dengan wilayah sekitarnya, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo juga ikut berkontribusi atau turut mendorong perkembangan wilayah sekitarnya, terutama beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo.

Ini bisa dilakukan melalui kebijakan dengan mendorong peluang-peluang ekonomi di wilayah pinggiran kota dapat difasilitasi dan didorong agar berkembang. Termasuk mendorong distribusi infrastruktur, layanan publik, serta akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja di seluruh wilayah Kota Palopo. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau wilayah

pinggiran kota, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara setara. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah pinggiran kota atau luar kota, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pusat kota. Kemudian keterhubungan pusat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dengan wilayah sekitarnya juga menjadi bagian penting dalam isu strategis ini. Kota Palopo, sebagai pusat pertumbuhan, harus mampu menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah baru, baik di sektor industri, pertanian, maupun pariwisata. Pengembangan wilayah yang merata ini akan membantu mengurangi migrasi penduduk ke pusat kota dan mendorong tumbuhnya potensi-potensi ekonomi di seluruh wilayah Kota Palopo. Masalah utama terkait isu ketimpangan wilayah dan keterhubungan pusat pertumbuhan di Kota Palopo adalah perbedaan signifikan antara pusat kota yang menjadi penggerak ekonomi utama dan wilayah pinggiran yang kurang terintegrasi, baik dari segi akses transportasi maupun komunikasi. Misalnya ancaman kemacetan seperti yang terjadi di kota-kota besar tanah air.

Ketimpangan ini bisa menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif dan merata. Untuk mengatasi masalah ini, integrasi ekonomi yang lebih baik, baik secara lokal, regional, maupun nasional, perlu ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang lebih merata, termasuk di wilayah pinggiran kota. Pusat kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus berperan dalam mendistribusikan manfaat pembangunan ke seluruh wilayah, mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran. Dengan demikian, Kota Palopo dapat mengurangi ketergantungan pada pusat kota dan mendorong potensi-potensi ekonomi di seluruh wilayahnya, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Perubahan Iklim, Risiko dan Mitigasi Bencana Alam

Perubahan iklim menjadi salah satu isu strategis Kota Palopo 2025-2045. Dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, cuaca dan curah hujan yang tidak menentu, serta frekuensi bencana alam yang potensial meningkat, menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan kehidupan dan pembangunan di Kota Palopo. Kota ini harus mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif guna menghadapi risiko tersebut, dengan fokus pada perlindungan masyarakat dan lingkungan. Tanpa upaya serius dalam menghadapi perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung kota akan semakin terancam, terutama dalam hal ketersediaan air, pangan, dan ruang hidup yang layak. Daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Palopo menjadi krusial dalam konteks perubahan iklim. Dengan semakin berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan. Kota Palopo harus memastikan bahwa pembangunan fisik dan infrastruktur tidak melampaui kapasitas lingkungan yang ada. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pengembangan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan ramah lingkungan, seperti sistem drainase yang efisien, bangunan tahan gempa, serta area resapan air, sangat penting dalam upaya mitigasi risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, menjaga kualitas lingkungan yang tinggi menjadi salah satu prioritas dalam upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim di Kota Palopo. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ruang hijau kota menjadi langkah penting dalam menurunkan dampak perubahan iklim. Penerapan konsep zero emisi melalui pengurangan polusi udara dari transportasi dan industri, serta peningkatan penggunaan energi terbarukan, akan membantu Kota Palopo menjadi kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kebijakan ramah lingkungan ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif bagi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko bencana alam yang diperparah oleh kerusakan lingkungan. Kota Palopo juga perlu meningkatkan ketangguhan terhadap bencana alam melalui program-program mitigasi bencana yang komprehensif. Upaya ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penyiapan sarana evakuasi, serta sistem peringatan dini yang efektif. Kota yang tangguh terhadap bencana akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman gempa, banjir, dan longsor yang mungkin diperburuk oleh perubahan iklim. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan risiko bencana harus menjadi prioritas untuk melindungi kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kerugian ekonomi. Isu strategis perubahan iklim, risiko, dan mitigasi bencana alam menjadi tantangan besar bagi Kota Palopo dalam jangka panjang, terutama terkait peningkatan suhu, cuaca tak menentu, dan frekuensi bencana alam yang berpotensi meningkat. Dampak ini mengancam keberlanjutan pembangunan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan kota, terutama terkait ketersediaan air, pangan, serta

ruang hidup yang layak. Kota Palopo harus mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif, termasuk perbaikan tata ruang yang berkelanjutan, infrastruktur ramah lingkungan, dan ketangguhan terhadap bencana. Ini meliputi penerapan sistem drainase yang efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan ruang hijau dan penggunaan energi terbarukan. Selain itu, diperlukan langkah mitigasi bencana melalui kesadaran masyarakat, sistem peringatan dini, dan sarana evakuasi yang memadai. Dengan demikian, Kota Palopo dapat menjadi kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana alam, mendukung target zero emisi, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Palopo dapat menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, menjaga daya dukung dan daya tampung kota, serta mempromosikan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Semua ini akan mendukung pencapaian target zero emisi dan pengurangan emisi gas rumah kaca, yang tidak hanya penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim global, tetapi juga untuk menciptakan kota yang lebih

Kerjasama Daerah dan Tantangan dalam Sinergi Regional dan Nasional

Menjadi salah satu isu strategis jangka panjang Kota Palopo tahun 2025-2045, kerjasama antar daerah merupakan salah satu isu strategis penting yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Di tengah dinamika globalisasi dan desentralisasi, kerjasama yang sinergis antara daerah-daerah di tingkat lokal, regional, dan nasional menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Tantangan utama yang dihadapi dalam kerjasama antar daerah adalah perbedaan kepentingan, tingkat perkembangan ekonomi, serta disparitas infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah. Kota Palopo harus mampu menjalin kerjasama yang efektif dengan daerah lain untuk memperkuat posisinya dalam peta ekonomi regional dan nasional. Kota Palopo memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah di Sulawesi Selatan maupun kawasan timur Indonesia. Palopo dapat memanfaatkan posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk mengintegrasikan perekonomian wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan memperkuat sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, pariwisata, dan industri pengolahan, Palopo dapat meningkatkan daya saingnya dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi dalam sinergi regional mencakup peningkatan keterhubungan infrastruktur, optimalisasi potensi lokal, serta harmonisasi regulasi antar daerah agar kerjasama tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi semua pihak. Pentingnya daya saing daerah dalam kerangka kerjasama antar daerah tidak hanya terletak pada kemampuan Kota Palopo untuk menarik investasi, tetapi juga pada kapasitasnya untuk menciptakan inovasi dan mendorong produktivitas ekonomi lokal. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang mendukung, dan regulasi yang pro-bisnis, Palopo dapat bersaing secara lebih efektif dalam skala nasional dan regional. Keberhasilan dalam membangun kerjasama antar daerah akan membantu Kota Palopo mengatasi berbagai tantangan pembangunan, seperti pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan akses pasar, serta penciptaan ekosistem bisnis yang inklusif dan kompetitif.

Selain itu, kepemimpinan yang kuat dan berpengaruh di tingkat lokal, nasional, dan regional menjadi faktor penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan. Pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak akan mampu memperkuat posisi Kota Palopo dalam kerjasama antar daerah. Sinergi antara pemimpin daerah dan pemerintah pusat juga sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan daerah mendapatkan dukungan yang optimal, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun sumber daya lainnya. Dengan adanya kepemimpinan yang solid, Palopo dapat memperluas pengaruh positifnya dan memperkuat integrasi dengan kawasan sekitarnya. Pada akhirnya, kerjasama antar daerah yang efektif akan meningkatkan kesinambungan pembangunan di Kota Palopo, di mana kota ini dapat berkembang secara harmonis dengan daerah sekitarnya, mengatasi tantangan infrastruktur dan ekonomi, serta berkontribusi pada pencapaian target nasional. Sebagai kota simpul dalam kerjasama regional, Palopo berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis, dengan daya saing yang kuat, serta mampu mendorong kemajuan yang merata di seluruh wilayah, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Isu strategis kerjasama antar daerah dan tantangan dalam sinergi regional dan nasional sangat penting bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang Kota Palopo. Dalam era globalisasi dan desentralisasi, kerjasama yang sinergis antara daerah-daerah di tingkat regional, dan nasional menjadi kunci mencapai pembangunan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi mencakup perbedaan kepentingan, tingkat perkembangan ekonomi, disparitas infrastruktur, dan aksesibilitas antar wilayah. Sebagai kota simpul di Sulawesi Selatan, Palopo memiliki



peran strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah sekitarnya, memanfaatkan sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa publik lainnya. Peningkatan keterhubungan infrastruktur, optimalisasi potensi lokal, dan harmonisasi regulasi antar daerah menjadi penting dalam mencapai sinergi regional yang berdampak positif. Keberhasilan Palopo dalam kerjasama antar daerah bergantung pada daya saing, inovasi, dan produktivitas ekonomi lokal, yang akan diperkuat melalui pengembangan SDM, infrastruktur, dan regulasi pro-bisnis. Kepemimpinan yang kuat juga menjadi faktor penentu dalam memastikan kesinambungan pembangunan dan memperkuat posisi Kota Palopo dalam peta ekonomi nasional, memungkinkan kota ini berkembang harmonis dengan wilayah sekitarnya.

Pengelolaan Pertanahan

Isu terkait permasalahan pertanahan adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah yang menimbulkan maraknya kasus pertanahan dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dapat menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat dan negara, menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah. Belum tercatatnya bidang-bidang tanah, menyebabkan masyarakat sulit untuk membuktikan kepemilikan tanah yang dimilikinya sehingga memunculkan sengketa dengan pihak lain termasuk negara. Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta terbatasnya ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial.



RPJPD 2025-2045



BAB IV VISI DAN MISI KOTA PALOPO

4.1. VISI

Definisi visi dalam RPJPD ini adalah kondisi Kota Palopo yang akan diwujudkan sebagai hasil dari rangkaian upaya pembangunan sampai dengan tahun 2045. Perumusan visi ini dilakukan dengan memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah.

Hal lain yang mendasari rumusan visi Kota Palopo adalah visi RPJPN 2025-2045 yakni **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** dan Visi Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 yakni **Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan**. Termasuk memperhatikan masalah utama dan isu strategis pembangunan daerah, aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai tahapan penyusunan RPJPD ini. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan visi RPJPD Kota Palopo 2025-2045 adalah sebagai berikut :

“PALOPO KOTA PENDIDIKAN DAN NIAGA YANG MAJU, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pendidikan adalah kondisi Palopo pada tahun 2045 dimana pendidikan berkembang untuk berbagai bidang ilmu dan menjadi kota tujuan bagi daerah sekitarnya untuk menuntut ilmu, baik bagi daerah lingkup Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan.

Kota Niaga adalah kondisi Palopo pada tahun 2045 yang menjelma sebagai pusat perdangan untuk beragam komoditas, terutama komoditas perkebunan, serta sebagai pusat perdagangan retailer dan reseller

Maju adalah kondisi Palopo pada tahun 2045 yang sejajar dengan kota lain di Indonesia dalam hal tingkat pendapatan masyarakat, dimana tingkat pendapatan tersebut mendekati atau setara dengan pendapatan pada masyarakat di negara maju. Pada saat itu, warga Palopo memiliki derajat kesehatan dan derajat pendidikan yang tinggi serta memiliki penguasaan iptekin sehingga berkualitas tinggi sebagai modal manusia.

Tangguh bermakna bahwa pada tahun 2045, sebagai sebuah entitas perkotaan, Palopo memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan. Aspek pertama dari ketangguhan ini mencakup ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dan ketahanan budaya. Aspek kedua dari ketangguhan ini terkait dengan daya saing infrastruktur dan sarana prasarana, daya saing perekonomian, dan daya saing investasi.

Berkelanjutan dipahami sebagai kondisi Kota Palopo pada tahun 2045 yang memiliki tata kelola yang baik, masyarakat sipil yang kuat, dan kualitas lingkungan hidup serta emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang rendah. Tata kelola yang baik dan masyarakat sipil yang kuat terkait dengan kepastian kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya seiring dengan regulasi yang berkualitas dan pelayanan public yang memenuhi standar. Kualitas lingkungan hidup yang baik mencakup keanekaragaman hayati, kapasitas penanganan bencana dan penurunan intensitas emisi GRK.

Visi dan misi pembangunan merujuk terhadap tujuan konkret yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang atau selama dua puluh tahun (2025-2045). Sasaran ini bertujuan untuk mendetailkan arah visi Kota Palopo selama jangka panjang disertai dengan pengukurannya berupa indikator-indikator yang sesuai sarannya.



Penyelarasan visi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Palopo tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Provinisi dan Kota Palopo Tahun 2025-2045

No	Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045
1	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Palopo Kota Pendidikan dan Niaga yang Maju, Tangguh dan Berkelanjutan

4.2 SASARAN VISI

Sasaran visi Kota Palopo diseleraskan dengan RPJPN dan RPJPD Sulawesi Selatan. Berikut adalah sasaran, indikator dan target kinerja visi RPJPD Kota Palopo 2025-2045 :

Tabel 4. 2 Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Visi Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Visi	No.	Indikator Visi Kab/kota	2025	2045
1.	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita	1	PDRB/kapita (Rp. Juta)	60.68 – 62	320 - 375.93
		2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	101,28	318,31
		3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	2.63	6.64
		4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	23.85	27
2.	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	5	Tingkat kemiskinan (%)	5.46 – 7.38	0.38 – 0.19
		6	Rasio Gini (Indeks)	0,363	0.323
		7	Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1.60	1.86
		8	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.96	7.39
3.	Meningkatnya daya saing daerah	9	Indeks Inovasi Daerah	56.80	75
		10	Indeks Daya Saing Daerah	2.9	3.37
4.	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	11	Indeks Pembangunan Manusia	80.79	98.00
5.	Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	12	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	18,76	80,66
		13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74.72	78.95

Untuk mendukung pencapaian sasaran visi selama 4 periode dari tahun 2025-2045, maka ditentukan target sasaran visi Kota Palopo selama 4 tahapan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi RPJPD Kota Palopo

No.	Sasaran Visi	No.	Indikator Visi Kab/kota	2025 (Baseline)	2029 (Periode I)	2034 (Periode II)	2039 (Periode III)	2045 (Periode IV)
1.	Meningkatnya pendapatan/kapita	1	PDRB/kapita (Rp. Juta)	60.68 – 62	110 - 135.75	200 - 216.87	250- 299.53	320 - 375.93
		2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	101,28	144,69	198,95	253,20	318,31
		3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	2.63	4.18	5.10	6.18	6.64
		4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	23.85	24	25	26	27
2.	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	5	Tingkat kemiskinan (%)	5.46 – 7.38	4.19- 7,38	2.92 – 5	1.65 – 3	0.38 – 0.19
		6	Rasio Gini (Indeks)	0,363	0,353	0,343	0,333	0.323
		7	Kontribusi PDRB (ADHB) Kota Palopo terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1.60	1.72	1.81	1.83	1.86
		8	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.96	6.51	7.01	7.13	7.39
3.	Meningkatnya daya saing daerah	9	Indeks Inovasi Daerah	56.80	62	67	71	75
		10	Indeks Daya Saing Daerah	2.9	2.9	3.10	3.19	3.37
4.	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	11	Indeks Pembangunan Manusia	80.79	84.24	88.54	92.84	98.00
5.	Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	12	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	18,76	31.24	43.96	65.04	80,66
		13	Indeks Kualitas	74.72	75.56	76.62	77.68	78.95



No.	Sasaran Visi	No.	Indikator Visi Kab/kota	2025 (Baseline)	2029 (Periode I)	2034 (Periode II)	2039 (Periode III)	2045 (Periode IV)
			Lingkungan Hidup Daerah					



Tabel 4. 4 Penyeragaman 5 (Lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Kota Palopo

Provinsi Sulawesi Selatan					Kota Palopo				
No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	No.	Indikator Visi Kab/kota	2025 (Baseline)	2045 (Periode IV)
1.	Peningkatan pendapatan/kapita	PDRB per kapita (Rp. Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	Meningkatnya pendapatan/kapita	1	PDRB/kapita (Rp. Juta)	60.68 – 62	320 - 375.93
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia	71,31	275,29		2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	101,28	318,31
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	12,95-13,05	18,62-19,92		3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	2.63	6.64
						4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	23.85	27
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	5	Tingkat kemiskinan (%)	5.46 – 7.38	0.38 – 0.19
		Rasio Gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332		6	Rasio Gini (Indeks)	0,363	0.323
		Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	3,21	3,23		7	Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1.60	1.86



Provinsi Sulawesi Selatan					Kota Palopo				
No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	No.	Indikator Visi Kab/kota	2025 (Baseline)	2045 (Periode IV)
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,30	6,90-8,94		8	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.96	7.39
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	Meningkatnya daya saing daerah	9	Indeks Inovasi Daerah	56.80	75
		Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4		10	Indeks Daya Saing Daerah	2.9	3.37
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	11	Indeks Pembangunan Manusia	80.79	98.00
5.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	37	89,74	Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	12	Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	18,76	80,66
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75		13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74.72	78.95



4.3 MISI

Misi RPJPD ini adalah pernyataan strategis yang merumuskan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Palopo dalam kurun waktu 20 tahun. Misi ini mencerminkan arah pembangunan yang ingin dicapai, menjabarkan visi daerah, dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Secara umum, misi dalam RPJPD bertujuan untuk mengarahkan upaya pembangunan daerah dengan fokus pada sektor-sektor prioritas, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Misi juga berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang konsisten dengan visi yang telah ditetapkan.

Terdapat delapan rumusan misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo dalam mewujudkan visi Kota Palopo, dua puluh tahun ke depan, yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Misi ini mencakup upaya umum dalam perwujudan kualitas kesehatan yang merata, kualitas pendidikan yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Ini merupakan substansi transformasi pertama Kota Palopo.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi

Misi ini bertujuan mentransformasikan perekonomian daerah, dari struktur perekonomian berbasis pemanfaatan sumber daya alam ke struktur perekonomian yang berbasis iptekin. Termasuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Misi ini mencakup peningkatan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan riset dan pemanfaatan iptekin dalam peningkatan produktifitas perekonomian, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, transformasi digital, dalam berbagai aspek aktifitas perekonomian daerah, integrasi perekonomian Kota Palopo dengan perekonomian regional, nasional serta lintas pulau dalam mendukung Ibukota Nusantara (IKN) serta perekonomian global. Misi ini merupakan substansi transformasi kedua Kota Palopo.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola

Misi ini merupakan substansi transformasi yang ketiga Kota Palopo. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan regulasi yang berintegritas, tata kelola yang baik, dan masyarakat sipil yang partisipatif. Misi ini mencakup upaya umum dalam memperbaiki kualitas hukum/regulasi daerah, perbaikan penerapan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan masyarakat sipil.

4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Misi ini bertujuan untuk memelihara ketertiban dan ketentraman umum, mewujudkan kondisi sosial politik yang mendukung tercapainya demokrasi substansial, menjaga stabilitas ekonomi makro daerah. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara keamanan daerah, penguatan partisipasi partai politik, dalam mewujudkan demokrasi substansial (dari demokrasi prosedural). Misi ini merupakan landasan transformasi yang pertama Kota Palopo.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi ini merupakan landasan transformasi yang kedua Kota Palopo. Misi ini bertujuan untuk menguatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi Kota Palopo, dalam menghadapi dinamika perubahan dalam 20 tahun ke depan, baik yang didorong oleh interaksi sosial budaya maupun yang didorong oleh kondisi lingkungan hidup. Misi ini mencakup upaya umum, dalam kehidupan beragama yang maslahat, keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, kualitas lingkungan hidup, serta resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Misi ini bertujuan untuk memantapkan posisi Kota Palopo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa pendidikan, dan jasa perniagaan/perdagangan dan didukung oleh perkembangan kawasan industri dan pergudangan. Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelesaian RDTR, pematangan kawasan industri,

perdagangan, dan niaga, penguatan fungsi pelabuhan dan pelelangan ikan, pengembangan water front city. Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang pertama Kota Palopo.

7. Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini bertujuan untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasana kota sehingga Kota Palopo nyaman sebagai tempat hidup. Misi ini mencakup upaya umum dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana ketahanan sistem transportasi, ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kedua Kota Palopo.

8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan

Misi ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Ini dicapai melalui kaidah pelaksanaan yang menjamin penjabaran RPJPD kedalam RPJMD dengan konsisten dan didukung oleh kapasitas pembiayaan yang optimal. Misi ini juga mencakup upaya umum penguatan daya saing dalam berbagai aspek. Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang ketiga Kota Palopo.

Delapan misi ini memiliki keterkaitan dengan pencapaian Visi Kota Palopo 2025-2045. Berikut adalah tabel keterkaitan misi terhadap visi Kota Palopo:

Tabel 4. 5 Keselarasan Visi dan Misi Kota Palopo 2025-2045

No.	VISI	No.	MISI
1	Kota Pendidikan	1	Mewujudkan transformasi sosial;
2	Kota Niaga	2	Mewujudkan transformasi ekonomi
3	Maju	1	Mewujudkan transformasi sosial;
		2	Mewujudkan transformasi ekonomi
4	Tangguh	3	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi;
		4	Mewujudkan transformasi tata kelola;
		5	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
		6	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan :
5	Berkelanjutan	7	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan :
		8	Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Keterkaitan dan relevansi antara misi nasional dalam RPJPN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Palopo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) penting untuk memastikan sinergi dan kesinambungan pembangunan. Misi nasional dalam RPJPN, dan misi Provinsi Sulsel harus diintegrasikan dan diseleraskan secara harmonis dengan misi Pemerintah Kota Palopo.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Palopo memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan misi tersebut ke dalam misi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan Kota Palopo. Dengan demikian, keterkaitan dan relevansi antara misi pembangunan nasional, provinsi dan kota ini akan memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan di tingkat kota tidak hanya sejalan dengan visi besar provinsi dan misi nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Palopo. Sinergi ini akan memperkuat upaya mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota. Berikut adalah tabel keselarasan misi pembangunan nasional dalam RPJPN, misi Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Palopo :



Tabel 4. 6 Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan

RPJPN Tahun 2025 – 2045			RPJPD Provinsi Sulsel Tahun 2025 – 2045	RPJPD Kota Palopo Tahun 2025 – 2045
Agenda		Misi	Misi	Misi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Transformasi Indonesia	1	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial
	2	Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi
	3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tranformasi tata kelola	Mewujudkan tranformasi tata kelola
Landasan Transformasi	4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Mewujudkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
	5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
Kerangka Implementasi Transformasi	6	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
	7	Sarana dan Prasarana yang berkualitas	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	8	Kesinambungan Pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan



RPJPD 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini berisi tentang *pertama* sub bab arah kebijakan, *kedua* adalah sub bab sasaran pokok yang terdiri dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan dan *ketiga* adalah sub bab arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah panduan strategis yang menentukan prioritas dan fokus pembangunan di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu pada visi dan misi, serta permasalahan dan isu strategis. Dengan arah kebijakan yang jelas dan terstruktur, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.

Dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, dilakukan penahapan per 5 (lima) tahun dengan mengikuti fokus pembangunan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut :

5.1.1 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2025-2029

Periode I diarahkan untuk **penguatan fondasi atau landasan transformasi** di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur. Arah kebijakan transformasi dijelaskan sebagai berikut :

Transformasi sosial pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pertama, kebijakan diarahkan untuk memastikan pelayanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, dengan penekanan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pergeseran orientasi dari kuratif-rehabilitatif ke promotif-preventif. Kedua, dalam sektor pendidikan, perhatian difokuskan pada pemenuhan SPM pendidikan dan peningkatan kualitas lulusan melalui pencapaian prestasi dalam literasi, numerasi, dan pengetahuan sains. Ketiga, kebijakan perlindungan sosial diperkuat dengan memastikan jenis, akses, dan mutu layanan yang adaptif, khususnya bagi rumah tangga miskin, rentan, serta kelompok margin dan minoritas lainnya.

Transformasi ekonomi pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, perdagangan jasa, industri, pariwisata, dan investasi, serta peningkatan ketenagakerjaan dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, kebijakan juga menekankan pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan, ekonomi sirkular, dan pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan ekonomi hijau dan biru. Transformasi digital melalui penguatan infrastruktur TIK dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Upaya ini mencakup peningkatan industri daerah lokal yang berfokus pada peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.

Transformasi tata kelola pada tahap ini diarahkan pada penguatan pondasi bagi kelembagaan yang adaptif yang tepat fungsi, peningkatan kualitas SDM ASN yang kompetitif, berintegritas, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil serta pengembangan partai politik yang modern dan berintegritas. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, serta pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri.

Keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan regulasi guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan. Pada tahap ini pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan transformasi tata kelola ketentraman dan ketertiban masyarakat, akuntabel berbasis digital, dan penguatan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai lebih ditingkatkan. Stabilitas ekonomi daerah ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan dan kemudahan investor.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada pertama penguatan pondasi dalam peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia diperkuat untuk memantapkan ketahanan sosial budaya, dengan fokus pada pembangunan kebudayaan dan kerukunan umat beragama. Kedua, kebijakan ini mendorong penggerakan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia, serta kesiapan menghadapi perubahan dan bencana. Ketiga, penguatan pondasi dilakukan untuk mendukung daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui kebijakan yang relevan. Terakhir, ketahanan ekologi daerah diperkuat dengan fokus pada adaptasi, mitigasi, dan respon terhadap perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diarahkan pada penguatan pondasi dalam upaya peningkatan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi di Kota Palopo berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah dengan memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Optimalisasi sarana dan prasarana meliputi peningkatan aksesibilitas transportasi, baik jalan, pelabuhan, maupun jaringan logistik, untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital juga menjadi prioritas untuk mempercepat transformasi ekonomi, di mana konektivitas dan teknologi informasi menjadi kunci dalam mendukung inovasi dan efisiensi usaha.

Kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada penguatan pondasi di Kota Palopo berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung ketahanan energi, air, dan pangan serta transportasi yang berkualitas. Dalam hal ketahanan energi, kebijakan ini bertujuan memastikan penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur energi dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sementara itu, untuk ketahanan air, akan dilakukan peningkatan sistem pengelolaan sumber daya air, distribusi, dan pengolahan air, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif.

Selain itu, kebijakan ini mendukung kemandirian pangan dengan pengembangan infrastruktur pertanian dan sistem logistik pangan yang efisien, serta memperkuat jaringan transportasi seperti tol laut dan jalur transportasi utama untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Aspek ramah lingkungan juga menjadi prioritas, dengan penerapan prinsip keberlanjutan dan teknologi ramah lingkungan dalam setiap pengembangan sarana dan prasarana.

Daya saing pembangunan daerah diarahkan pada ada penguatan pondasi untuk sinkronisasi pembangunan melalui perbaikan akuntabilitas dan tata kelola yang lebih baik. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat sistem pengendalian pembangunan dan tata kelola yang efisien, untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Penerapan teknologi berbasis elektronik akan mendukung transparansi dan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan.

Kebijakan ini juga menekankan pada peningkatan pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan sistem akuntabilitas yang lebih baik dan pengelolaan keuangan yang transparan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini akan memperkuat daya saing daerah dengan memastikan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1.2 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2030-2034

Periode II diarahkan untuk **akselerasi transformasi** yang diartikan bahwa telah terwujud fondasi pembangunan yang kuat. Akselerasi transformasi berarti mempercepat perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat dan efektif. Ini melibatkan adopsi teknologi baru,

perbaikan proses, pengembangan kapasitas, dan penyederhanaan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Transformasi sosial pada tahap ini diarahkan pada tiga area utama: pertama, mempercepat pembangunan kesehatan berkualitas dengan memperkuat sarana dan prasarana untuk mendukung upaya promotif dan preventif serta internalisasi budaya hidup sehat. Kedua, meningkatkan pencapaian prestasi pendidikan melalui akselerasi dalam numerasi, literasi, dan pengetahuan sains, serta penuntasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, mempercepat perlindungan sosial yang adaptif dengan fokus pada rumah tangga miskin dan rentan, untuk memastikan dukungan yang lebih cepat dan efektif.

Transformasi ekonomi pada tahap ini diarahkan pada akselerasi transformasi yang mencakup beberapa inisiatif utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan jasa, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sambil meningkatkan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran, dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, akselerasi investasi dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Kedua, akselerasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), penerapan ekonomi sirkular, dan pengelolaan lahan berkelanjutan bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru. Transformasi digital juga dipercepat melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan pemanfaatan TIK di berbagai sektor, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, peningkatan industri domestik yang difokuskan pada akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi, dan kemitraan usaha untuk memperkuat daya saing dan integrasi ekonomi baik lokal, regional dan nasional.

Transformasi tata kelola pada tahap ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Ini melibatkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah agar dapat berjalan dengan lebih efisien dan adaptif/fleksibel (agile/lincah) dalam menghadapi dinamika. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif, dengan peningkatan keterampilan dan profesionalisme untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Selain itu, akselerasi transformasi tata kelola mencakup modernisasi lembaga politik agar lebih berintegritas dan transparan, serta pembentukan dan evaluasi regulasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan masyarakat sipil yang mandiri juga menjadi fokus utama, dengan tujuan memberdayakan komunitas untuk berperan aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan, serta memastikan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam tata kelola daerah.

Keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada pertama, upaya untuk memastikan kondusifitas daerah yang baik, fokus diletakkan pada digitalisasi sistem penegakan regulasi daerah yang modern dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penegakan regulasi agar lebih berintegritas. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem regulasi dan kepatuhan yang lebih efisien dan transparan, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman.

Kedua, akselerasi juga diarahkan untuk memantapkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan kualitas tata kelola fiskal dan peran lembaga keuangan non-pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendorong partisipasi sektor keuangan swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia diperkuat untuk memantapkan ketahanan sosial budaya, dengan fokus pada pengembangan kebudayaan dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan memperkokoh kohesi masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan budaya.

Kedua, akselerasi modal sosial dalam masyarakat ditingkatkan untuk memperkuat ketangguhan individu dan komunitas dalam menghadapi perubahan serta bencana. Penguatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, ketahanan ekologi diperkuat melalui upaya adaptasi, mitigasi, dan respon terhadap perubahan iklim serta bencana, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih resilient dan berkelanjutan bagi masa depan.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diarahkan pada peningkatan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau produktif melalui optimalisasi sarana dan prasarana. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan spot yang memiliki potensi besar dengan memperkuat infrastruktur yang mendukung sektor-sektor utama, seperti transportasi, dan connectivity. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Selain itu, akselerasi ini juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memastikan bahwa sumber daya dan investasi didistribusikan secara adil. Ini melibatkan peningkatan kualitas infrastruktur di spot-spot yang kurang berkembang dan memastikan bahwa semua wilayah Kota Palopo mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan ekonomi dapat lebih merata dan berkeadilan, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua daerah di Kota Palopo.

Kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan beberapa aspek kunci. Pertama, fokus utama adalah pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan energi, seperti pengembangan infrastruktur untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), serta pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air bersih dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemandirian pangan juga menjadi prioritas dengan pengembangan infrastruktur pertanian dan sistem logistik pangan yang efisien.

Selain itu, akselerasi ini mencakup peningkatan kualitas transportasi dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti tol laut, yang akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Seluruh upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, termasuk penerapan teknologi dan praktik yang mengurangi dampak ekologis, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung ketahanan wilayah secara komprehensif sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

Daya saing pembangunan daerah diarahkan pada tahapan akselerasi transformasi dalam meningkatkan daya saing pembangunan daerah di Kota Palopo dengan menjaga dan memastikan sinkronisasi pembangunan daerah dengan memastikan bahwa seluruh rencana dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan visi dan misi jangka panjang. Ini melibatkan perencanaan yang terkoordinasi dan integrasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, meningkatkan kerjasama dan kemitraan daerah, perbaikan akuntabilitas dan pengendalian pembangunan melalui sistem pengendalian yang lebih ketat dan transparan. Ini mencakup penerapan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang jelas, serta penguatan sistem audit untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penerapan berbasis elektronik dan implementasi teknologi informasi berbasis elektronik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi birokrasi dan perbaikan pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah.

5.1.3 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo diarahkan pada kebijakan **perluasan jangkauan/cakupan (expansi)** yang berarti memperluas ruang lingkup dan area implementasi kebijakan untuk mencakup lebih banyak sektor, wilayah, atau kelompok sasaran. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan dampak dan manfaat pembangunan secara lebih luas dan merata. Dengan perluasan jangkauan atau ekspansi, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata, yang pada gilirannya mendukung pencapaian visi Kota Palopo 2025-2045.

Perluasan Transformasi sosial mencerminkan upaya untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas program sosial di berbagai bidang. Pertama, perluasan jangkauan pembangunan kesehatan berkualitas berarti memperluas akses ke layanan kesehatan yang merata dengan fokus pada upaya promotif dan preventif serta pembudayaan pola hidup sehat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani, dapat menikmati manfaat dari layanan kesehatan yang berkualitas.

Kedua, dalam pendidikan, perluasan jangkauan mencakup upaya untuk meningkatkan prestasi lulusan dalam numerasi, literasi, dan pengetahuan sains, sehingga semua siswa dapat mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Selain itu, perluasan jangkauan

perlindungan sosial adaptif fokus pada rumah tangga miskin dan rentan, memastikan bahwa dukungan sosial dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan dan meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Ini menciptakan dasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan sosial di daerah tersebut.

Perluasan transformasi ekonomi mencakup berbagai aspek strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, perluasan ini melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perdagangan jasa, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta BUMD. Fokus juga pada peningkatan ketenagakerjaan, pengurangan pengangguran, partisipasi tenaga kerja perempuan, dan investasi. Selain itu, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), ekonomi sirkular, dan pengelolaan lahan berkelanjutan diperluas untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi hijau serta biru.

Kedua, akselerasi transformasi digital menjadi prioritas dengan penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta peningkatan pemanfaatan TIK di berbagai sektor. Ini termasuk peningkatan literasi digital untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Perluasan industri Kota Palopo juga ditekankan, dengan fokus pada peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi, dan kemitraan usaha untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan di Kota Palopo.

Perluasan jangkauan transformasi tata kelola diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas kelembagaan serta sistem pemerintahan. Transformasinya diarahkan pada penguatan kelembagaan yang adaptif, yang mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif. Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) ASN yang kompetitif dan profesional, kemudian pada sisi lain meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Kedua, fokus transformasi ini juga meliputi pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih responsif dan efisien. Selain itu, ada penekanan pada pemberdayaan masyarakat sipil agar lebih mandiri, dengan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, tata kelola Kota Palopo diharapkan menjadi lebih transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perluasan jangkauan dalam keamanan daerah, ketangguhan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro bertujuan untuk memperkuat fondasi yang mendukung keamanan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di Kota Palopo. Pertama, perluasan ini mencakup upaya untuk memantapkan kondusifitas daerah melalui penegakan regulasi dan peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan regulasi, serta memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi dan etika yang baik.

Kedua, untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perluasan jangkauan juga fokus pada perbaikan tata kelola fiskal daerah dan dukungan peranan lembaga keuangan non-pemerintah lainnya. Ini melibatkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan keuangan daerah, serta menguatnya dukungan proyek-proyek pembangunan dan investasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud stabilitas ekonomi yang lebih baik, mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah.

Perluasan jangkauan dalam ketahanan sosial budaya dan ekologi berfokus pada penguatan berbagai aspek yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan komunitas serta lingkungan. Pertama, perluasan ini mencakup penguatan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia untuk memantapkan ketahanan sosial budaya. Ini melibatkan upaya pembangunan kebudayaan dan kerukunan umat beragama di Kota Palopo, sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Selain itu, peningkatan modal sosial dalam masyarakat bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial yang mendukung ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

Kedua, perluasan jangkauan dalam aspek ekologi meliputi peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Upaya ini termasuk adaptasi, mitigasi, dan respons terhadap perubahan iklim dan bencana daerah, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekologi Kota Palopo, menjaga

keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan komunitas yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Perluasan jangkauan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat dinikmati secara luas. Pendekatan ini mencakup upaya peningkatan pembangunan di spot produktif dan potensial Kota Palopo dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Ini berarti memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada dan mengembangkan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi, konektivitas dan aksesibilitas dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Dengan perluasan ini, diharapkan dapat tercipta distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil, sehingga tidak hanya spot dalam kota yang maju dan merasakan dampak positif, tetapi daerah luar kota yang memiliki potensi namun sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Pendekatan ini mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Perluasan jangkauan kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan berfokus pada meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan air, dan kemandirian pangan, serta transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan energi, pengelolaan dan penyediaan air yang berkelanjutan. Selain itu, memperkuat sistem pangan lokal untuk mencapai kemandirian pangan juga menjadi prioritas, diiringi dengan peningkatan kualitas transportasi, termasuk pembangunan tol laut, yang memungkinkan mobilitas barang dan orang yang lebih efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya aspek ramah lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur, memastikan bahwa pembangunan memenuhi standar keberlanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Perluasan jangkauan daya saing pembangunan daerah berfokus pada memperkuat sinkronisasi pembangunan dengan menekankan perbaikan di beberapa aspek kunci. Upaya ini mencakup peningkatan kerjasama daerah, akuntabilitas dan pengendalian pembangunan, serta penguatan tata kelola untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada.

Fokus utamanya adalah pada penerapan pemerintahan yang menerapkan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga melibatkan penyempurnaan mekanisme pembiayaan pembangunan untuk mendukung hal-hal strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan daerah dapat mencapai koordinasi yang lebih baik antar sektor, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas program pembangunan.

5.1.4 ARAH KEBIJAKAN PERIODE 2040-2045

Arah kebijakan periode IV adalah perwujudan Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan & Niaga yang Maju, Tangguh dan Berkelanjutan mendukung Indonesia Emas 2045. Tahap ke 4 ini dicapai dengan mewujudkan semua transformasi, landasan transformasi, dan pemenuhan semua kerangka implementasi transformasi pembangunan.

Transformasi sosial pada tahap ini diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi utama dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Transformasi ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, yang berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan yang optimal. Dengan menanamkan budaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, Kota Palopo diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Selain aspek kesehatan, transformasi sosial ini juga berfokus pada pendidikan sebagai alat utama dalam membentuk SDM yang cerdas dan berkarakter. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dengan penekanan pada literasi, numerasi, dan pengetahuan sains akan mendorong lahirnya generasi yang siap menghadapi tantangan global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan karakter, Kota Palopo tidak hanya menyiapkan SDM yang siap kerja, tetapi juga menciptakan warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, regional dan nasional. Transformasi

Perwujudan transformasi ekonomi di Kota Palopo diarahkan untuk menjadikannya sebagai Kota Perdagangan Modern, di mana sektor jasa yang maju dan berdaya saing menjadi motor penggerak perekonomian kota. Ini mencakup pengembangan infrastruktur dan layanan yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan jasa, termasuk digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan peran pelaku usaha lokal dalam rantai nilai regional dan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Kota Palopo diharapkan mampu bersaing secara regional dan nasional dan menjadi pusat perdagangan.

Selain itu, transformasi ekonomi ini juga difokuskan pada pembangunan berbasis ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan, menggeser struktur ekonomi dari ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya alam ke ekonomi yang didorong oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin). Pembangunan ekonomi hijau dan biru ini melibatkan optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Kota Palopo juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas daerah, dengan mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi ke dalam jaringan perekonomian regional dan nasional.

Perwujudan tata kelola di Kota Palopo diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, serta pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pemerintahan mampu beroperasi secara efektif dalam menghadapi tantangan modern, dengan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Selain itu, penguatan lembaga politik yang modern dan berintegritas juga menjadi fokus utama, untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Upaya transformasi ini juga mencakup pembentukan dan evaluasi regulasi sehingga peraturan dan kebijakan dapat lebih efektif diimplementasikan lebih efektif dan efisien. Dengan regulasi yang didukung oleh teknologi, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, masyarakat sipil yang mandiri juga menjadi target, dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga tercipta tata kelola yang inklusif dan partisipatif, yang mampu mendorong kemajuan sosial dan ekonomi di Kota Palopo.

Perwujudan keamanan daerah, ketangguhan, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro di Kota Palopo diarahkan pada terciptanya lingkungan yang kondusif dan adanya kepastian hukum dan kepatuhan regulasi yang terus menguat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dengan penegakan regulasi dan hukum yang konsisten dan sistematis, diharapkan tercipta stabilitas sosial yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, stabilitas ekonomi Kota Palopo akan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkualitas, didukung oleh tata kelola fiskal daerah yang efektif. Dalam upaya ini, peran lembaga keuangan non-pemerintah juga dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan dan investasi yang diperlukan dalam pembangunan daerah. Misalnya peran dunia usaha dalam pembangunan Kota Palopo. Sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan swasta diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Palopo di tingkat regional maupun nasional.

Perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kota Palopo diarahkan untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat. Fokus utama adalah menciptakan ketahanan sosial budaya yang kokoh melalui upaya pembangunan kebudayaan dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Dengan memperkuat peran keluarga sebagai fondasi, diharapkan tercipta generasi yang sehat dan harmonis Kota Palopo, yang siap mendukung pencapaian visi Indonesia Emas. Keluarga yang kuat dan harmonis menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, ketahanan ekologi di Kota Palopo juga menjadi prioritas utama. Langkah ini diwujudkan melalui pembangunan lingkungan yang estetik, asri dan lestari, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketahanan ekologi yang berkualitas diharapkan mampu menyikap dan mesrepon tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem Kota Palopo. Dengan demikian, Kota Palopo tidak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni, tetapi juga memiliki daya tahan lingkungan yang mampu mendukung pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kota Palopo diarahkan pada penciptaan pembangunan yang adil dan merata sampai pada tingkat kelurahan. Termasuk upaya pemerataan akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, dan sumber daya ekonomi, sehingga semua wilayah di Kota Palopo dapat berkembang secara seimbang. Dengan demikian, kesenjangan antarwilayah dapat diminimalisir, dan setiap



bagian dari Kota Palopo berkesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Selain itu, fokus pada pembangunan yang merata juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kota Palopo. Ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dengan pendekatan ini, Kota Palopo diharapkan dapat menjadi kota yang inklusif, di mana setiap warganya, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan.

Perwujudan kecukupan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palopo. Ini mencakup pembangunan fasilitas konektivitas dan aksesibilitas wilayah termasuk didalamnya upaya membangun jaringan transportasi air seperti tol laut, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Selain itu, fokus juga diberikan pada penyediaan infrastruktur air, dan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat memastikan ketersediaan sumber daya penting bagi masyarakat secara merata dan berkualitas.

Selain itu, perwujudan sarana dan prasarana ini juga menekankan pentingnya aspek ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sarana dan prasarana yang dibangun akan dirancang untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ketahanan lingkungan hidup di masa mendatang.

Perwujudan daya saing pembangunan daerah diarahkan pada pembangunan nasional dan daerah yang berlandaskan prinsip "*good and clean governance*" bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks ini, fokus utama adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun keuangan, melalui penerapan sistem berbasis elektronik dan digitalisasi proses administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan mempercepat penyampaian layanan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, penguatan daya saing daerah juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan. Dengan tata kelola yang baik dan bersih, daerah akan lebih mampu menarik investor, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.



Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Kota Palopo

Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
Palopo Kota Pendidikan dan Niaga yang Maju, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan transformasi sosial	Konsolidasi penguatan untuk fondasi transformasi sosial diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk melahirkan modal manusia berkualitas yang akan menjadi aktor pada tahapan transformasi berikutnya. Pemenuhan layanan kesehatan diarahkan pada pencapaian menyeluruh atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan; pemenuhan layanan pendidikan diarahkan pada pencapaian menyeluruh atas SPM pendidikan untuk terlaksananya Wajib Belajar 13 tahun; pelayanan perlindungan sosial diarahkan pada terlindunginya hak-hak dasar kelompok rentan dan miskin. Arah kebijakan ini untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses transformasi selanjutnya.	Akselerasi transformasi sosial diarahkan pada terwujudnya modal manusia yang berdaya saing. Akelerasi pembangunan kesehatan diorientasikan pada upaya preventif dan promotif dan menjadikan Palopo sebagai kota rujukan dalam pelayanan kesehatan berkualitas. Akselerasi pendidikan diorientasi-kan pada perbaikan kualitas lulusan terutama dalam kemampuan literasi, numerasi dan pengetahuan sains serta mendorong situasi kondusif bagi perkembangan perguruan tinggi sehingga Palopo menjadi kota tujuan pendidikan. Akselerasi perlindungan sosial diarahkan pada inklusifitas dan kelayakan	Perluasan transformasi sosial diarahkan pada berperannya modal manusia yang menguasai iptekin dan kewirausahaan secara kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan perubahan. Pembangunan kesehatan diarahkan pada meluasnya budaya hidup sehat yang didukung oleh sarana prasarana perkotaan seperti ruang terbuka hijau. Pembangunan pendidikan diarahkan pada perbaikan kecerdasan warga kota melalui ekosistem smart city. Perlindungan sosial diarahkan pada penanganan penduduk berusia lanjut dan kualitas hidup kelompok rentan.	Perwujudan Kota Palopo sebagai kota pendidikan di Sulawesi Selatan dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	Konsolidasi penguatan fondasi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh, unggul melalui upaya hilirisasi komoditas unggulan dan potensial, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan penguatan ekosistem usaha dan industrialisasi.	hidup seluruh kelompok rentan. Akselerasi transformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui peningkatan produktivitas daerah, penguatan dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan, daerah produktif dan potensial, penguatan struktur industri, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan baru seperti ekonomi biru, ekonomi hijau yang didukung dengan teknologi.	Perluasan/ekspansi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan daya saing ekonomi dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan rantai nilai, penguasaan teknologi tinggi, penguatan daya saing industri, dan memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dan barometer Kawasan Timur Indonesia.	Perwujudan Kota Palopo sebagai kota niaga dengan produktivitas dan perkonomian yang tinggi di Sulawesi Selatan, berbasis iptekin ditopang oleh sektor ekonomi hijau dan biru unggulan yang tangguh iklim
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola	Konsolidasi penguatan fondasi transformasi tata kelola melalui optimasi regulasi, pengembangan kelembagaan yang agile dan tepat fungsi, kualitas SDM ASN yang unggul dan berintegritas, inovasi secara terus menerus, digitalisasi	Akselerasi transformasi tata kelola melalui peningkatan fungsi kelembagaan yang kolaboratif, adaptif, inklusif berbasis teknologi informasi, SDM ASN sejahtera, berkompeten, berintegritas, dan	Perluasan/ekspansi transformasi tata kelola melalui kelembagaan yang adaptif, SDM ASN kompetitif dan berintegritas, dan masyarakat sipil yang profesional dan akuntabel	Perwujudan Palopo sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan, kelembagaan serta dimensi pelayanan yang berintegritas, dan adaptif serta masyarakat sipil yang berdaya



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
		pelayanan, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil.	masyarakat sipil yang berdaya serta partisipatif.		
	4. Memantapkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	<p>Menguatkan budaya kepatuhan regulasi, norma, dan hukum untuk mewujudkan kondusifitas daerah dan masyarakat, mengembangkan pendidikan politik masyarakat yang berbasis nilai, menciptakan stabilitas ekonomi daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan.</p> <p>Pengembangan budaya patuh regulasi, norma dan hukum ini mengedepankan keseimbangan transformasi ketentraman dan ketertiban masyarakat, penguatan pendidikan politik.</p> <p>Stabilitas ekonomi diarahkan para upaya menjaga keseimbangan ekonomi terutama harga dan daya beli, serta kepercayaan investor, serta keberlanjutan fiskal</p>	<p>Mengakselerasi upaya menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah dan ekonomi yang mencakup kapasitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat; partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang demokrasi publik yang sehat; kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan.</p> <p>Pada tahap ini kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman</p>	<p>Memperluas kawasan kawasan tertib kota dan bebas korupsi dalam mewujudkan Kota Palopo yang kondusif, dengan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.</p> <p>Pada tahap ini ketertiban dan keamanan mampu menjadi daya tarik regional dan nasional, menjadi daerah dengan clean and good governance, dengan paradigma restoratif dan berperspektif Hak Asasi Manusia, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam</p>	Perwujudan Palopo sebagai daerah dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, dan demokratis dengan stabilitas ekonomi yang tangguh.



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
			masyarakat semakin menguat, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter, adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan	memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik,	
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat yang mampu menghadapi dinamika perubahan termasuk perubahan iklim, untuk mewujudkan masyarakat inklusif, beradab, bertakwa dan berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya; serta meningkatkan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan Pada tahap ini diperkuat lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat	Mengakselerasi upaya memperkuat kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat inklusif, beradab, bertakwa, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religius dan sadar lingkungan; serta memperluas jangkauan ketersediaan air, energi, dan pangan berkualitas dengan menguatkan upaya keberlanjutan lingkungan. Pada tahap ini diperkuat pemantapan nilai religius	Memperluas aspek aspek ketangguhan keluarga dalam mewujudkan masyarakat inklusif, beradab, religius, berbudaya di kancan regional dan nasional, dan memastikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air, energi, pangan dan lingkungan berkualitas. Pada tahap ini masyarakat yang dimulai dari keluarga semakin religius, tangguh dan	Perwujudan Palopo sebagai daerah dengan masyarakat inklusif, beradab, bertakwa dan berbudaya ditopang dengan keluarga berkualitas dan berkesetaraan



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
		menjalankan fungsinya berbasis nilai religius dan budaya, partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok sosial dalam pengelolaan ekologi; dan ketahanan pangan.	dan budaya mewujudkan karakter manusia sebagai modal sosial; meningkatkan ketangguhan dan daya adaptasi masyarakat menghadapi perubahan; menjaga dan meningkatkan keselarasan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup termasuk kawasan pesisir dan sungai, pengembangan kapasitas manusia dan kelembagaan serta instrumen kebijakan pengelolaan ekosistem sumber daya alam	adaptif dalam menghadapi perubahan, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif; menguatkan pengelolaan kawasan pesisir dan sungai, optimalnya penerapan energi baru terbarukan, sirkulasi ekonomi dan penanganan sampah dan limbah yang terkelola dengan baik serta pemantapan sistem ketahanan pangan, air, dan energi	
	6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah dalam kota dengan kawasan luar kota, Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dengan penguatan kerjasama antar daerah baik regional maupun nasional, penuntasan RDTR termasuk pesisir dan laut, pengembangan pelabuhan Palopo untuk mendukung konektivitas laut dan logistik daerah.	Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru baik yang produktif maupun dukungan konektivitas dan kualitas digital. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. Pembangunan kawasan kawasan strategis wilayah	Memperluas cakupan dan jangkauan konektivitas daerah secara berkualitas terutama dengan wilayah-wilayah kawasan produktif dan potensial Kota Palopo terhadap pusat pertumbuhan ekonomi dengan dukungan pengembangan energi baru terbarukan sesuai konteks Kota Palopo.	Perwujudan Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan perekonomian yang terintegrasi secara regional dan nasional



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
		Memperkuat konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana. Penguatan dukungan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik baik regional maupun nasional.	, dengan tata kelola yang terintegrasi. Mengakselerasi peningkatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana. Penguatan dukungan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik baik regional maupun nasion	Dibarengi dengan upaya mengoptimalisasi pemanfaatan ALKI secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai baik regional dan nasional.	
	7. Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan, perumahan dan telekomunikasi terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan	Percepatan dalam upaya peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan untuk lingkungan yang berkualitas mendukung	Pemenuhan akses dan kualitas infrastruktur sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik, air bersih dan air layak minum, sanitasi aman, persampahan) secara merata di seluruh wilayah.	Perwujudan Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi, tangguh/resilience terhadap bencana dan perubahan iklim,serta berketahanan Energi,Air, serta Kemandirian Pangan.



Visi	Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2046
1	2	3	4	5	6
		kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	secara merata antar kawasan perkotaan dan luar kota serta mengakselerasi pencapaian pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim	Pada tahap ini lebih menguatkan implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pencapaian penerapan ekonomi hijau dan biru secara komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengurangan pencemaran lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati,	
	8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi regional dan nasional dalam mendorong kemajuan teknologi dan inovasi, memperluas skala ekonomi dan ukuran pasar, ketersediaan dan dukungan infrastruktur, dan memperkuat institusi dan kebijakan pemerintah. Termasuk menguatkan pengembangan sektor unggulan dan kerjasama daerah lainnya dalam skala regional, nasional.	Percepatan peningkatan daya saing sektor unggulan dan potensial daerah, dan pengembangan lingkup dan jenis kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global	Perluasan kolaborasi peningkatan daya saing sektor unggulan dan kerjasama daerah dalam skala regional dan nasional	Perwujudan Palopo sebagai Kota Simpul Dalam Kerjasama baik skala lokal, regional dan nasional dengan penguatan kemampuan daerah dan pemerintah, yang ditandai dengan kolaborasi dengan beragam komunitas



5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2025-2045 ditetapkan **8 (delapan) sasaran pokok** dengan **17 (tujuh belas) arah pembangunan** daerah Kota Palopo, dan dijabarkan lebih lanjut dalam **168 arah kebijakan transformasi**. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan **indikator utama pembangunan** sebagai ukuran kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

Berdasarkan visi dan misi Kota Palopo, maka dirumuskan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Palopo tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang sehat cerdas dan hidup layak
2. Terwujudnya Palopo sebagai kota niaga dengan produktifitas perekonomian yang tinggi dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi
3. Terwujudnya Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola berintegritas dan adaptif dengan masyarakat sipil yang berdaya
4. Terwujudnya Palopo sebagai kota yang Aman, Tertib, Demokratis, dan Kondusif
5. Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat at yang inklusif, beradab dan berbudaya
6. Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan
7. Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
8. Terwujudnya Palopo sebagai kota simpul dalam kerjasama daerah

Berikut adalah keterkaitan antara misi, sasaran pokok dan arah pembangunan Kota Palopo 2025-2045 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

No.	Misi RPJPD Kota Palopo	Sasaran Pokok Pembangunan Kota Palopo	Arah Pembangunan Kota Palopo
1	Mewujudkan transformasi sosial	1. Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak	Kesehatan Untuk Semua
			Pendidikan Berkualitas yang Merata
			Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Terwujudnya Palopo sebagai kota niaga dengan produktivitas perekonomian yang tinggi berbasis iptekin	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi
			Penerapan Ekonomi Hijau
			Transformasi Digital
3	Mewujudkan transformasi tata kelola	3. Terwujudnya Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola berintegritas dan adaptif dengan masyarakat sipil yang berdaya	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Memantapkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	4. Terwujudnya Palopo sebagai kota yang Aman, Tertib, Demokratis, dan Kondusif	Ketaatan hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan
			Stabilitas Ekonomi Makro Daerah



No.	Misi RPJPD Kota Palopo	Sasaran Pokok Pembangunan Kota Palopo	Arah Pembangunan Kota Palopo
5	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat yang inklusif, beradab dan berbudaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
6	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional
			Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7	Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	Lingkungan Hidup Berkualitas
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	8. Terwujudnya Palopo sebagai kota simpul dalam kerjasama daerah	Daya Saing Daerah tinggi

Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan indikator kinerjanya secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN HIDUP LAYAK (Sasaran 1)

Sasaran ini menggambarkan visi jangka panjang untuk Kota Palopo sebagai pusat pendidikan yang unggul dan inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dalam konteks ini, "masyarakat yang sehat" mengacu pada kondisi fisik dan mental yang prima, didukung oleh sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. "Cerdas" menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal yang mampu menghasilkan individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas tinggi. "Hidup layak" merujuk pada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perumahan yang memadai, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap infrastruktur serta layanan publik yang mendukung kualitas hidup yang baik.

Ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Palopo untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang. Pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, di mana kesejahteraan fisik dan mental warga kota menjadi perhatian utama. Dengan terwujudnya sasaran ini, diharapkan Kota Palopo akan menjadi kota yang kompetitif secara regional dan nasional, dengan masyarakat yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di berbagai sektor kehidupan.

kesehatan untuk semua

Arah pembangunan "kesehatan untuk semua" bertujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Palopo memiliki akses yang merata dan mendapatkan jaminan layanan kesehatan berkualitas. Hal ini

mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, penyebaran tenaga medis yang kompeten, serta program-program kesehatan promotif, preventif dan kuratif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Penanganan kesehatan Kota Palopo tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan.

Kesehatan yang baik menjadi fondasi bagi tercapainya masyarakat yang cerdas dan produktif. Pendidikan yang efektif membutuhkan individu yang sehat secara fisik dan mental, sehingga mereka mampu berpartisipasi penuh dalam proses belajar dan berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi. Dengan menjamin "kesehatan untuk semua," Kota Palopo memastikan bahwa seluruh warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimal mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi kota sebagai pusat pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pembangunan kesehatan untuk semua di Kota Palopo dua puluh tahun ke depan adalah 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat di Kota Palopo, 2) Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana yang berkualitas termasuk peningkatan layanan spesialisasi kesehatan guna mendukung pola hidup sehat yang dilengkapi dengan pemenuhan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis, 3) Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga 4) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen, 5) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisector, 6) Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor, 7) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), 8) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat local 9) Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah Kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim, 10) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat, dan 11) Pengembangan sistem telemedicine di Kota Palopo yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Arah pembangunan pendidikan berkualitas yang merata di Kota Palopo bertujuan memastikan bahwa setiap masyarakat Palopo memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Ini mencakup peningkatan kualitas sekolah, penyediaan guru yang kompeten, pengembangan kurikulum yang relevan, serta akses ke sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang merata juga berarti mengurangi kesenjangan antar sekolah dalam dan luar kota, dengan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata untuk dua puluh tahun ke depan adalah : 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) secara terintegrasi 2) Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi, 3) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, 4) Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, 5) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan vokasi dan pendidikan kesetaraan, 6) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, 7) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai



kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT), dan 8) Mendorong peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif di Kota Palopo mengacu pada strategi untuk menyediakan pengaman sosial yang responsif dan fleksibel, yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini mencakup program-program yang melindungi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, baik itu akibat perubahan iklim, bencana alam, atau krisis ekonomi. Perlindungan sosial yang adaptif juga berarti memperkuat sistem yang mampu memberikan bantuan tepat waktu, bantuan langsung tunai, atau program jaminan sosial lainnya, yang dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan dalam situasi darurat.

Arah kebijakan transformasi Kota Palopo untuk mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif di Kota Palopo dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran beragam program penanganan kemiskinan baik regional maupun nasional 2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD, serta penguatan komitmen pemangku kepentingan di Kota Palopo yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sosial, 3) Perlindungan sosial yang adaptif dengan fasilitasi penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, 4) Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang layak dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya, 5) Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, 6) Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah produktif dan potensial, 7) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan bagi lansia miskin dan tidak mampu, 8) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai, 9) Peningkatan koordinasim kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan, dan 10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada **sasaran pertama** pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5.3 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Pertama Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak	1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.20	75.36	76.81	78.26	80
			2	Kesehatan Ibu dan Anak					
				a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	94	95	97	98	100
				b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu Kelahiran Hidup)	120	97	70	40	7
				c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	1.2	1	0.75	0.5	0.2
			3	Penanganan Tuberkulosis					
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	78	81	86	89	95
		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)		42	53	66	79	95	
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96	96	97	98	100	
		2.Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada					



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				asesmen tingkat nasional di Kota Palopo untuk					
				i)Literasi Membaca	58	61	64	67	69,55-71,55
				ii) Numerasi	39	43	49	56	61,50-63,50
				b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	11,43	12.5	13.71	13.86	14
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,35	15.76	16.17	16.57	16.87
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13	17	21	30	45
			7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	68	69.75	71.50	73.25	75
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5.46-7.38	4.19-7.38	2.92-5	1.65-3	0.38-0.19
				b. Indeks Gini	0,363	0,353	0,343	0, 333	0.323
			9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	8	12	15	23	35
			10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	42	48	56	62	75

5.2.2 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA NIAGA DENGAN PRODUKTIVITAS PERKONOMIAN YANG TINGGI BERBASIS IPTEKIN (Sasaran 2)

Sasaran ini bertujuan menjadikan Kota Palopo sebagai pusat perdagangan dan ekonomi yang dinamis, dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) sebagai pendorong utama pertumbuhan. Dalam hal ini, produktivitas ekonomi yang tinggi akan dicapai melalui penguatan sektor-sektor strategis, produktif dan potensial, perbaikan efisiensi, dan penerapan teknologi dalam berbagai bidang. Kota Palopo akan berupaya membangun daya tarik bagi investasi dan perdagangan, dengan ekosistem bisnis yang kondusif dan infrastruktur yang mendukung, termasuk optimalisasi digitalisasi dan akses pasar yang luas.

Dengan fokus pada iptekin, Palopo tidak hanya akan meningkatkan produktivitas ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, menjadikannya lebih kompetitif di pasar regional dan nasional. Pada akhirnya, sasaran ini akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan ketahanan ekonomi kota, menjadikan Palopo sebagai pusat niaga yang maju dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan ini mengakomodir tiga arah pembangunan yakni Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital.

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Peningkatan produktivitas ekonomi Kota Palopo dilakukan secara optimal berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Arah kebijakan transformasi untuk mewujudkan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kota Palopo dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada : 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, 2) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan, 3) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism), 3) Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan, 4) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, 5) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri regional dan nasional, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, 6) Fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan produktif dan potensial serta kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja, 7) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 8) Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri. 9) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, dan 10) Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Penerapan Ekonomi Hijau

Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan output dan pendapatan, tetapi juga pada seberapa baik pertumbuhan tersebut melindungi dan memulihkan ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau mengedepankan

penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mempromosikan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meminimalkan limbah dan polusi.

Konsep ini mengajak pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan air dan limbah yang lebih baik. Ekonomi hijau juga mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sambil tetap menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

Arah kebijakan transformasi Kota Palopo dalam rangka penerapan ekonomi hijau adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan komoditas unggulan pangan berbasis keunggulan wilayah Kota Palopo, 2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, 3) Pengelolaan lahan pesisir secara berkelanjutan, 4) Peningkatan rehabilitasi lahan, dan pesisir, 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif, 6) Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan, 7) Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman local, 8) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial, 9) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi

Transformasi Digital

Kebijakan transformasi digital di Kota Palopo akan dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh lebih dulu sehingga dapat mendukung perekonomian Kota Palopo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna yang terus berkembang. Transformasi digital Kota Palopo diharapkan juga dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif, yang mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah dengan cepat.

Kebijakan untuk membangun transformasi digital di Kota Palopo diarahkan pada: 1) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah atau spot yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara dalam dan luar kota, 2) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah Palopo, 3) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis, dan 4) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran kedua pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 4 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kedua Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo						
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah					
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Terwujudnya Palopo sebagai kota niaga dengan produktivitas perkonomian yang tinggi berbasis iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,63	4,18	5,1	6,18	6,64	
			12	Pengembangan Pariwisata						
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.20	1.91	2.62	3.33	5	
					b. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	170.000	185.000	200.000	215.000	250.000
			13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	105	129	153	176	200	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
				a	Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota (Unit Usaha)	14900	17757	20250	22925	25000
				b	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	25	29	33	37	45
				d	Produktivitas Pertanian (Rata-rata skor dari tiga komoditas yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan budidaya) Ton	139498,78	154624,08	169749,39	184874,69	200000
					Produktifitas Padi Gabah Kering Giling (ton/Ha)	55	60	65	75	85
				c	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3.9	4.20	4.50	4.80	5
				e	Jumlah produksi perikanan (Ton)	194000	225000	260000	325000	450000
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.08	6	4,92	3,83	2,6 - 3,6	
16	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53	55	57	60	65				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65	67	70	72	75
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK					
				a. Indeks Inovasi Daerah	56,80	62	67	71	75
				b. Indeks Kapabilitas Inovasi	2,68	3,14	3,72	4,3	5
		5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau dan biru					
				a) Indeks Ekonomi Hijau	39,3	44,66	50,02	55,38	60,74
		6. Digitalisasi yang Unggul	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	85	88	91	95	100

5.2.3 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA AKSELERATIF DALAM PENCAPAIAN TATA KELOLA BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF DENGAN MASYARAKAT SIPIL YANG BERDAYA (Sasaran 3)

Sasaran ini menggambarkan komitmen untuk mempercepat pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kota Palopo berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih serta mampu merespons cepat dan efektif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul, baik dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini, tata kelola yang adaptif mencakup kemampuan pemerintah untuk berinovasi, mengadopsi teknologi digital, dan menerapkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sasaran ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sipil sebagai mitra aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat sipil yang berdaya memiliki akses terhadap informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik. Dengan demikian, sasaran ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat institusi pemerintahan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan demokratis.

Perwujudan sasaran ini difokuskan pada **satu arah pembangunan** yaitu Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut :

Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata kelola yang berintegritas, adaptif, mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, transparansi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta penggunaan inovasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, dan merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pemerintahan.

Arah kebijakan transformasi tata kelola yang berintegritas, adaptif terdiri dari : 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah, 2) Pembangunan dan pengembangan Big Data daerah dan harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi, 3) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, 4) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, 5) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 6) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi, 7) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah, 8) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 9) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, 10) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, 11) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, 12) Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government, 13) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen



perencanaan pusat dan daerah, 14) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, 15) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, dan 16) Memastikan semua aspek pemerintahan dari pengelolaan sumber daya hingga penyediaan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara berkesinambungan antar periode pembangunan.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran ketiga pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 5 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok ketiga Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo						
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah					
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	8	7	6	5	5	
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38	40	42	43	45	
			22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-11.28	-5.75	-0,12	4	4-5	
				Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar)	-367.40	-250	-133	-15	55	
		23	8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan					
					a. Proporsi Kontribusi PDRB (ADHB) Kota Palopo terhadap Provinsi Sulsel	1,6	1,72	1,81	1,83	1,86
					b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	85,71	92,54	100	100	100
	c. Indeks Layanan Infrastruktur	2.25	2,45	2,65	2, 85	3				

5.2.4 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA YANG AMAN, TERTIB, DEMOKRATIS, DAN KONDUSIF (Sasaran 4)

Sasaran "Terwujudnya Palopo sebagai kota yang aman dan tertib, demokratis, dan kondusif bertujuan menciptakan lingkungan urban yang memprioritaskan keamanan, ketertiban, dan integritas sosial. Dalam hal ini, memastikan bahwa semua masyarakat Kota Palopo dapat menjalani aktivitas dengan rasa aman. Selain itu, penegakan ketertiban umum, seperti pengelolaan lalu lintas dan pengendalian lingkungan, juga akan menjadi prioritas untuk menciptakan kota yang teratur dan bebas dari gangguan sosial.

Di sisi lain, sasaran ini juga menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis, di mana seluruh warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Demokrasi yang inklusif dan transparan akan memperkuat stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan kombinasi keamanan yang terjamin, tata kelola yang adil, dan stabilitas sosial, Kota Palopo diharapkan dapat menjadi tempat yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Perwujudan sasaran Terwujudnya Palopo sebagai kota yang aman dan tertib, demokratis, dan kondusif pada **dua arah pembangunan** yaitu Ketaatan hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut,

Ketaatan hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan

Ketaatan hukum, ketertiban, dan keamanan tangguh serta demokrasi berkeadilan di Kota Palopo mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang berfungsi dengan baik melalui penerapan hukum yang konsisten dan adil, serta menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Ketaatan hukum memastikan bahwa aturan dan peraturan ditegakkan secara merata tanpa diskriminasi, sementara ketertiban dan keamanan tangguh mengacu pada kesiapan dan kemampuan kota untuk mengatasi dan memitigasi risiko serta ancaman terhadap ketentraman masyarakat.

Demokrasi berkeadilan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembuatan keputusan, serta memastikan bahwa hak-hak dasar dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dihormati dan dipenuhi. Dengan kombinasi ini, Kota Palopo bertujuan menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan stabil, di mana hukum ditegakkan, keamanan terjaga, dan setiap individu memiliki suara dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

Arah kebijakan transformasi Ketaatan hukum Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan adalah : 1) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif , 2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial, dan 3) Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah, 4) Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi, 5) Peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, dan 6) Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas ekonomi makro daerah Kota Palopo merujuk pada kondisi di mana ekonomi beroperasi dengan keseimbangan yang baik, minim fluktuasi besar dalam pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Ini mencakup pengelolaan fiskal yang baik, kebijakan moneter yang efektif, dan penerapan strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan yang stabil dan inklusif. Dengan mencapai stabilitas ekonomi makro, daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi dan masyarakat. Stabilitas ini juga membantu memitigasi dampak dari guncangan eksternal, memperkuat



ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup warga dengan menyediakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Arah kebijakan transformasi untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah terdiri dari : 1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD), 2) Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, 3) Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah, 4) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan 5) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran keempat pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 6 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Keempat Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Terwujudnya Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola berintegritas dan adaptif dengan masyarakat sipil yang berdaya	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	68	75	82	89	96,45
			25	Indeks SPBE	3.89	4,20	4,50	4,80	5
			26	a. Indeks Pelayanan Publik	4	4,25	4,50	4,75	5
			27	a. Indeks Survey Penilaian Integritas	65	70	75	80	85
				b. Indeks Maturitas SPIP	3	3.40	3.80	4.20	5
	c. Nilai MCP KPK	59	64	69	74	80			



5.2.5 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF, BERADAB DAN BERBUDAYA (Sasaran 5)

Sasaran "Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat yang inklusif, beradab, dan berbudaya" bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang terbuka, menghargai keragaman, dan memperkuat identitas budaya lokal. Masyarakat inklusif berarti bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan layanan serta terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan komunitas. Aspek beradab mencakup pembentukan norma-norma sosial yang menghormati hak manusia, etika, dan sopan santun, sehingga menciptakan suasana harmonis dan saling menghargai di antara warga.

Sementara itu, nilai-nilai berbudaya berfokus pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, termasuk tradisi, seni, dan bahasa, yang memperkaya kehidupan masyarakat dan memperkuat identitas kota. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Kota Palopo diharapkan dapat menjadi contoh kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga kaya akan nilai-nilai sosial dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada **tiga arah pembangunan** yaitu Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif; serta Berketahanan Energi, Air, dan Pangan, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut :

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju menunjukkan integrasi harmonis antara agama yang dimaknai dalam konteks manfaat bersama (maslahat) dan pembangunan budaya yang progresif dan inklusif. Tidak hanya tentang menjalankan praktik keagamaan dengan benar tetapi juga mengembangkan dan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan transformasi untuk beragama maslahat dan berkebudayaan maju **diarahkan** pada : 1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, 2) Pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya, 3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi, 4) Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat, 5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, 6) Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 7) Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya, 8) Penguatan kerukunan antar umat beragama, 9) Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika, 10) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dan 11) Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menunjukkan sebuah tatanan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan meraih potensinya sepenuhnya, serta dapat mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan yang lebih besar.

Kebijakan transformasi untuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif **diarahkan** pada : 1) Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 2) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia yang menjamin kelangsungan



hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, 3) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, 4) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, 5) Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, 6) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector, 7) Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformative, 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, 9) Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, 10) Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi, dan 11) Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.

Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Mengacu pada upaya untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya energi, air, dan pangan yang mencukupi dan stabil bagi seluruh masyarakat. Kota Palopo berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan energi dengan efisien dan ramah lingkungan, mengelola sumber daya air secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari serta kegiatan ekonomi, dan memastikan ketahanan pangan dengan mendukung produksi lokal, distribusi yang efektif, dan mengurangi kerentanan terhadap krisis pangan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kota Palopo berupaya menciptakan lingkungan yang stabil dan resiliens, yang mendukung kualitas hidup warganya dan meningkatkan daya tahan kota terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Kebijakan transformasi untuk berketahanan energi, air dan pangan **diarahkan** pada : 1) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu pangan-energi dan air atau Food Energy Water (FEW) Nexus, 2) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, 3) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, 4) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; 5) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain, 6) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 7) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 8) Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal, 9) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, 10) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, atau terkena dampak bencana, 11) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting, 12) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air, 13) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat, 14) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal, dan 15) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran kelima pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 7 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kelima Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo						
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah					
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Terwujudnya Palopo sebagai kota yang Aman, Tertib, Demokratis, dan Kondusif	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	
			29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	72	76	80	84	90	
			30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	28	30	32	34	36	
				b) Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD	5	6	7	8	10	
				c) Persentase perempuan pengurus partai politik	30	32	35	37	40	
			11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	3.05	5	7	11	15
		32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,5	2,25	2	1,75	1,5		
		33	Persentase peningkatan investasi daerah	5	6,75	8,50	10,25	12		
		34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72	75	78	81	85		

5.2.6 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN PERKEMBANGAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN (Sasaran 6)

Sasaran "Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan" bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan kota tidak hanya terpusat di lokasi atau kelurahan tertentu, tetapi menyebar secara adil di seluruh wilayah Kota Palopo. Ini berarti menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi secara setara di wilayah, baik pusat maupun pinggiran kota. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh area Palopo, menciptakan kota yang lebih seimbang dan harmonis di mana semua warga merasakan manfaat dari kemajuan dan pembangunan secara adil.

Perwujudan sasaran ini difokuskan pada **dua arah pembangunan** yaitu **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**, Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Arah pembangunan beserta arah kebijakan transformasinya dijelaskan sebagai berikut

Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional

Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional merujuk pada proses penyalarsan dan penghubungan kegiatan ekonomi di Kota Palopo dengan berbagai wilayah dengan kebijakan dan pasar di tingkat regional Sulsel dan nasional. Ini melibatkan koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah, Sulsel dan pemerintah pusat, pengembangan infrastruktur yang menghubungkan wilayah, serta mempermudah akses daerah ke pasar yang lebih luas.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong investasi dan kolaborasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Dengan integrasi ini, diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, dan memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja secara lebih efektif di seluruh negara.

Arah kebijakan transformasi untuk menguatkan posisi Kota Palopo dalam perekonomian regional dan nasional adalah : 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi, 2) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya, 3) Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok regional dan nasional 4) Peningkatan pangsa ekspor komoditas, barang dan jasa daerah bernilai tambah tinggi di pasar regional dan nasional melalui ekspansi ekspor ke daerah-daerah yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi, 5) Pengembangan konektivitas *feder* angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda dari dan ke Kota Palopo dengan daerah lain di Nusantara dan 6) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkotaan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Termasuk memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan regional. Kota Palopo akan berupaya menempatkan posisinya sebagai pusat perkembangan inovasi, investasi, dan aktivitas ekonomi yang menarik, dengan dukungan infrastruktur yang estetik, aksesibilitas yang baik, serta konsentrasi sumber daya manusia dan teknologi. Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Palopo akan berupaya menawarkan peluang bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan layanan publik yang beragam, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warganya tetapi juga berdampak positif pada wilayah sekitarnya. Terutama dalam menarik investasi dan merangsang pengembangan ekonomi Kota Palopo, regional dan nasional dan berupaya memposisikan diri sebagai katalisator utama untuk pertumbuhan ekonomi di Tanah Luwu dan sekitarnya.



Arah kebijakan transformasi pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi meliputi :

- 1) Peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital,
- 2) Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas untuk mendukung pariwisata
- 3) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik
- 4) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan
- 5) Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis,
- 6) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta trans Sulawesi, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda,
- 7) Mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian di jalan trans Sulawesi,
- 8) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, dimana Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 9) Penerapan transportasi ramah lingkungan
- 10) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau
- 11) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman,
- 12) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh,
- 13) Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan sekitar wilayah pertumbuhan,
- 14) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi public,
- 15) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran keenam pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 8 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Keenam Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terwujudnya Palopo sebagai kota simpul dalam kerjasama daerah	12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	36	Indeks daya saing daerah	2,90	2,90	3,10	3,19	3,37
			35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	7	9	11	12	15

5.2.7 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA DENGAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG TINGGI SERTA TANGGUH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM (Sasaran 7)

Sasaran "Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim" bertujuan untuk menciptakan Kota Palopo yang bersih, sehat, estetis dan berkelanjutan sambil mempersiapkan kota untuk menghadapi potensi bencana dan dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, upaya akan difokuskan pada pengelolaan lingkungan yang baik, seperti pengurangan polusi, pengelolaan sampah yang efektif, dan pelestarian ruang terbuka hijau. Kualitas lingkungan yang tinggi juga mencakup penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem lokal.

Di sisi lain, ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim berarti mengembangkan infrastruktur dan sistem yang dapat mengurangi risiko dan dampak dari peristiwa ekstrem, seperti banjir, dan cuaca ekstrem. Ini meliputi perencanaan tata ruang yang memperhitungkan potensi risiko, penguatan bangunan dan infrastruktur, serta penyusunan rencana tanggap darurat yang komprehensif.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok ini, difokuskan pada **dua arah pembangunan** yaitu Lingkungan Hidup Berkualitas, dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, beserta arah kebijakan transformasinya sebagai berikut :

Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas di Kota Palopo diarahkan untuk mencakup kondisi di mana faktor-faktor lingkungan seperti udara, air, tanah, dan ruang terbuka hijau dikelola dengan baik untuk mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Termasuk didalamnya upaya pengurangan polusi, pengelolaan limbah yang efisien, serta perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistemnya.

Lingkungan hidup berkualitas Kota Palopo juga akan mencakup penyediaan ruang publik yang bersih dan aman, serta akses ke fasilitas dan layanan yang mendukung kehidupan yang sehat dan nyaman.

Kebijakan transformasi dalam rangka menciptakan lingkungan hidup berkualitas di Kota Palopo **diarahkan** pada : 1) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati 2) Koordinasi penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi 3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana, 4) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi, 5) Penguatan pengendalian dan penegakan regulasi implementasi tata ruang daerah, 6) Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada berkelanjutan, 7) Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 8) Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan, 9) Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, 10) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 11) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, 12) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, 13) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, 14) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, dan 15) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah.

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk tidak hanya bertahan hidup saat terjadi bencana atau perubahan iklim, tetapi juga untuk pulih dengan cepat, mengurangi kerentanan terhadap dampak masa depan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami krisis tersebut. Secara keseluruhan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bukan hanya tentang respons terhadap krisis saat terjadi, tetapi juga tentang upaya preventif, adaptasi



jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan manusia dan lingkungan di masa depan.

Kebijakan transformasi untuk mencapai resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kota Palopo diarahkan pada : 1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, 2) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, 3) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai, 4) Pengembangan Flood Forecasting Warning System, 5) Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim, 6) Peningkatan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 7) Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim, 8) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim, 9) Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, 10) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim, 11) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, 12) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon, 13) Koordinasi bagi upaya rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal, 14) Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada sasaran ketujuh pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 9 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Ketujuh Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat yang inklusif, beradab dan berbudaya	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	50	55	60	70	80
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76	78	81	83	85,18-85,39
		14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	39	a. indeks pembangunan kualitas keluarga	73	74	76	78	80
			40	b. indeks perlindungan anak	65	68	71	73	75
				indeks ketimpangan gender	0.273	0,240	0,207	0,174	0.150



5.2.8 TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA SIMPUL DALAM KERJASAMA DAERAH (Sasaran 8).

Sasaran "Terwujudnya Palopo sebagai Kota Simpul Dalam Kerjasama Daerah" bertujuan menjadikan Palopo sebagai pusat yang strategis dalam jaringan kerjasama antar daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai kota simpul, Palopo diharapkan dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang menghubungkan Palopo dengan wilayah sekitarnya, penyelenggaraan forum atau platform untuk berbagi informasi dan best practices, serta kerjasama dalam kebijakan pembangunan yang berdampak luas. Dengan menjadi simpul utama dalam kerjasama daerah, Palopo akan berperan sebagai penghubung dan penggerak dalam mempromosikan sinergi regional, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat integrasi antara berbagai pihak, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Daya Saing Daerah yang Tinggi

Daya saing Kota Palopo yang tinggi dan kompetitif merujuk pada kemampuan kota ini untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional melalui keunggulan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia dan aspek lainnya. Untuk mencapai daya saing ini, Palopo perlu fokus pada pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti transportasi, logistik, dan fasilitas publik dan layanan yang modern. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal akan memperkuat kapabilitas SDM, yang mampu menarik investasi dan menciptakan inovasi. Kota yang kompetitif juga harus memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim bisnis yang kondusif, memfasilitasi kemudahan berbisnis, dan mendorong kolaborasi atau menjadi simpul kerjasama antara sektor publik dan swasta. Selain itu, Palopo perlu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan industri dan UMKM yang ada ke usaha yang berbasis ekosistem dan teknologi.

Kebijakan transformasi dalam rangka pengembangan daya saing daerah **diarahkan** pada: 1) Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah, 2) Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala lokal, regional, nasional dan global, dan 3) Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan beragam komunitas yang ada dalam berkolaborasi dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.



Berikut adalah tabel indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo pada **sasaran ke delapan** pembangunan jangka panjang 2025-2045 :

Tabel 5. 10 Arah Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Pada Sasaran Pokok Kedelapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	15.Lingkungan Hidup Berkualitas	41	- Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati					
				a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	28	32	36	40	45
				- Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
				a) Indeks Pertanaman Padi	2	2,20	2,40	2, 60	>3
				b) Proporsi sawah beririgasi (%)	88	89	91	93	95
				c)Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	19.000	22000	25000	33000	45.000
				d) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Thn)	70	72,50	75	77,50	80,02
			42	kualitas lingkungan hidup					
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup	74,72	75,56	76,62	77,68	78,95
				b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4.32	12,50	22,90	42,20	56.80
				c. pengelolaan sampah	83,82	87,06	91,1	95,15	100
				i) timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah (%)	9	20	50	70	90
				ii) proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	81,43	85	88	92	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan energi, air, dan pangan					
				a. ketahanan energi					
				i) konsumsi listrik per kapita (kWh)	1285	2200	3300	4500	5.335
				b. ketahanan pangan					
				i) pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	4.5	4	3,50	3	2,34
				ii) indeks ketahanan pangan	80	84	88	92	97,76
				iii) skor pola pangan harapan	92.08	93,50	94,50	94,75	95,03
				c. Ketahanan air					
				i) kapasitas air baku (m3/detik)	0,57	0,68	0,7	0,987	1
				ii) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	97	98	99	99.50	100
		17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko bencana	190	175	150	135	122,30-98,59
			45	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Tahunan)	18,76	31,24	43,96	65,04	80,66
				Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	0.23	0,92	2,64	7,01	14.56



Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan berikut arah kebijakan transformasi dan indikator utamanya serta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2045, secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 11 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama dan Target Kinerja

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak	1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.20	75.36	76.81	78.26	80
			2	Kesehatan Ibu dan Anak					
				a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	94	95	97	98	100
				b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu Kelahiran Hidup)	120	97	70	40	7
				c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	1.2	1	0.75	0.5	0.2
			3	Penanganan Tuberkulosis					
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	78	81	86	89	95
				b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	42	53	66	79	95
			4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96	96	97	98	100
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum					



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				pada asesmen tingkat nasional di Kota Palopo untuk					
				i)Literasi Membaca	58	61	64	67	69,55-71,55
				ii) Numerasi	39	43	49	56	61,50-63,50
				b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	11,43	12.5	13.71	13.86	14
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,35	15.76	16.17	16.57	16.87
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13	17	21	30	45
			7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	68	69.75	71.50	73.25	75
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5.46-7.38	4.19-7.38	2.92-5	1.65-3	0.38-0.19
				b. Indeks Gini	0,363	0,353	0,343	0, 333	0.323
			9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	8	12	15	23	35
			10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	42	48	56	62	75



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo						
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah					
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
2	Terwujudnya Palopo sebagai kota niaga dengan produktivitas perkonomian yang tinggi berbasis iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,63	4,18	5,1	6,18	6,64	
			12	Pengembangan Pariwisata						
				a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.20	1.91	2.62	3.33	5
				b.	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	170.000	185.000	200.000	215.000	250.000
			13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	105	129	153	176	200	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
			a	Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota (Unit Usaha)	14900	17757	20250	22925	25000	
			b	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	25	29	33	37	45	
			d	Produktivitas Pertanian (Rata-rata skor dari tiga komoditas yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan budidaya) Ton	139498,78	154624,08	169749,39	184874,69	200000	
				Produktifitas Padi Gabah Kering Giling (ton/Ha)	55	60	65	75	85	
			c	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3.9	4.20	4.50	4.80	5	
			e	Jumlah produksi perikanan (Ton)	194000	225000	260000	325000	450000	
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.08	6	4,92	3,83	2,6 - 3,6	



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo							
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah						
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045		
			16	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53	55	57	60	65		
				b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65	67	70	72	75		
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK							
				a. Indeks Inovasi Daerah	56.80	62	67	71	75		
				b. Indeks Kapabilitas Inovasi	2,68	3,14	3,72	4,3	5		
				5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau dan biru					
						a) Indeks Ekonomi Hijau	39,3	44,66	50,02	55,38	60,74
	6. Digitalisasi yang Unggul	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	85	88	91	95	100			
3	Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	8	7	6	5	5		
			21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38	40	42	43	45		
			22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-11.28	-5.75	-0,12	4	4-5		
				Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar)	-367.40	-250	-133	-15	55		
			23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan							
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		a. Proporsi Kontribusi PDRB (ADHB) Kota Palopo terhadap Provinsi Sulsel	1,6	1,72	1,81	1,83	1,86			



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	92,54	100	100	100
				c. Indeks Layanan Infrastruktur	2,25	2,45	2,65	2,85	3
4	Terwujudnya Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola berintegritas dan adaptif dengan masyarakat sipil yang berdaya	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	68	75	82	89	96,45
			25	Indeks SPBE	3,89	4,20	4,50	4,80	5
			26	a. Indeks Pelayanan Publik	4	4,25	4,50	4,75	5
			27	a. Indeks Survey Penilaian Integritas	65	70	75	80	85
				b. Indeks Maturitas SPIP	3	3,40	3,80	4,20	5
				c. Nilai MCP KPK	59	64	69	74	80
5	Terwujudnya Palopo sebagai kota yang Aman, Tertib, Demokratis, dan Kondusif	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100
			29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	72	76	80	84	90
			30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	28	30	32	34	36
				b) Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD	5	6	7	8	10
				c) Persentase perempuan pengurus partai politik	30	32	35	37	40
		11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	3,05	5	7	11	15
			32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,5	2,25	2	1,75	1,5
			33	Persentase peningkatan investasi daerah	5	6,75	8,50	10,25	12



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
			34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72	75	78	81	85
6	Terwujudnya Palopo sebagai kota simpul dalam kerjasama daerah	12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	36	Indeks daya saing daerah	2,90	2,90	3,10	3,19	3,37
			35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	7	9	11	12	15
7	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat yang inklusif, beradab dan berbudaya	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	50	55	60	70	80
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76	78	81	83	85,18-85,39
		14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	39	a. indeks pembangunan kualitas keluarga	73	74	76	78	80
				b. indeks perlindungan anak	65	68	71	73	75
40	indeks ketimpangan gender	0.273	0,240	0,207	0,174	0.150			
8	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	15.Lingkungan Hidup Berkualitas	41	- Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati					
				a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	28	32	36	40	45
				- Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
				a) Indeks Pertanaman Padi	2	2,20	2,40	2, 60	>3
				b) Proporsi sawah beririgasi (%)	88	89	91	93	95



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				c) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	19.000	22000	25000	33000	45.000
				d) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Thn)	70	72,50	75	77,50	80,02
			42	kualitas lingkungan hidup					
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup	74,72	75,56	76,62	77,68	78,95
				b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4.32	12,50	22,90	42,20	56.80
				c. pengelolaan sampah	83,82	87,06	91,1	95,15	100
				i) timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	9	20	50	70	90
				ii) proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	81,43	85	88	92	100
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan energi, air, dan pangan					
				a. ketahanan energi					
				i) konsumsi listrik per kapita (kWh)	1285	2200	3300	4500	5.335
				b. ketahanan pangan					
				i) pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	4.5	4	3,50	3	2,34
				ii) indeks ketahanan pangan	80	84	88	92	97,76
				iii) skor pola pangan harapan	92.08	93,50	94,50	94,75	95,03
				c. Ketahanan air					
				i) kapasitas air baku (m ³ /detik)	0,57	0,68	0,7	0,987	1



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	No.	RPJPD Kota Palopo					
				Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah				
					Baseline 2025	Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
				ii) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	97	98	99	99,50	100
	17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		44	Indeks Risiko bencana	190	175	150	135	122,30-98,59
45			Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Tahunan)	18,76	31,24	43,96	65,04	80,66	
			Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	0,23	0,92	2,64	7,01	14,56	

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi, dan Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kota Palopo 2025-2045 memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan visi jangka panjang kota. Arah kebijakan transformasi mendorong perubahan struktural dalam berbagai aspek yang menjadi sasaran pokok dan arah pembangunan. Berikut adalah tabel sasaran pokok, arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi serta indikator kinerja utama pembangunan Kota Palopo 2025-2045.



Tabel 5. 12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
1	2	3		4	5	6	10
1	Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan hidup layak	1. Kesehatan Untuk Semua	<p>1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat di Kota Palopo</p> <p>2) Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana yang berkualitas termasuk peningkatan layanan spesialisasi kesehatan guna mendukung pola hidup sehat yang dilengkapi dengan pemenuhan ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis,</p> <p>3) Pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga</p> <p>4) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen</p> <p>5) Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisector,</p> <p>6) Percepatan pengurangan faktor resiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor,</p> <p>7) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services),</p>	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.20	80
				2	Kesehatan Ibu dan Anak		
					a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	94	100
					b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu Kelahiran Hidup)	120	7
					c. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	1.2	0.2
				3	Penanganan Tuberkulosis		
					a. Cakupan penemuan dan	78	95



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			8) Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat local		pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)		
			9) Penguatan dan perwujudan upaya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah Kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim,	4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	96	100
			10) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat,				
			11) Pengembangan sistem telemedicine di Kota Palopo yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).				
	2.Pendidikan Berkualitas yang Merata		1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar) secara terintegrasi 2) Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi, 3) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, 4) Peningkatan	5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kota Palopo untuk		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			<p>kualitas serta kuantitas sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, 5) Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui penguatan vokasi dan pendidikan kesetaraan, 6) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk ekosistem pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, 7) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan Internet of Things (IoT), dan 8) Mendorong peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.</p>		i)Literasi Membaca	58	69,55-71,55
					ii) Numerasi	39	61,50-63,50
					b) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	11,43	14
					c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,35	16.87
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13	45
				7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	68	75
		3.Perlindungan Sosial yang Adaptif		1) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data kemiskinan, untuk ketepatan sasaran beragam program penanganan kemiskinan baik regional maupun nasional 2) Perencanaan dan penganggaran melalui APBD, serta penguatan komitmen pemangku kepentingan di Kota Palopo yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan Standar	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5.46-7.38



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			Pelayanan Minimal (SPM) sosial, 3) Perlindungan sosial yang adaptif dengan fasilitasi penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, 4) Penciptaan lingkungan yang inklusif meliputi perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur yang layak dan responsive bagi pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya, 5) Perluasan aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas, 6) Perluasan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama daerah produktif dan potensial, 7) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan bagi lansia miskin dan tidak mampu, 8) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai, 9) Peningkatan koordinasim kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan, dan 10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan, utamanya perumahan bersubsidi.		b. Indeks Gini	0,363	0.323
				9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	8	35
				10	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	42	75



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
2	Terwujudnya Palopo sebagai kota niaga dengan produktivitas perkonomian yang tinggi berbasis iptekin	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, 2) Penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan, 3) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism), 3) Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan, 4) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi, 5) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri regional dan nasional, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, 6) Fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan produktif dan potensial serta kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja, 7) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 8) Pelaksanaan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri. 9) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,63	6,64
				12	Pengembangan Pariwisata		
					a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.20	5
					b. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (orang)	170.000	250.000
				13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	105	200
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a	Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota (Unit Usaha)	14900	25000
b	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	25	45				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, dan 10) Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	d	Produktivitas Pertanian (Rata-rata skor dari tiga komoditas yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan budidaya) Ton	139498,78	200000
					Produktifitas Padi Gabah Kering Giling (ton/Ha)	55	85
				c	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3.9	5
				e	Jumlah produksi perikanan (Ton)	194000	450000
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.08	2,6 - 3,6
				16	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53	65
					b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65	75
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
					a. Indeks Inovasi Daerah	56.80	75



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
					b. Indeks Kapabilitas Inovasi	2,68	5
		5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	1) Pengembangan komoditas unggulan pangan berbasis keunggulan wilayah Kota Palopo, 2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, 3) Pengelolaan lahandan pesisir secara berkelanjutan, 4) Peningkatan rehabilitasi lahan, dan pesisir, 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif, 6) Peningkatan penerapan praktik pertanian yang baik seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan. pengembangan agroforestri untuk diversifikasi pendapatan petani, pelatihan teknik pemanenan dan budidaya yang berkelanjutan, 7) Pemanfaatan teknologi pemuliaan tanaman local, 8) Peningkatan partisipasi yang inklusif untuk perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial, 9) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau dan biru		
					a) Indeks Ekonomi Hijau	39,3	60,74
		6. Digitalisasi yang Unggul	1) Penyediaan jaringan seluler khususnya daerah atau spot yang masih berada dalam titik blank spot sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital antara dalam dan luar kota, 2) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	85	100



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			wilayah Palopo, 3) Penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah, , mencakup akses internet yang cepat dan stabil, serta dukungan teknologi terbaru seperti 5G di kawasan-kawasan strategis, dan 4) Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan ketrampilan penggunaan perangkat digital.				
3	Terwujudnya Palopo sebagai Kota dengan perkembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi, 2) Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya, 3) Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok regional dan nasional 4) Peningkatan pangsa ekspor komoditas, barang dan jasa daerah bernilai tambah tinggi di pasar regional dan nasional melalui ekspansi ekspor ke daerah daerah yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi, 5) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda dari dan ke Kota Palopo dengan daerah lain di Nusantara dan 6) Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan	20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	8	5
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38	45
				22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-11.28	4-5
					Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar)	-367.40	55



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.				
		8.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1) Peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital, 2) Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas untuk mendukung pariwisata 3) Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik 4) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan 5) Pengembangan pusat-pusat agribisnis dan agroindustri berbasis kawasan secara sinergis, 6) Mendorong percepatan perwujudan jalur kereta trans sulawesi, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda, 7) Mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian di jalan trans Sulawesi, 8) Peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, dimana Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 9) Penerapan transportasi ramah lingkungan 10) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau 11) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman, 12) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, 13) Penataan kawasan permukiman wilayah perkotaan dan sekitar wilayah	23	Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
					a. Proporsi Kontribusi PDRB (ADHB) Kota Palopo terhadap Provinsi Sulsel	1,6	1,86
					b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100
					c. Indeks Layanan Infrastruktur	2.25	3



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			pertumbuhan, 14) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi public, 15) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.				
4	Terwujudnya Palopo sebagai kota akseleratif dalam pencapaian tata kelola berintegritas dan adaptif	9.Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah, 2) Pembangunan dan pengembangan Big Data daerah dan harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi, 3) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, 4) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan	24	Indeks Reformasi Hukum	68	96,45
				25	Indeks SPBE	3.89	5
				26	a. Indeks Pelayanan Publik	4	5
				27	a. Indeks Survey Penilaian Integritas	65	85
					b. Indeks Maturitas SPIP	3	5



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
	dengan masyarakat sipil yang berdaya		digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis Human Networking Management, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah, 5) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 6) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi, 7) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive, melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju zero complain, penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsive, peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah, 8) Pengawasan proses dan penguatan wilayah integritas tatakelola pengembangan karier, promosi mutasi ASN Daerah dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, 9) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, 10) Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital, 11) Peningkatan partisipasi		c. Nilai MCP KPK	59	80



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, 12) Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi top dan middle manajemen, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government, 13) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, 14) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, 15) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, dan 16) Memastikan semua aspek pemerintahan dari pengelolaan sumber daya hingga penyediaan pelayanan public dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan social secara berkesinambungan antar periode pembangunan.				



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
5	Terwujudnya Palopo sebagai kota yang Aman, Tertib, Demokratis, dan Kondusif	10.Ketaatan Hukum,Ketertiban dan Keamanan Tangguh	1) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif , 2) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial, dan 3) Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah, 4) Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi, 5) Peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, dan 6) Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100
				29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	72	90
				30	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	28	36
					b) Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD	5	10
					c) Persentase perempuan pengurus partai politik	30	40



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
		11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD), 2) Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau dan biru serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, 3) Mendorong penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah, 4) Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas stakedolder dan 5) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	3.05	15
				32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,5	1,5
				33	Persentase peningkatan investasi daerah	5	12
				34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72	85
6	Terwujudnya Palopo sebagai kota simpul dalam kerjasama daerah	12.Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi	1) Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah, 2) Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala lokal, regional, nasional dan global, dan 3) Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan beragam komunitas yang ada dalam berkolaborasi dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan.4) Simpul pengembangan pengetahuan industri kuliner sagu	36	Indeks daya saing daerah	2,90	3,37
				35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	7	15



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
7	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan masyarakat yang inklusif, beradab dan berbudaya	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial, 2) Pelestarian kearifan local dan perlindungan warisan budaya, 3) Pengembangan kesenian daerah yang dilakukan melalui pelestarian kesenian daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kreatifitas inovasi, 4) Peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk lembaga adat dan instansi untuk pemajuan kebudayaan, intensitas pertunjukan seni, dan pengembangan literasi masyarakat, 5) Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, 6) Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 7) Peningkatan upaya dan ide inovatif dalam menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya, 8) Penguatan kerukunan antar umat beragama, 9) Penguatan nilai-nilai keagamaan atau spiritual masyarakat sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika, 10) Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dan 11) Penguatan pendidikan yang selaras dengan pokok-pokok kerukunan antar etnis dan agama.	37	a. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	50	80
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76	85,18-85,39



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
		14.Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	1) Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local, 2) Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta memastikan penyandang disabilitas dan lansia bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, 3) Pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penguatan system perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah, 4) Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, 5) Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan, 6) Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sector, 7) Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang	39	a. indeks pembangunan kualitas keluarga	73	80



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			transformative, 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, 9) Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional, 10) Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan resiliensi pemuda dalam dinamika globalisasi, dan 11) Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.				
					b. indeks perlindungan anak	65	75
				40	indeks ketimpangan gender	0.273	0.150
8	Terwujudnya Palopo sebagai kota dengan kualitas lingkungan yang tinggi serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	15.Lingkungan Hidup Berkualitas	1) Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati 2) Koordinasi penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi 3) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana, 4) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi, 5) Penguatan pengendalian dan penegakan regulasi implementasi tata ruang daerah, 6) Mendukung peningkatan pelaksanaan reforma agraria yang berorientasi pada	41	- Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
					a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	28	45
					- Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			berkelanjutan, 7) Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 8) Penguatan implementasi integrasi tataruang darat dan laut melalui pengelolaan DAS, pengelolaan sampah/limbah, dan pendanaan, 9) Peningkatan kualitas air, udara, pengelolaan limbah, melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, 10) Penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 11) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, 12) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, 13) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah/limbah, 14) Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler, dan 15) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif berdasarkan karakteristik daerah.		a) Indeks Pertanaman Padi	2	>3
					b) Proporsi sawah beririgasi (%)	88	95
					c) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	19.000	45.000
					d) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Thn)	70	80,02
				42	kualitas lingkungan hidup		
					a. Indeks kualitas lingkungan hidup	74,72	78,95
					b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4.32	56.80
					c. pengelolaan sampah	83,82	100
					i) timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	9	90
					ii) proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	81,43	100
			1) Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu pangan-energi dan air atau Food Energy Water	43	Ketahanan energi, air, dan pangan		
					a. ketahanan energi		



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	(FEW) Nexus, 2) Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik, 3) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik, 4) Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; 5) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, pertanian regeneratif, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain, 6) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 7) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, 8) Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang minum aman sesuai karakteristik daerah. terpusat di wilayah perkotaan. berkinerja baik dan optimal, 9) Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, 10) Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, atau terkena dampak bencana, 11) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting, 12) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama		i) konsumsi listrik per kapita (kWh)	1285	5.335
				b. ketahanan pangan			
				i) prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (%)	4.5	2,34	
				ii) indeks ketahanan pangan	80	97,76	
				iii) skor pola pangan harapan	92.08	95,03	
				c. Ketahanan air			
				i) kapasitas air baku (m3/detik)	0,57	1	
				ii) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	97	100	



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			untuk daerah kepulauan dan rawan air, 13) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat, 14) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal, dan 15) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum				
		17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	: 1) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana, 2) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, 3) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai, 4) Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i> , 5) Perwujudan pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim, 6) Peningkatan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi pertanian, 7) Peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan yang adaptif terhadap perubahan iklim, 8) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim, 9) Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan	44	Indeks Risiko bencana	190	122,30-98,59
				45	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Tahunan)	18,76	80,66
					Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	0.23	14.56



No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	No.	RPJPD Kota Palopo		
					Indikator Utama Pembangunan	Target Daerah	
						Baseline 2025	Tahap IV 2045
			dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian, 10) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim, 11) Pemanfaatan, pengembangan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, 12) Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta implementasi pembangunan rendah karbon, 13) Koordinasi bagi upaya rehabilitasi hutan/ lahan dan mempertahankan luas tutupan hutan minimal, 14) Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi.				

5.3 ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

Dalam skala regional, bersama beberapa kabupaten lain yang berada di kawasan Palopo, memberikan kontribusi sebesar 15,65 persen terhadap PDRB ADHB Sulawesi Selatan tahun 2023. Kabupaten dengan share terbesar PDRB adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,69 persen dan yang terkecil sharenya adalah Kabupaten Tana Toraja dengan kontribusi sebesar 1,43 persen. Peluang kontribusi ekonomi kawasan Palopo bersumber dari kondisi geografis berupa pegunungan dengan kekayaan sumber daya alam diantaranya sumber daya mineral dan batuan yang melimpah serta sumber daya hutan dan ekosistem lautan yang merupakan bagian dari kawasan andalan laut Teluk Bone. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan dukungan konektivitas wilayah melalui peningkatan jaringan infrastuktur jalan dan pelabuhan serta bandar udara terutama untuk angkutan barang dan angkutan pariwisata. Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi **Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo diarahkan pada prioritas berikut.

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang didukung oleh sarana pendidikan yang berkualitas dan merata termasuk pendidikan tinggi dan teknologi yang diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan wilayah, sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas termasuk regionalisasi layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif serta pemenuhan pelayanan dasar yang akan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau yang didukung oleh digitalisasi ekonomi dan optimalisasi kawasan industri prioritas nasional berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja; pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dan UMKM serta membangun kemitraan dan kerjasama usaha di Kabupaten Luwu, dan Luwu Timur; pengembangan ekonomi biru terutama perikanan tangkap di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy; pengembangan kawasan sentra pertanian dan perkebunan khususnya komoditas sagu sebagai bahan pangan alternatif yang didukung oleh sentra industri pengolahan; peningkatan produktivitas komoditas perkebunan unggulan wilayah, dan terkhusus untuk kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis ketaatan rencana tata ruang wilayah; serta pengembangan kawasan Toraja sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, ekonomi biru, sirkuler dan berkelanjutan, membangun ekosistem digital yang tangguh melalui penguatan infrastruktur yang handal dan terjangkau serta peningkatan literasi digital; optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan, dan pengembangan potensi ekonomi wilayah serta perbaikan regulasi dan kemudahan perizinan; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan; peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana perkotaan secara terpadu; dan pemenuhan kebutuhan akan hunian layak terjangkau dan berkelanjutan; serta memperkuat peran perdesaan melalui pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api baik regional maupun internasional yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas.

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal berbasis digital; penguatan peningkatan kapasitas pelayanan publik berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Kelima, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik dan demokrasi, peningkatan partisipasi public dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, dan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten.

Keenam, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela. **Ketujuh**, peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; peningkatan cakupan pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, pengembangan kestabilan dan keandalan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, serta memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender.

Kedelapan, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas dan logistik antar wilayah yang terdiri dari bandar udara, jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang didukung oleh jaringan simpul transportasi yang berkualitas; peningkatan kapasitas tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku, tenaga listrik, dan pariwisata; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar khususnya air minum dan sanitasi layak dan aman, serta persampahan melalui pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dengan sistem 3R berbasis regional dengan penerapan ekonomi sirkular termasuk di wilayah pesisir, penguatan kawasan konservasi strategis yaitu Kawasan cagar alam dan Taman Wisata Alam Danau di kabupaten Luwu Timur, penguatan kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana, serta penguatan implementasi pembangunan rendah karbon dan penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan wilayah ini menjadi panduan strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan potensi dan keunggulan daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang terstruktur dan terfokus, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah tersusun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 yang berlaku selama 20 tahun maka pengembangan Kota Palopo diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah paling utara Sulawesi Selatan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah Kota Palopo, meliputi KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yakni KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa Kawasan Pelestarian Alam (Taman Wisata Alam Nanggala III) yang berada di wilayah Kecamatan Wara Barat seluas 891 Ha

A. Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas \pm 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
4. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
5. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
6. Kawasan Peruntukan Industri seluas \pm 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
7. Kawasan Terminal tipe A seluas \pm 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;
8. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
9. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
10. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
11. Kawasan Hiburan Labombo;
12. Kawasan Transmigrasi seluas \pm 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta.

B. Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;



2. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
 3. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;
 4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas \pm 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
 5. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion Lagaligo) seluas \pm 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
- C. Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
1. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas \pm 6.646,66 di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
 2. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
- D. Kawasan Strategis Kota (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi
- Kawasan Sagu Teknopark Palopo seluas 10 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang



RPJPD 2025-2045

BAB VI PENUTUP

RPJPD Kota Palopo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama dua puluh tahun kedepan. RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan dan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Arah (tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran pada RPJMD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/*master plan/grand design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan calon anggota DPRD Kota Palopo.

2. Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.



Pengendalian RPJPD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJPD ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan dan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. Pemberian insentif dapat didasarkan pada pencapaian kinerja yang diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas.

5. Mekanisme Perubahan RPJPD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

6. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

7. Transisi Periode RPJPD

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, sebelum berakhirnya periode RPJPD 2025-2045 ini Pemerintah Kota Palopo berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.

Pj. WALI KOTA PALOPO

FIRMANZA DP



RPJPD 2025-2045